

BMP.UKI: IN-02-BANPOL-IPOL-V-2021



**BUKU MATERI PEMBELAJARAN
PERBANDINGAN POLITIK**

Disusun oleh:

Indah Novitasari, M.Si (Han)

Reviewer:

Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2021**

BMP.UKI: IN-02-BANPOL-IPOL-V-2021



**BUKU MATERI PEMBELAJARAN
PERBANDINGAN POLITIK**

Disusun oleh:
Indah Novitasari, M.Si (Han)

Reviewer:
Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Pembandingan berbagai negara dengan berbagai sistem politiknya merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. Buku Materi Pembelajaran (BMP) ini dibuat dengan tujuan menolong mahasiswa untuk dalam mengupayakan kajian komprehensif dan kritis atas studi perbandingan politik, sekaligus sebagai bahan kajian dan rujukan. Melalui modul ini diharapkan kajian perbandingan dapat dikaji secara dan mendalam dan membekali mahasiswa untuk dapat memahami prinsip serta menganalisa fenomena politik secara lebih menyeluruh untuk menjawab perkembangan yang cepat dan menyelaraskan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial masyarakat, kondisi ekonomi bahkan relasi negara dengan aktor non-negara di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Terlampir dalam modul ini paparan persoalan, rangkuman argumen dan kontra argumen serta garis besar tentang kecenderungan utama dan arah perkembangan teoritis dalam studi perbandingan politik

Pada akhirnya harapan saya mahasiswa mampu menggunakan BMP ini sebagaimana mestinya, sebagai bekal secara khusus dalam setiap pertemuan mata kuliah perbandingan politik

Jakarta, 25 Juli 2021

Penyusun,



Indah Novitsari, S.Soz., M.Si (Han)

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel.....	IV
Daftar Gambar	V
Daftar Singkatan	VI
Daftar Lampiran	VII
Petunjuk Penggunaan Buku Materi Pembelajaran	VIII
Capaian Pembelajaran Lulusan.....	IX
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	XII
Modul 1.....	1
Pengantar Perbandingan Politik.....	1
Kegiatan Pembelajaran 1: Definisi dan Ruang Lingkup Perbandingan Politik	2
Kegiatan Pembelajaran 2 : Metode Perbandingan Politik.....	11
Modul 2.....	35
Pendekatan dalam studi perbandingan politik.....	35
Kegiatan Pembelajaran 1: Pendekatan dalam perbandingan ilmu politik.....	37
Modul 3.....	58
Analisa Sistem Politik dan Tipe pemerintahan	58
Kegiatan pembelajaran 1: Teori sistem politik	59
Kegiatan pembelajaran 2: tipe-tipe pemerintahan	76
Modul 4.....	108
Sosialisasi, Budaya, dan Partisipasi Politik.....	108
Kegiatan Pembelajaran 1 : Sosialisasi Politik.....	109
Kegiatan pembelajaran 2: Budaya politik	128
Modul 5.....	152
Komunikasi Politik.....	152
Kegiatan Pembelajaran 1: Komunikasi dan Politik.....	153

kegiatan Pembelajaran 2: Komunikasi Politik.....	168
Modul 6.....	184
Metode Representasi (sistem pemilihan dan sistem kepartaian)	184
Kegiatan Pembelajaran 1 : sistem pemilihan umum	185
Kegiatan Pembelajaran 2 : sistem kepartaian	204
Modul 7.....	215
Partai Politik dan Kelompok Kepentingan	215
Kegiatan Pembelajaran 1: Partai Politik	216
Kegiatan Pembelajaran 2: Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan.....	228
Modul 8.....	246
Elit Politik	246
Kegiatan pembelajaran 1: Elit Politik.....	247
Kegiatan pembelajaran 2: Sirkulasi Elit.....	263
Modul 9.....	283
Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan.....	283
Kegiatan pembelajaran 1 : Demokrasi dan Institusi Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi	284
Daftar Lampiran BMP	311
Lampiran i: Struktur Penulisan Artikel book chapter	311
lampiran ii: struktur penulisan paper atau artikel	315
biografi penulis	319

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tipologi Kebijakan Lowi dan Politik yang Dihasilkannya	11
Tabel 2. Ilustrasi mengenai Manfaat serta Biaya Proyek	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kebijakan Publik	3
Gambar 2. Sistem Nilai Kearifan	12
Gambar 3. Kisi-kisi Formulasi Kebijakan	13
Gambar 4. Fase Perumusan Masalah Kebijakan	67
Gambar 5. Model Sistem dalam Pembuatan Keputusan Kebijakan Publik	65
Gambar 6. Proses Agenda Kebijakan	71
Gambar 7. Macam- Macam Analisis Kebijakan Publik	72
Gambar 8 . Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah	75
Gambar 9. Iterasi Analisis Kebijakan	76
Gambar 10. Contoh Pohon Masalah	81
Gambar 11. Proses Agenda Kebijakan	86
Gambar 12. Macam- Macam Analisis Kebijakan Publik	98
Gambar 13. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah	113
Gambar 14. Iterasi Analisis Kebijakan	113
Gambar 15. Contoh Pohon Masalah	125
Gambar 16. Sekuensi Implementasi Kebijakan	134
Gambar 17. Hubungan Tiga Elemen	134
Gambar 18. Tiga Pilar/Aktor Tata Pemerintahan Yang Baik	115

DAFTAR SINGKATAN

BMP	Buku Materi Pembelajaran
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
BBM	Bahan Bakar Minyak
PP	Peraturan Pemerintah
Kepres	Keputusan Presiden
KepMen	Keputusan Menteri
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Penulisan Makalah	281
Lampiran 2. Struktur Penulisan Paper atau Artikel Ilmiah	285

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU MATERI PEMBELAJARAN

BMP ini akan memberikan panduan pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami salah satu ruang lingkup kajian ilmu politik yaitu perbandingan politik. Sebagai output dari proses politik dalam sistem politik, pembahasan utamanya akan berkisar tentang proses pembuatan, implementasi, dan pengawasan dari kebijakan publik. Namun dalam BMP ini akan mengkaji secara detail teori-teori yang berkaitan dengan ketiga kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik tersebut.

Mahasiswa akan sangat terbantu jika mempelajari BMP ini dalam kegiatan perkuliahan tentang perbandingan politik. Oleh karena itu mahasiswa dapat menggunakan BMP ini sebagai panduan dalam memahami mata kuliah teori kebijakan publik, namun tetap menambah pengetahuan dengan membaca berbagai referensi terkait materi perkuliahan. sebab BMP ini hanya sebagai panduan dalam pembelajaran di kelas.

Harapannya semoga BMP ini dapat memudahkan proses perkuliahan, dan implementasi *student centered learning* berdasarkan kurikulum KKNI.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
11. Mewujudkan diri sebagai intelektual Kristen yang dapat menunjukkan nilai-nilai UKI (rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, dan bertanggungjawab) dalam setiap tindakan.

B. Keterampilan Umum

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan disain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan

mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.

2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau kajian eksperimental terhadap informasi dan data.
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.

C. Keterampilan Khusus

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginternalisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
2. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginternalisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
3. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;
4. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu;
5. Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses politik lokal dan pemerintahan daerah;

6. Mampu memberdayakan masyarakat melalau *civil society* dan menjalankan peran *civil society* dalam kerangka sistem politik tingkat lokal dan pusat;
7. Mampu memberdayakan masyarakat melalau *civil society* dan menjalankan peran *civil society* dalam kerangka sistem politik tingkat lokal dan pusat;
8. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian;
9. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis;

D. Pengetahuan

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat;
2. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat;
3. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat;
4. Menguasai mekanisme kerja *civil society* dalam kerangka otonomi daerah dan perilakunya dalam sistem politik tingkat lokal dan pusat
5. Menguasai tugas dan fungsi *civil society* dalam sistem politik;
6. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris;
7. Menguasai dasar – dasar metode penelitian politik (metode penelitian sosial, baik kuantitatif maupun kualitatif);
8. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH PERBANDINGAN POLITIK



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Perbandingan Politik	731-2-4-2-25	Mata Kuliah Prodi	3	4	16 April 2020
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi
	Indah Novitasari, M.Si (Han)		Indah Novitasari, M.Si (Han)		Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap <ol style="list-style-type: none"> a. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Keterampilan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; d. Mengelola pembelajaran secara mandiri; 				

		<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; <p>3. Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah; b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan; c. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; d. Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses politik lokal dan pemerintahan daerah; e. Mampu memberdayakan masyarakat melalui civil society dan menjalankan peran civil society dalam kerangka sistem politik tingkat lokal dan pusat; <p>4. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; c. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat; d. Menguasai mekanisme kerja civil society dalam kerangka otonomi daerah dan perilakunya dalam sistem politik tingkat lokal dan pusat; e. Menguasai tugas dan fungsi civil society dalam sistem politik; f. Menguasai substansi politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah;
	CPMK	<ul style="list-style-type: none"> 1. CP 1 : Mahasiswa memiliki kemampuan observasi terhadap implementasi sistem politik. 2. CP 2 : Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis perilaku politik. 3. CP 3 : Mahasiswa dapat memperbandingkan implementasi sistem politik di berbagai negara. 4. CP 4 : Mahasiswa dapat memperbandingkan perilaku politik di berbagai sistem politik. 5. CP 5 : Mahasiswa mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi atas implementasi sistem dan perilaku politik di Indonesia
Deskripsi Singkat MK	<p>Kuliah ini dirancang sebagai pengantar untuk mempelajari perbandingan politik terutama dalam dimensi teoritis sebagai tools utama analisis empiris studi kasus perbandingan politik. Dengan terlebih dahulu melihat perkembangan teori dan metode perbandingan politik, mahasiswa kemudian akan diajak untuk memahami teori sistem politik yang meliputi struktur dan kultur politik yang berbeda-beda. Disamping teori sistem, juga akan dibahas teori pentahapan; hubungan budaya, politik, dan ekonomi; serta teori dependensia yang menghasilkan dinamika perkembangan dan perubahan politik. Kuliah dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi kelas; dengan penilaian terhadap mahasiswa meliputi keaktifan kelas, penugasan, dan ujian-ujian.</p>	
Referensi Utama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Andrew Heywood, 2007, <i>Politics</i>, Palgrave Foundations, New York. 2. Rodee Anderson, Christol Grenee, 1976, <i>Introduction to Political Science</i>, McGraw Hill Kogakusha, Tokyo 3. Isjwara F., 1964, <i>Pengantar Ilmu Politik</i>, Penerbit Dhiwantara, Jakarta 4. Miriam Budiarjo, Prof., 2008, <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 5. Tim Litbang Kompas, <i>Partai-Partai Politik di Indonesia</i> ; Ideologi dan Program 2004-2009, Penerbit Kompas, 2004 6. Miriam Budiarjo. 2008 <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>, edisi revisi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama 7. Stephen Eric Bronner. <i>Twentieth Century Political Theory</i>, Routledge, 1997. 	

	8. Muthia Alagappa. <i>Political Legitimacy in Southeast Asia, The Quest For Moral Authority</i> , California; Stanford University Press, 1995. 9. Benedict Anderson. <i>Language and Power, Exploring Political Culture In Indonesia</i> , Ithaca, New York; Cornell University Press, 1990. 10. Miriam Budiardjo. <i>Aneka Pemikiran Tentang Wibawa dan Kuasa</i> , Jakarta; Sinar Harapan, 1984. 11. Andrew Heywood. <i>Political Theory An Introduction</i> , 2nd edition, New York; Paagrave Publisher Ltd. 1999. 12. Chilcote, Ronald H. <i>Theories of Comparative Politics, The Search of Paradigm</i> , Colorado: West View Press, 1981 13. Held, David. <i>Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power and Democracy</i> , California: Stanford University Press, 1989. Chapter I 14. Miriam Budiardjo, <i>Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi</i> , Jakarta: PT. Gramedia 15. Noer, Deliar, <i>Pemikiran Politik di Negeri Barat</i> , Pustaka Mizan, 1996 16. Brooker, Paul. <i>Non-Democratic Regimes</i> , New York: St. Martin's Press, 2000 17. Neera, Chandhoke. <i>Benturan Negara dan Masyarakat Sipil</i> , Yogyakarta. ISTA WA, 2001;							
Media Pembelajaran	Perangkat lunak: MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer		Perangkat keras: Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD					
Matakuliah syarat	Teori Politik							
Dosen Pengampu	Indah Novitasari, M.Si (Han)							
Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan sumber belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa/i diharuskan untuk memahami tujuan pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan dan penjelasan ruang lingkup perkuliahan (RPS) Penjelasan aturan perkuliahan Penjelasan pengertian materi perkuliahan 	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mahasiswa mendengarkan dan menanyakan rincian RPS dan kontrak perkuliahan	Mahasiswa <u>mengenal</u> dosen dan isi matakuliah serta mampu <u>membuat</u> rencana tugas selama satu semester	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan dosen dan mahasiswa di kelas Latar belakang dan tujuan matakuliah Pembahasan RPS Penjelasan sistem penilaian Pembuatan kontrak belajar untuk satu semester 	-
2	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami 	Tinjauan umum perbandingan politik : Metode dan Konsep	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan definisi perbandingan 	15%

	pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam perbandingan politik		Tanya jawab				politik dan metode yang digunakan 2. Menjelaskan asumsi dasar perbandingan politik	
3	• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara kerja sistem politik dan peran struktur politik di dalamnya	Teori Sistem Politik Analisa Sistem Politik (David Easton)	<i>Presentation, Discussion dan Verification</i>	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	. Menjelaskan cara kerja sistem politik dan peran struktur politik di dalamnya	15%
4		Teori Sistem Politik Studi Perbandingan Sistem Politik : Gabriel Almon						
5	Mahasiswa mampu menjelaskan studi perbandingan sistem politik antara 2 negara yang berbeda sistem politik yang dianut	Case Study Studi perbandingan sistem politik di sejumlah negara	<i>Presentation, Discussion dan Verification</i>	2 x 40 menit	Mahasiswa menjelaskan sistem politik dari 2 negara yang diperbandingkan	Mahasiswa mampu <u>menjelaskan</u> sistem politik dari 2 negara yang diperbandingkan	1. Menjelaskan sistem politik yang dianut 2. Menjelaskan ideologi yang dianut 3. Menjelaskan struktur politik yang dipakai	20%
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan input yang mempengaruhi sistem politik	Budaya Politik	<i>Presentation, Discussion dan Verification</i>	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	1. Menjelaskan nilai sosial yang dianut 2. Menjelaskan perilaku politik 3. Menjelaskan ideology 4. Menjelaskan peran dan fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik	
7	Mahasiswa mampu	Sosialisasi dan Komunikasi Politik	<i>Presentation, Discussion dan</i>	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	1. Mendefinisikan sosialisasi	

	memahami dan menjelaskan peran sosialisasi dan komunikasi politik dalam mempengaruhi perilaku dan budaya sistem politik		<i>Verification</i>		pertanyaan		dan komunikasi politik dalam mempengaruhi perilaku dan budaya sistem politik	
8	Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pembelajaran	EVALUASI TENGAH SEMESTER	Tugas Terstruktur	2 x 40 menit	Mahasiswa membuat artikel atau makalah secara deskriptis studi kasus berkaitan dengan materi yang telah dipelajari	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan studi kasus materi yang telah diajarkan	1. Kejelasan konsep yang digunakan, analisis, dan kesimpulan serta rekomendasi	30%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami dan menjelaskan peran dan fungsi kelompok kepentingan dan penekan dalam sistem politik	Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	1. identifikasi peran dan fungsi kelompok kepentingan dan penekan dalam sistem politik 2. menjelaskan peran dan fungsi kelompok kepentingan dan penekan dalam sistem politik	15%
10	Mahasiswa memahami dan menjelaskan contoh kasus kelompok kepentingan dan penekan dalam sebuah sistem politik	Studi Kasus Kelompok Kepentingan dan Penekan	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mahasiswa membuat studi kelompok dan menjelaskan tentang peran masing-masing satu contoh kelompok kepentingan dan penekan	Mahasiswa <u>membuat</u> makalah kelompok dan presentasi	1. Penjelasan contoh kasus 2. Kemampuan mendeskripsikan 3. Kemampuan mempertahankan argumentasi dalam diskusi	

							kelas	
11	Mahasiswa memahami definisi, tugas dan fungsi serta menganalisis perilaku dan sistem kerja partai politik	Partai Politik	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan analisis 2. Kemampuan menjelaskan 3. Kejelasan data objektif 	
12	Mahasiswa memahami dan menjelaskan definisi dan teknis dalam sistem pemilihan umum	Sitem Pemilihan Umum	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan desain sistem pemilu 2. Menjelaskan dampak pemilu 3. Menjelaskan konflik pemilu 	
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan tugas dan fungsi civil society	Civil Society	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi civil society 2. Menjelaskan peran dan fungsi civil society 3. Memperbandingkan civil society dengan yang ada di negara lain 	20 %

14 - 15	Mahasiswa mampu membandingkan kinerja politik lokal di berbagai negara	Pemerintahan daerah dan Politik Lokal di Berbagai Negara	<i>Presentation, Discussion, Verification</i> dan Tanya jawab	2 x 40 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	1. Menjelaskan perbandingan sistem politik lokal dan sistem pemerintahan daerah antara 2 negara	
16	Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pembelajaran	EVALUASI AKHIR SEMESTER	Tugas Terstruktur perbandingan sistem politik antara 2 negara secara menyeluruh dan detail serta dampaknya terhadap pembangunan politik	1 x 40 menit	Makalah individu	Mahasiswa mampu melakukan perbandingan sistem politik 2 negara	Kemampuan menjelaskan tugas dengan data objektif	30%

SISTEM PENILAIAN

A. Persyaratan Umum

1. Kehadiran:
 - a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
 - b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
 - c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
 - d. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).
2. Perkuliahan:
 - a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNi.
 - b. Mata kuliah berbasis KKNi dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
 - c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
 - d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
 - e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
 - f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
 - g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.
 - h. Pada saat perkuliahan dengan metode daring, mahasiswa wajib menampilkan video dan mengisi form absensi secara online yang diberikan pada awal perkuliahan.
3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- i. Teguran;
- ii. Peringatan tertulis;
- iii. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- iv. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- v. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- vi. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- vii. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

B. Persyaratan Khusus

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut

 - a. Post test: mahasiswa wajib mengikuti post test yang diadakan pada akhir perkuliahan baik secara individu atau kelompok. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
 - b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
 - c. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS. Review mata kuliah dapat berbentuk poster maupun infografis terkait dengan isu tertentu.
 - d. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.
2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas
 - a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.
 - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).

- iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
- b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
 - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
 - iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

C. Bentuk Evaluasi

- 1. Makalah
- 2. Artikel

Kriteria Penilaian Makalah dan Artikel

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Isi	60 %		
2	Referensi	15 %		
3	Jumlah Halaman	10 %		
4	Pengutipan	15 %		
Jumlah				

3. Seminar

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Simulasi	20 %		
2	Topik Dan Penyajian Jelas Dan Menarik	40%		
2	Kontekstual	20%		
3	Sumber Data Yang Valid Dan Mutakhir	20%		
Jumlah				

4. Aturan Untuk Presentasi Seminar:

- a. Dibuat dalam bentuk *power point*.
- b. Jumlah slide *power point* 15-20 slide, boleh menyertakan gambar jika diperlukan (maksimal 3 slide).
- c. Pada setiap slide mencantumkan sumber data dari mana anda mengutip (jika pada slide itu anda mengutip).
- d. Materi *power point* dikirimkan kepada dosen *by email* paling lambat satu minggu sebelum presentasi dilakukan.

D. Skala Nilai Akhir Dalam Huruf Dan Angka

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80, 0-100, 0	A	4, 0
75, 0-79, 0	A-	3, 7
70, 0-74, 9	B+	3, 3
65, 0-69, 9	B	3, 0
60, 0-64, 9	B-	2, 7
55, 0-59, 9	C	2, 3
50, 0-54, 9	C-	2, 0
45, 0-49, 9	D	1, 0
<44, 9	E	0

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

Kehadiran	:	10 %
Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah)	:	30 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	:	30 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	:	30 %

Jakarta, 16 April 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik



Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.kom, M. Si

Dosen Pengampu



Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han)

MODUL 1

PENGANTAR PERBANDINGAN POLITIK

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Perbandingan politik merupakan salah satu ruang lingkup dari ilmu politik yang dikarakteristikan dari pendekatan empirik dengan metode perbandingan. Studi perbandingan politik bergantung pada perbandingan berdasarkan proses, perilaku dan pengalaman politik. Secara garis besar, perbandingan politik merupakan bagian signifikan dari ilmu politik, dan merupakan kebutuhan esensial dalam perkembangan ilmu politik. Sifat dasar dari perbandingan politik adalah untuk menemukan analisis dan membandingkan perbedaan sistem politik yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Bagian pertama modul ini akan memperkenalkan perbandingan politik, meliputi sifat dasar dan signifikansinya, beragam metode yang digunakan dalam melakukan analisa perbandingan politik

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 1 ini adalah:

- a. CP1 : Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- b. CP2: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- c. CP3: Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan pendekatan-pendekatan dalam studi perbandingan politik
- d. CP 4 : Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup dan karakter dari studi perbandingan politik
- e. CP 5 : Mahasiswa mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam perbandingan politik dalam mengkaji kajian dalam ilmu politik.

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 1 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami teori-teori kebijakan publik yang

berhubungan dengan perubahan sosial dan memahami tipe-tipe kebijakan serta mengetahui aktor-aktor kebijakan publik.

- b. Dapat menjelaskan teori-teori kebijakan publik.

4. Prasyarat Kompetensi

Mahasiswa lulus dari mata kuliah pengantar ilmu politik dan teori politik.

5. Kegunaan Modul 1

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah membantu mahasiswa memahami sifat dasar dan signifikansi studi perbandingan politik. Pemahaman awal dari perbandingan politik akan menjelaskan pentingnya studi perbandingan politik serta memperkenalkan sejumlah pendekatan yang digunakan dalam perbandingan politik

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok pembelajaran 1 dalam Modul 1 ini adalah teori, tipe-tipe, relevansi dengan perubahan sosial, dan aktor-aktor kebijakan publik. Serta pada pembelajaran dua lebih berfokus kepada proses kebijakan publik

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Definisi dan Ruang Lingkup Perbandingan Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan studi perbandingan politik
- b. Mahasiswa mampu mendiskusikan sifat alamiah dan ruang lingkup dari studi perbandingan politik
- c. Mahasiswa mampu menganalisa menggunakan berbagai pendekatan dalam perbandingan politik

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek di mana

untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek tadi dengan alat pembandingnya atau dari obyek yang satu dengan obyek yang lainnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan, tentu saja obyek yang diperbandingkan itu adalah pemerintahan dari satu negara (bangsa) tertentu dengan negara (bangsa) yang lain. Contohnya, jika Anda membandingkan kursi tamu dengan kursi goyang, maka bukan hanya perbedaan-perbedaannya saja yang Anda cari melainkan pula persamaan-persamaannya.

Ilmu Perbandingan Politik adalah salah satu cabang studi politik (*study of politics*) dan ilmu politik (*political science*). Studi perbandingan politik acapkali membingungkan, tidak saja bagi para mahasiswa, namun juga para akademisi.

Ilmu politik dan ilmu perbandingan politik berkaitan dalam hal teori dan metode. *Teori*, adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis, sedangkan *metode*, adalah suatu prosedur atau proses yang menggunakan teknik-teknik dan perangkat tertentu dalam mengkaji sesuatu guna menelaah, menguji dan mengevaluasi teori.

Dalam studi ini, banyak istilah yang terlanjur digunakan secara longgar dan diartikan secara berbeda-beda. Contohnya istilah “perbandingan pemerintahan”, yang biasanya mengacu ke studi tentang berbagai negara bangsa di Eropa, dan fokus studi ini adalah tentang lembaga-lembaga beserta segenap fungsinya di negara-negara itu, dengan penekanan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta berbagai organisasi lain yang terkait seperti partai politik dan *pressure group*.

Sedangkan studi perbandingan politik (*comparative politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan).

Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan

pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik. Pengertian perbandingan politik yang lebih longgar lagi akan mengaburkan kriteria penentuan hal-hal apa saja yang layak menjadi objek kajiannya

Kita dapat menggali hubungan ilmu politik dan perbandingan politik dengan bidang-bidang lain, seperti yang dilakukan oleh Ronald H. Chilcote, yang melihat bahwa teori maupun metodenya banyak bersumber dari pemikiran para filsuf politik “klasik” seperti Aristoteles dan Plato, Machiavelli dan Montesquieu, serta Hegel, Mark dan Mill. Perbandingan politik juga banyak bersumber dari pemikiran para tokoh di awal abad 20 seperti Woodrow Wilson, James Bryce dan Carl Friedrich, yang telaahannya mengarah ke studi formal tentang pemerintahan dan negara. Karya dibidang lain yang turut mempengaruhi studi perbandingan politik, antara lain karya A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski dibidang Antropologi; Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Mark Weber dan Emile Durkheim dibidang sosiologi dan sosiologi politik; serta John M. Keynes, Karl Marx dan V.I. Lenin dibidang ekonomi politik.

Tabel 1. Para pemikir dalam Perbandingan Politik

Aristotle (384-322 SM)	Memisahkan studi politik dari ilmu filsafat; menggunakan perbandingan politik dalam mempelajari <i>city-states</i> (negara-kota) Yunani; dalam tulisannya <i>The Politics</i> menyakinkan studi empirik terkait dengan politik dan tujuan praktis dari studi politik.
Niccolo Machiaveli (1469-1527)	Seringkali disebutkan sebagai ilmuwan politik modern pertama karena penekannya pada pengetahuan empirik dan tata kelola pemerintahan; melakukan analisa terkait dengan perbedaan sistem politik; mempercayai bahwa penemuan dilakukan oleh para politisi; dan mendiskusikan teorinya dalam konsep Leviathan
Thomas Hobbes (1588-1679)	Membangun dan mengembangkan konsep terkait kontrak sosial (<i>social contract</i>), dimana masyarakat

	menyerahkan haknya dibawah pemerintahan yang ada karena adanya kemerdekaan yang diberikan; menyarankan adanyanegara yang kuat dalam konsep <i>Leviathan</i>
John Locke (1632-1704)	Berargumen bahwa kepemilikan properti (<i>private property</i>) merupakan unsur esensial dalam kebebasan individu dan kesejahteraan/kemakmuran; memberikan pendapat (anjuran) terkait dengan <i>weak states</i> dalam tulisannya <i>Two treatises of Government</i> .
Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1669-1755)	Mempelajari sistem pemerintahan; menganjurkan pemisahan kekuasaan diantara pemerintah melalui tulisan <i>The Spirit of Laws</i>
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)	Memberikan pendapat bahwa hal warga negara tidak dapat diingkari atau dicabut oleh negara, tulisan ini mempengaruhi hadirnya hak sipil; ide ini kemudian didiskusikan secara mendalam dalam <i>The Social Contract</i>
Karl Marx (1818-1863)	Mengelaborasi teori pembangunan ekonomi dan ketidaksetaraan (<i>inequality</i>) dalam bukunya <i>Das Capital</i> ; memprediksikan kejatuhan kapitalisme dan demokrasi.
Max Weber (1864-1920)	Menuliskan secara luas topik terkait dengan birokrasi, bentuk-bentuk otoritas dan pengaruh dari budaya dalam pembangunan ekonomi dan politik, membangun sejumlah tema dalam <i>Economy and Society</i> .

Terjadinya Perang Dunia ke- II, telah meningkatkan minat para akademisi di AS untuk mempelajari sistem-sistem politik negara-negara lain, khususnya di Eropa dan Asia. Pudarnya pamor kerajaan-kerajaan

besar setelah perang dan gemuruh perjuangan kemerdekaan didunia ketiga mendorong akademisi untuk mengalihkan perhatian dari sistem-sistem politik mapan ke negara-negara baru tersebut. Konsekuensinya terhadap studi perbandingan politik sangatlah besar. Menurut Braibanti (1968), disaat itulah terjadi lonjakan riset tentang negara-negara baru, ditopang oleh perkembangan teknologi riset dan melimpahnya dana penelitian yang antara lain disediakan pemerintah yang menginginkan masukan-masukan dari kalangan akademis untuk menyusun aneka program luar negeri, termasuk program bantuan untuk negara berkembang.

Pembandingan berbagai negara dengan berbagai sistem politiknya merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. Apalagi bila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan jumlah dan aneka jenis sistem politik di dunia beberapa abad terakhir. Setidaknya saat ini terdapat lebih dari 190 negara- bangsa dengan beragam karakteristik sistem pemerintahan. Studi perbandingan dapat membantu peneliti untuk memahi cara kerja sistem politik, ciri-ciri sistem politik, perbedaan stabilitas antara satu sistem dengan sistem lainnya, serta menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian studi perbandingan sistem politik merupakan kunci untuk memahami sejumlah sistem politik.

Studi perbandingan politik berevolusi dari masa kemasa meskipun tetap berpusat pada perbandingan sistem politik dan pemerintahan di berbagai negara. Dimulai sejak tahun 1950, studi ini bahkan dinilai lebih tua karena metode perbandingan menjadi metode tertua yang digunakan dalam analisa politik, terlebih ketika Aristoteles sudah menggunakan metode ini dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam studi politik yang dikaji (Pradesh, 2018). Studi perbandingan politik itu sebenarnya sudah sangat tua, bahkan sama tuanya dengan politik itu sendiri, sebagaimana disebutkan diatas. Hal yang memberikan warna baru adalah pendekatan dan metode ilmiah yang mendukungnya.

Lebih dari seabad lampau, Edward E. Freeman dengan optimis menyatakan keyakinan bahwa perbandinngan politik menjanjikan temuan hukum universal di bidang politik. Sayangnya hal ini tidak terwujud, bahkan banyak kalangan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hukum atau prinsip universal di bidang politik yang pernah ditemukan. Adanya berbagai masalah teoritik dan metodologis itu sesungguhnya juga sudah disadari oleh sejumlah ilmuwan sosial perintis.

Ada beberapa upaya lebih baru untuk mengatasi maslaah teoritis dan

metodologis dalam perbandingan politik yang patut disesuaikan. Maurice Duverger, menawarkan suatu pendahuluan yang bermanfaat bagi para pembaca. Pertama, ia menggali gagasan dasar ilmu sosial, dan melacak perkembangan historis ilmu-ilmu sosial tersebut. Kedua, menguraikan dan membahas teknik observasi yang berkaitan dengan kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, statistik serta penggunaan metode kuisioner dan wawancara. Ketiga, menelaah penggunaan teori dan hipotesis, dan juga klasifikasi serta konseptualisasi dalam penelitian.

Studi ini menjadi bagian signifikan dari ilmu politik. Struktur dan perilaku dari pemerintah menjadi tantangan dan fokus dari area studi perbandingan politik. Pemerintah modern saat ini merupakan salah satu tolak ukur penting dalam instrumen pembangunan yang mempengaruhi sebagian besar negara seperti di Asia, Afrika dan Amerika latin. Pembangunan di negara berkembang tidak hanya diukur dari sejumlah pertumbuhan signifikan dalam ekonomi, sosial dan kondisi lingkungan, namun yang paling penting adalah bagaimana politik juga berkembang.

Perbandingan politik berupaya melakukan analisis perbandingan dari struktur dan proses dari sistem politik yang ada di berbagai belahan dunia, sehingga hal ini menjadi bagian penting bagi pembelajaran ilmu politik. M.G. Smith menyatakan bahwa perbandingan politik merupakan studi yang mempelajari bentuk dari organisasi politik, korelasi, variasi hingga bentuk perubahannya. Roy C. Macridis dan Robert Ward menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah dasar tunggal dari fokus pembelajaran dari perbandingan ilmu politik. Bukan hanya analisa dari struktur pemerintahan, namun demikian perbandingan politik juga mengkaji

- a. Masyarakat, kebudayaannya, sejarah, kondisi geografisnya hingga sumber daya
- b. Organisasi sosial dan ekonomi
- c. Sistem nilai dan ideologi
- d. Gaya politik
- e. Struktur partai, kepentingan dan struktur kepemimpinan

Perbandingan politik juga fokus pada aturan/regulasi yang signifikan, perbedaan dan persamaan cara kerja lembaga politik dan perilaku politik

Perbandingan politik berusaha untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan sistem politik yang bekerja di bawah masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan politik

menganalisis keterkaitan tiga unsur penting, sebagai berikut:

- a. Aktivitas politik
- b. Proses politik
- c. Kekuatan politik

Aktivitas politik berkaitan dengan aktivitas yang terlibat dalam resolusi konflik atau konflik perebutan kekuasaan. Dasar dari resolusi konflik adalah alokasi otoritatif dari nilai-nilai; karenanya, ini melibatkan analisis proses di mana nilai-nilai otoritatif dibuat dan diimplementasikan.

Dalam pengertian ini, politik berarti kekuatan politik. Ini melibatkan studi tentang semua lembaga pemerintah serta non-negara, melalui mana politik proses dibuat operasional. Proses politik tergantung pada sinyal dan informasi yang diterimanya dari lembaga non-negara. Ini selanjutnya mengubah sinyal-sinyal ini dan informasi menjadi nilai-nilai otoritatif. Politik, karenanya, melibatkan studi tentang kekuasaan dan relasi kekuasaan dalam masyarakat karena ini adalah perebutan kekuasaan dan proses dari resolusi konflik yang terjadi dengan menggunakan kekuasaan yang sah.

Studi tentang perbandingan politik kontemporer memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Penelitian analitik: Tekanan besar diberikan pada penelitian analitis ketika mengkaji perbandingan politik, karena tidak lagi terbatas untuk studi deskriptif. Penelitian analitik empiris, dengan demikian, bekerja untuk menyediakan pandangan yang lebih jelas tentang kegiatan aktual pemerintah bersama dengan struktur dan fungsi.
- Studi objektif ilmu politik: Ini berkaitan dengan studi empiris tentang berbagai proses studi politik di lingkungan yang berbeda. Sejak politik sains adalah ilmu sosial, ia hanya memperhitungkan nilai-nilai yang validitas dapat dibuktikan secara ilmiah.
- Studi infrastruktur: perbandingan politik juga menganalisis sifat sebenarnya individu, kelompok, struktur, sistem dan subsistem, dalam kaitannya dengan lingkungan di mana perilaku itu terwujud. Ilmu yang mempelajari dinamika politik dan operasi aktualnya di lingkungan dianggap sebagai hal yang esensial komponen politik komparatif.
- Studi masyarakat berkembang dan maju: Sebelumnya, politik komparatif hanya terbatas pada studi tentang sistem politik masyarakat maju. Namun, telah berkembang di zaman kontemporer

dan menekankan pada studi tentang sistem politik negara-negara berkembang juga. Faktanya, para ilmuwan politik modern seperti David Easton dan Sidney Verba, selain banyak lainnya, berpendapat penekanan itu harus diberikan pada studi politik negara-negara berkembang.

Fitur tambahan dari politik kontemporer ini membuat kita melihat politik komparatif dari sudut pandang yang berbeda. Itu benar-benar menolak semua norma lama dan sifat parokial dari politik komparatif tradisional. Sekarang, ini lebih realistis ilmu politik yang mampu menjelaskan dan membandingkan fenomena tersebut politik di seluruh dunia.

4. Rangkuman

- a. Perbandingan Politik merupakan salah satu ruang lingkup dalam ilmu politik yang memiliki karakteristik yaitu analisa politik dengan pendekatan empirik yang didasarkan atas metode perbandingan.
- b. Salah satu tantangan terbesar dari ilmu politik adalah membangun teori secara menyeluruh terkait dengan sistem politik. Sistem politik merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh David Easton guna menjelaskan keberadaan ilmu politik yang mampu menjelaskan luaran dari sistem berupa keputusan yang otoritatif dan aksi dari otoritas politik guna mendistribusikan serta membagikan nilai otoritatif yaitu kekuasaan
- c. Luaran dari perbandingan politik bergantung pada perbandingan pengalaman, perilaku serta institusi politik yang menggambarkan pada mekanisme kerja sistem politik.
- d. Salah satu kajian penting dalam sistem politik adalah perbandingan sistem pemerintahan. Struktur dan perilaku dari pemerintah dapat memberikan tantangan sekaligus kajian baru dalam area studi dan fokus utama dari ilmu politik.
- e. Sifat dasar (alamiah) dari perbandingan politik adalah untuk menganalisa dan membandingkan perbedaan diantara sistem politik yang bekerja pada masyarakat yang berbeda. Dalam sistem tersebut terdapat hubungan diantara aktivitas politik, proses politik dan kekuatan politik
- f. Aktivitas politik merupakan bentuk aktivitas dimana didalamnya

terdapat aktivitas resolusi konflik atau/meliputi upaya perebutan kekuasaan (*struggle for power*).

- g. Perbandingan politik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perbandingan pemerintahan. Studi ini meliputi kajian terkait dengan perbandingan sistem politik yang menekankan pada fungsi dan lembaga hingga pada kajian lembaga diluar negara. Karakteristik dari dari perbandingan politik adalah perbandingan politik merupakan studi terkait infrastruktur politik, studi pembangunan masyarakat dan masyarakat yang berkembang, dan merupakan tujuan dari studi ilmu politik yang terkait dengan penelitian analitis.

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Mahasiswa menjelaskan definisi perbandingan politik dari berbagai ahli dan membandingkannya dengan definisi serta ruang lingkup dari studi perbandingan pemerintahan
- ii. Mahasiswa menjelaskan studi kontemporer perbandingan politik serta memberikan contoh dengan membandingkan obyek kajian perbandingan politik

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

- a. Ketepatan menjelaskan sifat alamiah dan ruang lingkup perbandingan politik.
- b. Kejelasan dalam menjelaskan dan berargumentasi.

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2 : Metode Perbandingan Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari perbandingan politik
- b. Mahasiswa mampu mendiskusikan sifat alamiah dan ruang lingkup dari perbandingan politik
- c. Mahasiswa mampu menganalisa menggunakan berbagai pendekatan dalam perbandingan politik

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Meskipun istilah perbandingan politik dan perbandingan pemerintahan biasanya digunakan secara longgar dan bergantian, masih ada titik perbedaan antara keduanya. Sementara perbandingan pemerintah berurusan dengan studi ekstensif tentang politik yang berbeda sistem dengan penekanan khusus pada institusi dan fungsinya, perbandingan politik memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Ini mencakup semua yang berada di bawah studi yang terakhir, bersama dengan studi politik non-negara. Oleh karena itu, politik komparatif mencakup banyak hal wilayah yang lebih luas dalam studi politik.

Kajian tentang politik komparatif sangat menarik karena perbedaannya pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam mewujudkan 'realitas politik'. Sebuah angka penulis signifikan memiliki sudut pandang yang bertentangan dan mengadopsi strategi yang berbeda. Hasil, Namun, tampaknya saling terkait atau sinonim. Dengan berlalunya waktu, beberapa pendekatan telah menjadi ketat dan harus memberi jalan kepada yang baru pada metode kontemporer.

But whatever the approach or the origin of its ideas, we can say that political science as a discipline is concerned with the problems of ends; the goals of good society; the means of governing in such a manner as to realize the good society, the activities of the ruled (the public), especially political actions personified in voting, public opinion and attitude formation; and the underlying connections between society and government. Its key concern is with power—how it is shared through participation and representation and how it is affected by growth and change (Apter, 1978)

Dengan maksud untuk menyoroti arti dari berbagai tema yang digunakan dalam lingkup analisis politik kontemporer, David Apter mendefinisikan beberapa di antaranya sebagai berikut,

- a. Paradigma: Ini adalah kerangka gagasan yang menetapkan konteks umum analisis. Pada dasarnya, paradigma menggabungkan campuran filosofis asumsi dan kriteria pengetahuan yang valid. Kombinasi yang dihasilkan adalah dibedakan secara tajam satu sama lain.
- b. Teori: Ini adalah pernyataan umum yang merangkum tindakan nyata atau yang seharusnya dari satu set variabel, apakah tergantung, atau independen, atau intervensi. Parameter mewakili kondisi di mana variabel independen beroperasi. Sebuah teori makro atau mikro mungkin berurusan dengan kelompok besar atau kecil atau unit. Selain itu, mungkin abstrak, atau formal atau notasi, atau konkret.
- c. Metode: Ini adalah cara mengatur teori untuk aplikasi data. Jadi, metode dikenal dengan nama skema konseptual. Mereka mungkin dari banyak jenis seperti komparatif, konfigurasi, historis, simulatif dan eksperimental.
- d. Teknik: Ini menghubungkan metode ke data yang relevan. Ini mewakili berbagai mode observasi dan cara merekam informasi empiris. Dengan demikian, teknik bervariasi dalam kesesuaian, pengambilan sampel, pengujian opini publik, wawancara, analisis regresi, pemfaktoran, penskalaan dan pengujian.
- e. Model: Ini adalah cara sederhana untuk menggambarkan hubungan. Itu bisa dibangun dari paradigma, teori, metode atau teknik. Mungkin tipologis, deskriptif, formal, mekanis, organisme, biologis, dll
- f. Strategi: Ini adalah cara khusus untuk menerapkan satu atau lebih kombinasi dari jenis di atas untuk masalah penelitian. Diperlukan kualitas dan integritas harus dipadukan dalam sebuah strategi. Strategi yang baik sesuai dengan masalah, teori, metode dan teknik secara bersama-sama secara sistematis dan koheren.
- g. Desain penelitian: Ini mengubah strategi menjadi rencana operasional untuk pekerjaan lapangan atau percobaan. Ini adalah prospektus atau garis besar dari mana penelitian itu dibawa ke depan. Ini adalah tahap akhir dalam persiapan penelitian profesional.

3.1 Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional untuk mempelajari pemerintahan komparatif muncul sebagai tanggapan dengan historisisme abad ke-19. Ini menekankan pemeriksaan sejarah Barat lembaga-lembaga politik dari awal hingga zaman modern.

Kaum tradisional juga secara teoritis berfilsafat tentang demokrasi dan mata pelajaran lainnya, atau dibuat formal dan studi hukum lembaga pemerintah. Analisisnya pada dasarnya bersifat konfiguratif dan setiap sistem diperlakukan sebagai entitas yang unik. Pendekatannya sangat deskriptif daripada pemecahan masalah, penjelasan, atau analitik dalam metodenya, dan deskripsinya tidak lengkap dan terbatas pada bentuk pemerintahan dan sistem politik asing.

Roy Macridis, penulis *Modern Political Regimes*, secara sistematis dan dengan jelas merangkum fitur-fitur utama dari pendekatan tradisional. Dia secara singkat menunjukkan bahwa pendekatan tradisional pada dasarnya **non-komparatif, deskriptif, parokial, statis dan monografi**. Demikian pula, Almond dan Powell telah mengidentifikasi tiga premis utama yang telah mendominasi kritik terhadap pendekatan perbandingan pemerintah yang dilaksanakan sejak periode sebelum Perang Dunia II, sebagai berikut

- a. bersifat parokial
- b. analisis konfigurative
- c. bersifat formal

Harry Eckstein juga menunjukkan pengaruh teori abstrak, studi hukum formal dan studi konfigurasi yang mencirikan reaksi terhadap historisisme dalam studi politik. Pertama, seperti yang ditunjukkan Macridis, pendekatan tradisional ditujukan terutama untuk sistem politik Barat. Penekanannya adalah pada konfigurasi budaya tunggal, yaitu, demokrasi perwakilan dunia Barat dan penelitian ini terbatas pada Inggris dan negara-negara Persemakmuran, AS, Prancis, Jerman, Italia, dan Rusia. Sistem Barat dan sistem politik Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang tidak demokratis dipelajari oleh segelintir peneliti. Studi lintas budaya hampir sama sekali tidak teridentifikasi. Kajian ini dibatasi tidak hanya dalam jangkauan, tetapi juga secara mendalam; hanya aspek terisolasi dari proses pemerintahan di negara-negara tertentu dianalisis. Kajiannya lebih sering monografik dan komparatif.

Kedua, studi komparatif politik sangat formal dalam pendekatannya terhadap institusi politik. Studi ini difokuskan pada lembaga-lembaga pemerintah dan model hukum, aturan dan peraturan, atau ide dan ideologi politik mereka, bukan pada penampilan, interaksi, dan perilaku. Itu tidak memperhatikan pengaruh informasi faktor-faktor dalam pengambilan keputusan dan juga faktor-faktor penentu non-politik dari perilaku politik. Hanya organ institusional formal seperti parlemen, kepala eksekutif, pegawai negeri sipil, dll. berlaku untuk perbandingan kelembagaan dan struktural-fungsional. Realitas dari tindakan dan perilaku politik dalam struktur institusional tidak mendapat perhatian yang serius pikiran. Studi tradisional dalam hal ini sangat tidak realistis.

Ketiga, studi tradisional, seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih bersifat deskriptif daripada analitis, penjelasan atau pemecahan masalah dalam metodenya. Penekanannya adalah pada murni deskripsi dalam hal sejumlah besar fakta. Ada sedikit upaya untuk mengembangkan teori umum dengan verifikasi hipotesis dan penyusunan data yang signifikan. Memiliki dengan sangat tepat menunjukkan bahwa kekurangan empiris dari analisis tradisional adalah dorongan yang berdampak untuk behaviorisme. Inilah yang disebut Robert Dahl sebagai 'teori empiris' dalam studi kontemporer.

Suasana ketidakpuasan dengan subjektivisme dan formalisme dari pendekatan tradisional studi tentang pemerintahan dan politik dipimpin oleh logika situasi ke proses rekonstruksi disiplin. Sejumlah faktor bekerja untuk menghasilkan perubahan radikal pertama dalam pandangan AS dan kemudian negara-negara lain. Almond dan Powell menyebutkan beberapa perkembangan yang terutama bertanggung jawab untuk situasi baru. Ini adalah sebagai berikut:

- a. Munculnya banyak negara secara nasional dengan keragaman yang membingungkan budaya
- b. Institusi sosial dan ciri-ciri politik
- c. Hilangnya dominasi bangsa-bangsa di komunitas Atlantik
- d. Keseimbangan kekuatan yang berubah
- e. Munculnya komunisme sebagai faktor kekuatan dalam proses restrukturisasi Nasional
- f. Sistem politik internasional

Semua faktor ini mengarah pada upaya dinamis dalam inovasi dan upaya untuk menciptakan yang baru tatanan rasional. Hasilnya, seperti yang

dikatakan dengan tepat oleh Sidney Verba, 'Sebuah revolusi dalam politik komparatif'. Verba telah menyimpulkan secara memadai prinsip-prinsip di balik 'revolusi': 'Melihat melampaui deskripsi untuk masalah yang lebih relevan secara teoritis; Lihat di luar lembaga formal pemerintah hingga proses politik dan fungsi politik; dan melihat melampaui negara-negara Eropa Barat ke negara-negara baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin.' Dalam bahasa Almond dan Powell, upaya inovasi adalah dimotivasi oleh pencarian ruang lingkup yang lebih komprehensif, pencarian realisme, mencari presisi dan mencari orde teoritis

3.2 Pendekatan baru dalam studi perbandingan politik dan pemerintahan

a. Pendekatan sistem politik

Sistem politik sebagai bagian dari sistem sosial secara otomatis tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi dan didukung oleh sistem lainnya yang ada dalam sistem sosial. Sebagian ahli politik menyebutnya sebagai sifat keterbukaan yang dimiliki oleh sistem politik, namun sebagian mengklaim ini adalah dominasi sistem politik yang merupakan nama lain dari negara. Namun jika negara dipandang sebagai sebuah organisasi bentukan manusia, maka kita dapat menyebutkan negara merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dalam kehidupan manusia yang lebih memudahkan disebut sebagai sistem dunia. Pada intinya sistem politik akan melahirkan luaran (*output*) yang akan mempengaruhi sistem lain dalam sistem sosial, begitupun sebaliknya luaran dari sistem lainnya akan mempengaruhi mekanisme, proses, maupun luaran sistem politik. Pendapat terkemuka adalah apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sistem politik merupakan wadah bagi setiap orang untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan atau seluruh sistem sosial (termasuk dalam berbagai sistem lainnya).

Untuk lebih jelasnya perlu dipahami dulu asal kata politik, yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*. *Polis* berarti negara-kota¹. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling

¹ Negara-kota adalah sebutan untuk wilayah di masa Athena kuno dimana sebuah negara hanya terdiri dari 30.000 hingga 40.000 penduduk yang menerapkan sistem demokrasi langsung (akan dibahas pada modul 7: demokrasi). Berbeda dengan saat ini dimana semua negara dikategorikan

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan) dalam hidupnya di dalam *Polis*. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik (Carlton Clymer Rodee et al., 2002). Sementara Almond mendeskripsikan politik sebagai "... kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa" (Gabriel A. Almond et.al., 2004).

Terdapat 4 asumsi makna yang terkandung dalam politik menurut menurut Andrew Heywood, antara lain:

- i. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif.
- ii. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik.
- iii. Politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%.
- iv. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya.

Kekuasaan dalam politik untuk membedakan antara kekuasaan sosial dan kekuasaan privat. Sehingga pemerintahan, hubungan publik, kompromi dan konsensus, dan kekuasaan merupakan alat atau wewenang yang dimiliki oleh

sebagai negara bangsa, yaitu negara yang memiliki penduduk lebih diatas 40. 000 jiwa dan menerapkan sistem pemerintahn perwakilan (demokrasi perwakilan/demokrasi tidak langsung)

politik dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Setidaknya ada 4 ciri yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (MacAndrews, 1991):

- i. Ciri identifikasi. yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.
- ii. Input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.
- iii. Diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.
- iv. Integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Keduanya adalah ahli politik yang dalam berbagai karyanya secara harafiah menyebutkan kegiatan politik sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya terdapat sub sistem administrasi dan pemerintahan serta struktur dan institusi politik lainnya. Sehingga sistem politik

adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, atau kebaikan bersama seperti yang dikatakan Aristoteles.

Asumsi dalam memahami sistem politik menurut David Easton antara lain (Chilcote, 1981):

- i. *Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik:* Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.
- ii. *Input-output:* *Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. *Dukungan* adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.
- iii. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.
- iv. *Diferensiasi dalam sistem:* Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah yang dialami masyarakat.
- v. *Integrasi dalam sistem:* Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

b. Input dan output analisis

Input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (support). Perlu adanya manajemen bagi demands. Kelebihan demands akan mengakibatkan beban berlebihan (overload) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demands, baik melalui

institusi, budaya maupun struktural gatekeepers. Selain demands, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan demands mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut.

Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman. Dalam sistem politik, input diperlukan sebagai sumber energi dalam sistem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pemenuhan kepuasan dari sistem.

Tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, ada kebutuhan yang dengan mudah dipenuhi, namun ada pula kebutuhan yang dalam pemenuhannya memerlukan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua kebutuhan tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi karena tuntutan-tuntutan yang ada tidak terorganisir secara baik sehingga tidak sampai ke sistem. Hal terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk ke dalam sistem politik adalah cara penyampaian dan peranan komunikasi politik, termasuk agen yang menyampaikan tuntutan tersebut. Dalam sistem yang demokratis, setiap orang, organisasi, dan kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan tuntutannya.

Hal ini berbeda dengan negara yang tidak demokratis, di mana kesempatan dalam menyampaikan tuntutan sangat terbatas pada kelompok tertentu. Partai politik, dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik menjadi penting peranannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut. Apabila fungsi komunikasi partai politik yang dilanjutkan dengan agregasi (menggabungkan kepentingan) dan artikulasi (merumuskan kepentingan) tidak dapat berjalan dengan baik maka proses penyampaian tuntutan tersebut menjadi tidak terlembaga secara baik. Akibatnya muncul demonstrasi, petisi. Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem atau dari lingkungan luar sistem. Tuntutan eksternal dapat dengan mudah kita identifikasi karena lingkungan luar dalam pendekatan ini kita tetapkan sebagai sistem-sistem lain di luar sistem politik. Sedangkan tuntutan internal sebenarnya bukanlah input, namun lebih pada sesuatu yang timbul sebagai akibat langsung dari sistem politik itu

sendiri (with input). Dalam hal ini, tuntutan internal muncul karena adanya situasi-situasi yang terdapat dalam sistem politik itu sendiri.

Pada saat sistem politik bekerja, muncul tuntutan dari anggota-anggota sistem politik untuk mengubah hubungan politik yang telah ada. Perubahan hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan hubungan-hubungan politis yang terdapat dalam sistem politik. Adapun mengenai input yang berupa dukungan, tidak semata-mata berupa dukungan yang tampak dari luar, namun juga dukungan yang berupa pandangan atau suasana pikiran. Suasana pikiran yang mendukung merupakan suatu kumpulan sikap, kecenderungan yang kuat atau kesediaan untuk bertindak demi orang lain. Hal ini dapat berupa kesetiaan pada partai sampai dengan semangat patriotisme. Mengenai dukungan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

1. Wilayah Dukungan

- a. Komunitas Politik Dukungan terhadap komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat. Dukungan semacam ini dapat terlihat melalui pertumbuhan kesadaran dan kesatuan nasional. Sebagai contoh, seseorang akan merasa dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan menyumbangkan tenaga dan sumber daya yang dimilikinya untuk penyelesaian secara damai dari berbagai tuntutan yang berbeda.
- b. Rezim Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik.
- c. Pemerintah Artinya, ada dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul di antara sesama anggota sistem.

a) Mekanisme

Dukungan Sebagaimana diketahui bahwa tanpa adanya dukungan yang relatif tetap dan ajeg, sistem politik tidak akan dapat menyerap energi yang cukup memadai dari

anggotaanggotanya untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah keputusan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu output dan sosialisasi (politisasi).

- a. **Pertama**, output. Dalam sistem politik, output berwujud suatu keputusan atau kebijakan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga ikatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Pada dasarnya semakin besar tuntutan yang dapat dipenuhi maka akan semakin baik bagi kelangsungan sistem tersebut, hanya saja dapat dipastikan bahwa sistem tidak akan dapat memenuhi semua tuntutan yang ada. Paling tidak, tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruhlah yang harus diperhatikan.
- b. **Kedua**, sosialisasi (politisasi). Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turuntemurun dalam suatu sistem politik merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menciptakan dan mengakumulasi suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar. Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Apabila nilai yang ditanamkan sudah mengakar sedemikian dan terlembaga maka sistem politik tersebut memiliki legitimasi yang tinggi. Sosialisasi politik ini secara efektif menciptakan dan mewariskan nilai-nilai politik dan ukuran legitimasi dari suatu generasi ke generasi yang lain

Lingkungan dalam pengertian di sini adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik yang bukan termasuk dalam sistem politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu intrasocietal dan extrasocietal. Intrasocietal merupakan komponen dalam sistem politik. Intrasocietal mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi, budaya maupun struktur sosial. Intrasocietal dalam hal ini merupakan segmen fungsional masyarakat. Extrasocietal mencakup semua sistem di luar suatu sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau sebuah suprasistem.

Lingkungan terhadap sistem politik kadangkala dapat berupa tekanan (disturbances), misalnya krisis ekonomi. Sebuah sistem

politik harus menjalankan variabel-variabel esensialnya untuk mengatasi tekanan dan gangguan yang ada. Variabel-variabel esensial tersebut adalah alokasi nilai bagi anggota sistem dan mengatur bagaimana agar alokasi tersebut diterima oleh sebagian besar anggota.

Lingkungan masyarakat dalam oleh Easton dibagi dalam empat sistem, yaitu sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial.

- i. Pertama, sistem ekologi merupakan semua lingkungan fisik dan kondisi-kondisi organik nonhumanis dari kehidupan manusia. Lingkungan fisik misalnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial. Adapun kondisi nonhumanis, misalnya kekayaan alam, flora, dan fauna. Pengambil kebijakan hendaknya selalu memperhatikan kondisi lingkungan ekologi. Di Indonesia, misalnya dengan kondisi hutan yang luas hendaknya dijadikan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan hutan secara benar maka negara akan mendapatkan pemasukan dana dari penjualan kayu. Sebaliknya, eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam yang ada maka akan dapat menimbulkan bencana banjir. Pada akhirnya akan menimbulkan gangguan bagi sistem politik.
- ii. Kedua, sistem biologi. Sistem biologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu. Asumsi dasarnya adalah susunan biologis manusia tertentu akan melahirkan suatu perilaku tertentu pula. Kebenaran dari asumsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
- iii. Ketiga, sistem kepribadian. Pemahaman mengenai sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai karakter bangsa dan pengaruhnya terhadap masalah nasional.
- iv. Keempat, sistem sosial. Easton mengelompokkan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem

ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan budaya politik, umumnya masyarakat dikelompokkan dalam berbagai tipe, mulai dari masyarakat yang acuh terhadap politik sampai dengan masyarakat yang sangat aktif. Kajian dan penelitian mengenai budaya politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik hendaknya dapat mengatur budaya politik, termasuk partisipasi politiknya sehingga tidak merugikan. Jangan sampai yang muncul adalah beban yang berat dalam menampung partisipasi politik yang ada sehingga sistem politik tersebut hancur.

Dukungan diperlukan untuk menjaga kelangsungan setiap sistem politik. Indikator dukungan ini dapat diukur dengan cara bertanya pada setiap anggota kelompok tentang orientasi apa yang lebih dipilih: bekerja sama menyelesaikan masalah secara damai sehubungan tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya. Dukungan dalam sistem politik juga mampu membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah.

Lebih lanjut, Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

- a. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.
- b. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.
- c. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya tidak terlepas dari pengaruh sistem yang lain. Lebih dari itu, sistem politik (melalui kebijakan yang dihasilkan) turut mempengaruhi sistem yang lain.

- d. Oleh karena tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespon ancaman dan gangguan yang datang, serta beradaptasi dalam segala kondisi.

c. Analisis struktural Fungsional

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem kehidupan manusia.

Analisis pendekatan struktural fungsional ini dimulai dengan penjelasan mengenai sistem politik sebagaimana diperkenalkan oleh Gabriel Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi.

Talcott Parsons mengembangkan apa yang disebut *grand theory* (teori besar) dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai Fungsionalisme Struktural. Salah satu teori dasar Parsons menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagianbagian yang saling bergantung (interdependen). Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara division of labor (pembagian kerja), dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif dan melalui pertukaran-pertukaran di antara bagiannya, serta menciptakan suatu keseimbangan untuk mempertahankan eksistensi sistem tersebut. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang utama dalam sebuah sistem politik

- a. sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, sistem politik terdapat dalam

masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Aktor-aktornya pun sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing;

- b. tujuan sistem politik adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat (integrasi). Selain itu, sistem politik juga dapat menyesuaikan (adaptif) terhadap lingkungannya. Jadi selain berfungsi untuk menyatukan masyarakat, sistem politik diperlukan untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat di luar sistem politik;
- c. sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan dan paksaan fisik. Penggunaan kekuatan dan paksaan fisik, dalam kadar yang berbeda dapat dilihat dalam sistem politik yang totaliter dan sistem politik demokratis. Dalam sistem politik yang totaliter, paksaan fisik sangat dominan dalam alokasi nilai dan kebijakan. Berbeda dengan sistem politik yang demokratis, penggunaan paksaan fisik hanya dalam batas tertentu dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi input dan output. Termasuk dalam kategori fungsi input adalah sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan.

Lebih lanjut Almond menulis: “ *All of the functions in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, rule adjudication – are performed by means of communication* ” .

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Komunikasi politik versi Almond

beranggapan bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat).

Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik.

Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, 2000: 132-133). Arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota-anggota masyarakat.

Bagi Almond, proses tersebut bersifat universal karena tidak ada penguasa yang tidak menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya, baik itu dalam bentuk peraturan maupun perintah-perintah (Rauf, 2000: 133). Adapun mengenai interaksi antara sistem politik dengan lingkungan, antara Easton dan Almond tidak terdapat perbedaan dalam pembagian lingkungan dalam (intrasocietal) dan lingkungan luar (extrasocietal). Sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan. Pengaruh yang berasal dari lingkungan luar (input) berdampak pada sistem dan sebaliknya, sistem politik mempengaruhi pula lingkungannya (output).

Pada dasarnya pendekatan sistem politik yang digagas oleh Almond merupakan pendekatan perbandingan sistem politik. Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-proses politik yang terdapat di dalamnya, setidaknya dapat dilakukan dalam tiga tahapan (1) kegiatan deskriptif, dengan melihat dan memusatkan perhatian pada keseluruhan bagian dari sistem politik tersebut; (2) memilah-milah temuan yang didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing; (3) dicari kejelasan dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dengan konflik yang ada.

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang

menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong suatu usaha yang mengarah pada suatu perdamaian, memajukan perdangangan internasional ataupun membatasinya, membuka diri atau menutup diri dari semua gagasan.

Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, misalnya: parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya.

Konsep di atas ini, semuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya. Komponen tersebut merupakan komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik. Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam lingkungannya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana lingkungan-lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik.

Sifat saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem politik tersebut juga saling bergantung. Selanjutnya, bahasan mengenai hubungan sistem dengan lingkungan, akan diberikan beberapa ilustrasi contoh. Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan.

Dalam sistem tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional agama ataupun adat dalam semua

kehidupan. Berbeda dengan sistem politik dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, sebagai salah satu prosedur demokrasi, di Indonesia tidak dapat lepas dari lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional atau negara asing yang mengontrol jalannya Pemilu. Lebih dari itu, bantuan dana pun kerap diberikan oleh negara atau lembaga asing tersebut. Sebagai konsekuensi dan kekhawatiran yang muncul adalah adanya intervensi dari lingkungan luar. Adapun pengaruh ke luar terkait dengan isu demokratisasi ini adalah adanya kontrol dan proses yang diberikan pada kebijakan-kebijakan negara lain yang dianggap telah melanggar nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya, protes masyarakat Indonesia terhadap invasi AS ke Irak.

Isu lain yang cukup santer terkait dengan pengaruh lingkungan luar adalah masalah terorisme. Berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme menjadi perhatian pada hampir semua negara di dunia. Bahkan sampai ada anggapan terorisme sebagai gejala dan jaringan global pun kerap disimpulkan. Indonesia sebagai bagian dari lingkungan internasional yang dipengaruhi oleh isu tersebut harus menyesuaikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah membuat Undang-Undang tentang terorisme.

Keuntungan pendekatan ekologis ini adalah dapat mengarahkan pada perhatian dan isu politik yang lebih luas. Pendekatan ini dapat mencegah kita untuk memberikan penilaian yang tergesa-gesa dan penuh prasangka. Ketika kita ingin memberikan penilaian yang objektif terhadap suatu sistem maka kita harus dapat menempatkan sistem tersebut dalam lingkungannya untuk dapat melihat bagaimana lingkungan tersebut membatasi atau

memperlancar pilihan politik yang ada. Pada sisi yang lain, misalnya kita mengetahui ada negara yang eksploitatif terhadap sumber alamnya, kita tidak dapat langsung menjustifikasi bahwa negara tersebut buruk. Bisa jadi, eksploitasi tersebut adalah tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik yang disertai pula dengan tekanan dari negara yang ada di sekitarnya.

d. Teori Pilihan Rasional

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu. (Coleman, 2013)

Intervensi merupakan sebuah campur tangan yang dilakukan oleh seseorang, dua orang atau bahkan yang dilakukan oleh Negara. Dari adanya intervensi tersebut lah yang kemudian diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan sosial. Individu memang memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah sistem sosial. Karena pada dasarnya, individu lah yang menentukan berjalan tidaknya suatu sistem tersebut. Bahkan sebelum sistem itu terbentuk, dari tiap individu lah yang dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian disusun untuk menghasilkan sebuah sistem.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor.

Coleman juga menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sumber daya ke tingkat sistem sosial. Basis minima untuk sistem sosial adalah tindakan dua orang aktor, dimana setiap aktor mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi pihak lain. Aktor selalu mempunyai tujuan, dan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung pada tindakan aktor tersebut. Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional.⁴ Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial.

Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa

utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial.

Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor disini bisa dikatakan sebagai individu atau Negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan cara mengambil atau memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentingannya tersebut. Sebagai contoh, jika pilihan 1 dianggap lebih penting dan lebih bermakna dari pada pilihan 2, dan 3, maka aktor akan memilih pilihan 1. Aktor disini ialah individu, yaitu individu yang melakukan sebuah tindakan. Aktor tersebut dapat mengatur dirinya sendiri, karena aktor tahu apa yang ia mau dan yang harus dilakukan.

Teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berfikir rasional, didalam membuat suatu keputusan. Sama halnya dengan para petani miskin yang memilih suatu pilihan yang dianggap paling rasional (sesuai dengan akal) dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya dan menyambung kehidupannya. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional.

4. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

c. Latihan

- i. Jelaskan perbandingan politik menurut para ahli!
- ii. Evaluasi pengertian dan kebutuhan dari perbandingan politik dan perbandingan pemerintahan
- iii. Jelaskan sifat alamiah dari perbandingan pemerintah
- iv. Jelaskan kriteria utama dari sistem politik
- v. Diskusikan konsep teori pembuatan keputusan dan relevansinya dalam studi pemerintahan dan politik

d. Lembar Kerja Praktek

5. Evaluasi Pembelajaran

- a. Ketepatan menjelaskan studi perbandingan politik dan mampu membedakannya dengan perbandingan pemerintahan
- b. Kejelasan dalam menjelaskan dan berargumentasi.

6. Umpan Balik

D. Penutup

1. Rangkuman

- a) Perbandingan Politik merupakan salah satu ruang lingkup dalam ilmu politik yang memiliki karakteristik yaitu analisa politik dengan pendekatan empirik yang didasarkan atas metode perbandingan.
- b) Salah satu tantangan terbesar dari ilmu politik adalah membangun teori secara menyeluruh terkait dengan sistem politik. Sistem politik merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh David Easton guna menjelaskan keberadaan ilmu politik yang mampu menjelaskan luaran dari sistem berupa keputusan yang otoritatif dan aksi dari otoritas politik guna mendistribusikan serta membagikan nilai otoritatif yaitu kekuasaan
- c) Luaran dari perbandingan politik bergantung pada perbandingan pengalaman, perilaku serta institusi politik yang menggambarkan pada mekanisme kerja sistem politik.
- d) Salah satu kajian penting dalam sistem politik adalah perbandingan sistem pemerintahan. Struktur dan perilaku dari pemerintah dapat memberikan tantangan sekaligus kajian baru dalam area studi dan fokus utama dari ilmu politik.
- e) Sifat dasar (alamiah) dari perbandingan politik adalah untuk menganalisa dan membandingkan perbedaan diantara sistem politik yang bekerja pada masyarakat yang berbeda. Dalam sistem tersebut terdapat hubungan diantara aktivitas politik, proses politik dan kekuatan politik
- f) Sementara perbandingan pemerintah berurusan dengan studi ekstensif tentang politik yang berbeda sistem dengan penekanan khusus pada institusi dan fungsinya, perbandingan politik memiliki cakupan yang lebih luas. Ini mencakup semua yang ada di bawah penelitian yang terakhir, bersama dengan studi politik non-negara.

Oleh karena itu, perbandingan politik mencakup wilayah yang lebih luas dalam studi politik.

- g) Studi tentang perbandingan politik kontemporer ditandai dengan hal-hal berikut:
 - i. Penelitian analitik
 - ii. Studi objektif ilmu politik
 - iii. Studi infrastruktur
 - iv. Studi tentang masyarakat berkembang dan masyarakat maju
- h) Pendekatan tradisional untuk studi perbandingan pemerintahan muncul sebagai menanggapi historisisme abad ke-19. Itu menekankan pemeriksaan sejarah lembaga-lembaga politik Barat dari awal hingga zaman modern.
- i) Di bawah pengaruh reformasi pendekatan perilaku (*behavioural*), model analisis kelembagaan telah dipulihkan oleh mode proses. Behavioris mempelajari perilaku orang dan kelompok daripada struktur, institusi, ideologi atau peristiwa.
- j) Keluaran dari sistem politik adalah keputusan dan tindakan otoritatif dari otoritas politik untuk distribusi dan pembagian nilai.
- k) Sistem politik adalah mekanisme pengambilan keputusan. Efisiensi politik sistem dapat diukur dalam hal kemampuannya untuk membuat keputusan yang luas diterima.
- l) Kerangka Marxis jauh lebih baik diadaptasi untuk menganalisis sistem yang berbeda dalam hal perkembangan historis dari berbagai struktur sosial dan hubungan timbal balik, dan khususnya untuk mengatasi masalah ketidakstabilan dan perubahan.
- m) Analisis Marxis memberikan kerangka umum di mana seseorang dapat menelusuri proses bersejarah tentang struktur tertentu yang berlaku untuk terbatas dan situasi konkret.

2. Daftar Istilah

Perbandingan Politik	Merupakan studi yang mempelajari bentuk organisasi politik, kepemilikan, korelasi, variasi dan beragam bentuk perubahan
Parokial	Berkaitan dengan ide atau isu terkait dengan keterbatasan atau pandangan yang sempit, atau bisa dikaitkan dengan jangkauan yang terbatas

Etnosentrisme	Mengacu pada keyakinan bahwa kelompok etnis tertentu jauh lebih superior (mendominasi dibandingkan kelompok etnis lainnya)
Infrastruktur	Merupakan dasar fisik dan struktur organisasi serta kebutuhan fasilitas bagi operasional dari masyarakat atau suatu badan usaha
Paradigma	Pembagian secara relatif merata kepada semua anggota masyarakat.
Amalgamasi	Penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat. Contoh : Pemungutan pajak, bea cukai dan tarif iutran dan redistribusi dan pengolahan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah negara.
Artikulasi	Perasaan kesukuan yang berlebihan

Daftar Pustaka

- Alfian. (1978). *perbandingan Politik dan Generasi Muda*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel Abraham. 1970. *Political Development: Essays in Heuristic Theory*.
- Bardach, E. (2008). *The Implementation Game*. Cambridge: MIT Press.
- Barry, B. (1990). *Political Argument: A Reissue with a New Introduction*. California: University of California Press.
- Boston: Little Brown Publishers. Charlesworth, James Clyde. 1967. *Contemporary Political Analysis*. New Jersey: Free Press.
- Caramani, Daniel. 2011. *Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Dogan, Mattei and Ali Kazancigil. 1994. *Comparing Nations, Concepts, Strategies, Substance*. Black well.
- Easton, David. 1965. *A Framework for Political Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Publishing House.
- Eckstein, Harry and David Apter. 1963. *Comparative Politics: A Reader*. New York: Free Press.
- Johari, J. C. 1982. *Comparative Politics*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Ray, S. N. 2000. *Modern Comparative Politics*. New Delhi: PHI Learning.
- Palekar, S. A. 2009. *Comparative Politics and Government*. New Delhi: PHI Learning.

MODUL 2

PENDEKATAN DALAM STUDI PERBANDINGAN POLITIK

A. Pendahuluan

Pada modul 2 ini mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan dalam studi perbandingan ilmu politik. Pendekatan yang dimaksud adalah objek pendekatan analisis yang dilakukan oleh para analis politik dalam menjelaskan sistem politik sekaligus digunakan dalam analisa perbandingan politik. Hakikatnya para ilmuwan politik telah banyak mengajukan banyak sekali pendekatan, antara lain:

- a. Ibrahim Ambong menyebutkan adanya empat pendekatan dalam ilmu politik yaitu; (1). Tradisional (yuridis dan institusional); 2). Pendekatan perilaku; 3) Pendekatan pasca perilaku; 4). Pendekatan Neo Marxis.
- b. Miriam Budiarmo menyebutkan ada 6 pendekatan: 1). Filsafat Politik; 2). Paham Kelembagaan; 3). Paham Tingkah laku; 4). Paham Kemajemukan; 5). Paham Struktural; 6). Paham Perkembangan.
- c. Riswandha Imawan menyebut 3 pendekatan yaitu; 1). Tradisional; 2). Tingkah laku, dan 3). Pilihan Rasional.
- d. David Marsh and Gerry Stoker menyebutkan 7 pendekatan ilmu politik yakni, (1). Pendekatan Tingkah Laku, (2). Pendekatan Pilihan Rasional. (3). Pendekatan kelembagaan. (4). Pendekatan Feminisme. (5). Pendekatan Interpretasi. (6). Pendekatan Marxisme dan, (7). Pendekatan Normatif.

Namun pada pembelajaran modul ini hanya akan membahas beberapa pendekatan yang paling relevan bagi pengkajian ilmu politik masa kini, yaitu pendekatan tradisionalisme, pendekatan behavioralisme, pendekatan post behavioralisme dan pendekatan pilihan rasional.

1. Deskripsi Singkat

Pendekatan dalam ilmu politik hakikatnya terdapat 3 pendekatan. Ketiga pendekatan yang dimaksud antara lain pendekatan institusionalisme atau tradisionalisme yang berfokus menjadikan pembahasan tentang institusi dalam sistem politik. Institusi tersebut dibagi dalam suprastruktur dan infrastruktur.

Pendekatan kedua adalah pendekatan behavioralisme, yang berfokus pada pembahasan tentang perilaku aktor dan institusi politik. Sementara pendekatan ketiga adalah pendekatan post behavioralisme, yang berfokus pada penggabungan kedua pendekatan sebelumnya serta manfaat apa yang bisa dihasilkan oleh sistem politik dan ilmu politik itu sendiri. Ketiga pendekatan ini juga hakikatnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk memahami sejarah perkembangan ilmu politik dan objek kajiannya dari masa ke masa. Selain itu mahasiswa akan mempelajari pendekatan pilihan rasional yang menegaskan bahwa setiap kegiatan politik didasarkan pada kepentingan politik sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia maupun institusi merupakan sebuah pilihan rasional yang didasarkan pada perhitungan *cost* dan *benefit* yang dikeluarkan dan didapat.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul II ini adalah:

- a. Mampu menguasai perbandingan politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- b. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;
- c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;
- d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran student *center learning* melalui praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul ini adalah: Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik sebagai *science* sejak awal politik dilihat hanya dari sisi Institusional, perilaku aktor politik, hingga kritik atas keduanya yang terdapat dalam pendekatan Post Behavioralisme. Di sisi lain dengan pemahaman terhadap sejumlah pendekatan ilmu politik ini, mahasiswa juga mampu melakukan analisis perbandingan sistem, struktur dan fungsi politik.

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul II

Modul 2 ini akan sangat berguna bagi mahasiswa ilmu politik dalam melakukan berbagai analisis dalam bentuk makalah, maupun penelitian ilmu politik. Bahwa dengan 3 pendekatan utama ini, mahasiswa dapat menemukan variabel-variabel apa yang akan digunakan ketika menganalisis perbandingan sistem, struktur, fungsi hingga nilai politik. Dalam bab ini juga akan ditambahkan pendekatan neo-marxis yang dapat digunakan untuk mengkaji perbandingan ekonomi-politik

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok antara lain:

- a. Pendekatan tradisionalisme: para ilmuwan utama atau pemikir pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.
- b. Pendekatan behavioralisme: para ilmuwan utama atau pemikir pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.
- c. Pendekatan post behavioralisme: para ilmuwan utama atau pemikir pendukung pendekatan ini dan variabel analisisnya.
- d. Pendekatan Pilihan Rasional

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Pendekatan Dalam Perbandingan Ilmu Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami perkembangan politik sebagai *science* sejak awal politik dilihat hanya dari sisi Institusional, perilaku aktor politik, hingga kritik atas keduanya yang terdapat dalam pendekatan Post Behavioralisme serta landasan asumsi dalam pendekatan pilihan rasional. Di sisi lain mahasiswa/i diharapkan juga mampu memahami perkembangan metodologi ilmu politik.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

a. Pendekatan Legal Institusional atau Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini berkembang di akhir abad ke 19, yang menjadikan sifat UUD, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis lembaga-lembaga kenegaraan seperti badan eksekutif, eksekutif dan yudikatif, sebagai objek analisisnya. Ada 5 faktor yang perlu ditekankan dalam pendekatan ini pasca klasifikasi yang dilakukan oleh David Easton (Yoyo Rohaniah, 2015):

- i. Legal dan formal, biasanya administratif dan institusi-institusi yang menjadi perhatian para spesialis yang mempelajari empirium dan wilayah-wilayah jajahan sebelum Perang Dunia II.
- ii. Struktur-struktur kelembagaan baru (*neo-institutional structures*), seperti *civil society* dan partai politik, struktur-struktur legal dan konstitusi.
- iii. Kelompok-kelompok, seperti partai politik, agama, dan militer, kelompok-kelompok informal seperti serikat dagang, kelompok bisnis, dan kelompok petani.
- iv. Struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang membentuk sebuah sistem dari bagian-bagian yang saling berkaitan.
- v. Struktur-struktur dalam bentuk kelompok-kelompok dan kelas-kelas kepentingan ekonomi.

Para analis struktur cenderung menyelidiki perangkat kelembagaan yang formal dan peraturan perundangan yang mendasarinya.

Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian pendekata tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional.

Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut, terlebih menemukan apakah terdapat diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang diamati dalam praktik. Pada saat bersamaan pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi informal seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya hingga media. Pembahasan pendekatan ini bersifat statis dan deskriptif daripada analitis dan banyak menggunakan ulasan sejarah. Fakta atau temuan dianalisa dengan pendekatan norma, yang

mengutamakan konteks ideal (standar yang harus dicapai).

Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, yang menekankan pada idealitas atau memenuhi standar tertentu. Negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal (*a body of formal constitutional norms*) (Easton, 1968). Contoh dari pendekatan ini adalah karya R. Kranenburg, yang berjudul *Algemene Staatsler*. Bahasan pendekatan tradisional pada umumnya hanya terbatas pada negara-negara demokrasi barat, seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda dan Jerman. Sehingga membatasi terbentuknya teori baru.

Pada pertengahan dasawarsa tahun 1930-an beberapa sarjana di Amerika Serikat mulai mengemukakan suatu pandangan yang lebih melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dan masyarakat. Sarjana dari Mazhab Chicago (*Chicago School*) antara lain adalah Charles E. Merriam dan Harold E. Laswell menjelaskan baha esensi dari politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik (Merriam, 1934) (Laswell, 1972). Gerakan ini telah sedikit banyak memperlunak kelakuan pendekatan tradisional selama ini, meskipun harus diakui bahwa nuansa baru ini masih terbatas di Amerika saja.

Pendekatan ini sering dikritik karena sejumlah sifat-sifat kajiannya, di antara kritik-kritik tersebut adalah:

- i. Pendekatan ini terlalu normatif (sesuai dengan ideal atau standar tertentu), dengan norma-norma demokrasi Barat sebagai standar dan yang dianggap ideal. Negara, misalnya dilihat sebagai "sebuah badan norma-norma konstitusional yang formal".
- ii. Analisis dalam pendekatan ini tidak membedakan antara "fakta" (sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan) dan "norma" (standar atau ideal yang menjadi pedoman berperilaku).
- iii. Label Parokialisme atau etnosentrisme yang ditujukan pada pendekatan ini disebabkan karena bahasan-bahasan pendekatan ini terbatas pada struktur-struktur politik formal di negara-negara demokrasi di Eropa Barat.
- iv. Pendekatan ini juga mendapat kecaman karena sifatnya yang statis, sebab hanya menggambarkan struktur formal, baik pemerintah maupun yang dirumuskan di dalam dokumen-dokumen (UUD atau konstitusi).

Gerakan-gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Chicago membuka wacana politik yang lebih dinamis. Pada pertengahan tahun 1930-an di Amerika muncul kelompok ilmuwan politik yang membawakan pandangan baru tentang politik. Mereka melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Para pembaharu ini tergabung dalam Mazhab Chicago dengan tokoh-tokohnya Charles Merriam dan Harold D. Laswell. Merekalah ilmuwan-ilmuwan politik yang memelopori pandangan bahwa esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Dengan munculnya pandangan baru ini kajian politik menjadi lebih terbuka. Para ilmuwan politik kini tidak hanya menaruh perhatian pada lembaga-lembaga formal saja, berbagai kegiatan atau proses-proses yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik menjadi perhatian para ilmuwan politik. Akan tetapi pada masa itu penelitian empirik mengenai praktik kekuasaan masih belum banyak dilakukan. Pandangan tentang politik yang baru ini, meskipun demikian, telah membukakan jalan untuk kemunculan pendekatan lain yang bersifat fungsional yang dikenal dengan nama pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*).

Pendekatan tradisional untuk mempelajari pemerintahan komparatif muncul sebagai tanggapan dengan historisisme abad ke-19. Ini menekankan pemeriksaan sejarah Barat lembaga-lembaga politik dari awal hingga zaman modern.

Kaum tradisional juga secara teoritis berfilsafat tentang demokrasi dan mata pelajaran lainnya, atau dibuat formal dan studi hukum lembaga pemerintah. Analisisnya pada dasarnya bersifat konfiguratif dan setiap sistem diperlakukan sebagai entitas yang unik. Pendekatannya sangat deskriptif daripada pemecahan masalah, penjelasan, atau analitik dalam metodenya, dan deskripsinya tidak lengkap dan terbatas pada bentuk pemerintahan dan sistem politik asing.

Roy Macridis, penulis *Modern Political Regimes*, secara sistematis dan dengan jelas merangkum fitur-fitur utama dari pendekatan tradisional. Dia secara singkat menunjukkan bahwa pendekatan tradisional pada dasarnya **non-komparatif, deskriptif, parokial, statis dan monografi**. Demikian pula, Almond dan Powell telah mengidentifikasi tiga premis utama yang telah mendominasi kritik terhadap pendekatan perbandingan pemerintah yang dilaksanakan sejak periode sebelum Perang Dunia II, sebagai berikut

- a. bersifat parokial
- b. analisis konfigurative
- c. bersifat formal

Harry Eckstein juga menunjukkan pengaruh teori abstrak, studi hukum formal dan studi konfigurasi yang mencirikan reaksi terhadap historisisme dalam studi politik. Pertama, seperti yang ditunjukkan Macridis, pendekatan tradisional ditujukan terutama untuk sistem politik Barat. Penekanannya adalah pada konfigurasi budaya tunggal, yaitu, demokrasi perwakilan dunia Barat dan penelitian ini terbatas pada Inggris dan negara-negara Persemakmuran, AS, Prancis, Jerman, Italia, dan Rusia. Sistem Barat dan sistem politik Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang tidak demokratis dipelajari oleh segelintir peneliti. Studi lintas budaya hampir sama sekali tidak teridentifikasi. Kajian ini dibatasi tidak hanya dalam jangkauan, tetapi juga secara mendalam; hanya aspek terisolasi dari proses pemerintahan di negara-negara tertentu dianalisis. Kajiannya lebih sering monografik dan komparatif.

Kedua, studi komparatif politik sangat formal dalam pendekatannya terhadap institusi politik. Studi ini difokuskan pada lembaga-lembaga pemerintah dan model hukum, aturan dan peraturan, atau ide dan ideologi politik mereka, bukan pada penampilan, interaksi, dan perilaku. Itu tidak memperhatikan pengaruh informasi faktor-faktor dalam pengambilan keputusan dan juga faktor-faktor penentu non-politik dari perilaku politik. Hanya organ institusional formal seperti parlemen, kepala eksekutif, pegawai negeri sipil, dll. berlaku untuk perbandingan kelembagaan dan struktural-fungsional. Realitas dari tindakan dan perilaku politik dalam struktur institusional tidak mendapat perhatian yang serius pikiran. Studi tradisional dalam hal ini sangat tidak realistis.

Ketiga, studi tradisional, seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih bersifat deskriptif daripada analitis, penjelasan atau pemecahan masalah dalam metodenya. Penekanannya adalah pada murni deskripsi dalam hal sejumlah besar fakta. Ada sedikit upaya untuk mengembangkan teori umum dengan verifikasi hipotesis dan penyusunan data yang signifikan. Memiliki dengan sangat tepat menunjukkan bahwa kekurangan empiris dari analisis tradisional adalah dorongan yang berdampingan untuk behaviorisme. Inilah yang disebut Robert Dahl sebagai 'teori empiris' dalam studi kontemporer.

Suasana ketidakpuasan dengan subjektivisme dan formalisme dari pendekatan tradisional studi tentang pemerintahan dan politik dipimpin oleh logika situasi ke proses rekonstruksi disiplin. Sejumlah faktor bekerja untuk menghasilkan perubahan radikal pertama dalam pandangan AS dan kemudian negara-negara lain. Almond dan Powell menyebutkan beberapa perkembangan yang terutama bertanggung jawab untuk situasi baru. Ini adalah sebagai berikut:

- a. Munculnya banyak negara secara nasional dengan keragaman yang membingungkan budaya
- b. Institusi sosial dan ciri-ciri politik
- c. Hilangnya dominasi bangsa-bangsa di komunitas Atlantik
- d. Keseimbangan kekuatan yang berubah
- e. Munculnya komunisme sebagai faktor kekuatan dalam proses restrukturisasi Nasional
- f. Sistem politik internasional

Semua faktor ini mengarah pada upaya dinamis dalam inovasi dan upaya untuk menciptakan yang baru tatanan rasional. Hasilnya, seperti yang dikatakan dengan tepat oleh Sidney Verba, 'Sebuah revolusi dalam politik komparatif'. Verba telah menyimpulkan secara memadai prinsip-prinsip di balik 'revolusi': 'Melihat melampaui deskripsi untuk masalah yang lebih relevan secara teoritis; Lihat di luar lembaga formal pemerintah hingga proses politik dan fungsi politik; dan melihat melampaui negara-negara Eropa Barat ke negara-negara baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin.' Dalam bahasa Almond dan Powell, upaya inovasi adalah dimotivasi oleh pencarian ruang lingkup yang lebih komprehensif, pencarian realisme, mencari presisi dan mencari orde teoritis.

b. Pendekatan Perilaku atau Pendekatan Behavioralisme

Pendekatan ini berkembang di Amerika pasca Perang Dunia II, tepatnya di awal tahun 1950. Penyebab lahirnya pendekatan ini antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015):

- i. Sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari.
- ii. Ilmu politik ternyata tidak mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya komunisme dan fasisme.
- iii. Muncul keraguan akan kemampuan para ilmuwan politik menerangkan fenomena politik

Sehingga pendekatan ini mengembangkan analisis baru yang ingin menjadikan ilmu politik lebih ilmiah, dengan memberikan perhatian besar terhadap pengembangan metode penelitian ilmu politik, dan berupaya menemukan kaidah-kaidah universal dalam tingkah laku politik. Oleh karena itu para penganjur pendekatan ini disebut sebagai *saintific* atau *saintifisme* karena menjadikan kajian politik seperti kajian ilmu alam.

Dalam pandangan pendekatan ini bahwa kehidupan politik tergantung pada pemahaman akan tingkah laku aktor politik. Karena individu yang menjadi pelaku dalam sistem politik memiliki kecenderungan psikologis dan nilai budaya yang dianut yang keduanya memainkan peranan penting dalam menentukan kegiatan politik. Sebab lembaga politik hanyalah benda mati yang digerakkan oleh individu di dalamnya. Sehingga jika mampu mendeskripsikan nilai dan psikologis aktor politik dapat ditemukan alasan yang memotivasi sebuah kejadian atau fenomena politik. Jadi ada perubahan analisis dari institusi ke manusia, dan dari struktur ke dinamika politik. *Misalnya*, dalam pendekatan tradisional mengkaji lembaga legislatif maka yang dibahas adalah aturan regulasi dan wewenang yang dimiliki, sementara pendekatan behavioral akan mengkaji pola pemberian suara para anggota legislatif dalam voting penyusunan UU, pidato-pidato yang disampaikan, hingga cara mereka berinteraksi dengan sesama anggota legislatif dan masyarakat, termasuk penggunaan bahasa dan simbol dalam kegiatan politik mereka. Maka secara riil yang menjadi objeknya adalah sikap, motivasi, orientasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Maka pendekatan ini menjadi pendekatan yang menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ekonomi.

Karena yang diamati adalah perilaku maka pendekatan ini merupakan studi penelitian empiris yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kasus. David Easton dan Somit menguraikan beberapa konsep pokok, antara lain (Rauf, 1991):

- i. Perilaku politik menampilkan sebuah keteraturan yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya, melalui pengumpulan data yang dapat diukur atau dikuantifikasikan melalui ilmu statistik.
- ii. Harus ada usaha membedakan antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman).

- iii. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas nilai, sebab benar atau tidaknya nilai-nilai tidak dapat diukur, seperti demokrasi, persamaan, kebebasan.
- iv. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori.
- v. Ilmu politik harus bersifat murni; kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.

Pendekatan behavioral ini berkontribusi bagi studi perbandingan politik, terutama jika objek kajiannya adalah negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan, tidak bisa dibahas menggunakan pendekatan institusional/tradisionalisme.

Salah satu pelopor pendekatan Perilaku ini ialah Gabriel Abraham Almond, disamping sarjana seperti David Easton, Karl Deutsch, Robert Dahl dan David Apter. Gabriel Almond berpendapat bahwa semua sistem mempunyai struktur (institusi atau lembaga), dan unsur-unsur dari struktur ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi ini bergantung pada sistem dan juga bergantung pada fungsi-fungsi lainnya. Konsep ini yang kemudian disebut dengan *structural-fungsional*.

Sitem politik menyelenggarakan dua fungsi yaitu fungsi masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Keduanya terpengaruh oleh sifat dan kecenderungan para aktor politik. Menurut Almond ada lebih dari empat fungsi *input* dan *output*. Input adalah sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan, himpunan kepentingan (*interest aggregation*) dan komunikasi politik. Kemudian dalam perkembangannya Almond mengubah istilahnya menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi kapasitas (*capacity function*), fungsi konversi dan pemeliharaan (*conversion and maintenance function*), dan fungsi adaptasi (*adaption function*). Sementara itu komunikasi dianggap sebagai cara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi itu. Sedangkan ada tiga fungsi output, yaitu membuat peraturan (*rule-making*), mengaplikasikan peraturan (*rule-application*), dan memutuskan (secara hukum) peraturan (*rule-adjudication*). Konsep ini dijabarkan lagi oleh David Easton melalui analisis sistem (Easton, 1968).

David Easton menyatakan bahwa dalam suatu sistem politik selalu ada suatu aliran terus menerus dari input ke output serta adanya *feedback*. Input terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politik lainnya menerima

input ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya. Input kemudian dikonversikan kedalam **black box**, yang terdiri dari institusi politik dan **menghasilkan output dalam bentuk peraturan serta keputusan yang otoritatif**. Output kembali lagi ke lingkungan melalui suatu lingkaran umpan balik (*feedback loop*) yang menjadi input baru dalam sistem politik. Dalam sistem politik selalu ada upaya untuk menghasilkan **equilibrium** (keseimbangan). Proses ini berlanjut dan sistem politik dapat bertahan (*persist*) melalui proses yang dinamis. Easton juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya menerima desakan dari luar tetapi juga dari sistem itu sendiri, sehingga tergarbar adanya *with input* yang muncul dalam bentuk desakan dari partai politik.

Penganut *Structural-fungsionalist* berpendapat bahwa, sekalipun berbagai sistem politik berbeda satu sama lain dalam cara mengatur institusi, tetapi ada fungsi-fungsi tertentu yang diselenggarakan dalam setiap sistem politik. Hal ini memudahkan pada peneliti untuk mempelajari kegiatan dan kehidupan politik di negara-negara berkembang yang masing-masing berbeda sejarah perkembangan, latar belakang kebudayaan, dan ideologinya. Pengamatannya dilakukan terhadap bermacam-macam struktur yang menjalankan fungsi yang sama, sekalipun nama struktur itu mungkin berbeda. Kecenderungan ini telah mempertajam penelitian mengenai politik di negara-negara baru dan dengan demikian telah memajukan bidang studi perbandingan politik

Jika diperbandingkan dengan pendekatan tradisionalisme maka dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Perbandingan Tradisional versus Behavioralisme (Haboddin, 2016)

Dari Tradisionalis	Ke Behavioralis
Mengaitkan antara fakta dan nilai	Pemisahan fakta dan nilai
Penelitian segi filsafat	Penelitian empirik
Kualitatif	Kuantitatif
Menekankan aspek historis-yuridis	Menekankan Sosiologis psikologi
Anti positivis	Positivis
Fokusnya struktur formal	Fokus pada struktur formal dan fungsi informal
Menguraikan	Menjelaskan
Etnosentrik: fokus pada Negara demokratis di Eropa	Etnosentrik; khususnya pada model Anglo Amerika

Meskipun begitu bukan berarti pendekatan behavioral mendapatkan kritikan, antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015):

- i. Pendekatan behavioral berfokus pada hal-hal yang tidak penting seperti perilaku pemilih, sikap politik, dan pendapat umum. Sementara mereka mengabaikan terhadap pembahasan tentang konflik dan pertentangan yang mengguncang masyarakat pada masa itu.
- ii. Ilmuwan yang menganjurkan pendekatan behavioral cenderung mengabaikan upaya-upaya perubahan sosial.
- iii. Pendekatan behavioral yang mengabaikan nilai-nilai dan norma dalam sistem politik, tidak mampu menjawab pertanyaan yang mengandung sistem nilai, seperti pertanyaan apakah sistem demokrasi yang baik atau bagaimana membangun masyarakat yang adil.
- iv. Behavioralisme mengklaim bahwa sebuah ilmu haruslah bebas nilai namun kenyataannya ilmu politik tak bisa bebas nilai, karena selalu ada kecenderungan untuk berpihak dan juga setiap tindakan manusia selalu melibatkan nilai.
- v. Behavioralis menggunakan metode statistik dan kuantifikasi digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor politik namun perilaku aktor adalah hal yang bersifat dinamis dan sosial sehingga tidak dapat diukur dengan menggunakan ukuran matematika.

Kritik terhadap pendekatan perilaku

Dalam perkembangan Pendekatan Perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian dari kalangan penganut Pendekatan Perilaku Sendiri, dan juga dari para Neo-Marxis. Kalangan tradisionalis yang tadinya menjadi sasaran utama dari kecaman kaum perilaku (*behavioralis*), kemudian melakukan kritik terhadap *behavioralis* dengan argumentasi bahwa pendekatan itu meolaknya masuknya nilai dan norma dalam penelitian politik. Menurut kalangan tradisional, pendekatan perilaku tidak mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai, seperti apakah sistem politik demokrasi yang baik atau bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sebagainya.

Pendekatan perilaku juga dikiritik karena tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting seperti survei mengenai perilaku pemilih, sikap politik, dan pendapat umum. Pendekatan ini tidak memiliki ketertarikan terhadap konflik

c. Pendekatan Pasca Behavioralisme atau Pendekatan Post Behavioralisme

Pasca kritikan yang diarahkan pada objek kajian pendekatan behavioralisme, memicu lahirnya pendekatan post behavioralisme, yang lahir di tahun 1960-an. Salah satu pemicunya selain kritikan diatas yang diarahkan kepada pendekatan behavioral, adalah begitu banyaknya masalah yang meresahkan masyarakat. Seperti perlombaan senjata nuklir akibat perang dingin, diskriminasi ras, neo kolonialisme, dan masalah lainnya yang tidak menjadi objek kajian behavioralisme namun terjadi dalam sistem politik di berbagai negara. Bagi David Easton Dalam penelitian politik, “substansi atau isi pokok harus mendahului teknik”. Paling penting adalah tujuan. Jika suatu penelitian ilmiah tidak relevan dan tidak memiliki apa-apa bagi masalah-masalah sosial yang mendesak pada saat ini, maka penelitian tersebut tidak berharga sama sekali untuk dilakukan. Ilmu politik masa kini seharusnya memberikan penekanan utamanya kepada perubahan sosial dan bukan kepada pemeliharanya, sebagaimana tampak yang dilakukan kaum behavioralis. Kaum post-behavioralisme, ingin mengingatkan para ilmuan politik bahwa sebagai kaum intelektual mereka memiliki peranan yang harus dimainkan dalam masyarakat. Merupakan tanggung jawab mereka untuk berusaha melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan.

Secara ringkas, pendekatan ini hakikatnya menginginkan penelitian ilmu politik harus mampu memberikan solusi atas fenomena politik yang memberikan dampak kerugian materi maupun nilai dan etika. Jika diperbandingkan ketiga pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Perbedaan Pendekatan Tradisional, Behavioralisme, dan Post Behavioralisme

Tradisional	Behavioral	Post Behavioral
Lembaga-lembaga formal	Perilaku aktor-aktor politik	Substansi masalah bukan jenis penelitian tetapi pada tindakan (pemecahan masalah-masalah sosial)
Nilai-nilai dan norma-norma	Fakta	Fakta dan nilai
Filsafat	Penelitian empiris	Filsafat dan empiris

Ilmu terapan	Ilmu murni	Ilmu terapan dan ilmu murni
Histori-yuridis	Sosiologis-psikologis	Semuanya
Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif dan kuantitatif
Mencampuradukan fakta dengan nilai ; spekulatif	Memisahkan fakta dengan nilai	Fakta dan nilai bergantung pada tindakan serta relevansi antar keduanya
Keteraturan dan ketidakteraturan	Keseragaman dan keteraturan	Keteraturan atau ketidakteraturan
Deskriptif, parokial, dan negara sentris	Abstrak, konservatif secara ideologis, dan negara - sentris	Teoritis, radikal, dan berorientasi pada perubahan
Fokus pada struktur politik yang formal (konstitusi dan pemerintah)	Fokus pada struktur serta fungsi kelompok formal dan informal	Fokus pada kelompok, kelas, dan konflik antar kelompok

d. Pendekatan Neo-marxist

Kelompok Neo Marxis, membedakan dirinya dengan kelompok Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme. Kelompok ini digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang mendapatkan inspirasi dari tulisan-tulisan Marx. Cikal bakal orientasi ini adalah tulisan sarjana Hongaria, Georg Lukacs, terutama dalam karyanya yang berjudul *History and Class Consciousness*.

Kebanyakan kalangan Neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan “borjuis” dalam seperti cendekiawan yang enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis, hanya ada satu atau dua kelompok yang militan yaitu golongan kiri baru (*New Left*).

Dalam rangka analisis holistik, kelompok ini berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian tersendiri seperti politik terlepas dari ekonomi, ekonomi terlepas dari kebudayaan dan sebagainya. Semua berkaitan erat dan tidak boleh dipisahkan. Terutama kaitan antara politik dan ekonomi sangat ditekankan oleh kalangan Neo-Marxis. Sehingga jika Marxisme cenderung untuk menekankan determinasi Ekonomi maka para Neo-marxis hanya mencanangkan keunggulan (*primacy*) dari basis ekonomi, artinya ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik, tetapi politik tidak seluruhnya ditentukan ekonomi.

Fokus analisis Neo Marxist adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka mengancam analisis struktural-fungsional dari para behavioralis karena terlampaui mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial

dalam suatu sistem politik. Menurut pandangan struktural fungsional, konflik dalam masyarakat dapat diatasi melalui rasio, itikad baik dan kompromi, dan ini sangat berbeda dengan titik tolak pemikiran Neo-Marxis.

Bagi kalangan Neo marxis konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas ini. Hal ini tidak berarti bahwa kalangan Neo-Marxis ini mengabaikan konflik-konflik lain dalam masyarakat, seperti konflik etnis, agama maupun rasial. Tetapi konflik ini, menurut keyakinan mereka, langsung maupun tidak, berasal dari atau berhubungan erat dalam konflik kelas.

Berdasarkan analisis dialektik, mereka melihat sejarah seolah-olah terdorong oleh pertentangan antar dua kelas sosial, yang dulu oleh para Marxis klasik dijelaskan sebagai konflik antara mereka yang memiliki alat-alat produksi dengan mereka yang tidak memilikinya. Karena mereka menyadari bahwa konsep lama mengenai adanya dua kelas pertentangan dimasa modern tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak sesuai dengan ketaan, kalangan Neo-Marxis memberi perumusan yang lebih fleksibel dan luas dengan mencanangkan adanya dua himpunan massa (aggregates) yang sedikit banyak kohesif serta memiliki banyak fasilitas (the advantaged) dan mereka yang tidak mempunyai fasilitas (the disadvantaged).

Himpunan pertama paling dominan, dan negara mempertahankan kepentingan himpunan yang dominan itu dengan segala kekuatan yang ada untuk mempertahankan dan memperkuat dominasinya. Kelas (dalam arti yang luas) dominasi berasal dari latar belakang sosial dan pendidikan yang sama dan mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang sama pula. Dominasi mereka hanya dapat di akhiri dengan transformasi total dari keadaan yang menimbulkannya yaitu tatanan sosial politik yang ada. Kaum Neo Marxis memperjuangkan suatu perkembangan yang revolusioner serta multi linear untuk menghapuskan ketidakadilan dan membentuk tatanan masyarakat yang menurut mereka, memenuhi kepentingan seluruh masyarakat dan tidak hanya kepentingan kaum Borjuis.

Meskipun demikian, kelas yang berkuasa dapat saja mencegah usaha kelas-kelas lainnya untuk melawan dominasi melalui paksaan, konsensus, atau persuasi. Dengan demikian suatu konflik, seolah-olah tidak ada pertentangan Akan tetapi apa yang tampak sebagai harmonisebenarnya harmoni yang semu dan menyesatkan. Di bidang politik praktis mereka menginginkan desentralisasi kekuasaan dan partisipasi dalam politik untuk

semua komunitas. Demikianlah secara umum pandangan dari golongan Neo-Marxis dalam memahami masalah Sosial-Politik dan Ekonomi.

e. Pendekatan Ketergantungan

Kalangan lain yang juga berada dalam teori kiri adalah kelompok teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, tetapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah mulai dirintis antara lain oleh Paul Baran yang kemudian disusul oleh Andre Gunder Frank (Evans, 1979). Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara kurang maju (*underdeveloped*). Negara maju memang telah melepaskan jajahannya, tetapi tetap mengendalikan ekonominya.

f. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi pendekatan ini baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan *Journal Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya *Rational Choice Section* pada tahun 1994 di negara tersebut. Pengertian “Rasional” yang dimaksud berbeda dengan pengertian rasional dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa filsafat atau pendefinisian sebagai pemikiran yang sehat dan masuk akal. Namun rasional yang dimaksud adalah tindakan individu dilihat seolah-olah sebagai pertimbangan biaya (*costs*) dengan keuntungan (*benefits*), sehingga tindakan semata-mata dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi, dalam pendekatan ini, seluruh keputusan, berdasarkan nalar sehat maupun “sinting” sama-sama dipostulasikan sebagai bagian dari proses “rasional”. Pemicu lahirnya pendekatan ini adalah konteks sosial dan politik yang di Amerika Serikat yang bersifat individualistik, serta ideologi kapitalisme yang menjadi anutan mereka.

Pandangan para penganut paham pendekatan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara politik dan ekonomi. Mereka mengembangkan analisisnya dengan pertama-tama melihat sifat dasar manusia sebagai makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingannya sendiri dan egois dan selalu

mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya (Syam, 2010). Manusia harus membuat pilihan oleh karena sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun suatu skala preferensi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Pilihan ditentukan oleh pertimbangan keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal bagi dirinya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari *teori rational choice*. Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, tentu saja diakui oleh kebanyakan sosiolog, namun mereka melihat tindakan-tindakan rasional berdampingan dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat tindakan manusia sebagai tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-rasional.

Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “utility maximizing approach” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep *utility maximizing approach* mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann (1959) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan “seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapat keuntungan maksimal?”.

Konsep Teori Pilihan Rasional secara teoritik bisa sangat kuat namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah (Boudon, 2009). Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survey-survey menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun jika terjadi fenomena, sebagaimana ketidak-sesuaian hasil survey dalam contoh diawal maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menghambat penggunaan teori ini dalam berbagai aplikasinya terutama dalam psikologi politik, psikologi konsumen, dan psikologi moral. Secara konseptual, teori ini masih merupakan teori yang baik dalam memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu.

Kajian politik, terutama tentang perilaku pemilih masih sangat membutuhkan teori pilihan rasional dalam memprediksi perilaku pemilih, begitu juga psikologi konsumen yang membutuhkan prediksi bagaimana konsumen memilih produk tertentu, begitu juga psikologi moral yang membutuhkan teori ini untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan perilaku berdasarkan nilai moral tertentu. Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional

memiliki enam postulat, yaitu:

- a. setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb.,
- b. perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadiankejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu
- c. perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan
- d. bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu
- e. penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa
- f. individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

Adapun kajian tentang pilihan rasional memiliki dua prinsip utama, yaitu dominasi dan invariasi. Hal itu dijelaskan oleh Kahneman & Tversky (1984: 343) sebagai berikut:

However, all analyses of rational choice incorporate two principles: dominance and invariance. Dominance demands that if prospect A is at least as good as prospect B in every respect and better than B in at least one respect, then A should be preferred to B. Invariance requires that the preference order between prospects should not depend on the manner in which they are described

Konsep dominasi menunjukkan bahwa sesuatu (A) dipilih dari yang lain (B) karena sesuatu tersebut (A) memiliki keunggulan dari yang lain (B). Namun demikian, keunggulan tersebut tidak harus pada segala aspek namun setidaknya sesuatu yang dipilih (A) memiliki salah satu aspek yang lebih unggul daripada yang lain (B). Prinsip ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut akan sangat tergantung dari keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan konsep invariasi menunjukkan bahwa preferensi/ minat dari pemilih terhadap pilihan yang tersedia tidak tergantung pada cara pilihan tersebut digambarkan. Dengan demikian, konsep pilihan rasional mengatakan bahwa pilihan akan rasional

apabila tidak dipengaruhi oleh cara menggambarkan pilihan yang tersedia baik A maupun B seharusnya digambarkan secara setara. Dengan demikian, seseorang akan memiliki pilihan yang rasional jika A dan B dijelaskan secara netral. Kahneman & Tversky (1984) dalam artikelnya yang mendapat penghargaan dari American Psychologist pada tahun 1983 mengatakan bahwa kajian dan analisa terhadap perilaku memilih perlu memperhatikan dua sifat dari pilihan tersebut, yaitu pilihan yang beresiko dan pilihan dengan resiko minimal. Adapun contoh dari pilihan beresiko adalah apakah seseorang akan membawa payung atau tidak, termasuk apakah seseorang memutuskan untuk ikut serta dalam perang atau tidak. Sedangkan contoh dari pilihan yang minim resiko adalah pilihan dari transaksi jual beli antara pembeli dan penjual

Kritik terhadap pendekatan ini terutama berkenaan dengan pandangannya tentang sifat dasar manusia. *Pertama*, manusia tidaklah selalu rasional dan sering tidak mempunyai skala preferensi. Faktor-faktor lain, seperti: budaya, agama, sejarah, dan moralitas sering turut menentukan sikapnya. *Kedua*, pemikiran tentang sifat individualistik dan materialistik manusia terlalu berlebihan. Masih cukup banyak manusia yang bertindak untuk kepentingan orang lain dan peduli pada sesama manusia. Ada dua reaksi yang menarik untuk diperhatikan setelah kemunculan pendekatan ini. *Pertama*, munculnya perhatian pada persoalan keadilan, persamaan hak dan moralitas sebagaimana yang diangkat oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*. Keadilan dan persamaan di sini adalah bagi seluruh warga, khususnya yang tidak beruntung, yang dilaksanakan oleh institusi-institusi politik. *Kedua*, meningkatnya perhatian pada dan keinginan untuk meningkatkan peran negara di masa modern. Namun negara dalam konsepsi terbaru bukanlah negara sebagaimana dalam konsepsi para struktural fungsionalis yang hanya berperan merespon tuntutan dari luar sistem atau seperti dalam paham Neo-Marxis yang merupakan alat penindas atau arena perjuangan kelas.

4. Rangkuman

Pendekatan tradisionalis sebagai pendekatan tertua dalam kajian ilmu politik yang dekat dengan analisis kelembagaan misalnya tentang cabang trias politika eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta relasi antar ketiganya.

Sedangkan behavioral memiliki fokus “*on political actors and their behavior (or attitudes and opinions), value-free science, and the study of operationalizable questions through hypothesis formulation and empirical, quantitative*” (L. T. Ishiyama, 2011). Berbeda dengan tradisionalis

yang menitikberatkan pada analisis kelembagaan, behavioralis lebih menekankan pada aspek perilaku politik. Salah satu metode yang lazim dikenal dalam pendekatan ini adalah survei perilaku memilih. Pendekatan ini membakukan dirinya sebagai pendekatan paling ilmiah dalam kajian politik.

Sedangkan post-behavioral memiliki asumsi dasar diantaranya *(a) that political science research should be meaningful, that is, that it should address urgent political problems; (b) science and values are inextricably connected* (J.T. Ishiyama, 2011)). Pendekatan ini secara tegas mengecah pendekatan behavioralis yang terlalu mendewakan kebutuhan atas standar politik sebagai kajian ilmiah yang malah membuat peneliti menjadi “buta” terhadap realitas politik secara mendalam. Mereka juga tidak meyakini, sebagaimana pandangan behavioral, bahwa ilmu politik harus bebas nilai. Padahal, bebas nilai itu tidak mungkin terwujud dan tugas ilmuwan adalah mencari jalan keluar atau paling tidak penjelasan yang dibutuhkan atas kondisi penting yang sedang terjadi.

Sementara pendekatan pilihan rasional melihat manusia menurut pendekatan Pilihan Rasional dilihat dari sifat dasarnya sebagai makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingan sendiri dan egois. Adanya keterbatasan sumber daya, maka manusia harus membuat pilihan dan mencari cara yang paling efisien untuk mencapai tujuannya. Pilihan yang diambil didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kegunaan yang sebesar-besarnya. Dengan dasar pertimbangan ini, maka dikembangkan mengenai optimalisasi kepentingan dan efisiensi sebagai inti dari teori pilihan rasional.

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Apa saja berbagai pendekatan dan perdebatan terkait perbandingan politik? Berikan pandangan Anda.
- ii. Diskusikan kontribusi Bryce, Lowell dan Ostrogorski pada pendekatan institusi!
- iii. Diskusikan alasan mengapa terdapat kritik terhadap behavioralisme!
- iv. Apakah menurut Anda pendekatan tradisionalis lebih cocok daripada pendekatan behavioralis?
- v. Bagaimana teori pilihan rasional dapat diterapkan pada ekonomi politik?

b. Lembar Kerja Praktik

6. Evaluasi Pembelajaran

Proses evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tingkatan pemahaman akan contoh kasus yang dikemukakan serta rencana penelitian dari keempat pendekatan yang dimaksud.

7. Umpan Balik

C. Penutup

1. Rangkuman

Melalui pembelajaran tentang pendekatan utama dalam ilmu politik pada modul ini mahasiswa akan memahami berbagai pendekatan ini bermakna 2 hal, yang pertama bahwa pendekatan-pendekatan ini merupakan gambaran umum dari perkembangan politik dari sebuah ilmu normatif hingga menjadi ilmu terapan. Kedua, bahwa melalui pendekatan-pendekatan tersebut mahasiswa dapat membedakan apa saja fokus analisis dalam kajian ilmu politik. Meski ada perdebatan antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya, bukan berarti pendekatan yang ada di awal perkembangan saat ini tidak berlaku lagi.

2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Neo marxis	Kelompok pemikir pendukung dan pengkritik Karl Marx namun menyetujui tujuan akhir dari Marxisme, yaitu komunisme. Namun perbedaan mereka ada pada implementasi komunisme, upaya dan kritikan yang menjadi alasan terbentuknya komunisme.
Yuridis	Aturan hukum yang telah ada, dijalankan dan ditaati sebagai bentuk perwujudan keadilan.
Institusional	Berkaitan dengan sifat dari institusi. Fungsi, peran, dan wewenang.
Feminisme	Paham tentang gerakan kesetaraan gender, dan pemenuhan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Post	Pasca
Kekuasaan formal	Kekuasaan yang dimiliki berdasarkan aturan hukum, atau kewenangan yang sah berdasarkan aturan hukum atau aturan formal yang berlaku.
Civil society	Masyarakat sipil. Dimaknai sebagai kelompok masyarakat

	paham politik di luar negara baik itu merupakan masyarakat umum yang tersebar pada suatu wilayah, atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan pemerintah. Fungsinya adalah mengimbangi kekuasaan pemerintah, menjadi mediator pemerintah dan masyarakat, serta melakukan pendidikan serta pemberdayaan sosial.
Parokialisme	Pandangan yang didasarkan pada nilai, norma, maupun argumentasi yang sempit.
Etnosentrisme	Pandangan yang menjadikan nilai, prinsip, atau etika etnis atau budaya sendiri.
Statis	Tetap/stagnan
Komunisme	Ideologi yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas, tanpa dominasi, yang mampu mewujudkan keadilan absolut.
Fasisme	Paham yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan terutama ada pada negara, menjunjung keunggulan rasial atau elit, menolak kesetaraan, militeristik, dan menerapkan imperialisme.
Saintific	Teknik kajian ilmu pengetahuan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, empiris, dan objektif. Dengan melakukan konstruksi konsep, hukum dan prinsip melalui tahapan – tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”
Voting	Pengambilan suara
Positivis	Suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik.
Kualitatif	Pendekatan kajian yang mengedepankan penemuan makna, arti, nilai, motivasi, etos, dan sikap.
Kuantitatif	Pendekatan kajian yang berfokus pada pengalaman empiris, objektif, yang dapat dilihat dan dikuantifikasikan.
Filsafat	Berasal dari kata <i>philosophia</i> , secara harfiah bermakna "pecinta kebijaksanaan". Yang bermakna sebuah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
Empirik	Kata sifat dari empiris yang berarti berdasarkan

	pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
Konservatif	Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku, tidak ingin berubah.
Radikal	Paham yang ingin mendorong perubahan kepada kebenaran yang hakiki, atau keadaan awal mula.

3. Daftar Pustaka

- Haboddin, M. (2016, Maret). Jejak Pemikiran : Dari Tradisionalis ke Behavioralis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 17-29.
- J.T. Ishiyama, & M. (2011). *21st Political Science: A Reference Handbook*. Los Angels, London, New Delhi: Sage Publications.
- Rauf, M. (1991, April). Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik Sebuah Studi Penjajagan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7, 524-535.
- Syam, N. (2010). *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Yoyo Rohaniah, d. E. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

MODUL 3

ANALISA SISTEM POLITIK DAN TIPE PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan mempelajari berbagai teori politik, mahasiswa harus terlebih dahulu memahami konsep atau teori tentang sistem politik dan negara, yang menjadi wadah bagi keseluruhan objek analisis teori politik. Sebab sebagai teori, teori-teori dalam ilmu politik memiliki objek analisis yang terbagi dalam institusi politik dan perilaku politik dari para aktor politik. Keduanya terjadi di dalam sistem politik yang dianut atau dimiliki oleh sebuah negara.

1. Deskripsi Singkat

Pada Modul 3 ini mahasiswa akan mempelajari sistem politik sebagai salah satu sistem dalam sistem sosial. Pokok-pokok pembahasan tentang pola kerja dan institusi dalam sistem politik serta perilaku aktor politik, merupakan ruang lingkup bahasan utama tentang sistem politik itu sendiri. Selanjutnya mahasiswa akan mempelajari negara sebagai salah satu organisasi politik terbesar yang di dalamnya hidup sistem politik. Ideologi yang dianut serta bentuk sistem politik akan mempengaruhi pola perilaku dan alur kerja dalam sistem politik, tentu akan berbeda antara satu ideologi dengan ideologi lainnya. Setidaknya akan ada dua ahli utama dalam membahas tentang sistem politik yang akan menjadi objek kajian dalam sistem politik demokrasi. Sementara dalam sistem politik non demokrasi akan lebih banyak dibahas dalam modul 4, 5, dan 6.

Sementara bahasan tentang negara akan terpusat pada ruang lingkup terbentuknya negara, sifat, dan kekuasaan negara berdasarkan berbagai pendapat para ahli.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul I ini adalah:

- a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan teori politik

- c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 3 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami tipe-tipe rezim politik, sistem politik, dan tipologi sistem pemerintahan.
- b. Mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang negara.
- c. Dapat menjelaskan teori klasik dan kontemporer tentang negara.

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 3

Kegunaan atau manfaat dari Modul 3 ini adalah menolong mahasiswa memahami sistem politik sebagai sebuah sistem yang secara alamiah terjadi dalam sebuah negara. Mahasiswa juga memiliki landasan analisis dalam memahami berbagai teori tentang terbentuknya, sifat, dan ruang lingkup negara. Sistem politik menjadi unit analisis penting dalam perbandingan politik, sekaligus menjadi dasar teori yang dikembangkan oleh David Easton guna menekankan sisi empirik dari ilmu politik.

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok pembelajaran 3 dalam Modul 3 ini adalah bentuk, aktor, institusi dan cara kerja sistem politik, serta pada pembelajaran II adalah teori-teori tentang terbentuknya negara serta sifat yang dimiliki negara sebagai wadah keberadaan sistem politik.

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Teori Sistem Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami konsep tentang sistem, teori sistem politik, dan tipologi sistem atau rezim politik pemerintahan yang dipraktekkan di berbagai negara.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

a. Sistem

Sistem merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh ilmu biologi dalam menjelaskan mekanisme alam dan segala isinya, termasuk organ tubuh makhluk hidup. Sistem berasal dari kata Dengan demikian, kata “systema” berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan. Secara sederhana sistem dapat dipahami sebagai mekanisme kerja bagian-bagian dari keanggotaan sistem, yang didalamnya terdapat fungsi yang berbeda dan sifat yang saling bergantung satu sama lain. Jogiyanto mengungkapkan definisi sistem sebagai jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 1999). Anggota dalam sistem secara umum disebut sebagai sub sistem, hingga bentuk terkecil.

Sehingga makna sistem bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip dari sub-sub sistem yang saling berkaitan, berhubungan, dan bergantung satu sama lain. Sebuah sub sistem tidak akan mampu mencapai kinerja maksimal jika tidak didukung dan dipengaruhi oleh sub sistem lainnya, sehingga hubungan antara sub-sub sistem itu disebut sebagai cara kerja sistem. Oleh karena itu masing-masing sub sistem dan sistem yang satu dengan sistem lain memiliki karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. Maka untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem, perlu adanya kerja sama antara sub sistem.

Dari definisi diatas kita akan menemukan setidaknya beberapa fungsi dari sistem, seperti yang dikemukakan oleh Parsons dibawah ini (Goodman, 2004):

- i. *Adaptation*: sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal di luar dirinya dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- ii. *Goal attainment*: sebuah sistem harus memiliki tujuan utama.
- iii. *Integration*: sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya.
- iv. *Latensi* atau pemeliharaan pola: sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Maka elemen terpenting yang dapat diidentifikasi dari sistem adalah Penghubung sistem, batasan sistem lingkungan luar, masukan, keluaran, dan tujuan (Sigit, 1999).

Jogiyanto mampu menjelaskan karakteristik dari sistem sebagai berikut (Jogiyanto, 1999):

- i. **Komponen Sistem:** Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.
- ii. **Batasan Sistem (*boundary*):** Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu dengan Sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
- iii. **Lingkungan Luar Sistem (*envronment*):** Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi oprerasi sistem.
- iv. **Penghubung Sistem (*interface*):** Penghubung merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya.
- v. **Masukan Sistem (*input*):** Masukan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi.
- vi. **Keluaran Sistem (*output*):** Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.
- vii. **Pengolahan Sistem:** Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
- viii. **Sasaran atau Tujuan Sistem:** Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran, kalau tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya.

b. Sistem Sosial

Defenisi sistem diatas dapat diadaptasi dalam pemaknaan interaksi antar manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Kondisi ini secara alamiah tidak dapat dielakkan bahwa manusia tidak akan mampu hidup secara menyendiri tanpa manusia lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, maupun manusia dalam konteks intrapribadinya sendiri selalu dipengaruhi atau membutuhkan orang lain. Seperti seorang manusia yang mampu membuat pakaian, akan membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan makanannya, seorang petani membutuhkan pakaian dari manusia yang membuat pakaian serta alat pertanian dari tukang besi. Dalam konteks intrapribadi, seorang manusia akan selalu membutuhkan orang lain hanya untuk sekedar menceritakan kegelisahan hatinya, atau perilakuna terbentuk karena ingin memenuhi harapan

manusia lain yang akan berinteraksi dengan dirinya. Sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sosial adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama (Salim, 2002). Sehingga kata interaksi diatas dimaknai sebagai interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya (Basrowi, 2014).

Interaksi antara manusia baik secara individu maupun berkelompok membentuk sistem sosial. Setiap manusia memiliki karakter, kebutuhan, kepentingan, masalah, maupun tujuan masing-masing. Kesamaan hal-hal tersebut akan mendorong manusia untuk membentuk kelompok. Sehingga interaksi antar individu, kelompok dan berbagai kelompok yang lebih besar lagi (kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan tujuan akan membentuk kelompok besar), pada akhirnya disebut sebagai sistem sosial. Setiadi dan Kolip, mendefenisikan sistem sosial sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan antar elemen-elemen tersebut selanjutnya menghasilkan produk-produk interaksi itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang keadannya selalu dinamis (Kolip, 2013).

Interaksi antara berbagai kelompok sosial maupun antar individu pada tataran terendah menurut Parsons hakikatnya dipengaruhi oleh 4 faktor di bawah ini:

- i. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu: material dan moril.
- ii. Terjadi pada situasi tertentu: adanya situasi yang menjadi ajang perwujudan tujuan.
- iii. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu: aturan, nilai, norma atau etika yang mengatur upaya perwujudan tujuan dalam situasi tertentu.
- iv. Didorong oleh motivasi-motivasi tertentu: tujuan yang ingin diraih didasarkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan, terwujudnya kepentingan, atau penyelesaian masalah yang dihadapi.

Interaksi ini disebut sebagai *social action* (gerak sosial) oleh Parsons. Oleh karena itu sistem sosial sering disebut sebagai sistem terbesar yang mencakup berbagai sistem dalam kehidupan manusia yaitu sistem ekonomi, sistem politik, sistem agama, sistem budaya, dan sistem teknologi. Hal ini karena defenisi sistem sosial yang luas.

c. Sistem Politik

Sistem politik sebagai bagian dari sistem sosial secara otomatis tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi dan didukung oleh sistem lainnya yang ada dalam sistem sosial. Sebagian ahli politik menyebutnya sebagai sifat keterbukaan yang dimiliki oleh sistem politik, namun sebagian mengklaim ini adalah dominasi sistem politik yang merupakan nama lain dari negara. Namun jika negara dipandang sebagai sebuah organisasi bentukan manusia, maka kita dapat menyebutkan negara merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dalam kehidupan manusia yang lebih memudahkan disebut sebagai sistem dunia. Pada intinya sistem politik akan melahirkan luaran (*output*) yang akan mempengaruhi sistem lain dalam sistem sosial, begitupun sebaliknya luaran dari sistem lainnya akan mempengaruhi mekanisme, proses, maupun luaran sistem politik. Pendapat terkemuka adalah apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sistem politik merupakan wadah bagi setiap orang untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan atau seluruh sistem sosial (termasuk dalam berbagai sistem lainnya).

Untuk lebih jelasnya perlu dipahami dulu asal kata politik, yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*. *Polis* berarti negara-kota². Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan) dalam hidupnya di dalam *Polis*. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik (Carlton Clymer Rodee et al., 2002). Sementara Almond mendeskripsikan politik sebagai "... kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa" (Gabriel A. Almond et.al., 2004).

Terdapat 4 asumsi makna yang terkandung dalam politik menurut menurut

² Negara-kota adalah sebutan untuk wilayah di masa Athena kuno dimana sebuah negara hanya terdiri dari 30.000 hingga 40.000 penduduk yang menerapkan sistem demokrasi langsung (akan dibahas pada modul 7: demokrasi). Berbeda dengan saat ini dimana semua negara dikategorikan sebagai negara bangsa, yaitu negara yang memiliki penduduk lebih di atas 40.000 jiwa dan menerapkan sistem pemerintahan perwakilan (demokrasi perwakilan/demokrasi tidak langsung)

Andrew Heywood, antara lain:

- i. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif.
- ii. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik.
- iii. Politik sebagai kompromi dan konsensus. *Sharing* atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%.
- iv. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya.

Kekuasaan dalam politik untuk membedakan antara kekuasaan sosial dan kekuasaan privat. Sehingga pemerintahan, hubungan publik, kompromi dan konsensus, dan kekuasaan merupakan alat atau wewenang yang dimiliki oleh politik dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Setidaknya ada 4 ciri yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (MacAndrews, 1991):

- i. Ciri identifikasi. yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.
- ii. Input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.
- iii. Diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.
- iv. Integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah

satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasikan dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Keduanya adalah ahli politik yang dalam berbagai karyanya secara harafiah menyebutkan kegiatan politik sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya terdapat sub sistem administrasi dan pemerintahan serta struktur dan institusi politik lainnya. Sehingga sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, atau kebaikan bersama seperti yang dikatakan Aristoteles.

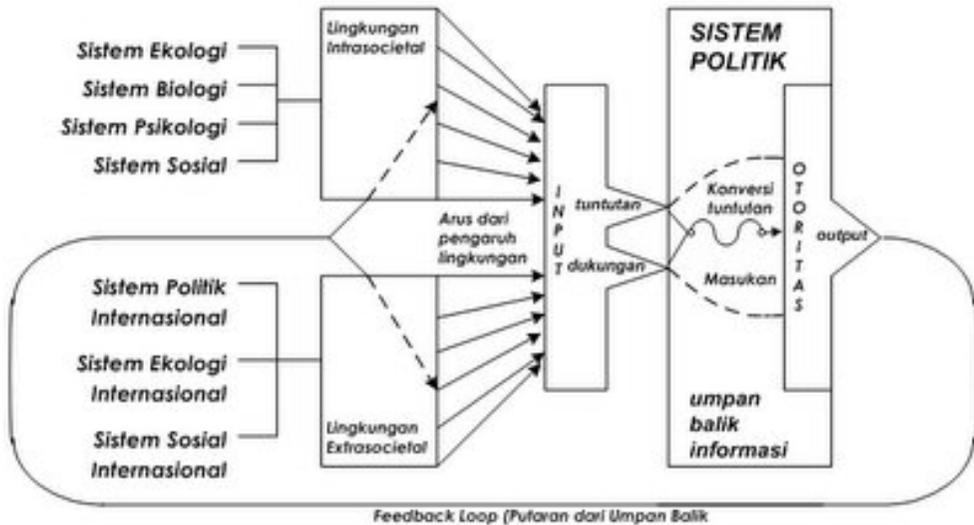
Asumsi dalam memahami sistem politik menurut David Easton antara lain (Chilcote, 1981):

- i. *Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik:* Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.
- ii. *Input-output:* *Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. *Dukungan* adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk.

Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

- iii. *Diferensiasi dalam sistem*: Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah yang dialami masyarakat.
- iv. *Integrasi dalam sistem*: Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Penggambaran sistem politik menurut David Easton dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerja Sistem Politik Menurut David Easton

Keterangan gambar, atau mekanisme kerja sistem politik menurut David Easton yaitu (Chilcote, 1981):

- i. Input terdiri atas dua jenis: *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).
- ii. Input yang sudah terstimulasi kemudian menjadi *garapan* aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun

menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu *positif (forwarding)* dan *negatif (rejecting)* kinerja sebuah sistem politik.

- iii. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik.
- iv. *Lingkungan intrasocietal* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas:
 - § Lingkungan ekologis; berkaitan dengan fisik, non manusia. Misalnya dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah dimana sistem politik ini berada.
 - § Lingkungan biologis; berhubungan dengan keturunan ras.
 - § Lingkungan psikologis; berkaitan dengan status negara sebagai negara maju, berkembang, tertinggal, bekas jajahan dan sebagainya.
 - § Lingkungan sosial; berkaitan dengan budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.
- v. Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada, yang terdiri dari:
 - § Sistem Sosial Internasional; berkaitan dengan dunia internasional seperti sistem ekonomi dunia, dan dinamika politik internasional yang mempengaruhi internal sebuah negara atau mempengaruhi kegiatan politik dalam sebuah sistem politik.
 - § Sistem ekologi internasional; berkaitan dengan kawasan geografis yang memisahkan sebuah negara berdasar benua (Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika), isu lingkungan seperti *global warming*, dan sebagainya.
 - § Sistem politik internasional. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam

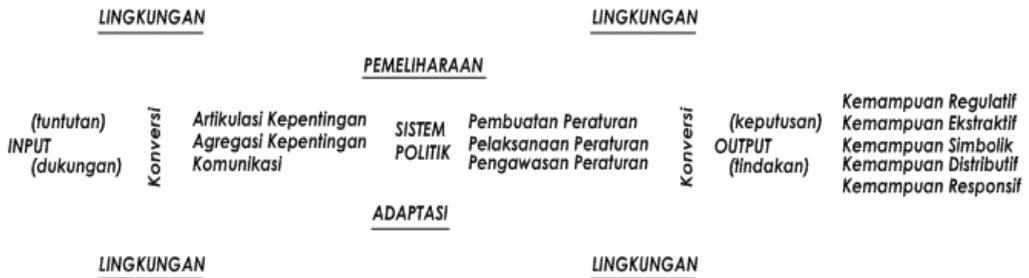
sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.

Sementara Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya tentang sistem politik dengan pendekatan Struktural Fungsional. Almond sebenarnya adalah pengkritik Easton, menurutnya Easton mengabaikan kajian politik pada skala mikro

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Sehingga suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi *input* dan *output*.

- i. Fungsi *input* adalah sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.
- ii. Fungsi *output* terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. *Output* mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik.

Titik berat dari pendapat Almond ini adalah arus komunikasi dalam sistem politik, bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis, 2000).



Gambar 2. Sistem Politik Menurut Gabriel Almond

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi (Gabrield Almond and James S, 1960). Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau *struktur-struktur*, misalnya: parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau *fungsi-fungsi* tertentu. Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya (Gabrield Almond and James S, 1960).

Contoh pentingnya lingkungan dalam sistem politik menurut Almond adalah: Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan. Dalam sistem tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional agama ataupun adat dalam semua kehidupan. Berbeda dengan sistem politik dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, sebagai salah satu prosedur demokrasi, di Indonesia tidak

dapat lepas dari lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional atau negara asing yang mengontrol jalannya Pemilu.

Sementara penjelasan mengenai ke 5 kemampuan yang dimiliki oleh sistem politik menurut Almond pada gambar 2 adalah kemampuan sistem politik mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya. Penjelasan (Gabrield Almond and James S, 1960):

- i. Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik untuk mengelola sumber-sumber material dari lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaitan dengan kuantitas sumber yang masuk ke dalam sistem politik. Misalnya, pendapatan daerah. Ukuran lainnya meliputi kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk mencapai kemampuan. Dengan kata lain, kemampuan ekstraktif berhubungan dengan potensi yang dimiliki suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya.
- ii. Kemampuan Regulatif adalah kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem. Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu.
- iii. Kemampuan Distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Tinggi rendahnya kemampuan distributif ditentukan oleh kuantitas, nilai, bidang-bidang kehidupan manusia yang diuntungkan dengan adanya distribusi tersebut.
- iv. Kemampuan Simbolis adalah kemampuan sistem politik dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjungan kenegaraan. Minimnya kepercayaan terhadap simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara.
- v. Kemampuan Responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, semakin baik pula kapabilitas responsifnya.

Sementara struktur dalam sistem politik menurut Almond yang bertugas melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan komunikasi politik, serta fungsi pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan ada 6 struktur politik atau lembaga politik. Keenam struktur politik itu antara lain,

kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan (Gabrield Almond and James S, 1960).

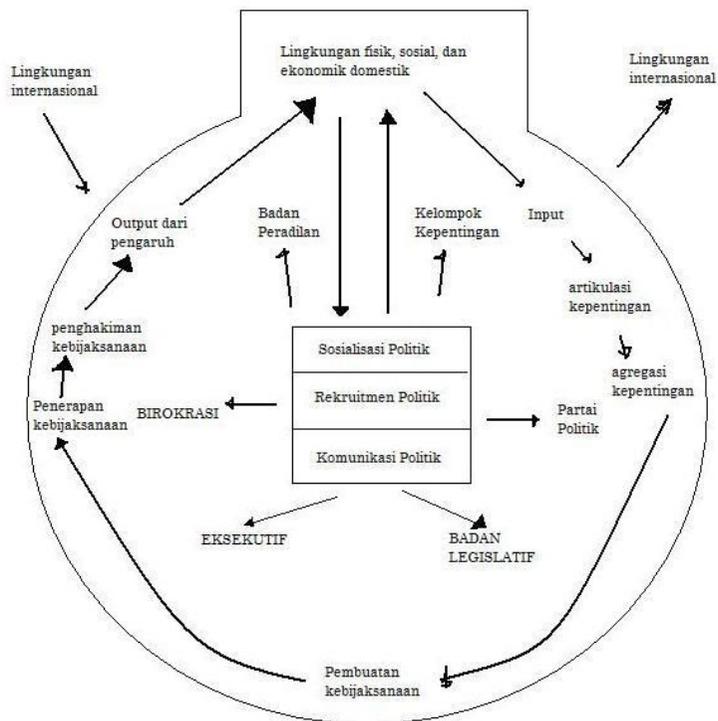
- i. Artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.
- ii. Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsinya memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan.
- iii. Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.
- iv. Pembuatan keputusan adalah proses merumuskan keputusan yang akan dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatif setelah melalui proses artikulasi dan agregasi kepentingan dari berbagai struktur diluar keduanya.
- v. Penerapan keputusan adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksananya adalah badan eksekutif.
- vi. Pengawasan keputusan atau penghakiman keputusan, dilakukan oleh badan yudikatif, agar keputusan yang diterapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi.

Jika anda ingin membandingkan dua sistem politik atau lebih maka caranya adalah membandingkan cara kerja dari sistem politik.

Sementara fungsi dari sistem politik menurut Almond adalah fungsi sosial politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan *inherent* dalam setiap sistem politik.

Ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond adalah

1. semua sistem politik mempunyai struktur politik
2. semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.
3. semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu.
4. semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan.



Gambar 3. Gambar sistem politik (struktur dan fungsi) oleh Gabriel A. Almond

Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond antara lain adalah:

Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.

Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almond berasumsi bahwa semua sistem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan perbandingan sistem politik yang seragam.

Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat dan non-”modern”. Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond:

- a. Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural-fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak menghasilkan teori).

- b. Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu lebih menitikberatkan pada penjelasan analisis.
- c. Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik.
- d. Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat.
- e. Kedua pendekatan itu juga dikritik kecenderungan ideologisnya karena cara memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton dan Almond menyamakan masyarakat dengan organisme, yang selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu mereka juga memandang masyarakat sebagai makhluk biologis yang selalu mencari keseimbangan dan keselarasan.
- f. Obsesi Almond tentang ekuilibrium dan kestabilan telah membuatnya keliru tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-ekuilibrium, seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrium bisa dipakai untuk menciptakan keadilan sosial, ketika cara-cara konvensional tidak mungkin dilakukan. Contohnya perang kemerdekaan melawan penjajah atau pemberontakan melawan kediktatoran

4. Rangkuman

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan politik sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan keputusan yang menyangkut publik. Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain. Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antaranggotanya. Pembagian kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif dalam sistem politik.

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam

struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut. Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembagalembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Setiap mahasiswa diminta untuk menjelaskan ulang secara ringkas mengenai sistem, sistem sosial, dan sistem politik.
- ii. Setiap mahasiswa diberikan harus menganalisis sistem politik di Indonesia.
- iii. Mahasiswa menemukan solusi dari hasil analisis tentang mekanisme kerja sistem politik di Indonesia.

b. Lembar Kerja Praktik

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama para tokoh yang mendefinisikan konsep tentang sistem, dan sistem politik dengan pokok-pokok pikirannya.

No	Nama Tokoh	Pokok Pikirannya
1		
2		
3		

6. Evaluasi Pembelajaran

- a. Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas definisi sistem politik.

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2: Tipe-tipe Pemerintahan dan tipe negara

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

- a. Mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang negara.
- b. Dapat menjelaskan teori klasik dan kontemporer tentang negara.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Seperti yang telah disinggung pada pembelajaran sebelumnya bahwa sistem politik merupakan nama lain dalam menyebutkan negara. Roger F. Soltau menyebutkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara-negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara (Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, 1991). Sebab kegiatan dalam sistem politik adalah kehidupan bernegara seluruhnya. Negara berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yaitu nagara atau nagari, yang berarti kota. Pemaknaannya dalam bahasa Indonesia, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Definisi lain menyebut negara sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (KBBI, 2021). Persamaan kata ini dengan bahasa lain di dunia atau dalam berbagai buku para ahli politik dari Eropa, yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis) (Huda, 2013).

Definisi negara menurut pendapat para ahli:

- a. Aristoteles: negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian (Suhino, 1980).
- b. Logemen: negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu (Mukhtar, 1971).
- c. Harold . J Laski: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan negara yang harus ditaati baik oleh individu maupun

oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Saragi, 1985).

- d. Eric Nordlinger: negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat (Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, 2010).

Dapat dirangkum bahwa negara merupakan kesatuan masyarakat, kelompok sosial, serta struktur sosial di dalamnya yang berorientasi pada tujuan bersama, yang dilakukan dengan cara menetapkan nilai, aturan, struktur serta mekanisme kerja yang dijalankan dan ditegakkan oleh segelintir masyarakat terpilih pada suatu wilayah tertentu. Diskusi tentang negara pada akhirnya membahas bagaimana mekanisme kerja penyelenggara negara, proses pembuatan keputusan dalam upaya mencapai tujuan, pola perekrutan para penyelenggara negara, nilai dan etika yang harus dianut, kekuasaan dan kewenangan, serta sifat-sifat yang dimiliki oleh negara.

Sebelum membahas kajian tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengenal berbagai teori terbentuknya negara.

- a. **Teori Ketuhanan (F. J. Stahl, Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas Mores):** Teori ini menegaskan kedudukan bentuk negara Teokrasi. Bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan. Menurut teori ini suatu negara tidak akan atau belum akan terjadi jika Tuhan belum menghendakinya. Pengakuan ini sekilas dapat dilihat dari kalimat *”Dengan Berkat Raha dalam berbagai konstitusi negara. Kepala negara/raja: sering dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Oleh karena sumber kewenangan adalah Tuhan, penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah. Rasionalitas tidak dapat dipakai untuk memahami bahwa kekuasaan Tuhan diturunkan kepada manusia yang menjadi kepala negara/raja. Perdebatannya: Jika 2 kekuasaan berperang lalu yang kalah maka mana yang kekuasaannya bersumber dari Tuhan? Bagaimana jika dalam satu negara terdapat dua atau lebih kekuasaan?.”*
- b. **Teori Hukum Alam (Aristoteles, Plato):** Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon and social being*). Kondisi ini terbentuk karena manusia yang pada awalnya hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dan berburu sebagai

upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, mengalami kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Sehingga mereka berhenti berpindah dan mulai bercocok tanam. Selanjutnya mereka menetapkan aturan agar kehidupan mereka di tempat yang mereka diami dapat menjamin kebutuhan dan keselamatan mereka sendiri. Maka diangkatlah pemimpin kelompok yang akan menjadi penegak peraturan tersebut, seiring berjalannya waktu pemimpin tersebut membutuhkan pembantu karena jumlah manusia semakin banyak. Pemimpin dan para pembantu tersebut diberi kekuasaan yang sah, atau kewenangan untuk melakukan apa saja yang disepakati agar aturan dapat ditegakkan. Teori ini berfokus pada kebutuhan alamiah manusia yang membutuhkan manusia lain untuk hidup.

- c. **Teori Perjanjian Sosial (Cicero, Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke):** teori ini mendasarkan pemikiran terbentuknya negara karena adanya perjanjian diantara manusia.

Cicero mengatakan bahwa asal mula negara adalah sebuah kota yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial, memformasi diri menjadi negara. Jadi, motivasi pemformasian negara adalah dorongan rasional untuk menciptakan ketertiban. Dengan adanya kontrak sosial ini, Cicero meyakinkan mengenai terhindarnya negara dari tirani. Bagaimana pun, kata Cicero, tirani bertentangan dengan kepentingan negara itu sendiri karena mengeskpresikan sosok manusia yang kejam.

Thomas Hobbes manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha mencapai kebahagiaan dan menolak apa yang tidak diinginkannya. Manusia akan bersaing dan bertarung satu sama lain demi mewujudkan apa yang diinginkannya. Singkatnya manusia melakukan apapun yang menurut mereka akan menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri, tanpa memandang apakah hal itu akan menyakiti yang lain. Nafsu yang menjadi penyebab semua itu bagi Hobbes harus dibatasi. Oleh karena itu manusia berupaya menghindarkan diri penghancuran dan pertumpahan darah, maka mereka membuat perjanjian tentang kekuasaan bersama. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian sosial yang akan melahirkan institusi yang memiliki kewenangan mewujudkan isi perjanjian yang pada akhirnya menghasilkan tujuan kepentingan bersama, maka terbentuklah negara. Oleh karena itu penyelenggara institusi disebut

sebagai yang mengemban kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dalam sebuah negara. Suhelmi berpendapat bahwa, bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya harus mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa tetapi pada saat yang sama raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya (Suhelmi, 2001). Hobbes memilih penguasa laki-laki daripada penguasa perempuan. Hobbes terlihat begitu fanatik pada ketertiban sosial yang diciptakan oleh sistem feodalis-patriarki Inggris (Fink, 2010).

Teori Kontrak Sosial John Locke, dititikberatkan pada upaya pemenuhan HAM seperti hak untuk memiliki hidup, bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990). Bagi Locke kekuatan politik yang dimiliki pemerintah haruslah hasil kontrak sosial masyarakat yang bebas, yang akan berubah menjadi masyarakat sipil dibawah pemerintahan berdaulat hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat. Berbeda dengan Hobbes, Locke menginginkan adanya pembagian kekuasaan pemerintah pada 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.

Teori Kontrak Sosial Rousseau, difokuskan pada kebebasan manusia. Bahwa manusia itu terlahir dari kondisi yang bebas, namun menjadi rusak ketika manusia masuk dalam kehidupan

- d. **Teori Kekuasaan (Niccolo Machiavelli)**: Negara amat ditentukan oleh bagaimana politik kekuasaan dijalankan. Negara ada bukan karena alasan moral atau hukum, tetapi karena kebutuhan politik. Politik dan kekuasaan dijalankan oleh negarawan, tetapi tidak perlu memperhatikan ajaran moral dan pertimbangan hukum. Citacita untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh harus diabaikan. Terbentuknya negara adalah karena hasil penaklukan dan kekerasan antarmanusia. Yang kuat dan mampu menguasai yang lain membentuk negara dan memaksakan haknya untuk menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan dalam teori ini adalah

kekuatan itu sendiri, karena kekuatan itu yang membenarkan kekuasaan dan kewenangan.

- e. **Teori Penaklukan:** teori ini memandang negara terbentuk karena adanya sekelompok manusia menaklukan manusia lainnya. Meski pendapat ini dilihat dari penaklukan yang dilakukan oleh kelompok pastoralis (agama) terhadap masyarakat pertanian. Pasca penaklukan, para penakluk akan menegaskan kekuasaannya atas kelompok yang ditaklukan. Mereka membentuk institusi sosial dan nilai yang menjadi penguat kekuasaan mereka. Bahkan mereka akan melakukan rotasi penguasa diantara mereka saja. Penaklukan ini dilakukan dalam bentuk pemberontakan, proklamasi, peleburan atau penguasaan.
- f. **Teori Kedaulatan (Jean Bodin):** Bodin berpendapat bahwa negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Para keluarga, yang menjadi basis berdirinya negara, menyerahkan beberapa hal menjadi urusan negara yang kemudian membuat kekuasaan negara dibatasi tindakannya menurut moralitas hukum alam. Raja sebagai pemimpin yang berkuasa disampiri oleh atribut kedaulatan yang bersifat, *pertama*, tunggal. Ini berarti hanya negara yang memiliki segalanya jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lain yang membuat UU atau hukum. *Kedua*, asli, yang berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, bukan diberikan atau diturunkan dari kekuasaan lain. *Ketiga*, abadi. Kekuasaan tertinggi ada pada negara. *Keempat*, tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- g. **Teori Garis Keturunan:** Teori ini menganggap negara terbentuk karena adanya sebuah keluarga yang berkembang menjadi besar dan bersatu hingga akhirnya membentuk negara. Teori ini dibagi dalam dua perspektif; *Pertama* Patrilineal, pendekatan ini melihat garis keturunan ayah sebagai kepala keluarga membentuk kekuasaannya melalui garis keturunannya, laki-laki. *Kedua*, Matrilineal, yang memandang kekuasaan itu meski tetap laki-laki yang memiliki, namun garis keturunan penguasa diberikan kepada keluarga perempuan.

- h. **Teori Pengalihan Hak:** Teori ini melihat negara terbentuk karena memang kekuasaan raja itu bisa diterima dan ditolak oleh masyarakat yang dikuasai. Sehingga kekuasaan yang dimiliki bisa beralih kepada penguasa baru yang membentuk negara dengan bentuk kekuasaan yang baru. Seperti negara-negara yang terbentuk akibat penjajahan.
- i. **Teori Historis:** Teori ini mendeskripsikan asal mula terbentuknya negara adalah melalui proses perkembangan secara evolusioner. Berubah secara bertahap, pada satu aspek hingga secara menyeluruh terjadi perubahan. Lembaga negara terbentuk karena adanya kebutuhan manusia, perkembangan zaman, serta kondisi lingkungan hingga akhirnya berkembang seperti negara yang saat ini kita lihat.

Selain berbagai teori di atas yang melihat pembentukan negara terjadi secara primer, namun ada pandangan lain yang melihat negara terbentuk secara sekunder. Yaitu negara terbentuk secara:

- a. **De Facto:** Merupakan pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya negara baru. Bersifat sementara karena negara baru yang terbentuk tersebut masih dipertanyakan apakah telah melalui prosedur hukum.
- b. **De Jure:** Merupakan pengakuan seluas-luasnya terhadap munculnya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.

Kedua proses ini terjadi setelah melalui Pendudukan (*Occupatie*), Peleburan (*Fusi*), Penyerahan (*Cessie*), Penaikan (*Accesie*), Penguasaan/ Pencaplokan (*Anexatie*), Proklamasi (*Proclamation*), Pembentukan baru (*Innovation*), dan Pemisahan (*Separatisme*).

Meski negara terbentuk secara sekunder maupun primer, secara umum dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur non fisik yang menjadi pembentuk negara, yaitu:

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan yang mandiri.
- d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.

Sementara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, negara harus mempunyai empat unsur konstitutif:

- a. Harus Ada Penghuni
- b. Harus Ada Wilayah
- c. Harus Ada Kekuasaan Tertinggi
- d. Kesanggupan Berhubungan Dengan Negara-negara Lain.

Selanjutnya yang terpenting dari sebuah negara adalah bagaimana kekuasaan atau kewenangan dijalankan. Mulai dari mekanisme pergantian penguasa, etika atau batas implementasi kekuasaan, struktur yang mendukung penguasa menjalankan kewenangannya, serta pola keterlibatan masyarakat dan organisasi non pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan bernegara.

Semua itu dapat dijelaskan ketika kita menyinggung bagaimana bentuk negara, bahwa ada 2 bentuk negara yang secara umum dapat diidentifikasi, yaitu bentuk horizontal dan vertikal. 2 bentuk negara itu adalah:

- a. **Secara Vertikal.** Bentuk negara ini dibagi berdasarkan tingkatan pemerintahan seperti bentuk negara, federasi, konfederasi dan negara kesatuan. (i) **Konfederasi** adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara berdaulat untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern. Mereka bersatu berdasarkan perjanjian internasional dan menyelenggarakan alat kelengkapan dengan kekuasaan tertentu, dan memiliki wewenang atas negara anggota konfederasi tapi tidak dengan warga negaranya. Bentuk ini dapat ditemukan pada masa kejayaan romawi kuno. Meskipun pada awalnya *European Union* (Uni Eropa) dapat dikategorikan sebagai negara konfederasi namun dalam perkembangannya Uni Eropa memiliki simbol-simbol kenegaraan, mengatur aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya negara anggota (28 negara Eropa), maka Uni Eropa dikategorikan sebagai (ii) **Negara Superstruktural (*Super State*)**. Dampaknya adalah mulai hilangnya kedaulatan negara anggota, jika sampai pada kondisi yang lebih luas lagi pengaruhnya maka *Super State* ini bisa menjadi awal berdirinya negara federasi. (iii) **Federasi**, adalah bentuk negara yang didasarkan pada kesepakatan tentang kepentingan, identitas, dan integritas anggotanya. Selanjutnya mereka bersepakat tentang apa yang menjadi kepentingan dan tujuan yang sama berlaku bagi seluruh anggota negara (negara bagian). Sehingga negara federasi disebut sebagai negara yang

terdiri dari berbagai negara kecil dengan satu pemerintahan nasional (negara federal) mengurus aturan dan mewujudkan tujuan bersama). Hal ini karena kata federasi bermakna serikat atau perserikatan, dimana setiap anggota negara menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah pusat. Hak atau kewenangan negara federal antara lain mencetak uang, mengadakan perjanjian internasional, keamanan, maupun ekonomi makro. Sementara kekuasaan politik pada legislatif merupakan hasil dari keputusan negara-negara bagian, sementara eksekutif diperoleh melalui pemilu pada negara bagian. Contoh negara federasi dapat dilihat dari apa yang diterapkan Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan sebagainya. Meskipun begitu tidak banyak kesamaan antara negara-negara tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi definisi negara federasi, karena hakikatnya bentuk federasi lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan sejarah politik sebuah negara. (iv) **Negara Kesatuan**, merupakan bentuk negara yang kekuasaan dan praktek penyelenggaraan negaranya terpusat pada pemerintah pusat, namun menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada struktur di bawahnya (pemerintah daerah, atau badan pemerintahan lebih kecil dengan sebutan lainnya). Sehingga sistem pemerintahan pada negara kesatuan berbentuk hirarkis terpusat keatas. Namun negara kesatuan memiliki kecenderungan otoriter atau totaliter, maka terjadi pembagian kekuasaan melalui bentuk otonomi daerah (desentralisasi). Meskipun begitu negara kesatuan sering dipuji karena kekuatan integrasinya membuat negara kesatuan lebih kokoh dibandingkan negara federasi dan konfederasi apalagi negara *super state*.

- b. **Secara Horizontal**. Merupakan bentuk negara yang didasarkan pada fungsi di dalam negara tersebut. Bentuk penyelenggaraan negara dibagi dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda. Hal ini dapat diterapkan dalam negara kesatuan, federasi, konfederasi, maupun *super state*. Pembahasan tentang ini akan lebih banyak jika dibahas dalam konteks kekuasaan negara dibawah ini.

2 bentuk kekuasaan negara:

- a. **Secara Horizontal (pemisahan kekuasaan)**. Bentuk negara secara horizontal ini adalah bentuk negara yang pemisahan

kekuasaannya dilakukan berdasarkan fungsinya. Disebut sebagai pemisahan kekuasaan, karena hakikatnya tidak ada organisasi tunggal yang mampu melaksanakan tugas-tugas negara, meski ada kenyataan berbagai lembaga negara yang memiliki dapat dikontrol oleh 1 orang atau 1 partai. Kita dapat menemukan pembahasan ini dalam konteks Trias Politika. Meski pandangan Montesquieu tentang Trias Politika adalah yang paling banyak diterapkan di berbagai negara saat ini, namun pandangannya terilhami oleh pendapat John Locke. Menurut Locke ada 3 macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perUUan (*legislative*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang dinamakan kekuasaan *federative* (Wirjono, 1983). Pandangan Locke ini dilihat oleh Montesquieu tidak sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan negara, sebab ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.

Selanjutnya ada Vollenhoven yang mengajukan bentuk pemisahan kekuasaan fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan (Asshiddiqie, 2006).

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari kekuasaan eksekutif (kekuasaan penyelenggaraan UU tetapi berfokus pada politik luar negeri), legislatif (membuat UU), dan yudikatif (peradilan atas pelanggaran UU).

Pembagian kekuasaan ini tidak bisa semata-mata diterapkan tanpa adanya pengawasan dan keseimbangan antara ketiganya. Oleh karena itu para ahli mengajukan bentuk-bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara.

- b. Secara Vertikal (pembagian kekuasaan).** Kekuasaan negara secara vertikal adalah kekuasaan yang dimiliki berdasarkan tingkatan struktur. Semakin kecil struktur dari sebuah lembaga negara maka semakin kecil pula kekuasaan yang dimiliki. Setelah melalui proses pembagian kekuasaan, kekuasaan pada tingkatan

dibawah eksekutif, legislatif, dan yudikatif membentuk struktur hingga terkecil agar mampu menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat hingga unsur terkecil. Seperti pada negara kesatuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga pada satuan masyarakat terkecil. Sementara pada negara federasi dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan pemerintah kota. Sementara pada negara konfederasi dan *super state*, dari pemerintah uni, pemerintah nasional negara berdaulat, dan seterusnya berdasarkan bentuk masing-masing negara. Karena anggota negara konfederasi dan *super state* bisa saja memiliki bentuk negara federal maupun kesatuan (lihat bentuk negara-negara Eropa).

Berdasarkan tujuan terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, serta kekuasaan yang dimiliki oleh negara, maka kita dapat merumuskan sifat-sifat yang dimiliki oleh negara, antara lain:

- a. Sifat Memaksa, negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal.
- b. Sifat Monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat.
- c. Sifat Mencakup Semua (*All-Embracing*), yaitu semua peraturan perUUan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

Sifat yang dimiliki negara tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada banyak tujuan negara, namun menurut Charles E. Merriam negara bertujuan untuk (Budiardjo, 2000):

- a. Keamanan keluar, adalah suatu tujuan negara yang identik dengan perlindungan. Dengan kehadiran negara, maka diperoleh jaminan perlindungan negara terhadap serangan-serangan dari luar terhadap kelompok-kelompok, individu-individu, serta komponen yang berada dalam negara itu sendiri.
- b. Ketertiban di dalam, ini berkaitan dengan pembagian kerja dan tanggungjawab atas peraturan terhadap segenap petugas-petugas negara. Terdapat pula badan-badan, prosedur, dan usaha-usaha yang dimengerti dan diterima oleh segenap warga negara dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.
- c. Keadilan, ini berkaitan dengan upaya perwujudan kesejahteraan yang didasarkan pada saling pengertian dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap orang yang telah disetujui dan

dianggap patut. Keadilan mengumpamakan adanya sistem nilai dalam perhubungan individu, agar setiap orang memperoleh bagiannya berdasarkan nilai-nilai itu. Dan untuk itu, negara harus selalu terus menerus mengupayakan keadilan bagi semua yang berada dalam teritori kekuasaannya.

- d. Kesejahteraan umum, meliputi keamanan, keadilan, kebebasan, tugas-tugas pencegahan ancaman-ancaman bahaya alam maupun non alam. Sehingga warga negara mampu mewujudkan keinginan, kepentingan, maupun kebutuhan dirinya.
- e. Kebebasan, pada satu sisi dipahami sebagai kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat individu, namun harus tetap memperhatikan kepentingan umum.

Ke 5 tujuan ini harus dilakukan oleh negara secara bersamaan tanpa mengkhususkan pada satu tujuan. Implementasi tujuan yang secara sama dan seimbang ini ditujukan pada semua orang secara setara juga tanpa mengistimewakan salah satu kelompok atau individu tertentu.

Setiap warga negara harus mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan kebebasan dan kedaulatan dirinya kepada negara, sehingga yang terpenting dalam sebuah negara adalah mewujudkan kepentingan umum atau kebaikan bersama. Sehingga pemerintah atau pengelola penyelenggaraan negara memiliki kedaulatan atas upaya perwujudan tujuan negara itu. Kedaulatan adalah superioritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membuat, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan aturan hukum, agar terjaga upaya pencapaian tujuan negara. Orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan ini berasal dari masyarakat, untuk posisi eksekutif, legislatif dan pegawai pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum dan seleksi, ini khusus pada negara demokrasi. Sementara pada negara yang bersifat otoriterian biasanya melalui penunjukkan. Bagi Aristoteles para pejabat pemerintahan ini haruslah orang-orang yang memiliki keunggulan diri yang terlepas dari kepentingan pribadi, yang disebutnya sebagai *philosopher king*. Jika melalui pemilihan umum, upaya ini dilakukan melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Dengan mengajukan anggota terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat. Sementara jika melalui proses seleksi, dilakukan dengan cara semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan, jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh aturan hukum (pembahasan mengenai ini akan dibahas pada modul 7; Demokrasi).

Mendiskusikan kedaulatan negara hakikatnya ada beberapa pandangan, yang berkaitan dengan terbentuknya negara maupun praktek dalam negara itu sendiri. beberapa teori tentang kedaulatan antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015):

- a. Teori Kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan Tuhan menjelma dalam aturan hukum yang harus dipatuhi kepala negara dan warga negara. Sehingga teori ini dijadikan sebagai dasar dalam konsep negara Teokrasi (*Theos* – Tuhan, *Katein* – memerintah).
- b. Teori Kedaulatan Raja. Teori ini bermakna kekuasaan tertinggi negara ada pada raja atau satu penguasa. Semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang yaitu di tangan raja atau ratu. Pengelolaan negara tergantung pada kehendak raja/ratu.
- c. Teori Kedaulatan Negara. Kedaulatan dalam teori ini berada di tangan negara selaku badan hukum yang menyelenggarakan kekuasaannya melalui organ dan aparturnya, dalam hal ini segalanya demi negara karena ditekankan bahwa negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak yang sah. Teori kedaulatan negara ini kemudian disalahgunakan oleh Komunisme sehingga muncul istilah anak negara, buruh negara, bahkan ternak negara.
- d. Teori Kedaulatan Hukum. Teori ini merupakan antitesis terhadap teori kedaulatan negara dan raja. Ajaran teori ini bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Hukum bersumber dari kesadaran hukum dan budaya setiap orang. Maka urusan negara maupun praktek penyelenggaraan negara dan kehidupan dalam negara didasarkan pada aturan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara lembaga peradilan, hakim, diberikan kewenangan untuk menilai implementasi hukum, namun mereka pun dibatasi oleh aturan hukum dan etika profesi mereka sendiri.
- e. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori ini alurnya dilalui mulai dari penentuan hak pilih oleh masyarakat, dan menyerahkan kedaulatannya kepada orang terpilih dan kewenangan yang telah disiapkan oleh lembaga negara yang ditempati orang terpilih tersebut. Maka rakyatlah yang berdaulat atas negara, kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara adalah kekuasaan rakyat yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Tabel 1. Teori Kedaulatan dan Sifat Pemerintahannya

Teori kedaulatan	Sifat pemerintahan
Kedaulatan tuhan	Teosentris – teokrasi
Kedaulatan raja	Monarki
Kedaulatan negara	Fasisme – otoriterian

Kedaulatan hukum	Nomokratis
Kedaulatan rakyat	Demokratis

Sifat pemerintahan berdasarkan teori kedaulatan ini hakikatnya diinterpretasikan bermacam-macam dalam prakteknya di dunia. Perkembangan sejarah negara-negara di dunia dari masa ke masa mengalami berbagai bentuk, secara umum kekuasaan itu

- a. *Timocracy* atau negara yang dijalankan oleh militer.
- b. *Plutocracy* atau pemerintahan oleh orang kaya.
- c. *Oligarchy* atau pemerintahan oleh segelintir orang yang menggunakan materi untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih banyak.
- d. *Democracy* atau pemerintahan oleh semua orang dengan batasannya adalah aturan hukum karena kekuasaannya berasal dari rakyat.
- e. *Mobocracy* atau pemerintahan oleh orang banyak
- f. *Tyrani* yang merupakan pemerintahan terburuk oleh seorang penguasa yang “bertangan besi”.
- g. *Aristokrasi* atau pemerintahan yang dijalankan oleh para aristokrat.
- h. *Monarchy* atau pemerintahan yang dijalankan oleh raja/ratu atau kaum bangsawan.
- i. *Teokrasi* atau negara yang dijalankan oleh para pemuka agama menggunakan doktrin tentang keTuhanan.

Sifat-sifat pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di dunia sangat bermacam-macam jenisnya, pada satu negara dengan negara lain nama dan wewenang yang dimiliki bisa saja berbeda. Sehingga mahasiswa pengguna BMP ini jika ingin mendalami sistem pemerintahan perlu membaca studi tentang sistem pemerintahan di berbagai negara secara mendalam namun tidak bisa digeneralisir.

Diantara berbagai sistem pemerintahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Monarki absolut: raja/ratu memiliki kekuasaan penuh yang dibantu oleh para menteri dan tingkatan pemerintahan di daerah oleh para raja-raja kecil atau pemimpin yang ditunjuk raja. Namun pada praktek di negara lain, bisa saja pemimpin daerah dipilih oleh rakyat secara langsung namun harus tunduk pada kewenangan raja.

- b. Monarki parlementer/konstitusional: raja/ratu menjalankan kekuasaannya sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen (legislatif). Sementara anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Maka raja/ratu berperan sebagai simbol negara yang akan menjalankan fungsi-fungsi integrasi, agama, sosial dan budaya.
- c. Presidensial: presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif secara seimbang. Meski pada beberapa negara presiden berkuasa mutlak tanpa legislatif atau lembaga legislatif hanyalah “topeng”.

Pembahasan mengenai sifat-sifat pemerintahan tidak akan dibahas semuanya dalam BMP ini. Pada modul-modul berikutnya akan dibahas beberapa diantaranya karena saat ini yang paling mayoritas dijalankan oleh negara-negara di dunia.

2.1 TEORI TENTANG NEGARA

Seperti yang telah disinggung pada pembelajaran sebelumnya bahwa sistem politik merupakan nama lain dalam menyebutkan negara. Roger F. Soltau menyebutkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara-negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara (Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, 1991). Sebab kegiatan dalam sistem politik adalah kehidupan bernegara seluruhnya. Negara berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yaitu nagara atau nagari, yang berarti kota. Pemaknaannya dalam bahasa Indonesia, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Defenisi lain menyebut negara sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (KBBI, 2021). Persamaan kata ini dengan bahasa lain di dunia atau dalam berbagai buku para ahli politik dari Eropa, yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis) (Huda, 2013).

Definisi negara menurut pendapat para ahli:

- a. Aristoteles: negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian (Suhino, 1980).

- b. Logemen: negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu (Mukhtar, 1971).
- c. Harold . J Laski: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan negara yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Saragi, 1985).
- d. Eric Nordlinger: negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat (Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, 2010).

Dapat dirangkum bahwa negara merupakan kesatuan masyarakat, kelompok sosial, serta struktur sosial di dalamnya yang berorientasi pada tujuan bersama, yang dilakukan dengan cara menetapkan nilai, aturan, struktur serta mekanisme kerja yang dijalankan dan ditegakkan oleh segelintir masyarakat terpilih pada suatu wilayah tertentu. Diskusi tentang negara pada akhirnya membahas bagaimana mekanisme kerja penyelenggara negara, proses pembuatan keputusan dalam upaya mencapai tujuan, pola perekrutan para penyelenggara negara, nilai dan etika yang harus dianut, kekuasaan dan kewenangan, serta sifat-sifat yang dimiliki oleh negara.

Sebelum membahas kajian tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengenal berbagai teori terbentuknya negara.

- a. **Teori Ketuhanan (F. J. Stahl, Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas Mores):** Teori ini menegaskan kedudukan bentuk negara Teokrasi. Bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan. Menurut teori ini suatu negara tidak akan atau belum akan terjadi jika Tuhan belum menghendakinya. Pengakuan ini sekilas dapat dilihat dari kalimat *"Dengan Berka t R a h m a dalam T u h a n* berbagai konstitusi negara. Kepala negara/raja: sering dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Oleh karena sumber kewenangan adalah Tuhan, penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah. Rasionalitas tidak dapat dipakai untuk memahami bahwa kekuasaan Tuhan diturunkan kepada manusia

yang menjadi kepala negara/raja. *Perdebatannya: Jika 2 kekuasaan berperang lalu yang kalah maka mana yang kekuasaannya bersumber dari Tuhan? Bagaimana jika dalam satu negara terdapat dua atau lebih kekuasaan?*

- b. **Teori Hukum Alam (Aristoteles, Plato):** Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon and social being*). Kondisi ini terbentuk karena manusia yang pada awalnya hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dan berburu sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, mengalami kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Sehingga mereka berhenti berpindah dan mulai bercocok tanam. Selanjutnya mereka menetapkan aturan agar kehidupan mereka di tempat yang mereka diami dapat menjamin kebutuhan dan keselamatan mereka sendiri. Maka diangkatlah pemimpin kelompok yang akan menjadi penegak peraturan tersebut, seiring berjalannya waktu pemimpin tersebut membutuhkan pembantu karena jumlah manusia semakin banyak. Pemimpin dan para pembantu tersebut diberi kekuasaan yang sah, atau kewenangan untuk melakukan apa saja yang disepakati agar aturan dapat ditegakkan. Teori ini berfokus pada kebutuhan alamiah manusia yang membutuhkan manusia lain untuk hidup.
- c. **Teori Perjanjian Sosial (Cicero, Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke):** teori ini mendasarkan pemikiran terbentuknya negara karena adanya perjanjian diantara manusia. **Cicero** mengatakan bahwa asal mula negara adalah sebuah kota yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial, memformasi diri menjadi negara. Jadi, motivasi pemformasian negara adalah dorongan rasional untuk menciptakan ketertiban. Dengan adanya kontrak sosial ini, Cicero meyakinkan mengenai terhindarnya negara dari tirani. Bagaimana pun, kata Cicero, tirani bertentangan dengan kepentingan negara itu sendiri karena mengeskpresikan sosok manusia yang kejam. **Thomas Hobbes** manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha mencapai kebahagiaan dan menolak apa yang tidak diinginkannya. Manusia akan bersaing dan bertarung satu sama lain demi mewujudkan apa yang diinginkannya. Singkatnya manusia melakukan apapun yang menurut mereka akan menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri, tanpa memandang apakah hal

itu akan menyakiti yang lain. Nafsu yang menjadi penyebab semua itu bagi Hobbes harus dibatasi. Oleh karena itu manusia berupaya menghindarkan diri penghancuran dan pertumpahan darah, maka mereka membuat perjanjian tentang kekuasaan bersama. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian sosial yang akan melahirkan institusi yang memiliki kewenangan mewujudkan isi perjanjian yang pada akhirnya menghasilkan tujuan kepentingan bersama, maka terbentuklah negara. Oleh karena itu penyelenggara institusi disebut sebagai yang mengemban kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dalam sebuah negara. Suhelmi berpendapat bahwa, bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya harus mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa tetapi pada saat yang sama raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya (Suhelmi, 2001). Hobbes memilih penguasa laki-laki daripada penguasa perempuan. Hobbes terlihat begitu fanatik pada ketertiban sosial yang diciptakan oleh sistem feodalis-patriarki Inggris (Fink, 2010).

Teori Kontrak Sosial John Locke, dititikberatkan pada upaya pemenuhan HAM seperti hak untuk memiliki hidup, bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990). Bagi Locke kekuatan politik yang dimiliki pemerintah haruslah hasil kontrak sosial masyarakat yang bebas, yang akan berubah menjadi masyarakat sipil dibawah pemerintahan berdaulat hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat. Berbeda dengan Hobbes, Locke menginginkan adanya pembagian kekuasaan pemerintah pada 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.

Teori Kontrak Sosial Rousseau, difokuskan pada kebebasan manusia. Bahwa manusia itu terlahir dari kondisi yang bebas, namun menjadi rusak ketika manusia masuk dalam kehidupan

- d. **Teori Kekuasaan (Niccolo Machiavelli):** Negara amat ditentukan oleh bagaimana politik kekuasaan dijalankan. Negara ada bukan karena alasan moral atau hukum, tetapi karena kebutuhan politik. Politik dan kekuasaan dijalankan oleh negarawan, tetapi tidak perlu memperhatikan ajaran moral dan pertimbangan hukum. Citacita untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh harus diabaikan. Terbentuknya negara adalah karena hasil penaklukan dan kekerasan antarmanusia. Yang kuat dan mampu menguasai yang lain membentuk negara dan memaksakan haknya untuk menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan dalam teori ini adalah kekuatan itu sendiri, karena kekuatan itu yang membenarkan kekuasaan dan kewenangan.
- e. **Teori Penaklukan:** teori ini memandang negara terbentuk karena adanya sekelompok manusia menaklukan manusia lainnya. Meski pendapat ini dilihat dari penaklukan yang dilakukan oleh kelompok pastoralis (agama) terhadap masyarakat pertanian. Pasca penaklukan, para penakluk akan menegaskan kekuasaannya atas kelompok yang ditaklukan. Mereka membentuk institusi sosial dan nilai yang menjadi penguat kekuasaan mereka. Bahkan mereka akan melakukan rotasi penguasa diantara mereka saja. Penaklukan ini dilakukan dalam bentuk pemberontakan, proklamasi, peleburan atau penguasaan.
- f. **Teori Kedaulatan (Jean Bodin):** Bodin berpendapat bahwa negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Para keluarga, yang menjadi basis berdirinya negara, menyerahkan beberapa hal menjadi urusan negara yang kemudian membuat kekuasaan negara dibatasi tindakannya menurut moralitas hukum alam. Raja sebagai pemimpin yang berkuasa disampiri oleh atribut kedaulatan yang bersifat, *pertama*, tunggal. Ini berarti hanya negara yang memiliki segalanya jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lain yang membuat UU atau hukum. *Kedua*, asli, yang berarti kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, bukan diberikan atau diturunkan dari kekuasaan lain. *Ketiga*, abadi. Kekuasaan tertinggi ada pada negara. *Keempat*, tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

- g. **Teori Garis Keturunan:** Teori ini menganggap negara terbentuk karena adanya sebuah keluarga yang berkembang menjadi besar dan bersatu hingga akhirnya membentuk negara. Teori ini dibagi dalam dua perspektif; *Pertama* Patrilineal, pendekatan ini melihat garis keturunan ayah sebagai kepala keluarga membentuk kekuasaannya melalui garis keturunannya, laki-laki. *Kedua*, Matrilineal, yang memandang kekuasaan itu meski tetap laki-laki yang memiliki, namun garis keturunan penguasa diberikan kepada keluarga perempuan.
- h. **Teori Pengalihan Hak:** Teori ini melihat negara terbentuk karena memang kekuasaan raja itu bisa diterima dan ditolak oleh masyarakat yang dikuasai. Sehingga kekuasaan yang dimiliki bisa beralih kepada penguasa baru yang membentuk negara dengan bentuk kekuasaan yang baru. Seperti negara-negara yang terbentuk akibat penjajahan.
- i. **Teori Historis:** Teori ini mendeskripsikan asal mula terbentuknya negara adalah melalui proses perkembangan secara evolusioner. Berubah secara bertahap, pada satu aspek hingga secara menyeluruh terjadi perubahan. Lembaga negara terbentuk karena adanya kebutuhan manusia, perkembangan zaman, serta kondisi lingkungan hingga akhirnya berkembang seperti negara yang saat ini kita lihat.

Selain berbagai teori diatas yang melihat pembentukan negara terjadi secara primer, namun ada pandangan lain yang melihat negara terbentuk secara sekunder. Yaitu negara terbentuk secara:

- a. **De Facto:** Merupakan pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya negara baru. Bersifat sementara karena negara baru yang terbentuk tersebut masih dipertanyakan apakah telah melalui prosedur hukum.
- b. **De Jure:** Merupakan pengakuan seluas-luasnya terhadap munculnya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.

Kedua proses ini terjadi setelah melalui Pendudukan (*Occupatie*), Peleburan (*Fusi*), Penyerahan (*Cessie*), Penaikan (*Accesie*), Penguasaan/ Pencaplokan (*Anexatie*), Proklamasi (*Proclamation*), Pembentukan baru (*Innovation*), dan Pemisahan (*Separatisme*).

Meski negara terbentuk secara sekunder maupun primer, secara umum dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur non fisik yang menjadi pembentuk negara, yaitu:

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan yang mandiri.
- d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.

Sementara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, negara harus mempunyai empat unsur konstitutif:

- a. Harus Ada Penghuni
- b. Harus Ada Wilayah
- c. Harus Ada Kekuasaan Tertinggi
- d. Kesanggupan Berhubungan Dengan Negara-negara Lain.

Selanjutnya yang terpenting dari sebuah negara adalah bagaimana kekuasaan atau kewenangan dijalankan. Mulai dari mekanisme pergantian penguasa, etika atau batas implementasi kekuasaan, struktur yang mendukung penguasa menjalankan kewenangannya, serta pola keterlibatan masyarakat dan organisasi non pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan bernegara.

Semua itu dapat dijelaskan ketika kita menyinggung bagaimana bentuk negara, bahwa ada 2 bentuk negara yang secara umum dapat diidentifikasi, yaitu bentuk horizontal dan vertikal. 2 bentuk negara itu adalah:

- a. **Secara Vertikal.** Bentuk negara ini dibagi berdasarkan tingkatan pemerintahan seperti bentuk negara, federasi, konfederasi dan negara kesatuan. (i) **Konfederasi** adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara berdaulat untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern. Mereka bersatu berdasarkan perjanjian internasional dan menyelenggarakan alat kelengkapan dengan kekuasaan tertentu, dan memiliki wewenang atas negara anggota konfederasi tapi tidak dengan warga negaranya. Bentuk ini dapat ditemukan pada masa kejayaan romawi kuno. Meskipun pada awalnya *European Union* (Uni Eropa) dapat dikategorikan sebagai negara konfederasi namun dalam perkembangannya Uni Eropa memiliki simbol-simbol kenegaraan, mengatur aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya negara anggota (28

negara Eropa), maka Uni Eropa dikategorikan sebagai **(ii) Negara Superstruktural (*Super State*)**. Dampaknya adalah mulai hilangnya kedaulatan negara anggota, jika sampai pada kondisi yang lebih luas lagi pengaruhnya maka *Super State* ini bisa menjadi awal berdirinya negara federasi. **(iii) Federasi**, adalah bentuk negara yang didasarkan pada kesepakatan tentang kepentingan, identitas, dan integritas anggotanya. Selanjutnya mereka bersepakat tentang apa yang menjadi kepentingan dan tujuan yang sama berlaku bagi seluruh anggota negara (negara bagian). Sehingga negara federasi disebut sebagai negara yang terdiri dari berbagai negara kecil dengan satu pemerintahan nasional (negara federal) mengurus aturan dan mewujudkan tujuan bersama). Hal ini karena kata federasi bermakna serikat atau perserikatan, dimana setiap anggota negara menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah pusat. Hak atau kewenangan negara federal antara lain mencetak uang, mengadakan perjanjian internasional, keamanan, maupun ekonomi makro. Sementara kekuasaan politik pada legislatif merupakan hasil dari keputusan negara-negara bagian, sementara eksekutif diperoleh melalui pemilu pada negara bagian. Contoh negara federasi dapat dilihat dari apa yang diterapkan Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan sebagainya. Meskipun begitu tidak banyak kesamaan antara negara-negara tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi definisi negara federasi, karena hakikatnya bentuk federasi lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan sejarah politik sebuah negara. **(iv) Negara Kesatuan**, merupakan bentuk negara yang kekuasaannya dan praktek penyelenggaraan negaranya terpusat pada pemerintah pusat, namun menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada struktur di bawahnya (pemerintah daerah, atau badan pemerintahan lebih kecil dengan sebutan lainnya). Sehingga sistem pemerintahan pada negara kesatuan berbentuk hirarkis terpusat keatas. Namun negara kesatuan memiliki kecenderungan otoriter atau totaliter, maka terjadi pembagian kekuasaan melalui bentuk otonomi daerah (desentralisasi). Meskipun begitu negara kesatuan sering dipuji karena kekuatan integrasinya membuat negara kesatuan lebih kokoh dibandingkan negara federasi dan konfederasi apalagi negara *super state*.

- b. **Secara Horizontal.** Merupakan bentuk negara yang didasarkan pada fungsi di dalam negara tersebut. Bentuk penyelenggaraan negara dibagi dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda. Hal ini dapat diterapkan dalam negara kesatuan, federasi, konfederasi, maupun *super state*. Pembahasan tentang ini akan lebih banyak jika dibahas dalam konteks kekuasaan negara dibawah ini.

2 bentuk kekuasaan negara:

- c. **Secara Horizontal (pemisahan kekuasaan).** Bentuk negara secara horizontal ini adalah bentuk negara yang pemisahan kekuasaannya dilakukan berdasarkan fungsinya. Disebut sebagai pemisahan kekuasaan, karena hakikatnya tidak ada organisasi tunggal yang mampu melaksanakan tugas-tugas negara, meski ada kenyataan berbagai lembaga negara yang memiliki dapat dikontrol oleh 1 orang atau 1 partai. Kita dapat menemukan pembahasan ini dalam konteks Trias Politika. Meski pandangan Montesquieu tentang Trias Politika adalah yang paling banyak diterapkan di berbagai negara saat ini, namun pandangannya terilhami oleh pendapat John Locke. Menurut Locke ada 3 macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perUUan (*legislative*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang dinamakan kekuasaan *federative* (Wirjono, 1983). Pandangan Locke ini dilihat oleh Montesquieu tidak sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan negara, sebab ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.

Selanjutnya ada Vollenhoven yang mengajukan bentuk pemisahan kekuasaan fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan (Asshiddiqie, 2006).

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari kekuasaan eksekutif (kekuasaan penyelenggaraan UU tetapi berfokus pada politik luar negeri), legislatif (membuat UU), dan yudikatif (peradilan atas pelanggaran UU).

Pembagian kekuasaan ini tidak bisa semata-mata diterapkan tanpa adanya pengawasan dan keseimbangan antara ketiganya. Oleh karena itu para ahli mengajukan bentuk-bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara.

- d. **Secara Vertikal (pembagian kekuasaan).** Kekuasaan negara secara vertikal adalah kekuasaan yang dimiliki berdasarkan tingkatan struktur. Semakin kecil struktur dari sebuah lembaga negara maka semakin kecil pula kekuasaan yang dimiliki. Setelah melalui proses pembagian kekuasaan, kekuasaan pada tingkatan dibawah eksekutif, legislatif, dan yudikatif membentuk struktur hingga terkecil agar mampu menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat hingga unsur terkecil. Seperti pada negara kesatuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga pada satuan masyarakat terkecil. Sementara pada negara federasi dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan pemerintah kota. Sementara pada negara konfederasi dan *super state*, dari pemerintah uni, pemerintah nasional negara berdaulat, dan seterusnya berdasarkan bentuk masing-masing negara. Karena anggota negara konfederasi dan *super state* bisa saja memiliki bentuk negara federal maupun kesatuan (lihat bentuk negara-negara Eropa).

Berdasarkan tujuan terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, serta kekuasaan yang dimiliki oleh negara, maka kita dapat merumuskan sifat-sifat yang dimiliki oleh negara, antara lain:

- a. Sifat Memaksa, negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal.
- b. Sifat Monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat.
- c. Sifat Mencakup Semua (*All-Embracing*), yaitu semua peraturan perUUan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

Sifat yang dimiliki negara tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada banyak tujuan negara, namun menurut Charles E. Merriam negara bertujuan untuk (Budiardjo, 2000):

- a. Keamanan keluar, adalah suatu tujuan negara yang identik dengan perlindungan. Dengan kehadiran negara, maka diperoleh jaminan perlindungan negara terhadap serangan-serangan dari luar terhadap kelompok-kelompok, individu-individu, serta komponen yang berada dalam negara itu sendiri.

- b. Ketertiban di dalam, ini berkaitan dengan pembagian kerja dan tanggungjawab atas peraturan terhadap segenap petugas-petugas negara. Terdapat pula badan-badan, prosedur, dan usaha-usaha yang dimengerti dan diterima oleh segenap warga negara dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.
 - c. Keadilan, ini berkaitan dengan upaya perwujudan kesejahteraan yang didasarkan pada saling pengertian dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap orang yang telah disetujui dan dianggap patut. Keadilan mengumpamakan adanya sistem nilai dalam perhubungan individu, agar setiap orang memperoleh bagiannya berdasarkan nilai-nilai itu. Dan untuk itu, negara harus selalu terus menerus mengupayakan keadilan bagi semua yang berada dalam teritori kekuasaannya.
 - d. Kesejahteraan umum, meliputi keamanan, keadilan, kebebasan, tugas-tugas pencegahan ancaman-ancaman bahaya alam maupun non alam. Sehingga warga negara mampu mewujudkan keinginan, kepentingan, maupun kebutuhan dirinya.
 - e. Kebebasan, pada satu sisi dipahami sebagai kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat individu, namun harus tetap memperhatikan kepentingan umum.
- Ke 5 tujuan ini harus dilakukan oleh negara secara bersamaan tanpa mengkhususkan pada satu tujuan. Implementasi tujuan yang secara sama dan seimbang ini ditujukan pada semua orang secara setara juga tanpa mengistimewakan salah satu kelompok atau individu tertentu.

Setiap warga negara harus mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan kebebasan dan kedaulatan dirinya kepada negara, sehingga yang terpenting dalam sebuah negara adalah mewujudkan kepentingan umum atau kebaikan bersama. Sehingga pemerintah atau pengelola penyelenggaraan negara memiliki kedaulatan atas upaya perwujudan tujuan negara itu. Kedaulatan adalah superioritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membuat, meyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan aturan hukum, agar terjaga upaya pencapaian tujuan negara. Orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan ini berasal dari masyarakat, untuk posisi eksekutif, legislatif dan pegawai pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum dan seleksi, ini khusus pada negara demokrasi. Sementara pada negara yang bersifat otoriterian biasanya melalui penunjukkan. Bagi

Aristoteles para pejabat pemerintahan ini haruslah orang-orang yang memiliki keunggulan diri yang terlepas dari kepentingan pribadi, yang disebutnya sebagai *philosopher king*. Jika melalui pemilihan umum, upaya ini dilakukan melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Dengan mengajukan anggota terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat. Sementara jika melalui proses seleksi, dilakukan dengan cara semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan, jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh aturan hukum (pembahasan mengenai ini akan dibahas pada modul 7; Demokrasi).

Mendiskusikan kedaulatan negara hakikatnya ada beberapa pandangan, yang berkaitan dengan terbentuknya negara maupun praktek dalam negara itu sendiri. beberapa teori tentang kedaulatan antara lain (Yoyo Rohaniah, 2015):

- f. Teori Kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan Tuhan menjelma dalam aturan hukum yang harus dipatuhi kepala negara dan warga negara. Sehingga teori ini dijadikan sebagai dasar dalam konsep negara Teokrasi (*Theos* – Tuhan, *Katein* – memerintah).
- g. Teori Kedaulatan Raja. Teori ini bermakna kekuasaan tertinggi negara ada pada raja atau satu penguasa. Semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang yaitu di tangan raja atau ratu. Pengelolaan negara tergantung pada kehendak raja/ratu.
- h. Teori Kedaulatan Negara. Kedaulatan dalam teori ini berada di tangan negara selaku badan hukum yang menyelenggarakan kekuasaannya melalui organ dan aparturnya, dalam hal ini segalanya demi negara karena ditekankan bahwa negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak yang sah. Teori kedaulatan negara ini kemudian disalahgunakan oleh Komunisme sehingga muncul istilah anak negara, buruh negara, bahkan ternak negara.
- i. Teori Kedaulatan Hukum. Teori ini merupakan antitesis terhadap teori kedaulatan negara dan raja. Ajaran teori ini bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Hukum bersumber dari kesadaran hukum dan budaya setiap orang. Maka urusan negara maupun praktek penyelenggaraan negara dan kehidupan dalam negara didasarkan pada aturan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara lembaga peradilan, hakim,

diberikan kewenangan untuk menilai implementasi hukum, namun mereka pun dibatasi oleh aturan hukum dan etika profesi mereka sendiri.

- j. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori ini alurnya dilalui mulai dari penentuan hak pilih oleh masyarakat, dan menyerahkan kedaulatannya kepada orang terpilih dan kewenangan yang telah disiapkan oleh lembaga negara yang ditempati orang terpilih tersebut. Maka rakyatlah yang berdaulat atas negara, kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara adalah kekuasaan rakyat yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Tabel 1. Teori Kedaulatan dan Sifat Pemerintahannya

Teori kedaulatan	Sifat pemerintahan
Kedaulatan tuhan	Teosentris – teokrasi
Kedaulatan raja	Monarki
Kedaulatan negara	Fasisme – otoriterian
Kedaulatan hukum	Nomokratis
Kedaulatan rakyat	Demokratis

Sifat pemerintahan berdasarkan teori kedaulatan ini hakikatnya diinterpretasikan bermacam-macam dalam prakteknya di dunia. Perkembangan sejarah negara-negara di dunia dari masa ke masa mengalami berbagai bentuk, secara umum kekuasaan itu

- a. *Timocracy* atau negara yang dijalankan oleh militer.
- b. *Plutocracy* atau pemerintahan oleh orang kaya.
- c. *Oligarchy* atau pemerintahan oleh segelintir orang yang menggunakan materi untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih banyak.
- d. *Democracy* atau pemerintahan oleh semua orang dengan batasannya adalah aturan hukum karena kekuasaannya berasal dari rakyat.
- e. *Mobocracy* atau pemerintahan oleh orang banyak
- f. *Tyrani* yang merupakan pemerintahan terburuk oleh seorang penguasa yang “bertangan besi”.
- g. *Aristokrasi* atau pemerintahan yang dijalankan oleh para aristokrat.
- h. *Monarcy* atau pemerintahan yang dijalankan oleh raja/ratu atau kaum bangsawan.
- i. *Teokrasi* atau negara yang dijalankan oleh para pemuka agama menggunakan doktrin tentang keTuhanan.

Sifat-sifat pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan. Sistem pemeritnahan di dunia sangat bermacam-macam jenisnya, pada satu negara dengan negara lain nama dan wewenang yang dimiliki bisa saja berbeda.

Sehingga mahasiswa pengguna BMP ini jika ingin mendalami sistem pemerintahan perlu membaca studi tentang sistem pemerintahan di berbagai negara secara mendalam namun tidak bisa digeneralisir.

Diantara berbagai sistem pemerintahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Monarki absolut: raja/ratu memiliki kekuasaan penuh yang dibantu oleh para menteri dan tingkatan pemerintahan di daerah oleh para raja-raja kecil atau pemimpin yang ditunjuk raja. Namun pada praktek di negara lain, bisa saja pemimpin daerah dipilih oleh rakyat secara langsung namun harus tunduk pada kewenangan raja.
- b. Monarki parlementer/konstitusional: raja/ratu menjalankan kekuasaannya sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen (legislatif). Sementara anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Maka raja/ratu berperan sebagai simbol negara yang akan menjalankan fungsi-fungsi integrasi, agama, sosial dan budaya.
- c. Presidensial: presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif secara seimbang. Meski pada beberapa negara presiden berkuasa mutlak tanpa legislatif atau lembaga legislatif hanyalah “topeng”.

Pembahasan mengenai sifat-sifat pemerintahan tidak akan dibahas semuanya dalam BMP ini. Pada modul-modul berikutnya akan dibahas beberapa diantaranya karena saat ini yang paling mayoritas dijalankan oleh negara-negara di dunia.

4. Rangkuman

Negara sebagai kelompok sosial terbesar yang dibentuk oleh manusia dijalankan oleh sekelompok orang, dan lembaga atau institusi dengan strukturnya baik secara vertikal maupun horizontal. Karena negara ditujukan untuk mewujudkan kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu bentuk pemerintahan, sifat negara, implementasi kekuasaan sangat ditentukan oleh sejarah sebuah bangsa dan proses terbentuknya negara. Dalam mengkaji sebuah negara memang terdapat sebagian hal yang sama antara satu negara dengan negara lain, namun tidak semua negara. Meskipun kesamaan yang dimiliki cenderung sedikit. Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan konsep yang telah dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran II ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadikannya sebagai acuan dalam melakukan analisis tentang negara.

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

Berdasarkan teori dan konsep tentang negara diatas, maka mahasiswa diminta untuk membandingkan 2 negara dengan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

- i. Sejarah terbentuknya kedua negara.
- ii. Bentuk pemerintahan kedua negara.
- iii. Sifat pemerintahan dan kekuasaan yang dimiliki kedua negara.
- iv. Ideologi yang dianut oleh kedua negara.

Tugas dibuat dalam bentuk esai naratif dengan sistematika berdasarkan 4 variabel perbandingan diatas. Diketik dengan menggunakan ukuran huruf 12, spasi 1, 5, jenis huruf Times New Roman, ukuran A4, menulis kutipan referensi dari mana data dan narasi diambil. Dikumpulkan pada pertemuan berikut.

b. Lembar Kerja Praktik

Mahasiswa diminta menjelaskan pemikiran para tokoh tentang terbentuknya negara, serta praktek menjalankan kekuasaan negara:

No	Nama Tokoh	Pokok Pikirannya

6. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dalam pembelajaran ini dilihat berdasarkan kualitas substansi tugas yang telah dibuat serta kemampuan menjelaskan kembali apa yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam diskusi di kelas.

7. Umpan Balik

D. Penutup

1. Rangkuman

Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori sistem sebagai sebuah bentuk keterkaitan, keterikatan, ketergantungan, saling mempengaruhi yang terjadi akibat interaksi sosial dalam berbagai aspek. Baik itu ekonomi, politik,

hukum, agama, dan sosial budaya. Namun yang dipelajari saat ini adalah sistem dalam bidang politik, yang disebut sebagai sistem politik. Dalam semua sistem terdapat peran dan fungsi yang menjalankan berbagai bentuk diatas, yang dijalankan oleh setiap struktur baik itu vertikal maupun horizontal. Setiap sistem memiliki tujuannya masing-masing, tujuan dari sistem politik adalah mewujudkan kepentingan umum yang merupakan transformasi atau penggabungan dari berbagai kepentingan individu atau pribadi. Kepentingan-kepentingan itu secara singkat dimaknai sebagai pemenuhan HAM, dengan pendeskripsian dalam politik dirinci sebagai kesejahteraan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, keamanan, dan keselamatan. Oleh karena itu negara yang menjadi kerangka dimana sebuah sistem politik itu berada, bertugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Pada modul-modul selanjutnya mahasiswa akan mendalami berbagai bentuk konsep tentang upaya mewujudkan tujuan tersebut melalui pendalaman tentang kekuasaan, kewenangan, distribusi kekuasaan, serta ideologi-ideologi yang mengkaji bagaimana ke 3 hal tersebut dijalankan.

Negara sebagai kelompok sosial terbesar yang dibentuk oleh manusia dijalankan oleh sekelompok orang, dan lembaga atau institusi dengan strukturnya baik secara vertikal maupun horizontal. Karena negara ditujukan untuk mewujudkan kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu bentuk pemerintahan, sifat negara, implementasi kekuasaan sangat ditentukan oleh sejarah sebuah bangsa dan proses terbentuknya negara. Dalam mengkaji sebuah negara memang terdapat sebagian hal yang sama antara satu negara dengan negara lain, namun tidak semua negara. Meskipun kesamaan yang dimiliki cenderung sedikit. Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan konsep yang telah dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran II ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadikannya sebagai acuan dalam melakukan analisis tentang negara.

2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Legislatif	Lembaga yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD dan UU yang ada di sebuah negara. Anggotanya adalah perwakilan atau utusan dari golongan masyarakat berdasarkan wilayah, profesi, atau indikator lainnya yang dapat dipakai sebagai wakil masyarakat dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung/representatif. Selain itu tugasnya juga adalah

	meminta pertanggungjawaban eksekutif.
Presidensial	Disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu Presiden yang dipilih rakyat, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
Republik	Berasal dari bahasa Perancis, Res = urusan, Publica = publik atau umum.
Eksekutif	Lembaga yang menjalankan UU yang telah dibuat oleh legislatif, dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada legislatif dan publik.
Absolut	Mutlak
Konstitusional	Segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada konstitusi atau UUD.
Yudikatif	Lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan terhadap pelaksanaan teknis UU dan UUD oleh eksekutif dan legislatif, maupun dirinya sendiri. Jika terjadi pelanggaran, maka akan dijatuhkan hukuman badan berupa penjara, dan pelarangan atau pembatasan perilaku atau hukuman material berupa denda.
Ekonomi makro	Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara menyeluruh atau dalam skala besar pada sebuah negara. Objek kajiannya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan.
Prestise	Gengsi

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Basrowi. (2014). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2000). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Carlton Clymer Rodee et al. (2002). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Chilcote, R. H. (1981). *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*. Colorado: Westview Press.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*. Jakarta: Kencana.
- Fink, H. (2010). *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabriel A. Almond et.al. (2004). *Comparative Politics Today: a World View, Eight Edition*. Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc.
- Gabriel Almond and James S, C. (1960). *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.
- Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modren*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jogiyanto, H. M. (1999). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- KBBI. (2021, Februari 6). *negara*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/negara>
- Kolip, E. S. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Lessnoff, M. (1990). *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- MacAndrews, M. M. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mukhtar, A. (1971). *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni.
- Rauf, M. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas.
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Saragi, M. K. (1985). *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press.
- Sigit, S. (1999). *Pengantar Metodologi Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhino. (1980). *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberty.
- Wirjono, P. (1983). *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta Timur: Dian Rakjat.

Yoyo Rohaniah, d. E. (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

MODUL 4

SOSIALISASI, BUDAYA, DAN PARTISIPASI POLITIK

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membantu mahasiswa dalam memahami sosialisasi politik dan budaya politik yang merupakan kunci dalam memahami sistem politik. Proses sosialisasi menjadi pintu awal internalisasi nilai dan kebudayaan politik kepada masyarakat. Sosialisasi politik menjadi proses yang berlangsung seumur hidup baik secara langsung dan tidak langsung, yang kemudian membentuk sikap dari masyarakat suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan dan politiknya. Selanjutnya partisipasi politik merupakan hasil dari internalisasi nilai, pemahaman dan sikap masyarakat yang kemudian akan kembali mendorong terjadinya sosialisasi dan pembentukan budaya politik.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 4 ini adalah:

- a. CP2: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- b. CP3: Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena politik
- c. CP 4 : Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis perilaku politik.
- d. CP 3 : Mahasiswa dapat memperbandingkan implementasi sistem politik di berbagai negara.
- e. CP 4 : Mahasiswa dapat memperbandingkan perilaku politik di berbagai sistem politik.
- f. CP 5 : Mahasiswa mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi atas implementasi sistem dan perilaku politik di Indonesia

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 4 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan input yang mempengaruhi sistem politik
- b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran sosialisasi dan komunikasi politik dalam mempengaruhi perilaku dan budaya sistem politik

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 4

Kegunaan atau manfaat dari Modul 4 ini adalah membantu mahasiswa memahami sosialisasi, budaya dan partisipasi politik

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 4 ini adalah definisi, jenis , tipologi dan analisa perbandingan dari sosialisasi, budaya dan partisipasi politik

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Sosialisasi Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami definisi dan bentuk sosialisasi politik
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan aktor yang memiliki peran dalam sosialisasi politik.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sosialisasi Politik menempati posisi strategis dalam khazanah kehidupan politik. Sebagai salah satu fungsi yang melekat pada sistem politik, tentu relevansi sosialisasi politik tidak diragukan lagi. Dalam ilmu politik, dikenal sebuah konsep “political socialization” atau “sosialisasi politik”. Konsep itu sering dijadikan pijakan untuk mengkaji, misalnya, bahwa pembelajaran politik sudah dimulai sejak anak-anak. Pada masa itu, pembelajaran lewat keluarga adalah yang pertama dan utama. Sebab, keluarga merupakan tempat pertama individu melakukan interaksi dengan

pihak lain. Namun, ada pula ilmuwan yang menekankan bahwa lingkungan pergaulan memberi andil lebih besar dalam proses menambah pengetahuan politik. Basis argumennya, seseorang relatif lebih intens berinteraksi dengan sesama dalam lingkungan pergaulan, seperti teman atau rekan seprofesi dibandingkan anggota keluarga.

Membahas tentang bagaimana seseorang memperoleh wawasan dan pemahaman politik, sama dengan menelaah proses sosialisasi politik. Dengan demikian, dirasa perlu untuk lebih dulu mengenali makna sosialisasi. Hal ini karena sosialisasi politik dapat dinyatakan sebagai bagian dari proses sosialisasi pada umumnya. Berbagai kalangan memberi pengertian sosialisasi, salah satunya Alex Inkeles yang menyatakan bahwa:

“From sociological point of view, socialization refers to the process whereby individuals acquire the personal system properties—the knowledge, skill, attitudes, values, needs and motivations, cognitive, affective and conative patterns—which shape their adaptation to the physical and socio-cultural setting in which they live”. (Inkeles, 1969)

Senada dengan Inkeles, Fuller dan Jacobs mengemukakan bahwa sosialisasi dalam pandangan paling umum dijelaskan sebagai proses individu untuk mengenali dan mendapatkan pengetahuan sosial dan kompetensi untuk berinteraksi dengan orang lain (Fuller & Jacobs, 1973)

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Karena tidak spesifik menyebutkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi berlangsung di semua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern.

Sementara itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar dan internalisasi dengan kondisi sosial budaya di lingkungannya, yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh Guy Rocher yang menyatakan bahwa:

”Socialization as the process through which the human individual learns and internalizes, throughout his life, the sociocultural elements of his environment, integrating them into the structure of his personality

under the influence of meaningful social agents and personal experiences, and thus adapting himself to the social environment in which he must life” (Rocher, 1972)

Ada pula Barrie Stacey, memandang sosialisasi sebagai proses individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai mendasari terbentuknya sikap tertentu (Stacey, 1987). Baginya, melalui proses sosialisasi, seseorang diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat dan belajar untuk hidup bersama di dalamnya.

Apabila Stacey menekankan sosialisasi adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, lain halnya Gabriel Almond⁵ yang menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses dimana anak-anak atau generasi muda diperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada di masyarakatnya, dan bagaimana cara mereka mempelajari peran yang diharapkan kelak ketika berusia dewasa. Dari narasi tersebut, secara implisit menyiratkan ada pihak yang memberi pengajaran ke generasi muda dalam proses sosialisasi. Meski Almond tidak menyebut secara gamblang tetapi dapat disimpulkan pihak itu adalah generasi yang lebih tua.

Dari beragam pengertian sosialisasi yang telah dijabarkan, benang merahnya adalah sosialisasi merupakan proses pengajaran yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Semua individu tanpa terkecuali—suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar—akan mengalami sosialisasi sepanjang hidupnya. Meskipun dalam proses ini terdapat kecenderungan bahwa pada satu sisi, generasi muda akan bertindak sebagai pihak yang menerima pengajaran, sementara pada sisi yang lain, generasi yang lebih tua akan berperan sebagai pihak yang memberikan pengajaran.

g. Pengertian Sosialisasi Politik

Pada uraian sebelumnya, dinyatakan bahwa ditinjau dari kacamata sosiologis, sosialisasi merupakan proses yang melekat dalam masyarakat, baik yang masih tradisional, sedang berkembang, ataupun sudah modern. Proses sosialisasi digunakan oleh banyak ilmuwan sosial untuk menjelaskan transfer nilai, pengetahuan, ataupun keterampilan dari satu individu ke individu lain. Sosialisasi juga merupakan sarana atau salah satu cara yang biasa dilakukan di tengah masyarakat untuk mengenalkan

bermacam peran sosial. Jika dikaitkan dengan politik, maka sosialisasi politik merupakan proses yang berdimensi politik; sehingga politik bisa dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, nilai, bahkan keterampilan.

Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, dalam arti melestarikan ataupun mengubahnya (Kavanagh, 1983). Paralel dengan pendapat tersebut, Kenneth P. Langton mengungkapkan bahwa “political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits its political culture from generation to generation.” (Langton, 1969). Pemahaman atas budaya politik yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya memang relatif longgar. Akan tetapi, ungkapan Langton bisa dimaknai ketika masyarakat dapat memperoleh nilai, keyakinan, sikap, atau perilaku politik; hal itu tidak lain adalah bagian integral dari sebuah budaya politik.

Bagi Almond, sosialisasi politik memperlihatkan proses pembentukan sikap dan tingkah laku politik juga sebagai sarana suatu generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya (Mas'ood & Andrews, 2001). Senada dengan pendapat tersebut, menurut Alfian, melalui proses sosialisasi politik anggota masyarakat bisa mengenal, memahami, dan menghayati nilai politik tertentu, yang memengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari (Alfian, 1978). Sosialisasi politik mempunyai sasaran, yakni membentuk sikap individu terhadap pemerintah dan sistem politik, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme, loyal terhadap pemerintah, mematuhi pemimpinnya, dan memahami peran mereka saat berpartisipasi dalam sistem politik.

h. Tahapan dan Elemen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Menurut beberapa ilmuwan politik, ada masa-masa penting bagaimana proses sosialisasi politik memberi andil bagi terbentuknya nilai, sikap, ataupun perilaku individu terhadap politik. Sebagai suatu proses, periode berlangsungnya sosialisasi politik dapat dipilah menjadi beberapa tahap. Robert H. Blank memilahnya menjadi tiga, yaitu tahap anak-anak, remaja, dan dewasa (Blank, 1980).

Pada masa anak-anak, sebagai tahap awal kehidupan seseorang, sosialisasi politik lebih menekankan pada upaya membentuk loyalitas politik, umumnya dilakukan pihak yang mempunyai otoritas terhadap anak, yaitu keluarga dan sekolah. Salah satu caranya melalui pengenalan lagu kebangsaan atau bendera nasional sejak dini.

Pada tahap berikutnya, sosialisasi diarahkan kepada individu remaja atau memasuki awal usia dewasa. yang relatif intens membangun relasi dengan kelompok pergaulannya. Pada tahap ini, sosialisasi politik memberi tekanan pada upaya pengembangan emosional, demi memperoleh pengetahuan tentang lembaga politik dan apa yang dirasakan terhadap keberadaan lembaga tersebut. Kelompok pergaulan, sebagai pihak yang melakukan sosialisasi, mempunyai kedudukan sederajat dengan sasaran sosialisasi.

Pada tahap akhir, yakni saat individu dewasa, proses sosialisasi ditandai adanya pengaruh kebijakan dan peristiwa tertentu pada individu yang menjadi target sosialisasi. Selain masih berperannya kelompok pergaulan dalam proses ini, pengalaman politik yang dimiliki seseorang dapat pula memberi pengaruh pada mereka.

Sebagaimana dipaparkan oleh Blank, proses sosialisasi politik memiliki penekanan yang berbeda pada setiap tahapannya. Hal yang perlu dicermati adalah mengapa di tahap awal, sosialisasi politik lebih menekankan upaya terbentuknya loyalitas politik; di tahap kedua, fokus pada upaya pengenalan lembaga politik, sementara tahap akhir, menitikberatkan pengaruh kebijakan atau peristiwa politik tertentu terhadap individu.

Dugaan terhadap hal itu tidak lepas dari faktor usia individu yang menjadi sasaran sosialisasi. Sebagai tahapan paling awal, loyalitas politik anak-anak perlu dibentuk lebih dulu, setelahnya baru dikenalkan adanya lembaga politik. Dengan pengetahuan itu, remaja bisa mulai menilai dan berpendapat tentang aktivitas politik yang ada. Tahap berikutnya, berbekal pengetahuan yang dimiliki, ditambah pengaruh kebijakan dan pengalaman politik yang biasanya dialami individu dewasa, sosialisasi politik berlangsung.

Selain tahapan dan perspektif sosialisasi politik, dalam proses sosialisasi politik terdapat pula beberapa elemen penting untuk diketahui. Elemen yang dikemukakan Langton menyangkut tiga hal. Pertama, proses

sosialisasi politik memerlukan elemen seperti agen atau aktor, sebagai pihak yang aktif memberikan materi sosialisasi. Kedua, harus dipastikan ada materi yang akan diberikan. Materi atau isi yang dimaksud tidak melulu soal politik tetapi bisa juga mengenai hal lain, asalkan mampu memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap politik. Ketiga, harus ada interaksi antara agen dengan target sosialisasi. Dalam proses ini, interaksi bisa menentukan proses penerimaan, bahkan penolakan materi sosialisasi politik.

Memperkuat pendapat yang dijabarkan Langton, perlu pula menyimak pernyataan Laswell bahwa dalam proses sosialisasi politik perlu memperhatikan “(a) who, (b) learns what, (c) from whom, (d) under what circumstances, and (e) with what effects. “ Pernyataan Laswell menekankan proses sosialisasi melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima materi sosialisasi. Interaksi tersebut merupakan proses pembelajaran tentang materi tertentu yang berlangsung pada kondisi tertentu dan akan berdampak tertentu pula dalam bidang politik.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat tentang sosialisasi politik, dapat ditarik benang merah bahwa dalam proses sosialisasi politik terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Harus ada pihak yang menyampaikan materi, mencermati metode yang dipakai saat proses sosialisasi politik, serta memperhatikan target atau sasaran sosialisasi (Ala, 1982).

d. Agen Sosialisasi Politik

Salah satu elemen penting dari sosialisasi politik adalah keberadaan agen atau aktor yang melakukan proses sosialisasi politik. Tanpa agen sebagai generator penggerak, sudah pasti proses tersebut tidak akan berjalan. Akibatnya, tanpa kehadiran agen atau aktor sebagai penggerak, sosialisasi politik bisa berpotensi mengganggu bekerjanya sistem politik; paling tidak mengganggu berlangsungnya proses input–output yang menjadi karakter utama sistem politik. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa proses sosialisasi politik tanpa agen adalah mustahil, lantaran kunci sosialisasi politik mensyaratkan adanya interaksi antara agen dengan individu.

Meski demikian, yang dimaksud dengan agen atau aktor sosialisasi tidak dimaknai sebatas individu saja, lebih dari itu, tidak jarang merujuk

pada subjek kondisi tertentu yang menjaga sosialisasi politik tetap terlaksana. Merujuk pada hasil penelitian para ilmuwan, agen atau aktor tampil dalam wujud keluarga, lembaga pendidikan—baik tingkat rendah, menengah, maupun tinggi—, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

Berkaitan dengan agen sosialisasi politik, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan agen yang pertama kali dijumpai oleh mereka yang mengalami sosialisasi. Hal ini karena secara sosiologis, keluarga adalah kelompok sosial pertama yang dihadapi seseorang dalam menjalin interaksi. Ayah, Ibu, dan saudara-saudara kandung atau kerabat dekat lainnya merupakan orang-orang yang pertama kali ditemuinya, dengan mereka pula kontak sosial terjalin untuk pertama kalinya.

Materi yang disosialisasikan melalui keluarga biasanya bersifat umum, dalam arti tidak spesifik bermuatan politik; namun tidak menutup kemungkinan materi itu bisa memengaruhi pandangan atau sikap politik. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan melalui keluarga tidak bisa langsung terlihat hasilnya.

Selain keluarga, agen sosialisasi politik yang tidak kalah penting adalah sekolah. Sekolah memberi pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sering kali tidak diperoleh di lembaga lain. Kurikulum dan peran para guru akan membentuk sikap maupun pandangan bagi muridnya tentang kehidupan, pengetahuan sosial, ekonomi, dan politik (Langton, *Political Socialization and The High School Civics Curriculum in the United States*, 1968)

Selain keluarga dan sekolah, kelompok pergaulan pun memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Adapun yang termasuk dalam lingkup kelompok pergaulan, antara lain kelompok bermain di masa remaja, kelompok persahabatan, atau kelompok sosial lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal. Lebih spesifik, keikutsertaan dalam asosiasi perkumpulan berlatar tradisi, agama, ataupun etnisitas ternyata juga menjadi sarana yang menopang bagi berlangsungnya sosialisasi politik.

Selain agen yang telah diulas di atas, ada pula agen sosialisasi yang tampil dalam wujud lingkungan pekerjaan. Relasi yang terjalin dalam lingkungan pekerjaan memberi warna dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Hubungan dengan atasan, bawahan, atau rekan sejawat memiliki karakter berbeda dengan relasi yang ada di lingkungan lain.

Situasi dan karakteristik yang ada di lingkungan “white collar” tentu berbeda dengan situasi dan karakteristik yang ada pada lingkungan “blue collar”.

Selain itu, media massa juga merupakan agen sosialisasi politik. Wujudnya dapat berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio atau televisi, dan terutama media sosial. Media massa dapat setiap saat menyalurkan beragam informasi ke masyarakat, termasuk yang bermuatan politik. Media sosial, seperti facebook dan twitter pun bisa dengan cepat membawa informasi berbau politik sekaligus melakukan sosialisasi.

Selain sebagai agen yang menstransfer materi sosialisasi, media massa juga menjalankan peran “intermediary”. Media massa menjadi instrumen perantara untuk mentransfer nilai, norma, sikap, atau orientasi politik sehingga berperan ganda. Dalam menjalankan peran “intermediary”, banyak agen yang memanfaatkan media massa sebagai perantara. Sekolah memanfaatkan media massa untuk menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh kepada para siswa. Keluarga pun memakai media sosial—dalam pemahaman yang longgar, media sosial merupakan varian dari media massa—sebagai perantara sosialisasi.

Pentingnya peran media massa sebagai agen sosialisasi politik ditunjukkan oleh Garramone dan Atkin. Mereka meneliti media massa seperti berita televisi, koran, radio dan majalah dalam melakukan proses sosialisasi politik. Garramone dan Atkin menjelaskan bahwa banyaknya pemberitaan melalui media, terutama televisi, memberikan kontribusi signifikan bagi pengetahuan politik. Tingginya pemberitaan melalui televisi mampu meningkatkan keingintahuan sekaligus hasrat untuk berdiskusi tentang tema-tema politik. Dari kajian ini, bisa dicermati bagaimana media massa mampu menjadi agen sosialisasi politik meski terbatas pada peningkatan pengetahuan politik.

g. Metode Sosialisasi Politik

Materi sosialisasi yang dipaparkan Almond mengulas adanya materi sosialisasi manifes dan laten. Materi sosialisasi yang manifes adalah materi yang mempunyai kaitan secara eksplisit dengan masalah-masalah politik atau materi yang bermuatan politik; dan dampak

sosialisasi dirasakan secara langsung seketika itu oleh individu yang mengalaminya. Sedangkan materi yang laten adalah materi yang tidak bermuatan politik atau tidak berkaitan langsung dengan masalah-masalah politik, sehingga imbas politisnya baru terasa jika individu yang pernah menerima materi ini terlibat dalam kehidupan politik kelak di kemudian hari.

Proses sosialisasi politik yang manifes dilukiskan seorang individu yang menempuh pendidikan di sekolah. Dalam proses pendidikan, yang bersangkutan memperoleh materi pembelajaran, misalkan, tentang mekanisme sistem politik yang bercorak demokratis. Melalui proses sosialisasi yang dilakukan agen sekolah, individu tersebut langsung mengetahui dan memahami sistem politik yang bercorak demokratis. Dengan pengetahuan dan pemahamannya, yang bersangkutan mempunyai sikap dan penilaian tertentu terhadap corak sistem politik yang demokratis. Contoh lain, seorang pekerja menjadi aktivis di organisasi pekerja atau serikat pekerja. Dari aktivitasnya, yang bersangkutan memperoleh pengalaman berorganisasi, melakukan lobi atau demonstrasi memprotes kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Dari pengalaman itu, ia mampu menjalankan organisasi dengan efektif dan mendapat pengetahuan terkait strategi atau taktik untuk mengartikulasikan aspirasi kelompoknya.

Sebaliknya, proses sosialisasi politik yang laten dilukiskan melalui contoh seorang anak yang dididik disiplin, tegas, dan keras. Orang tuanya selalu menekankan pentingnya disiplin dalam waktu belajar, makan, dan tidur. Anak harus patuh dan tidak boleh membantah perintah orang tua, jika aturan yang telah dibuat itu dilanggar maka si anak akan dikenai sanksi. Disadari atau tidak, proses sosialisasi sedang berlangsung di keluarga tersebut. Si anak yang terkena sosialisasi tidak merasakan sentuhan, apalagi pengetahuan tentang politik. Ia hanya memahami bahwa hidup harus dijalani dengan pendisiplinan diri, tegas, bahkan keras. Dampak politik baru akan muncul jika kelak ia terjun di panggung politik. Kecenderungannya, ia akan menjadi politisi yang kurang demokratis, bahkan otoriter.

Terkait materi sosialisasi politik, pendapat Chilcote layak dicermati. Ia menyatakan:

“... content may include knowledge, that is, certain dispositions and beliefs about politics. Content also involves attitudes learned through political activity such as partisan attachment, ideology, voting, and the like. Additionally, content may relate orientations toward authority” (Chilcote, *Theories of Comparative Politics : The Search for A Paradigm*, 1981).

Chilcote mengisyaratkan bahwa materi sosialisasi politik dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, materi sosialisasi yang berupa pengetahuan, yaitu berkaitan dengan disposisi dan keyakinan politik tertentu. Kedua, materi yang berkenaan dengan sikap- sikap yang dipelajari melalui kegiatan politik seperti menjadi pendukung setia, seperti apa ideologinya, bagaimana mekanisme pemungutan suara, dan yang sejenisnya. Ketiga, materi yang disosialisasikan berorientasi kepada otoritas.

Selain Chilcote, Levine pun membedakan sosialisasi politik menjadi tiga tipe yaitu *cognitive socialization*, *affective socialization*, dan *evaluative socialization*. Lebih terperinci, Levine menjelaskannya sebagai berikut:

“*Cognitive socialization refers to how knowledge of the basic structures and rules of politics is acquired. How, for example, does an American become aware of the President, the Congress and the Supreme Court. Affective socialization is the process in which an individual develops feelings of approval or rejection of a political leader, governmental unit, or political system. The way in which an individual is shaped in good or bad terms of the President, or the police, or the bureaucracy, for example, is illustrative of affective socialization. Evaluation socialization refers to the process through which one requires the judgements and opinions about political system on the basis of some moral criteria. An assessment of how an individual decides whether or not government policy should be more concerned with national health problems is an example of evaluation socialization*”

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa *cognitive socialization* berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang struktur dasar dan kaidah politik mampu diterima seseorang. Contohnya, bagaimana seseorang dapat mengetahui tentang presiden, lembaga legislatif, atau mahkamah agung di negaranya. Sedangkan materi yang berhubungan

dengan *affective socialization* adalah proses seseorang yang pernah mendapat sosialisasi politik mampu mengembangkan sikap untuk menyetujui atau menolak objek politik tertentu. Misalnya, setuju atau tidak dengan pemimpin politik, lembaga-lembaga pemerintah, sistem politik atau hasil kebijakan yang telah diputuskan. Terakhir, materi *evaluative socialization* berhubungan dengan proses seseorang yang terpapar sosialisasi politik dapat menerima pertimbangan dan pendapat tertentu tentang sistem politik, atas dasar beberapa kriteria moral.

Senada dengan Almond, Dawson mengungkapkan bahwa dalam khazanah literatur ilmu politik terdapat dua bentuk *political learning*, yaitu *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung). "*Direct political socialization* menunjukkan materi yang ditransmisikan memang spesifik bermuatan politik, sedangkan yang dimaksudkan dengan *indirect political socialization* adalah materi yang disampaikan tidak berkaitan dengan politik. Dawson juga menunjukkan bahwa sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dibentuk predisposisi yang sifatnya umum dan pada tahap kedua predisposisi tersebut dipindahkan ke objek politik.

Berdasarkan pendapat Almond dan Dawson, pelaksanaan sosialisasi politik dibedakan menjadi dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Perbedaan di antara keduanya, selain terletak pada bagaimana proses sosialisasi berlangsung juga terletak pada materi sosialisasi. Metode langsung menekankan pada materi atau isi yang bermuatan politik, sementara tidak langsung materinya tidak bermuatan politik tetapi membawa dampak politis di kemudian hari bagi individu yang terkena sosialisasi.

Dawson menambahkan, sosialisasi politik yang dilakukan dengan metode langsung bisa dipilah menjadi empat jenis, yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education* (edukasi atau pendidikan politik), dan *political experiences* (pengalaman politik)

a. *Imitation* (imitasi).

Imitasi dapat diartikan sebagai peniruan. Tidak bisa dibantah dalam kehidupannya, seseorang pasti pernah meniru orang lain. Oleh karenanya, imitasi dinyatakan sebagai hal yang lumrah karena sering terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Imitasi sering dilakukan baik sengaja ataupun tidak, dan yang ditiru umumnya adalah nilai-nilai atau pola-pola tingkah laku orang lain. Dalam konteks ini, orang lain yang ditiru acap kali merujuk pada orang-orang yang lebih tua, orang yang memiliki otoritas, atau tokoh yang dihormati. Contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, seorang anak mengimitasi nilai-nilai sosial budaya yang melekat pada orang tuanya. Misalnya, anak perempuan suka menirukan untuk menjadi ibu, sedangkan anak laki-laki menjadi ayah. Selain itu, anak yang menghargai pendapat teman sepermainan bisa jadi merupakan hasil peniruannya terhadap perilaku orang tua yang menghargai perbedaan pendapat.

Dunia politik juga tidak luput dari proses peniruan. Seseorang sangat mungkin meniru nilai, sikap, atau tingkah laku politik orang tua, guru, pemimpin, ataupun tokoh politik yang dikaguminya. Seorang anak bisa mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu karena orang tuanya menjadi anggota, aktivis partai, atau simpatisan partai politik tersebut. Peniruan tersebut disebut dengan *positive imitation*.

Berkebalikan dengan *positive imitation*, ada juga penolakan dalam proses peniruan atau *negative imitation*, yaitu si peniru tidak sepakat dengan nilai, sikap, atau tingkah laku politik yang menempel pada orang yang akan ditiru (seseorang yang dijadikan referensi). Kondisi ini biasanya terjadi pada remaja karena mereka sudah mampu membedakan dan memilih sendiri hal-hal yang ingin diikuti. Misalnya, seorang remaja dari keluarga kelas menengah atau atas dan konservatif bergabung dengan kelompok politik radikal, tindakan itu adalah bentuk peniruan yang berlawanan dari nilai, sikap, atau tindakan orang tuanya.

Positive dan *negative imitation* dapat muncul di masyarakat mana pun, baik yang masih terbelakang, sedang berkembang, atau yang sudah maju. Peran agen sosialisasi, sebagai pihak yang dijadikan referensi, ternyata penting dalam proses peniruan. Hal ini karena segala atribut dan karakter yang melekat padanya akan dijadikan referensi untuk ditiru atau ditolak,

oleh sasaran sosialisasi politik. Anticipatory political socialization (sosialisasi politik antisipatoris).

Sosialisasi politik antisipatoris merupakan tahap dari sosialisasi politik yang merujuk pada proses persiapan sebelum seseorang memegang jabatan tertentu. Orang yang ingin menduduki jabatan atau posisi sosial tertentu sering memulainya dengan mengambil oper nilai, sikap ataupun tingkah laku yang berhubungan dengan peran-peran tersebut pada jauh hari sebelum yang bersangkutan benar-benar menduduki jabatan profesi atau posisi sosial tertentu tadi. Beberapa contoh yang cukup gamblang adalah mahasiswa fakultas hukum mulai mengadaptasi tingkahlakudanpolapikir advokat, anak laki-laki lebih senang berperan sebagai “bos” dalam permainannya, dan anak perempuan biasanya akan memerankan ibu.

b. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik. Kegiatan ini dapat diselenggarakan melalui berbagai macam agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Melalui pendidikan politik, anggota masyarakat diharapkan menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Sekolah, sebagai salah satu agen yang menjalankan bisa mengenalkan siswa tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, sekolah bisa pula menjadi agen sosialisasi politik untuk menjalin persatuan dan kesatuan, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenalkan dan menghayati keanekaragaman masyarakat. Demikian pula halnya dengan pendidikan poliik yang dilakukan partai-partai politik melalui kontak-kontak politik langsung, selain mengenalkan hak dan kewajiban warga negara juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman ideologi yang dianut.

Jika pada imitasi dan sosialisasi politik antisi- patoris, inisiatif dalam menyelenggarakan sosialisasi berada di tangan

sasaran sosialisasi, lain dengan pendidikan politik, inisiatif justru muncul dari pihak yang memberikan sosialisasi. Oleh karena itu, dalam pendidikan politik, peran aktif agen dan materi sosialisasi penting. Keberhasilan sosialisasi lebih bergantung pada keaktifan agen sosialisasi. Sebagai contoh, gagalnya seorang guru dalam melakukan pendidikan politik akan berakibat pada gagalnya transmisi materi sosialisasi kepada siswa. Walaupun inisiatif dalam pendidikan politik dilakukan pihak yang mentransfer materi sosialisasi, namun tetap harus diakui bahwa peran pihak penerima juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan politik, meski porsinya kecil. Oleh karena itu dalam pendidikan politik, *receptivity* materi sosialisasi yang ditransmisikan oleh agen tetap dinyatakan memberi andil, walau dalam kadar relatif kecil, dalam proses sosialisasi politik.

c. *Political experiences* (Pengalaman Berpolitik)

Selayaknya pengalaman pada umumnya, pengalaman politik merupakan guru yang baik bagi setiap individu untuk memengaruhi kehidupan di masyarakat. Pengalaman hidup seseorang tentunya tidak sama dengan pengalaman hidup orang lain. Seseorang yang banyak mengenyam asam garam kehidupan, biasanya lebih arif dalam menyikapi dan menanggapi persoalan kehidupan.

Di panggung kehidupan politik pun demikian pula adanya. Orang yang sering terlibat di arena politik tentunya mempunyai pengalaman politik yang banyak dan lengkap dibandingkan dengan orang yang jarang terlibat. Beragam pengalaman politik yang dimiliki, pasti akan memengaruhi sikap atau orientasi seseorang terhadap sistem politik yang berlangsung.

Dawson berpendapat bahwa sebagai suatu proses, sosialisasi politik dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dibentuk suatu *general predisposition* dan tahap berikutnya *general predisposition* yang ditransfer ke objek-objek politik yang lebih khusus. Ia pun mengungkapkan bahwa ada tiga macam sosialisasi politik tidak

langsung, yaitu *interpersonal transference*, *apprenticeship*, dan *generalization*.

1) Interpersonal transference.

Dawson menyandarkan pembahasan interpersonal transference pada asumsi yang dikemukakan oleh Robert Hess dan Judith Torney. Menurutnya, interpersonal transference erat kaitannya dengan persoalan psikokultural. Penerapan interpersonal transference sering dipakai untuk menjelaskan perkembangan orientasi individu sebagai pihak yang menerima sosialisasi terhadap keberadaan otoritas. Diasumsikan bahwa orientasi seseorang terhadap otoritas politik berakar pada kontak paling awal yang dijalaninya dengan pemegang otoritas nonpolitik, yaitu orang tua atau guru. Berdasarkan pengalamannya, sebagai seorang anak dalam suatu keluarga atau sebagai murid di suatu sekolah, seseorang dapat mengembangkan berbagai ragam hubungan dengan figur-figur yang memegang otoritas.

Berkaitan dengan pengembangan berbagai ragam hubungan tersebut, individu yang bersangkutan dapat menggunakan metode atau pola hubungan yang diterapkan saat berinteraksi dengan orang tuanya pada saat di rumah atau dengan guru pada saat berada di sekolah. Dari relasi yang demikian, individu-individu tersebut belajar mengembangkan pengalaman dan menerapkannya ketika menghadapi otoritas politik. Individu tersebut akan mentransfer perasaannya kepada para pemegang otoritas, yang sering kali berdasar pada hubungan awal yang terjadi ketika ia membangun relasi dengan otoritas nonpolitik. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa orientasi individu terhadap otoritas bukan merupakan hal yang statis melainkan terbentuk melalui proses yang berakar pada kontak-kontak dengan pemegang otoritas nonpolitik. Orientasi awal ini sebagai basis bagi terbentuknya orientasi terhadap otoritas politik.

2. Apprenticeship

Apprenticeship atau magang mempunyai kaitan cukup erat dengan interpersonal transference. Magang, dalam kaitannya dengan interpersonal transference, memerlukan proses transfer pengalaman yang telah dikembangkan dari kehidupan nonpolitik ke kehidupan politik. Berbeda dengan “interpersonal transference”, sosialisasi politik melalui magang

terjadi lewat proses yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh struktur atau pengorganisasian di lingkungan tempat magang.

Dalam hal ini, seseorang akan memperoleh nilai, sikap ataupun pandangan yang ada dan diterapkan oleh organisasi kerja. Nilai, sikap ataupun pandangan ini biasanya ada dan melekat pada organisasi kerja dalam kurun waktu lama sehingga bisa dinyatakan sebagai hal yang bersifat turun-temurun. Misalnya, pada titik ekstrem, lingkungan magang yang memegang nilai disiplin tinggi dan patuh pada atasan (seperti halnya kepatuhan pada organisasi militer) akan mentransmisikan nilai, sikap, dan pandangan yang berbeda dengan lingkungan magang yang tidak begitu ketat menerapkan kedisiplinan. Untuk membedakan interpersonal tranference dengan magang, secara sederhana dapat dikatakan bahwa interpersonal tranference lebih menekankan pada peran individu sebagai aktor yang terkena sosialisasi, sedangkan apprenticeship atau magang lebih banyak bertumpu pada struktur organisasi beserta nilai, sikap, dan pandangan yang ada dan dianut di lingkungan magang. Meskipun demikian, peran dari agen dalam sosialisasi politik melalui proses magang juga tidak bisa diabaikan sepenuhnya.

Oleh karena itu, dalam konteks magang, aktivitas yang sifatnya nonpolitik dipandang sebagai latihan atau magang sebelum individu yang bersangkutan menjalankan aktivitas politiknya. Dalam hal ini, nilai atau sikap nonpolitik seperti keterbukaan, kedisiplinan, komitmen, dan loyalitas yang diperoleh individu dalam proses magang, pada gilirannya di waktu mendatang, akan memberi warna bagi yang bersangkutan dalam menjalani aktivitas-aktivitas politiknya.

Ringkasnya, melalui proses magang, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, bahkan nilai yang dapat digunakan dalam kehidupannya di pentas politik atau ketika mengambil keputusan politik. Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa magang adalah proses individu untuk menimba pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, maka akan semakin menguntungkan bagi yang bersangkutan. Banyaknya pengalaman yang dimiliki membuat seseorang mempunyai semacam referensi sebagai basis dan bahan pertimbangan untuk menjalankan peran politik.

3. Generalization

Generalization atau generalisasi berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang dibahas sebelumnya, yakni interpersonal transference atau apprenticeship (magang). Namun, dalam generalization berlangsung perluasan nilai-nilai sosial terhadap objek politik. Artinya, pandangan yang dimiliki seseorang yang berakar pada nilai-nilai sosial ditanamkan pada seluruh sistem keyakinan yang dimiliki, termasuk keyakinan politik. Nilai, sikap, atau keyakinan dan pandangan yang bersifat umum dan nonpolitik ditanamkan menjadi keyakinan, yang kemudian menjadi basis untuk melakukan penilaian politik. Sehubungan dengan hal itu, patut diperhatikan bahwa proses sosialisasi dalam bentuk generalization ini sering mengemukakan asumsi yang menyamaratakan penilaian, mengandung stereotip ataupun stigma-tisasi.

Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa proses generalisasi ini membentuk pandangan politik bagi setiap individu. Pandangan politik inilah yang nantinya akan ditanamkan pada seluruh sistem keyakinan yang dimiliki individu. Penanaman pandangan politik ke semua sistem keyakinan merupakan hal yang penting, mengingat beragamnya subkultur di masyarakat. Pandangan politik yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat mempunyai style atau corak tersendiri berdasarkan budayanya. Terkait dengan sosialisasi politik tidak langsung, menurut penjabaran Dawson tadi, prosesnya diawali dengan pembentukan general predisposition yang kemudian ditransfer ke objek politik. Demikian pula halnya dengan interpersonal transference, apprenticeship, dan generalization, proses berlangsungnya diawali dengan pembentukan general predisposition yang kemudian ditransfer ke obyek politik. Sehubungan dengan hal itu, tidak berlebihan bila dinyatakan nilai, norma, sikap, atau keyakinan politik yang diserap seseorang dalam proses sosialisasi politik tidak langsung tergantung pada keberhasilan membentuk general predisposition.

Uraian sebagaimana dipaparkan tersebut menunjukkan ada bermacam metode atau cara bagi keberlangsungan sosialisasi politik, baik yang dilakukan secara langsung (empat tipe) maupun tidak langsung (tiga tipe). Berkaitan dengan metode atau cara tersebut, dengan beragam variasi proses penyelenggaraannya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- a. Pertama, paparan beragam metode tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik yang dijalani seseorang bukanlah proses sederhana, namun justru beragam dan kompleks. Hal itu tidak lepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, antara lain agen sebagai pihak yang mentransfer materi sosialisasi, metode atau cara pentransferan materi, dan konten atau isi materi sosialisasi. Meskipun materi sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat sama, namun hasilnya bisa berbeda, hal ini tidak mengherankan karena proses penyampaiannya berbeda atau disampaikan oleh agen yang berbeda.
- b. Kedua, metode sosialisasi langsung dan tidak langsung dapat berjalan terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersama-sama. Maksudnya, sosialisasi bisa dilakukan tidak hanya dengan satu metode, namun dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan berbagai metode lain. Kombinasi tersebut sangat mungkin dilakukan karena seorang individu pada waktu yang bersamaan terlibat dalam berbagai sektor kehidupan. Seseorang yang menerima pendidikan politik di sekolah, di saat yang sama—misalnya, pada jam istirahat—juga terlibat dalam proses interpersonal transference dengan para guru.
- c. Ketiga, apa pun metode sosialisasi politik yang dilakukan, peran agen sosialisasi sangat penting. Namun demikian, peran agen bukan sepenuhnya sebagai penentu keberhasilan sosialisasi. Peran agen juga tergantung konteks yang melingkupi, di antaranya sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sosio-politik. Selain itu, keberhasilan agen juga tergantung pada individu-individu sebagai pihak yang terkena sosialisasi.

Berdasarkan metode sosialisasi politik tersebut, Dawson menyatakan bahwa sosialisasi politik langsung lebih bisa diterapkan pada upaya penerimaan informasi dan pengetahuan politik, yang berkaitan dengan identifikasi politik. Ia pun menyatakan bahwa sosialisasi politik langsung merupakan teknik yang paling umum dilakukan, melalui teknik ini individu-individu yang mulai menginjak usia dewasa mendapatkan sikap-sikapnya terhadap isu-isu politik yang bersifat khusus. Sementara itu, sosialisasi politik yang dilakukan secara tidak langsung tampak lebih

relevan bagi pengembangan cara yang lebih umum bagi individu-individu dengan mengkaitkan dirinya sendiri dengan pentas politik

4. Rangkuman

- a. sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, dalam arti melestarikan ataupun mengubahnya .
- b. Ringkasnya, dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sistem politik di dalamnya, diperlukan fungsi sosialisasi politik. Lancar atau tersendatnya fungsi tersebut akan memengaruhi gerak roda sistem politik.
- c. Corak sosialisasi politik di masyarakat atau negara demokratis tentu berbeda dengan yang tidak demokratis. Perbedaan pun tidak hanya tentang materi sosialisasi tetapi juga agen dan metode yang diterapkan

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Mahasiswa mengidentifikasi jenis isu publik yang menjadi framing media massa.
- ii. Mahasiswa menentukan perkiraan kebijakan publik yang akan diterapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

b. Lembar Kerja Praktek

Mahasiswa merangkum pemikiran para tokoh terkait konsep yang dijelaskan dalam modul ini.

6. Evaluasi Pembelajaran

- a. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan definisi dan bentuk-bentuk sosialisasi politik
- b. Kemampuan mahasiswa melakukan identifikasi fenomena sosialisasi politik pada ruang lingkup politik lokal dan nasional

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2: Budaya Politik dan Partisipasi politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami definisi budaya politik
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan aktor yang memiliki peran dalam internaslisasi nilai budaya politik
- c. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pembentukan budaya politik

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

a. Definisi dan Model Budaya Politik

Salah satu wujud budaya akan tercermin dalam pola hubungan yang terjadi antara individu (anggota kelompok) yang satu dengan yang lainnya, antara individu dengan kelompoknya, dan antara kelompok dengan kelompok. E.B Taylor dan R Linton mendefinisikan budaya dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* (Prasetya : 1998) menerangkan kebudayaan bahwa keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang di dapat manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut R Linton (Prasetya : 1998) mengatakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu

Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga macam (Koentjaraningrat : 2007), yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud pertama ini adalah wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak dan letaknya dalam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan itu tidak

lepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem dan disebut sistem budaya atau adat istiadat.

- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini adalah yang disebut sistem sosial, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu yang menurut pola tertentu. Sistem sosial ini bersifat konkrit sehingga dapat di observasi dan di dokumentasi
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga ini adalah yang disebut kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa bendabenda dapat diraba dan dilihat.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan manusia, Baik gagasan, tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa memengaruhi pola pikir dan perbuatannya.

Pola hubungan dalam sistem politik masyarakat tertentu itu dinamakan —Budaya Politik, (Political Culture). Yang dimaksud dengan budaya politik adalah pola tingkah laku, sebagaimana dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 29), bahwa:

“ B u d a y a p o l i t i k adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern ”

Pengertian political culture (budaya politik) menurut Almond dan Verba, (1990:20). adalah bagaimana seseorang memiliki orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu Lebih lanjut menurut Almond dan Verba, warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan

lembagalembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik.

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Sudijono : 1995).

Dari sinilah akan dapat dilihat pola orientasi dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik. Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik.

Orientasi kognitif warga negara menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output-nya. Orientasi ini lebih menunjuk kepada sejauh mana pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, serta implikasinya terhadap kepentingan dirinya. Sedangkan orientasi afektif menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Dilihat dari aspek ini, maka seseorang dimungkinkan untuk memiliki perasaan subyektif tertentu terhadap berbagai aspek dari sistem politik, sehingga ia dapat menerima ataupun menolak sistem politik itu pada bagian tertentu maupun sistem politik secara keseluruhan.

Orientasi evaluatif menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya. Keputusan dan pendapat seseorang mengenai sistem politik ini ditentukan oleh kemampuannya dalam menilai moralitas politik, pengetahuan, dan caracara mereka dalam membuat penilaian politik, serta dalam menyampaikan pendapat. Pendapat lain dikemukakan oleh Albert Widjaja dalam Tesisnya —Kultur Politik elit Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia, bahwa: —Kultur politik mempunyai kesamaan dengan lain

kebudayaan masyarakat. Kultur politik adalah tindak budaya, sistem nilai dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat dan lain-lain (Prisma : 1980). Albert Widjaja juga memberikan rincian mengenai ciri-ciri kultur politik, yaitu:

- a. Biasanya berpijak pada norma pokok.
- b. Biasanya tertanam pada perasaan orang (tidak hanya pada inteleknya).
- c. Umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja/sosial politik dalam pergaulan dan keluarga.

Kultur politik atau budaya politik tidak hanya dijumpai pada kelompok masyarakat yang berskala besar, tetapi juga terdapat dalam setiap kelompok masyarakat berskala kecil. Juga tidak hanya terdapat pada masyarakat modern, tetapi juga pada masyarakat tradisional. Namun akan lebih tampak pada masyarakat modern, sebab pada masyarakat modern ini orang akan sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh dan proses politik. Sebagaimana pendapat Arbi Sanit (1983 : 3), bahwa:

*“ Di masa modern ini hampir dapat d
dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya salah satu dari bentuk proses politik seperti, konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan dan tawar-menawar politik, mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu ” .*

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. Dengan kondisi dapat dikatakan bahwa dalam kerangka pengembangan budaya politik suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan keterkaitan antar nilai budaya maupun antar komponen orientasi dalam masyarakat sehingga dapat terjalin proses interaksi ke arah pengembangan budaya (Syamsudin : 2009).

Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Dalam konteks sistem politik Indonesia, memosisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik,

bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik. Lebih jauh, mengkonstatasi bahwa salah satu parameter pembangunan politik Indonesia adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau akan ada (Herimanto : 2010).

Berpijak dari paparan diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa budaya politik sesungguhnya akan dapat menjelaskan perilaku politik dan partisipasi politik, dengan kata lain pendekatan budaya politik adalah upaya menembus cara lebih dalam pemahaman tentang perilaku politik dan partisipasi politik. Selain itu, pendekatan budaya politik untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupungyang berubah, seiring dengan proses perubahan dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini.

Untuk melihat peranan individu-individu dalam subjek politik itu, Almond dan Verba membedakan golongan subjek. Subjek pertama adalah peranan struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrasi. Kedua penunjang jabatan seperti pemimpin monarkhi, legislator, dan administrator. Struktur dan penunjang jabatan serta struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk dalam proses “masuk” politik atau dalam proses administratif atau “keluar”. Dengan proses (input) politik dapat terjadi bahwa arus tuntutan politik masyarakat mengalami pemutusan dengan proses konversi tuntutan-tuntutan ini ke arah kebijakan dan otoritatif. Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki. Orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintah negaranya dapat digolongkan ke dalam kebudayaan politiknya. Suatu model budaya politik tertentu tak dapat dihubungkan secara kaku dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas, terutama bila subkultur juga disertakan.

Setiap orang anggota suatu sistem politik tidak bisa tidak dia akan mendukung salah satu budaya politik yang dikukuhinya tadi. Dalam keadaan aktif ataupun diam, dalam lingkup yang luas ataupun sempit. Budaya politik itu selalu didapati dengan tipe-tipe yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik seperti berikut:

- i. Budaya politik Parokhial (Parochial Political Culture).

Budaya Politik Parokhial (*Parokhial Political culture*) biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil,

sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan.

Collemen mencontohkan masyarakat suku-suku di Afrika, yang tidak terdapat pembagian pesan secara khusus antara pesan politik, sosial ataupun religius. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya (Sudijono : 1995). Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagianbagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian parokialisme dalam sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat afektif dan orientatif daripada kognitif.

ii. Budaya politik Kaula (Subject Political Culture).

Budaya politik —Kaula. (Subject Political Culture), yang memberikan strata terhadap masyarakat menjadi dua kelompok yakni kelompok terendah dan kelompok tertinggi. Pengertian yang lengkap tentang budaya politik kaula, dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira, (1983 : 37), sebagai berikut:

“ B u d a y a p o l i t i k K a u l a masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Sedangkan perhatian (yang frekuensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap output-nya. Posisi sebagai Kaula, pada pokoknya dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya.

Pembahasan yang lebih umum diungkap oleh Gabriel A. Almond dan Sidney. Verba (1984 : 21), bahwa di dalam budaya politik kaula terdapat kecenderungan seperti berikut:

“ Di s i n i t e r d a p a t f r e k u e n s i politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tapi frekuensi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut; mereka mungkin menunjukkan kebanggaan terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya, dan tapi hubungannya terhadap sistem secara umum, dan terhadap output, administratif. Sistem politik itu secara esensial adalah hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subjek”

Tipe budaya politik subjek ini memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya, yang perhatian dan frekuensi orientasi terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal itu berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya subjek menyadari telah adanya otoritas pemerintah. Orientasi pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan ungkapan saling, baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem (Sudijono : 1995).

Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima keputusan yang diambil dan segala kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan mereka memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat bersifat mutlak. Tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya.

Orientasi budaya subjek yang murni sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang dideferensiasi. Demikian pula dalam budaya subjek orientasi dalam sistem politik lebih normatif dan efektif daripada kognitif, oleh karena itu, dapat dipahami bila mereka memiliki sikap yang demikian

iii. Budaya Politik Partisipan (Partisipan Political Culture)

Masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya (Sudijono : 1995).

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetap memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.

Sesungguhnya tipe-tipe budaya politik pada umumnya dan budaya politik —kaula khususnya, selalu bersentuhan satu sama lain, sehingga dijumpai tipe-tipe lain yang merupakan campuran antara ketiga budaya politik orisinal yang ada. Tipe-tipe campuran itu adalah:

- a. Parochial ~Subject Culture
- b. Subject ~ Partisipan Culture
- c. Parochial ~Partisipan Culture

Kesatuan antara tipe yang satu dengan yang lain, tampak pada kehidupan politik negara-negara berkembang yang

menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Dalam kehidupan politik Indonesia yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi Pancasila akan didapati tipe campuran budaya kaula ~partisipan atau parokhial ~ kaula. Terutama pada masyarakat pedesaan, tipe campuran yang lebih jelas terlihat adalah parokhial ~ kaula, sebab kondisi dan alam pikiran masyarakat pedesaan lebih memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Seperti diilustrasikan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 41), bahwa:

Budaya Indonesia yang bersifat parokhial ~ kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, disatu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari hubungan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial. Sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat), kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab integrasi, seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.

Ciri-ciri budaya politik Indonesia yang parokhial ~ kaula dan kaula~ partisipan itu antara lain adalah masih kukuhnya sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik ini ada keselarasan dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada output dari penguasa.

4. Rangkuman

- d. Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya
- e. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

- f. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandanganpandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya
- g. Orientasi dalam budaya politik meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.
- h. Terdapat tiga tipe ideal budaya politik yaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek dan budaya politik partisipan.

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

c. Latihan

- i. Mahasiswa menjelaskan budaya politik yang berlaku pada sistem pemerintahan lokal di daerahnya.
- ii. Mahasiswa membandingkan budaya politik di daerahnya dengan budaya politik lokal lainnya berdasarkan sistem presentasi acak

d. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

- c. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan secara budaya politik yang ada di daerahnya dan budaya politik nasional
- d. Kemampuan mahasiswa menemukan dan menganalisis faktor pembentuk budaya politil khususnya kaitannya dengan sosialisasi dan partisipasi politik
- e. Kemampuan mahasiswa menjelaskan fenomena budaya politik yang ada di masyarakat.

7. Umpan Balik

3.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam kajian politik khususnya pada negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik menfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi muncul berbagai kelompok masyarakat yang ikut dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok – kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post-industrial*) yang kemudian diberikan nama gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok ini tidak sejalan dengan kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu sehingga diharapkan kontribusi yang dilakukan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (*direct action*).

Secara umum partisipasi politik didefinisikan sebagai aktualisasi kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin (penguasa) dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, melakukan *direct action* dan sebagainya (Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, 2000).

Herbert McClosky menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat, yang secara sederhana diwujudkan dengan mengambil bagian dalam pemilihan penguasa dan secara tidak langsung maupun langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky, 1972). Partisipasi politik diarahkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation values for a society*).

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberikan tafsiran yang lebih luas dengan mengkategorikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Kegiatan ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Huntington & Nelson, 1977).

Di negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang yang akan memegang kekuasaan. Sehingga partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama maka kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan demikian mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Dari deskripsi diatas dapat ditangkap bahwa partisipasi politik memiliki kaitan dengan kesadaran politik, karena semakin besar kesadaran politik dalam masyarakat (*political awareness*), maka akan semakin aktif partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini juga terkait dengan sosialisasi politik, dimana dengan tingginya sosialisasi maka akan tercipta budaya politik partisipatif yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam masyarakat. Tingkat pendidikan juga memiliki andil penting dalam mendorong tingkat partisipatif. Hal ini tercermin dalam kelompok masyarakat Eropa dimana awalnya hanya kelompok elit yang memiliki suara dalam lembaga perwakilan. Budaya ini kemudian berubah ketika kelompok masyarakat lain mendapatkan penanaman nilai yang bicara tentang kebebasan, keadilan sehingga mendorong partisipasi politik luas dalam masyarakat. Di Amerika, perempuan baru mendapatkan hak suara setelah adanya Amandemen ke-19 pada tahun 1920. Kesempatan ini kemudian semakin berkembang ketika dorongan partisipasi menjangkau semua sektor masyarakat terlepas dari golongan laki-laki maupun perempuan.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, maka kondisi politik akan lebih baik. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa rezim terkait memiliki legitimasi yang tinggi. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa masyarakat cenderung apatis terhadap masalah kenegaraan.

Para ilmuwan barat melihat bahwa partisipasi politik lebih dititikberatkan pada tindakan sukarela. Pandangan ini disepakati oleh sejumlah tokoh seperti Herbert McClosky, Gabriel Almond, Norman H. Nie dan Sidney Verba. Namun demikian, disamping itu sejumlah pemikir seperti Huntington dan Nelson membedakan partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) (Huntington, 1984). Ada juga yang menamakan gejala terakhir ini sebagai *regimented participation*. Huntington juga menjelaskan bahwa tidak semua partisipasi politik mengarah pada partisipasi positif, namun demikian juga memuat unsur desktruktif seperti halnya demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan sejumlah peristiwa yang memuat unsur kekerasan (Huntington S. , 2001).

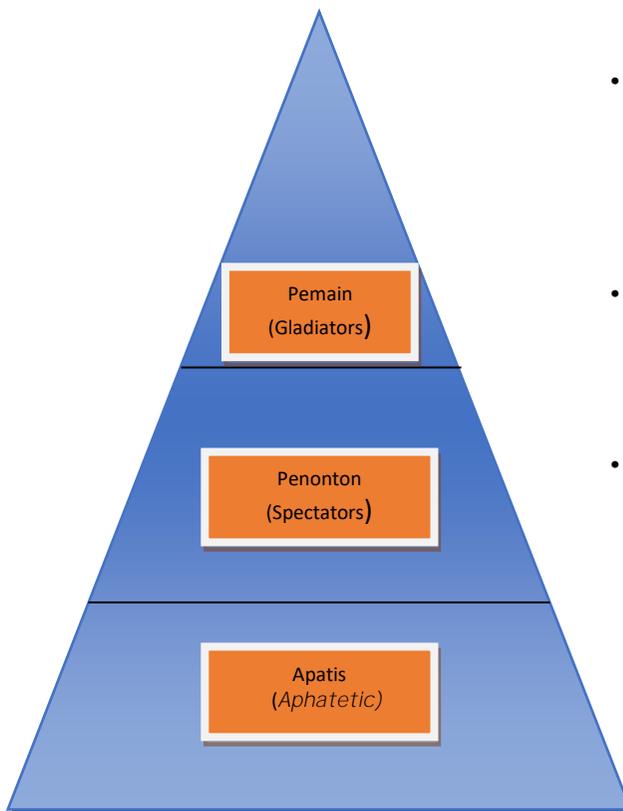
Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik? McClosky menjelaskan bahwa sikap apatis (ketidakterpedulian) ini sesungguhnya merupakan sifat yang positif karena memberikan fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang mengalami partisipasi berlebihan dan terlalu “aktif” yang pada akhirnya akan mengarah pada konflik, pertikaian, fragmentasi dan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan.

Sebaliknya ada kemungkinan bahwa orang tersebut tidak memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapapun yang akan dilih tidak akan mengubah keadaan. Sehingga apatis dalam keadaan ini tidak menunjuk pada rasa kecewa melainkan merupakan manifestasi dari rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Maka dari itu sekurangnya di negara-negara demokrasi Barat, gejala tidak memberikan suara dapat diartikan sebagai cerminan stabilitas dari sistem politik yang bersangkutan (Lipset, 1960). Pandangan yang sama disampaikan oleh Robert Dahl (Dahl R. , 1979), sedangkan Gale A. Irwin dalam tulisannya *Political Efficacy Satisfaction and Participation* menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu perasaan puas menyebabkan partisipasi yang lebih rendah (Irwin, 1975).

1.1 Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

Kegiatan yang dapat dikategorisasikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Di bawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat di negara demokrasi modern dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu a. Pemain (*Gladiators*), b. Penonton (*Spectators*), dan c. Apatis

(*Aphatetic*).



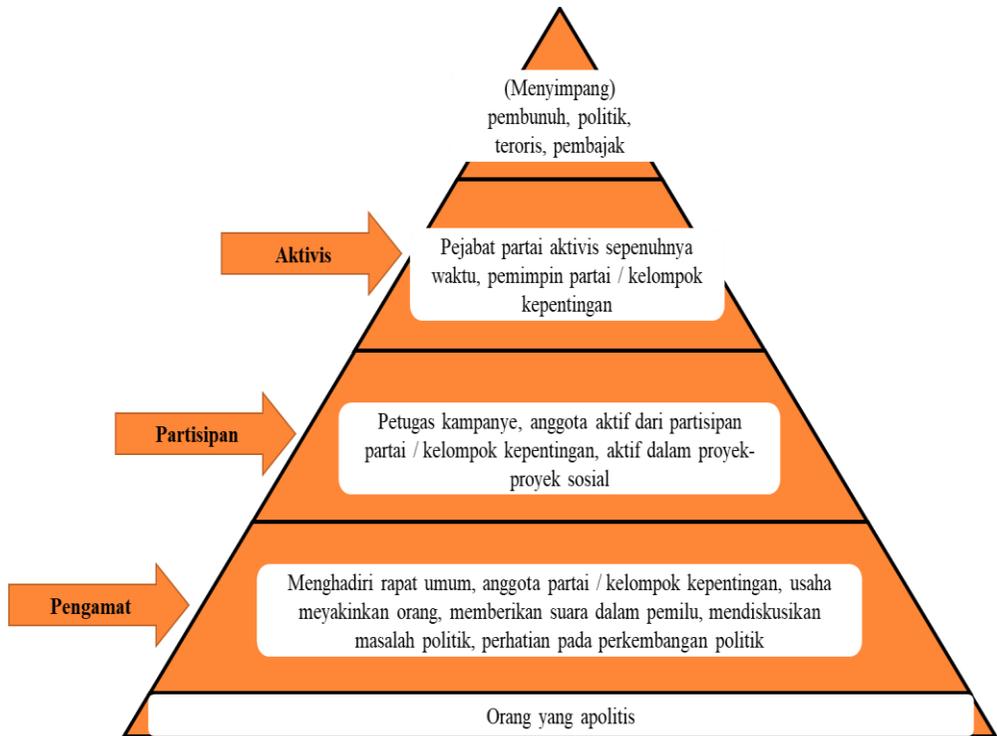
- Pemain (*Gladiators*)
5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik
- Penonton (*Spectators*)
60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya
- Apatitis (*Aphatetic*)
33% populasi termasuk apatis, yaitu orang yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya

Gambar Piramida Partisipasi Politik (Milbath & Goel)

Piramida partisipasi politik lainnya sebagaimana disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori

- d. Aktivis (*activist*)
- e. Partisipan (*Participant*)
- f. Penonton (*Onlookers*)
- g. Apolitis (*Apolitical*)

Bentuk piramida ini menarik karena memasukkan perilaku menyimpang (*the deviant*) seperti pembunuhan politik, pembajakan, dan terorisme; di bagian puncak piramida.

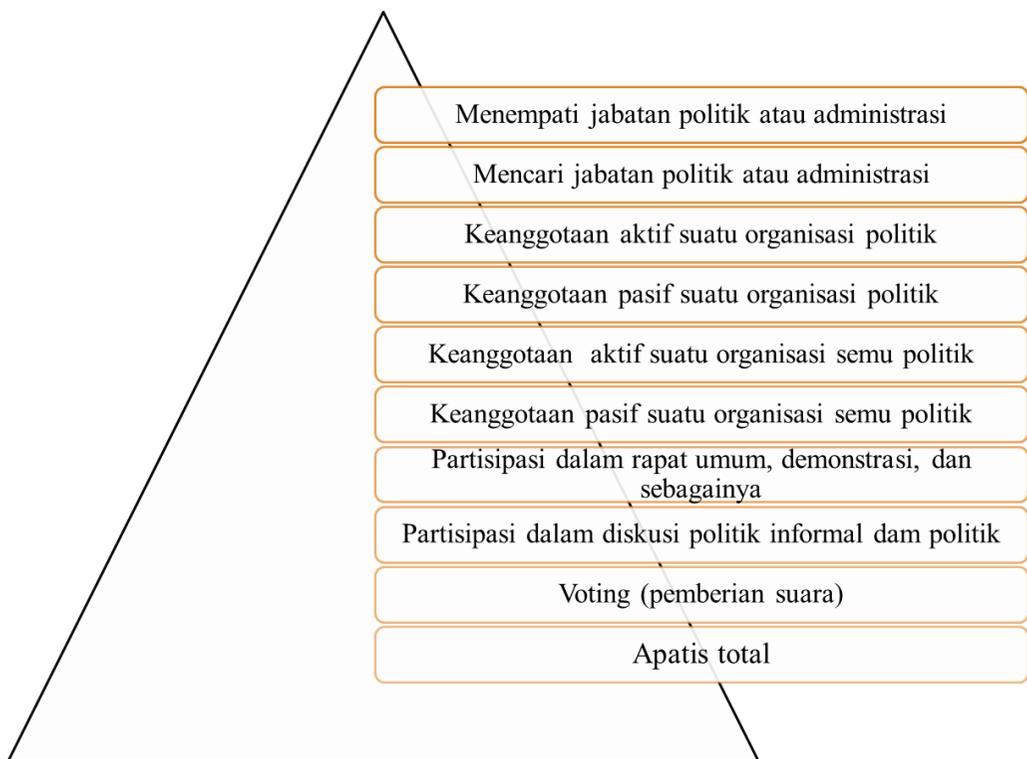


Gambar 10. Piramid Partisipasi Politik (Gatara, 2009)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verba dan Nie ditemukan juga sejumlah bentuk partisipasi politik yaitu,

- a. Dua puluh satu persen masyarakat Amerika sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik, bahkan dalam pemilu. Kelompok ini merupakan kelompok sosial-ekonomi rendah, berkulit hitam, perempuan, orang tua (di atas 55 tahun) dan orang-orang muda (di bawah 35 tahun)
- b. Dua puluh satu persen disebut dengan *voter specialist* yang hanya aktif memberikan suara, tetapi tidak mengadakan kegiatan politik lainnya. Kelompok ini terdiri atas golongan sosial ekonomi rendah, orang kota dan orang lanjut usia.
- c. Empat persen yang disebut dengan partisipan parokial yang aktif berelasi dengan pejabat, baik di pemerintahan maupun di partai untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kelompok ini terdiri dari masyarakat kelas ekonomi bawah yang beragam Katolik di kota-kota besar.

- d. Komunalis merupakan golongan yang terdiri dari pejabat partai dan pemerintah. Sebagian besar dari golongan ini memilih tetapi tidak mau melibatkan diri dalam kampanye pemilihan, merupakan masyarakat kelas sosial ekonomi atas, beragama Protestan, dan ada di daerah pedesaan atau kota-kota kecil.
- e. Aktivis kampanye – merupakan kelompok yang aktif dalam memberikan suara serta berkampanye. Terdiri atas golongan atas, berasal dari kota besar dan kota satelit. Banyak orang kulit hitam dari orang Katolik termasuk di dalamnya.
- f. Aktivis penuh yang merupakan kelompok aktivis yang melakukan berbagai kegiatan kampanye, memimpin partai penuh waktu, berasal dari golongan sosial-ekonomi atas. Orang tua dan golongan muda kurang terwakili dalam kelompok ini. (Nie & Verba, 1972)



Gambar 11. Piramid Partisipasi Politik (Gatara, 2009)

Asumsinya adalah jika semakin luas ruang lingkungannya, maka semakin kecil

intensitasnya. Begitupun sebaliknya, jika semakin sempit ruang lingkungnya, maka semakin kuat intensitasnya.

Di sisi lain Huntington dan Nelson merumuskan bentuk partisipasi politik dalam beberapa bentuk antara lain (Nelson, 1984):

- i. Kegiatan pemilihan, mencakup menyumbangkan dana untuk kampanye dan pemberian suara, bekerja dalam suatu pemilihan sebagai pengawas atau komisi pemilihan, menjadi tim sukses, atau berusaha mempengaruhi pemilih.
- ii. Kegiatan *lobbying*, mencakup upaya perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan publik.
- iii. Kegiatan organisasi, mencakup partisipasi sebagai anggota atau pengurus organisasi yang tujuan utama dan secara implisit untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- iv. *Contacting* atau mencari koneksi, mencakup tindakan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi individu atau kelompok tertentu.
- v. *Violence* atau kekerasan, mencakup tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

Berbeda dengan Huntington, Gabriel Almond mengidentifikasi bentuk partisipasi politik kedalam dua bentuk umum yaitu konvensional dan non konvensional yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Bentuk Partisipasi Politik Gabriel Almond

Konvensional	Non Konvensional
Voting	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Demonstrasi/unjuk rasa
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi	Kekerasan politik terhadap harta benda fasilitas publik (pembakaran, pemboman, perusakan)
	Kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, teror)
	Perang gerilya

Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi politik diatas kita dapat mengidentifikasi tipologi partisipasi politik dan model partisipasi politik.

- i. Tipologi partisipasi politik: **aktif** – mengajukan usul mengenai kebijakan politik, mengajukan alternatif kebijakan politik, mengajukan kritik dan rekomendasi perbaikan kebijakan politik, membayar pajak, dan memilih dalam pemilu. Partisipasi aktif berorientasi pada input dan output. **Pasif** – menaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik yang pasif berorientasi pada output (Surbakti, 1992).
- ii. Tipologi jumlah pelaku: individual, dan kolektif. Kolektif dibagi lagi dalam bentuk konvensional seperti mengikuti pemilu, dan non konvensional seperti ikut serta dalam demonstrasi atau pemogokkan.
- iii. Model Partisipasi politik dibagi lagi dalam 4 bentuk, yaitu; 1) apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan tinggi, partisipasi politiknya aktif. 2) apabila kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan. 3) apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan pada pemerintah rendah, partisipasi politiknya cenderung militan-radikal. 4) apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, partisipasi politiknya pasif. (Gatara, 2009)

1.2 Partisipasi politik pada Negara otoriter

Pada negara otoriter dan totaliter partisipasi politik cenderung lahir dari kalangan masyarakat yang tidak puas dan ingin melawan pemerintah dengan cara melakukan teror, atau perang gerilya. Pilihan ini yang paling sering dilakukan karena pemerintah cenderung menggunakan militer untuk menekan partisipasi politik masyarakat. Namun bagi kelompok elit lebih mudah melakukan partisipasi politik karena berada dalam ruang lingkup kekuasaan.

Bentuk partisipasi di luar pemilihan umum dapat juga dibina melalui organisasi-organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi-organisasi kebudayaan. Melalui pembinaan yang ketat potensi masyarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat *community action* terutama di Uni Soviet dan China yang terkenal sangat insentif dan luas melebihi kegiatan serupa di negara-negara demokrasi Barat. Akan tetapi ada unsur *mobilized participation* di dalamnya, karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh partai.

1.3 Partisipasi politik melalui *New Social Movement* dan kelompok kepentingan.

Kelompok ini merupakan kelompok yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial (*social movements*). T. tarrow dalam bukunya *Power in Movement* (1994) berpendapat bahwa *Social movements* merupakan sebuah tantangan kolektif dimana sekelompok orang memiliki tujuan bersama berbasis solidaritas (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus menerus dengan para elite, lawan-lawannya dan pejabat (*Social Movements are Collective Challenges by People with Common Purposes and Solidarity in Sustained Interaction with Elites opponents and authorities*) ((Hague, 1998).

Gerakan ini membentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19 sebagai response dari keberadaan parlemen yang didominasi oleh kelompok atas dan fokus pada masalah umum. Tujuan utama kelompok kepentingan adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonominya.

New Social Movement (NMS) menjadi bentuk partisipasi politik dengan bentuk yang meliputi ciri-ciri berikut,

- e. Mempunya basis yang lintas kelas sosial. Latar belakang status sosial peserta yang tersebar (*diffuse social statuses*). Seperti golongan madu, gender, dan mereka yang memiliki perbedaan orientasi seksualitas
- f. Memiliki ideologi yang beragam baik itu Marxist, pluralis, pragmatis dan memperjuangkan partisipasi dalam membuat partisipasi
- g. Dalam kehidupan sehari-hari NMS menumbuhkan dimensi identitas; lebih memperhatikan masalah identitas daripada bidang ekonomi dan mendasarkan diri pada perangkat kepercayaan dan nilai yang menyangkut keyakinannya. Dalam kelompok ini tidak dipungkiri dapat terbentuk identitas yang baru, lambang hingga gambaran sendiri. Hal ini sering terjadi pada kelompok yang mengarah pada

gerakan etnis, separatis dan nasionalis dalam suatu negara.

- h. Pada kelompok/gerakan ini hubungan antara individu dan kolektivitas kabur. Hal ini terjadi pada gerakan dimana kegiatan individu lebih menonjol dibandingkan kelompok seperti gerakan *hippy* atau kelompok LGBTQ.
- i. NSM seringkali terkait dengan hal yang sifatnya pribadi seperti aborsi, anti -rokok, dan pengobatan alternatif semisal legalisasi ganja
- j. Taktik mobilisasi yang dipakai adalah gerakan anti kekerasan dan ketidakpatuhan (*civil disobedient*), hal ini jauh berbeda dengan gerakan sosial buruh dimasa lampau.
- k. Berkembangnya kelompok-kelompok NSM dipicu antara lain oleh timbulnya krisis kepercayaan terhadap sarana-sarana partisipasi politik, terutama perilaku partai massa tradisional
- l. Berbeda dengan birokrasi dari partai-partai tradisional, kelompok-kelompok NSM cenderung tersegmentasi, tersebar luas tanpa fokus dan tidak sentralistis. (Larana, 1994)

3. Rangkuman

- a. Perilaku politik memiliki tujuan dan didasarkan pada berbagai karakteristik aktor politik, implementasi perilaku politik didasarkan pada nilai, norma, dan preferensi aktor politik.
- b. Partisipasi politik adalah bentuk perilaku politik yang berfokus pada upaya mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik, dalam berbagai macam bentuk, dengan skala aktif dan pasif.

4. Evaluasi Pembelajaran

- a. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan langkah analisis kebijakan publik.
- b. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan soal kasus latihan.

5. Umpan Balik

D. Penutup

1. Rangkuman

Agenda Setting atau dikenal dengan agenda kebijakan dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah yang ada disekitarnya. Dalam pembuatan agenda kebijakan diperlukan suatu masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga harus diagendakan suatu masalah yang dapat terbentuk menjadi suatu kebijakan. Dalam pembuatan agenda kebijakan tentunya peran media massa sangat berpengaruh, dari media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dan sebagainya. Ada juga media cetak yaitu Koran dan lain sebagainya. Peran media massa dalam agenda kebijakan menjadidi suatu pengaruh yang kuat dalam perkembangan pembentukan suatu kebijakan. Isu dan kasus dari agenda kebijakan sering kali terjadi dalam dunia media massa yang terdapat pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat.

Sementara analisis kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pengamat atau peneliti kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan, atau penyelesaian masalah sosial yang dihadapi. Oleh karena itu pemahaman dan kemampuan dalam menganalisis kebijakan merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu politik.

2. Daftar Istilah

Komunikator	Orang atau badan yang menjadi sumber pesan, yang disampaikan menggunakan media atau secara langsung kepada komunikan (penerima pesan)
Otoritatif	Berkaitan dengan otoritas atau kekuasaan
Framing	Membingkai sebuah peristiwa
Komunikasi Massa	Bentuk komunikasi dimana pesan disampaikan kepada khalayak dalam jumlah yang banyak, dan tersebar di wilayah yang berbeda, menggunakan media massa.
Hoaks	Berita bohong
Media Sosial	Media komunikasi berbasis internet baik dalam bentuk aplikasi, atau <i>website</i> yang menggunakan telepon seluler sebagai alat komunikasinya.

<i>Decision Maker</i>	Individu, kelompok atau organisasi publik pembuat dan pengambil keputusan.
<i>Forecasting</i>	Peramalan mengenai informasi yang akan terjadi di masa depan.
<i>Private problems</i>	Isu -isu yang berkembang di masyarakat dan hanya berdampak pada perseorangan atau kelompok
<i>Public Problems</i>	Isu-isu yang berkembang di masyarakat dan dampaknya di rasakan oleh semua masyarakat.
<i>Policy Determination</i>	Analisis yang berkaitan dengan kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat dan untuk siapa dibuat.
<i>Policy Content</i>	Terkait dengan deksripsi kebijakan tertentu, bagaimana kebijakan itu dibuat dalam kaitanya dengan kebijakan-kebijakan sebelum-sebelumnya
<i>Policy Monitoring</i>	Mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dikaitkan dengan tujuan kebijakan
<i>Policy Evaluation</i>	Dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu.
<i>Policy Advocacy</i>	Terkait dengan riset dan argumen yang bertujuan untuk mempengaruhi policy agenda, baik diluar maupun didalam pemerintah.
<i>Information for Policy</i>	Suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo. 1982. Majalah Mahasiswa, Vol. 32, Tahun VI, November 1982.
- Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Allen Beck, Paul. 1977. Handbook of Political Socialization. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Allen Beck, Paul and M. Kent Jennings. 1975. "Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization". The Journal of Politics, Vol. 37 (1), 1975.
- Almond, Gabriel A. 1974. Comparative Politics Today: A World View. Boston: Little, Brown and Company.

- Almond, Gabriel A. and James S. Coleman (eds.). 1960. *The Politics of Developing Areas*. Princeton, N. J: Princeton University Press.
- Atkin, Charles K. and Walter Gantz. 1978. "Television News and Political Socialization". *Socialization: Specifying the Effects Public Opinion Quarterly*, Vol. 42 (2), 1978.
- Blank, Robert H. 1980. *Political Parties: An Introduction*. Englewood, Cliffs, N. J: Prentice-Hall.
- Chaffee, Steven H. et. al. 1970. "Mass Communication and Political Socialization". *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol. 47 (4), 1970.
- Chilcote, Ronald H. 1981. *Theories of Comparative Politics: The Search for A Paradigm*. Boulder, Colorado: Westview Press, Inc.
- Coleman, James S. (ed.). 1965. *Education and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Conway, M. Margaret and Frank B. Feigert. 1972. *Political Analysis: An Introduction*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dawson, Richard E. et. al. 1977. *An Analytic Study Political Socialization*. Boston: Little, Brown and Company.
- Fuller, John Scott and Jerry Jacobs. 1973. *Introduction to Sociology*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Garramore, Gina M. and Charles K. Atkin. 1986. "Mass Communication and Political". *Public Opinion Quarterly*, Vol. 50 (1), 1986.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hener, Timo, et. al. 2016. "Political Socialization in Flux? Linking Family Non-Intactness During Childhood to Adult Civic Engagement". *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistic in Society)*, Vol. 179 (3), June 2016.
- Inkeles, Alex. 1969. *Handbook of Socialization, Theory and Research*. Chicago: Rnd Macmillan & Company.
- Irish, Marian D. and Elke Frank. 1978. *Introduction to Comparative Politics*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.
- Kavanagh, Dennis. 1983. *Political Science and Political Behavior*. London: George Alen & Unwin Ltd.
- Langton, Kenneth P. 1969. *Political Socialization*. London: Oxford University Press.

- Langton, Kenneth P. and M. Kent Jennings. 1968. "Political Socialization and the High School Civics Curriculum in the United States". *American Political Science Review*, Vol. 62 (03), 1968.
- Levine, Herbert M. 1982. *Political Issues Debated, An Introduction to Politics*. Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc. Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews (eds.). 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lee, N.-J., Shah, D. V., & McLeod, J. M. (2013). Processes of political socialization: A communication mediation approach to youth civic engagement. *Communication Research*, Vol. 40 (5) pp. 669 - 697. <https://doi.org/10.1177/0093650212436712>
- Neundorf, A., Niemi, R. and K. Smets. (2016). The Compensation Effect of Civic Education: How School Education Makes Up for Missing Parental Political Socialisation. *Political Behavior*, 38(4) pp. 921-949.
- Ojeda, Christoper and Peter K. Hatemi. 2015. "Accounting for the Child in the Transmission of Party Identification". *American Sociological Review*, Vol. 80 (6), 2015.
- Renshon, Stanley Allen, ed. 1977. *Handbook of Political Socialization*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Rocher, Guy. 1972. *A General Introduction to Sociology: A Theoretical Perspective*. Macmilan Company of Canada Limited.
- Rosamond. 2002. *Politics: An Introduction*. London and New York: Routledge.
- Sigel, Roberta. 1965. "Assumptions about the Learning of Political Values". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 361, September 1965.
- Sills, David L., ed. *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 14. The Macmillan Company & The Free Press. 1968.
- Stacey, Barrie. 1978. *Political Socialization in Western Society*. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, et. al. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Karunika– Universitas Terbuka.

MODUL 5

KOMUNIKASI DAN POLITIK

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Komunikasi politik merupakan gabungan dari 2 disiplin ilmu yang berbeda yaitu Komunikasi dan Politik. Ini bukanlah sebuah anomali, sebab ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang menjadikan berbagai bidang kehidupan sebagai objek kajian, karena memiliki pengaruhnya terhadap sistem politik dan fenomena yang terjadi dalam sistem politik. Bidang ilmu lainnya seperti sosiologi politik, mengkaji pengaruh sosial budaya dan peradaban terhadap sistem politik, atau ekonomi politik yang mengkaji pengaruh ekonomi terhadap politik atau proses politik dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat dilihat bahwa penggabungan dua disiplin ilmu karena adanya sifat saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada modul yang pertama ini mahasiswa akan mendalami terlebih dahulu definisi komunikasi dan politik secara terpisah dan definisi penggabungan keduanya.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 5 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam komunikasi politik.
- b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi politik.
- c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi.

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 1 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian, konteks dan ruang lingkup Komunikasi dan politik.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi politik

sebagai bentuk kegiatan dalam politik.

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 1

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah membantu mahasiswa untuk memiliki landasan pemahaman tentang politik serta kegiatan politik, maupun bentuk komunikasi dan pengaruh serta ruang lingkup teoritis keduanya, yang menjadi dasar keterkaitannya dalam komunikasi politik. Sehingga mahasiswa memiliki landasan yang kuat dalam mempelajari modul berikutnya yang berkaitan dengan bentuk komunikasi dalam kegiatan politik.

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- a. Materi pokok pembelajaran I dalam Modul.
- b. Definisi, ruang lingkup, bentuk, praktek Komunikasi.
- c. Definisi, sistem politik, struktur dan tujuan Politik.
- d. Definisi komunikasi politik, bentuk kegiatan politik yang berkaitan dengan komunikasi, serta pengaruh komunikasi dalam politik.

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Komunikasi dan Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami secara teoritis disiplin ilmu komunikasi dan disiplin ilmu politik, serta bentuk-bentuk dari objek analisis maupun sub analisis dari kedua disiplin ilmu.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

a. Komunikasi

Sejak manusia hidup di muka bumi, manusia selalu berusaha memahami dunia tempatnya berada. Proses memahami ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengamati, menyelidiki, dan mendiskusikan pendapat masing-masing tentang dunia. Sehingga manusia berusaha berkomunikasi dengan orang lain, dengan lingkungan dimana manusia hidup. Proses ini menambah pengetahuan

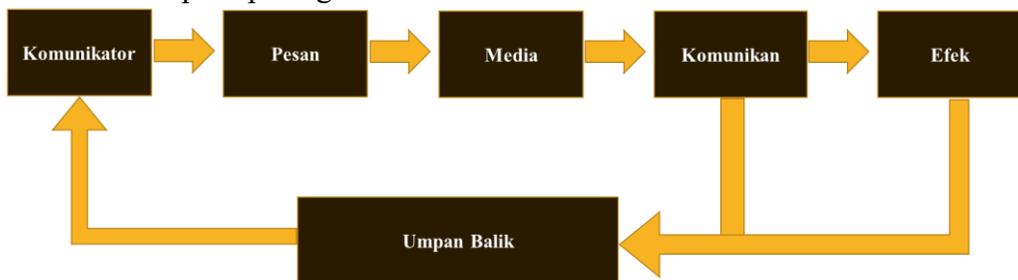
dan pengalaman manusia, terutama dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mengembangkan upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu kata komunikasi pada akar definisinya bermakna “membagi”, dari bahasa latin *communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun ke bersamaan antara dua orang atau lebih, daalam bentuk *communico* yang artinya membagi (Cangara, 2014). Para ahli mendefinisikan komunikasi dengan perkataan yang berbeda-beda namun memiliki makna dan maksud yang sama, seperti:

- i. Jhon B Hason: komunikasi adalah pertukaran verbal, pikiran atau gagasan (Mulyana, 2005).
- ii. Tubbs dan Moss: komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih (Mulyana, 2005).
- iii. Budyatna: komunikasi merupakan cara manusia membangun realitas mereka. Dunia manusia tidak terdiri dari obyek-obyek tetapi respon-respon manusia kepada obyek-obyek atau kepada makna-maknanya (Budyatna, 2015).
- iv. Jenis & Kelly: Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak) (Vardiansyah, 2008).
- v. Berelson & Stainer: Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain” (Vardiansyah, 2008).
- vi. Gode: Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih (Vardiansyah, 2008).
- vii. Brandlun: Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego (Vardiansyah, 2008).

Definisi dari para ahli diatas dapat dirangkum, bahwa komunikasi adalah kegiatan pertukaran pikiran dan gagasan yang didorong oleh kebutuhan seseorang melalui penyampaian pesan dalam wujud bahasa dan simbol yang memiliki makna kepada orang lainnya, sehingga memiliki pemahaman yang sama atau berbeda karena menolak pikiran dan gagasan dari sumber. Dalam

proses penyampaian pesan tersebut, sumber pesan bisa menyampaikannya secara langsung, lisan, atau menggunakan media yang bisa ditulis, digambar, atau media elektronik yang menampilkan gambar dan video dan memperdengarkan suara. Maupun menggunakan alat komunikasi yang menghantarkan pesan secara langsung. Media yang dipakai ini disebut sebagai media komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut sebagai komunikator, yang menerima pesan disebut sebagai komunikan.

Rangkuman definisi komunikasi diatas hakikatnya telah menjelaskan secara sederhana proses komunikasi. Jika dapat digambarkan proses komunikasi seperti pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Proses Komunikasi

Penjelasan gambar:

- i. Komunikator, merupakan pemrakarsa atau yang pertama kali memulai terjadinya proses komunikasi. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya lembaga, partai, dan organisasi. Bisa diidentifikasi bahwa komunikator ini bisa saja 1 orang, lebih dari 1 orang, dan massa. Sebelum mengirim pesan, terlebih dahulu komunikator mengemasnya dalam bentuk yang dirasa sesuai dan dapat diterima serta dimengerti oleh komunikan. Pengemasan pesan itu disebut *encoding*. Dengan *encoding*, pengirim memasukkan atau mengungkapkan pesannya ke dalam kode atau lambang dalam bentuk kata-kata atau non kata, seperti raut wajah atau gerak-gerik tubuh (Budi, 2010). Proses *encoding* itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti; *Pesan apa yang hendak disampaikan? Kepada siapa pesan itu hendak disampaikan? Dalam bentuk apa: verbal-*

dengan kata-kata, atau nonverbal-tanpa kata-kata, pesan itu akan disampaikan? Media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan itu: lisan, tertulis, atau elektronik?

- ii. Pesan. Isi pesan bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Pesan yang dikomunikasikan adalah pesan yang berarti dan informatif. Informatif bila pesan itu mengandung peristiwa, data, fakta, atau penjelasannya.
- iii. Media yang dimaksud di sini ialah alat yang dipergunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai media komunikasi. Selain indra manusia, ada juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi antarpribadi. Serta media dalam komunikasi dengan orang banyak seperti spanduk, *flyer*, pamflet, baliho, brosur, dan papan iklan (*billboard*).
- iv. Komunikan atau penerima pesan biasa disebut juga khalayak, sasaran, *audience*, atau *receiver*, merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa satu orang atau lebih bisa dalam bentuk kelompok, organisasi atau masyarakat umum yang disebut massa. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber. Penerima menerima pesan melalui indranya terutama telinga dan mata. Begitu menerima kode, tanda, lambang, entah verbal maupun non verbal, penerima membuka pintu khazanah ingatan (*memory*) dalam benaknya. Kumpulan ingatan itu merupakan akumulasi warisan budaya, asuhan, pendidikan, lingkungan, prasangka, dan biasanya. Jika tidak diganggu oleh gangguan-gangguan komunikasi, berdasarkan bank ingatannya itu, penerima dapat menafsirkan dan menerjemahkan pesan yang diterimanya (Hardjana, 2003). Komunikan yang menerima pesan jika menyampaikan pesan

yang sama kepada orang baru lainnya, maka dia berubah menjadi komunikator.

- v. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan (Cangara, 2014). Efek dari komunikasi yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (emosional), dan konatif atau behavioral (tingkah laku, yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).
- vi. Umpan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. Hal-hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. Tanggapan balik atau umpan balik, jika dipandang dari efektivitas komunikasi dan akibat komunikasi pada penerima dapat bersifat negatif dan positif. Umpan balik negatif adalah umpan balik yang menunjukkan bahwa penerima pesan tidak dapat menerima dengan baik pesan yang diterimanya. Umpan balik negatif dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengirim pesan untuk memperbaiki isi dan cara penyampaian pesan, atau membatalkan pesan sama sekali. Umpan balik positif, bila tanggapan penerima menunjukkan kesediaan untuk menerima dan mengerti pesan dengan baik serta memberi tanggapan sebagaimana diinginkan oleh pengirim (Hardjana, 2003).

Gambar 1 diatas dapat diperkuat dengan definisi yang diajukan oleh Harold Laswell, pada tahun 1948. Menurutnya cara yang paling mudah mendefinisikan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan

sebagai berikut; *siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Dengan akibat apa?* (Nimmo, 1993).

Berdasarkan paradigma Laswell, Effendy (1994) membedakan proses komunikasi menjadi 2 tahap, yaitu:

- i. Proses komunikasi secara primer, merupakan proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama komunikator menyandi (*encode*) pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian, komunikan menterjemahkan (*decode*) pesan dari komunikator. Ini berarti komunikan menafsirkan lambang yang mengandung perasaan dan pikiran komunikator. Menurut Wilbur Schramm, komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*), yakni perpaduan pengalaman dan pengertian yang diperoleh komunikan. Kemudian Schramm juga menambahkan, bahwa komunikasi akan berjalan lancar apabila bidang pengalaman komunikator sama dengan dengan bidang pengalaman komunikan. Ketidaksamaan pemahaman komunikan dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator menentukan keberhasilan dan keberlanjutan proses komunikasi diantara keduanya.
- ii. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media merupakan alat atau sarana yang diciptakan untuk meneruskan pesan komunikasi. Pada akhirnya, sejalan dengan berkembangnya masyarakat beserta peradaban dan kebudayaannya, komunikasi bermedia (*mediated communication*) mengalami kemajuan pula dengan memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar dan warna. Maka film, televisi dan video pun sebagai media yang mengandung

bahasa, gambar, dan warna melanda masyarakat di Negara manapun. Pentingnya peranan media, surat kabar, radio, atau televisi, merupakan media yang efisien dalam mencapai komunikasi dalam jumlah yang amat banyak. Akan tetapi, menurut para ahli komunikasi diakui bahwa keefektifan dan efisiensi komunikasi bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif.

Dua tahap proses komunikasi ini dapat dilihat bahwa secara umum ada dua pelaku komunikasi dan ada lebih dari satu. Berdasarkan jumlah para aktor dalam proses komunikasi kita dapat mengklasifikasinya pada apa yang disebut sebagai bentuk komunikasi.

Menurut Cangara (2014), para pakar komunikasi berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi kepada 5 macam tipe, yakni komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi organisasi (*organisation communication*), komunikasi massa (*mass communication*) dan komunikasi publik (*public communication*). Sedangkan menurut Effendy, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu (Effendy, 1994):

- i. Komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu: *pertama*, komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*). Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, sehingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri. *Kedua*, komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu: *pertama* dimulai dari diri sendiri. *Kedua*, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. *Ketiga*, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. *Keempat*, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. *Kelima*, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. *Keenam*, tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta

maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang telah diucapkan.

- ii. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat (Sendjaja, 1994).
- iii. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop (Wiryanto, 2001). Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat.

Sementara jika dikategorikan berdasarkan bentuk pesan, komunikasi dibagi dalam 3 bentuk, yaitu; 1) *Komunikasi tertulis* adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunikasi tertulis antara lain adalah bahwa komunikasi itu dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik, dapat dibaca berulang-ulang, menurut prosedur tertentu, mengurangi biaya. 2) *Komunikasi lisan*, adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat pula melalui telepon. 3) *Komunikasi non verbal*, adalah komunikasi dengan menggunakan mimik, pantomim dan bahasa isyarat. Jika dikategorikan dalam bentuk arah komunikasi, dibagi dalam 2 bentuk, yaitu; 1) *Komunikasi satu arah*, adalah komunikasi yang bersifat koersif dapat berbentuk perintah, intruksi dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. 2) *Komunikasi dua arah* atau lebih bersifat informatif dan persuasif dan memerlukan hasil (*feedback*).

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan proses komunikasi, kita dapat menilainya dari faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses komunikasi. Menurut Effendy (2003), terdapat faktor pendukung, diantaranya:

- i. Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya distorsi, yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima selanjutnya.
- ii. Adanya *Feedback* langsung. Hal ini akan dapat mempermudah proses komunikasi yang berlangsung karena mendapatkan respon yang cepat sehingga terjadi dialog yang matang.

- iii. Evaluasi pesan. Pada tahap ini seorang penerima dan pengirim pesan akan bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang dilangsungkan. Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan sinkron maka akan menimbulkan kesamaan pemahaman dalam mengartikan pesan.
- iv. Media pengantar; yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif jika terdapat media pengantar seperti surat kabar, televisi, telepon dan lain-lain.

Sementara faktor-faktor penghambat komunikasi antara lain (Effendi, 2003):

- i. Hambatan Sosiologis; yaitu hambatan yang dapat mempengaruhi iklim sosial. Menurut salah seorang sosiolog Jerman, Ferdinand Tonnies, kehidupan manusia diklasifikasikan dalam dua jenis pergaulan yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. *Gemeinschaft* adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi sedangkan *Gesellschaft* adalah cara pergaulan yang dinamis, rasional, dan bukan pribadi. Seperti pada pergaulan di kantor atau dalam organisasi.
- ii. Hambatan Psikologis; faktor psikologi sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi. Hal ini disebabkan si komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikasi. Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikasi sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati dan kondisi psikologis lainnya. Dalam praktek berkomunikasi, kita akan mengalami berbagai macam hambatan-hambatan sehingga tujuan atau pesan dari maksud informasi yang di komunikasikan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh orang yang menerima informasi tersebut

b. Politik

Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *polis*, yang berarti negara kota. Sementara *politeia* adalah segala sesuatu yang dianggap identik dengan negara, *polites* artinya warga negara, *politikos* artinya kewarganegaraan, *litikos* berarti ahli negara, *politeke techne* atau *politika* bermakna kemahiran berpolitik, dan *politieke episteme* bermakna ilmu politik (Efriza, 2015). Dari penjelasan etimologis ini dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu negara, maka politik hakikatnya adalah seni dan ilmu memerintah (Rudy, 2003). Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat

politik yang terbaik, dimana manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang mengembangkan bakat, hidup dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi (Efriza, 2015).

Defenisi 2 filosof ini pada akhirnya dikembangkan dalam pemaknaan politik sebagai sebuah upaya untuk mencapai masyarakat yang baik, dengan pemanfaatan kekuasaan, kebijakan, dan alokasi nilai. Sehingga politik sendiri meliputi “pengaturan” kekuasaan dalam kehidupan bernegara dengan segala aktivitasnya agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam ketetapan hukum yang jelas, yang meliputi unsur-unsur dan penerapannya sebagai berikut (Ibrahim, 2009):

- i. Unsur-unsurnya adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian/alokasi kekuasaan/kewenangan dan tercakup juga hubungan dengan negara lain.
- ii. Dalam penerapannya mencakup:
 - 1) Apa saja nilai-nilai/keinginan/aspirasi rakyat yang perlu diwujudkan? Model sistem politiknya seperti apa?.
 - 2) Bagaimana upaya pemerintahan dan lembaga politik lainnya diakui keberadaannya secara sah?
 - 3) Apa saja kewajiban setiap hak dalam mengatur kekuasaan sesuai dengan model sistem politik yang dianut?.
 - 4) Bagaimana mengatur hubungan dengan bangsa-bangsa/negara lain?.

Sementara kegiatan politik yang menjadi objek kajian dalam ilmu politik adalah (Efriza, 2015):

- i. Negara. Pembahasan tentang tujuan dibentuknya negara, institusi yang menjadi pemegang tugas perwujudan tujuan negara, tugas, bentuk, susunan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara, serta aturan yang dibuat tentang kehidupan bernegara.
- ii. Kekuasaan. Pembahasan tentang upaya merebut kekuasaan baik melalui pemilu, penunjukkan, pengangkatan, maupun kudeta. Menggunakan kekuasaan demi tujuan negara, dalam menjalankan sistem politik, sistem pemerintahan. Mempertahankan kekuasaan, dengan cara menggunakan kekuasaan sebaik mungkin sesuai tujuan sehingga tidak diganti, atau dengan

- menggunakan kekuatan fisik, paksaan, intimidasi, maupun ancaman.
- iii. Proses pengambilan keputusan. Pembahasan berkisar bagaimana cara keputusan yang berkaitan dengan upaya perwujudan tujuan negara dibuat, mulai dari menampung aspirasi rakyat, memprosesnya melalui pembahasan bersama hingga implementasi hasil pembahasan.
 - iv. Kebijakan umum. Pembahasannya mengenai proses implementasi kebijakan umum mulai dari proses pembuatan, kesesuaian implementasinya dengan hukum, hasil yang diraih disesuaikan dengan tujuan negara.
 - v. Pembagian atau alokasi nilai. Pembahasannya tentang proses pembagian hasil implementasi kebijakan, berupa kesejahteraan, keamanan, keselamatan, perlindungan, keadilan, dan kesetaraan. Ketimpangan pembagian atau alokasi akan menyebabkan konflik.
 - vi. Kelembagaan masyarakat. Pembahasannya tentang organisasi kemasyarakatan dan berbagai pengaruhnya dalam mewujudkan kepentingan masyarakat maupun mempengaruhi proses pembuatan, implementasi, maupun pembagian hasil kebijakan umum.
 - vii. Konflik dan konsensus. Ketidakadilan, ketimpangan, diskriminasi, atau penyimpangan dari tujuan negara atau tujuan sistem politik akan menciptakan konflik dan konsensus sebagai penyelesaiannya.

Seluruh kegiatan politik ini dapat dilihat bentuk kegiatannya dalam ruang lingkup:

- i. Lembaga politik: UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintahan, dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- ii. Parpol dan golongan: Parpol, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara, dan pendapat umum.
- iii. Hubungan internasional: politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional.
- iv. Pembangunan politik: pembangunan di bidang sosial dan ekonomi serta peranan lembaga-lembaga dan asosiasi/organisasi dalam pembangunan.

Berdasarkan konteks kegiatan politik dan ruang lingkup politik diatas, kita dapat mengidentifikasi pada bagian mana sajakah proses komunikasi itu dapat terwujud sehingga disebut sebagai komunikasi politik.

i. Negara.

- 1) Lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara negara, menampung aspirasi rakyat untuk diwujudkan sebagai tujuan bernegara. Rakyat mengkomunikasikan apa saja yang menjadi kehendak mereka yang berisikan kepentingan, kebutuhan atau masalah yang dialami yang harus diwujudkan dan diselesaikan oleh pemerintah. Proses komunikasi dilakukan melalui pemanfaatan organisasi masyarakat, Parpol, media massa atau langsung kepada lembaga pemerintahan.
- 2) Pemerintah berkewajiban memproses kehendak rakyat melalui proses pembahasan di badan-badan atau lembaga pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam proses pembahasan ini semua pihak yang terlibat mengemukakan pendapatnya masing hingga menemui kesepakatan atau keputusan mayoritas. Masyarakat mampu mempengaruhi melalui proses komunikasi di media massa, demonstrasi, atau melakukan lobi kepada pihak atau lembaga yang berwenang membuat keputusan tersebut.
- 3) Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hasil keputusan yang dibuat kepada masyarakat. Proses sosialisasi ini bisa menggunakan media massa, atau melalui pemanfaatan struktur pemerintahan hingga ke tingkat terendah. Agar masyarakat memahami bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan, anggaran, pelaku, serta hasil yang ingin diraih. Dengan harapan masyarakat mendukung implementasinya.
- 4) Proses implementasi kebijakan oleh pemerintah akan direspon oleh masyarakat berupa mengkomunikasikan dukungan agar kebijakan itu dilanjutkan atau ditingkatkan, atau melalui kritikan agar kebijakan itu diubah atau dibatalkan karena tidak memenuhi apa yang

dikehendaki rakyat.

- 5) Untuk mengisi jabatan di lembaga pemerintah dilakukan melalui pemilu, kudeta, penunjukkan, maupun pengangkatan. Seluruh proses ini berkaitan dengan proses komunikasi yang bertujuan melahirkan simpati dari masyarakat, opini publik yang positif, lahirnya citra yang positif, persuasi, koersi yang melahirkan ketataan dari masyarakat, maupun kecintaan sehingga masyarakat mendukung terpilihnya, atau melahirkan legitimasi atas pemimpin lembaga pemerintahan.
- ii. Kekuasaan.
 - 1) Dalam proses yang dilaksanakan oleh pemerintah terdapat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah berupa pengaruh maupun penggunaan sifat negara yang memaksa dalam bentuk perintah yang didasarkan pada aturan hukum.
 - 2) Masyarakat memiliki pengaruh pada pemerintah melalui proses komunikasi aspirasi masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
 - 3) Diantara masyarakat terdapat kekuasaan yang dibentuk dan memiliki legitimasi selain kewenangan negara, baik itu kekuasaan tradisi, kharismatik, maupun organisasi masyarakat. Kekuasaan yang ada dalam masyarakat terbangun dari hubungan relasi antar masyarakat itu sendiri. Sehingga terjadi proses komunikasi diantara masyarakat baik itu untuk mewujudkan tujuan umum mereka atau mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah.
 - iii. Kebijakan umum
 - 1) Pemerintah melakukan pengumpulan aspirasi rakyat untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum.
 - 2) Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
 - iv. Parpol dan organisasi sosial
 - 1) Parpol melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat, sosialisasi dan pendidikan politik, memobilisasi massa

untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu melalui kampanye dan promosi kadernya maupun kebijakan alternatif yang ditawarkan.

- 2) Parpol mengkomunikasikan hasil pengumpulan aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah.
- 3) Parpol melakukan komunikasi politik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan politik.
- 4) Organisasi sosial melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan pendidikan politik bagi masyarakat baik untuk melakukan perubahan sosial maupun untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Alur komunikasi yang dijelaskan diatas merupakan alur komunikasi yang terjadi pada negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara pada negara yang menerapkan prinsip-prinsip otoritarian maupun totalitarian, pola komunikasi berlangsung satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam bentuk perintah, doktrin, maupun ancaman.

4. Rangkuman

- a. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan media sebagai saluran penyampaian. Harapan dari kegiatan komunikasi adalah tercipta dampak bagi pihak yang menerima, baik berupa pengetahuan, emosional, dan perilaku.
- b. Komunikasi dilakukan dalam bentuk intrapribadi, antarpribadi, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Hakikatnya komunikasi dipengaruhi oleh berbagai lingkungan atau situasi dimana proses komunikasi itu terjadi.
- c. Politik adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, warga negara, organisasi sosial, dalam mewujudkan tujuan negara.
- d. Upaya-upaya politik itu terwujud dalam bentuk kekuasaan, administrasi, peran Parpol dan organisasi sosial, serta hubungan antar bangsa. Dalam keseluruhan proses politik tersebut ada peran komunikasi. Baik dalam bentuk penyamaan tujuan,

kepentingan, maupun upaya mempengaruhi lahirnya kebijakan politik yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan aktor politiknya. Upaya-upaya politik tersebut disebut sebagai bentuk agregasi (pengumpulan aspirasi politik), artikulasi (penyampaian aspirasi politik) sosialisasi, dan implementasi kebijakan politik.

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

c. Latihan

- iv. Setiap mahasiswa memberikan respon terkait definisi komunikasi dan politik sebagai sebuah kegiatan manusia dan disiplin ilmu.

d. Lembar Kerja Praktik

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menyebutkan definisi yang disebutkan para ahli yang berkaitan dengan komunikasi dan politik.

No	Nama Tokoh	Pokok Pikirannya
1		
2		
3		

6. Evaluasi Pembelajaran

- b. Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas defenisi komunikasi dan politik sebagai kegiatan manusia.

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2: Komunikasi Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi politik sebagai bentuk kegiatan dalam politik.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Kita sering mendengar ada yang mengatakan komunikasi politik dan politik komunikasi, makna dari 2 kalimat ini tentu berbeda. “Politik Komunikasi” maksudnya mengkaji komunikasi dari aspek politiknya, contohnya setiap peristiwa komunikasi yang bermuatan politik terjadi seperti pertemuan non formal antara petinggi Parpol, forum-forum di sidang-sidang komisi di DPR, shilaturahmi politik Partai Golkar, kunjungan PKS (partai oposisi) ke Istana Presiden lalu menyebut partainya sebagai oposisi yang loyal, pidato tokoh politik, politisasi media, seperti juga peristiwa adanya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersamaan pertemuan Presiden Jokowi dengan para pelawak di Istana yang bisa jadi sebuah pesan yang bermuatan politik untuk disampaikan kepada khalayak untuk mempengaruhi opini publik, dan berbagai peristiwa lainnya. Sedangkan Komunikasi politik bisa dikatakan berbeda dengan politik komunikasi, penempatan kata yang dipindahkan akan bermakna sangat berbeda cara memahaminya. Kalau komunikasi politik artinya adalah politik sebagai pesanpesan komunikasi, yaitu bagaimana politik yang berkaitan dengan pengaruh, kekuasaan, kewenangan, nilai, ideologi, kebijakan umum, distribusi kekuasaan menjadi pesan yang disampaikan secara sirkular dari pengirim (komunikator politik) kepada penerima (komunikan), *audience* atau khayalak politik.

Hakikatnya kedua konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain. Politik mempengaruhi komunikasi bisa dilihat dari berbagai kegiatan politik seperti pada saat pemilu, terdapat pengaturan yang mewajibkan media massa mempublikasikan Parpol maupun kandidat dalam pemilu secara setara dan netral. Sedangkan komunikasi mempengaruhi politik dapat dilihat dari berbagai aksi protes, demonstrasi, yang kemudian diberitakan secara massif oleh media massa sehingga mempengaruhi opini publik dan memaksa pemerintah mengubah atau melahirkan kebijakan politik tertentu. Mendefinisikan komunikasi politik tidak dilakukan dengan sekedar menggabungkan definisi dari

komunikasi dan politik. Namun komunikasi politik memiliki arti atau definisi yang berdiri sendiri. beberapa definisi yang dapat ditemukan tentang komunikasi politik dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah (Wahid, 2016).
- b. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya serta diantara sistem sosial dan sistem politik.
- c. Gabriel Almond mendefinisikan komunikasi politik suatu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, berkaitan dengan keterkaitan mengenai isu-isu politik, pembuatan peraturan politik, aturan aplikasi, dan aturan-aturan lainnya yang melibatkan proses serta tindakan komunikasi (Shulhan, 2013).
- d. McNair mendefinisikan Komunikasi politik murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan UU atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda (Cangara, 2009).
- e. Dan Nimmo: komunikasi politik adalah cara seseorang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian (Nimmo, 2000).
- f. Onong Uchjana Effendy: Komunikasi politik merupakan suatu aktivitas pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau suatu lembaga dalam upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam fungsi sebagai pelaksana pemerintahan maupun sebagai anggota sebuah struktur sosial masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu kebijakan sistem kekuasaan atau pemerintah dalam berbagai komponen (Effendy, 1989).

Dapat dilihat bahwa berbagai definisi diatas dapat dipakai oleh mahasiswa untuk memahami komunikasi politik secara komprehensif. Hakikatnya proses mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik itu adalah jika semakin jelas sebuah pesan komunikasi berkaitan dengan politik hingga memberikan dampak terhadap politik maka semakin signifikan pula komunikasi tersebut dinilai sebagai komunikasi politik.

McNair memberi batasan atau definisi komunikasi politik antara lain (Wahid, 2016):

- a. Semua bentuk komunikasi yang digunakan politikus dan aktor politik untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
- b. Komunikasi yang disampaikan oleh aktor atau pelaku politik non politikus seperti pemilih dalam pemilu dan kolumnis politik di media massa.
- c. Komunikasi mengenai para aktor atau pelaku politik dan aktivitasnya seperti pada berita, editorial, dan bentuk lainnya dari media politik.

Sementara objek yang dikaji dalam kegiatan komunikasi politik dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dalam *i)* Organisasi Politik; Parpol, organisasi publik, kelompok penekan, organisasi teroris, dan pemerintah. *2)* Media dan *3)* Masyarakat.

Melvin L. Defleur merumuskan 3 faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik (Muhtadi, 2008):

- a. Lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi itu disampaikan.
- b. Situasi sosiokultural, yakni komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang didalamnya terkandung makna kultural tertentu sekaligus menjadi identitas para pelaku yang terlibat di dalamnya.
- c. Hubungan sosial, yakni status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri maupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Sementara saluran yang dipakai dalam komunikasi politik diantaranya melalui (Wahid, 2016):

- a. Komunikasi massa – paling banyak menggunakan media massa, maupun media internet.
- b. Komunikasi interpersonal.
- c. Komunikasi organisasi

Dari berbagai penjelasan tentang definisi, faktor yang mempengaruhi, serta bentuk komunikasi politik, dapat dilihat bahwa komunikasi politik sangat penting dalam menjembatani transformasi ide, kepentingan, dan tujuan politik. Baik itu untuk mempengaruhi, membentuk pendapat atau opini, hingga

mengubah perilaku politik dapat dilakukan melalui proses komunikasi politik.

Bagi negara demokrasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers atau media massa merupakan salah bahasan penting yang wajib ada. Sebab dengan keberadaannya dapat menunjang terjadinya kontrol atas kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun elit politik, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki tidak dapat disalahgunakan. Bahkan Almond dan Powell menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik (Wahid, 2016). Sumarno dan Didi Suhandi (1993) mengajukan pendapat bahwa komunikasi politik merupakan sebuah proses, prosedur, dan kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam sistem politik itu sendiri. dalam ungkapan yang lebih terbuka, komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Disampaikan oleh komunikator politik.
- b. Pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara.
- c. Terintegrasi dalam sistem politik.

Dalam proses komunikasi politik terjadi perdebatan kepentingan, perdebatan memperebutkan kekuasaan, dan tujuan masing-masing pihak yang secara esensi untuk mengelola sumber daya manusia serta lingkungan mereka.

Menurut Ardial Metode komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi politik adalah (Ardial, 2010):

- a. Informatif. Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum. Jadi dengan penerangan (*information*) berarti, pesan-pesan yang dilontarkan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. *Persuasive* Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak akan diduga jalan pikirannya, dan terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu

khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Dengan demikian penggunaan metode ini menganjurkan komunikator agar terlebih dahulu menciptakan situasi di mana komunikasi mudah terkena sugesti. Situasi yang mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada khalayak.

- c. Edukatif. Salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, walaupun hal ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode persuasif.
- d. Koersif. Metode koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat, selain pendapat dan pengalaman juga berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan ke dalam bentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelaksanaannya didukung oleh kekuatan tangguh. Menyusun pernyataan umum yang bersifat koersif tidaklah seluwes pernyataan umum yang lain, dan karena memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa aktivitas dan unsur-unsur komunikasi politik antara lain:

- a. Peran media massa dan media baru berbasis internet.
- b. Komunikator politik dengan segala agenda dan teknik komunikasi yang digunakan.
- c. Pesan politik itu sendiri sebab akan melahirkan opini dan upaya pencapaian tujuan politik.
- d. Khalayak komunikasi politik, atau penerima pesan politik.
- e. Efek komunikasi politik, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh pesan politik pada khalayak.

Sementara bentuk atau kegiatan komunikasi politik yang dapat terwujud dalam kelahiran kebijakan, kesamaan kepentingan dan tujuan, hingga tercapainya

tujuan dan kepentingan itu sendiri. Adapun bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh para politikus antara lain:

- a. Retorika politik – seni berpidato dalam konteks politik.
- b. Agitasi politik – hasutan/persuasi
- c. Propaganda
- d. *Public relations* politik – menciptakan citra dan menjalin hubungan.
- e. Lobi politik
- f. Kampanye politik
- g. Pemasaran politik
- h. *Branding* dan promosi politik
- i. Penelitian politik

Sebagian dari bentuk-bentuk komunikasi politik ini akan dibahas secara tersendiri pada modul-modul berikutnya. Alasan sebagian, adalah karena pengaruh yang ditimbulkan, tanpa mengesampingkan bentuk yang lain tidak penting atau tidak diperlukan.

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan *public opinion* (pendapat umum) dan bisa pula untuk melawan pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Ardial, 2010). Beberapa tujuan komunikasi politik antara lain (Arifin, 2006):

- a. Membangun Citra Politik. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.
- b. Membentuk dan Membina Pendapat Umum Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga

terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan. Masyarakat primitif yang dicirikan dengan tingkatan melek-huruf yang rendah dan tidak memiliki keahlian teknis dan sarana untuk mengembangkan media massa modern, maka barang cetakan dan siaran radio merupakan sarana utama, dengan mana informasi politik disampaikan kepada setiap sistem politik. Bersamaan dengan itu, saluran komunikasi lainnya adalah sangat penting, dan jelas sering lebih politis sifatnya. Kelompok kepentingan dan partai-Parpol, meskipun berbeda dari sistem yang satu dengan yang lain sangat vital sekali bagi proses komunikasi, karena menyajikan saluran yang dapat mengadakan kontak antara para pejabat politik dan pejabat-pejabat administratif, serta rakyat pada umumnya. Keanggotaan organisasi politik dan quasi politik dapat melibatkan seseorang dalam komunikasi politik yang hanya bersifat sementara; akan tetapi para partisipan yang ikut terlibat dalam komunikasi menjadi lebih akrab, di mana informasi diteruskan secara vertikal dari para pemegang posisi yang lebih tinggi dalam suatu hierarki partisipasi, dan diteruskan secara horisontal antara para anggota aktivis pada tingkatan yang sama, baik sebagai anggota suatu organisasi yang sama, maupun antara sesama organisasi. Dibandingkan dengan media massa yang dapat dianggap sebagai sarana umum dari komunikasi politik, maka kelompok kepentingan dan partai-Parpol itu lebih khusus dan lebih sering terlibat dalam proses komunikasi (Althoff M. R., 2008). Pendapat umum sebagai kekuatan politik tidak hanya mampu mendukung suatu pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk menggulingkannya. Seperti apa yang dialami oleh Soekarno, Soeharto dan Abd. Rahman Wahid, baik melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui pergolakan- pergolakan atau aksi-aksi massa, atau kedua-keduanya (aksi massa dan parlemen). Sehingga pendapat umum harus dapat dibentuk, dipelihara, dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui komunikasi politik yang intensif, persuasif ataupun informatif,

edukatif dan koersif (Arifin, 2006).

- c. Mendorong Partisipasi Politik Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang (khalayak) mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun Parpol tertentu dalam pemilihan umum.

Komunikator Politik

Sosiolog J.D Halloran mengemukakan kritikan terbesarnya kepada para ahli komunikasi yang dianggapnya terlalu berfokus pada pembahasan tentang dampak yang ditimbulkan oleh komunikasi. Mereka mengabaikan peran komunikator politik. Padahal komunikator politik adalah komunikator massa yang menduduki posisi penting yang peka di dalam jaringan sosial, menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam sistem sosial yang bersangkutan (Halmos, 1969). Para komunikator politik berperan penting dalam pembentukan opini publik. Salah satu teori terkemuka tentang ini dikemukakan oleh Karl Poper, yang mengungkapkan teori opini publik yang dibangun di sekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam teori ini pemimpin politik menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, dipertimbangkan dan akhirnya diterima (Nimmo, 1993).

Leonard W. Doob menyarankan jenis-jenis sifat yang perlu diketahui tentang komunikator politik yaitu (Nimmo, 1993):

- a. Bahwa mereka sebagai dirinya sendiri yaitu seorang individu.
- b. Sikap mereka terhadap khalayak.
- c. Martabat yang diberikannya sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya, jadi jika khalayaknya dianggap tolol maka komunikator politik akan menurunkan nada pesan politiknya sama rendahnya.
- d. Komunikator memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya.
- e. Pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

Memang kita tidak mampu mengidentifikasi seluruh sifat yang dimiliki oleh

komunikator politik ini. Namun kita dapat memulainya dengan menetapkan 3 kategori komunikator politik, yaitu (Nimmo, 1993).

- a. **Politikus Sebagai Komunikator Politik.** Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Mereka ini disebut sebagai politikus, tak peduli apakah mereka dipiliha, ditunjuk, atau pejabat karir, baik itu di eksekutif, legislatif atau yudikatif. Ada 2 jenis politikus yaitu politik ideolog dan politikus partisipan. Para politikus memiliki 2 kewenangan utama yaitu, mempengaruhi alokasi ganjaran yang ada dan mengubah struktur sosial agar sesuai dengan tujuannya, serta mencegah perubahan struktur sosial atau alokasi ganjaran agar pemenuhan tujuan kepentingannya tetap bertahan. Politikus *partisipan*, berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok, pesan-pesan politik yang diajukan untuk melindungi tujuan kepentingan politik kelompoknya. Sementara politikus *ideolog* berfokus pada menetapkan tujuan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. Politikus *ideolog* tidak mewakili kepentingan tertentu yang bersifat transaksional, namun diarahkan pada mengarahkan masyarakat pada satu tujuan. Secara umum terdapat jenis-jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik diantaranya adalah *i)* para pejabat pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka mengkomunikasikan berbagai masalah nasional yang multikompleks terkait bagaimana cara menyelesaikannya, serta mencari dukungan dari masyarakat terhadap ide alternatif kebijakan yang mereka ajukan. *2)* Politikus yang merupakan para pejabat pemerintahan pada aspek-aspek tertentu yang ada di eksekutif, seperti lembaga kementerian, badan, maupun departemen. Mereka mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi masalah sosial yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Misalnya para pejabat di lembaga kementerian pertahanan akan mengkomunikasikan terkhusus pada masalah keamanan dan militer. Sementara pejabat pada kementerian kesehatan akan berfokus mengkomunikasikan tentang masalah kesehatan dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar terus dipercaya. *3)* Politikus yang menjabat di tingkat lokal namun

menyelesaikan masalah yang multikompleks pada wilayah tertentu, seperti para gubernur, bupati, camat dan kepala desa. Mereka mirip dengan politikus yang pertama namun skala kekuasaannya lebih kecil. 4) Politikus yang tidak memegang jabatan pemerintahan namun memiliki pengaruh politik yang besar, seperti para mantan presiden, gubernur, mantan anggota legislatif, dimana mereka turut mengkomunikasikan pemikiran dan pendapat mereka sesuai dengan pengalaman dan tujuan anggota partai atau kelompok yang diwakili. Pada akhirnya kita dapat merumuskan jenis-jenis politikus ini diantaranya politikus yang berada di dalam dan diluar jabatan pemerintahan, politikus yang berpandangan nasional dan subnasional, dan politikus yang berurusan dengan masalah yang multikompleks dan masalah tunggal.

- b. **Komunikator Profesional Dalam Politik.** Profesi komunikator profesional dalam politik ini lahir seiring berkembangnya media massa yang semakin melintasi ruang dan waktu, dan kelas sosial yang menciptakan publik baru untuk meningkatkan kesadaran nasional. Komunikator politik profesional lahir sebagai aktor penengah yang memiliki keahlian komunikasi yang mampu mengolah simbol-simbol dan yang memanfaatkan ketrampilan ini untuk menciptakan persatuan dari kelompok yang berbeda, baik berbeda secara fisik maupun berbeda kepentingan dan tujuan. Mereka menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dapat menarik dan dimengerti. Mereka menghubungkan golongan elit dengan elit organisasi lain atau komunitas lain, dan dengan khalayak umum. Sehingga posisi mereka ada di tengah-tengah antara tuntutan kebutuhan khalayak dan tuntutan sumber pesan politik, atau politikus yang membayar mereka. Komunikator profesional dalam politik dapat diidentifikasi sebagai kolumnis, editorial, pengamat, komentator, dan konsultan politik. Dalam tugas yang mereka jalankan bukanlah tidak mungkin jika mereka memasukkan opini pribadi mereka dalam komunikasi politik yang mereka lakukan. Para profesional ini menjual keahliannya dalam memanipulasi, menjualkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan kepada para politikus yang lain. Meski ada konsultan politik atau konsultan kampanye politik yang hanya bekerja untuk politikus dari

Parpol atau pandangan ideologis tertentu. Mereka bisa saja menggunakan jaringan media massa sebagai saluran kepentingan komunikasi politik mereka, atau menggunakan lembaga resmi yang disebut sebagai lembaga konsultan politik termasuk melakukan survey untuk membentuk opini publik masyarakat.

- c. **Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu.** Aktivis yang berperan sebagai komunikator politik dapat diidentifikasi sebagai jurubicara organisasi, dan pemuka pendapat. *Pertama*, Sebagai jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi pada umumnya mereka tidak mencita-citakan jabatan pada lembaga pemerintahan. Jurubicara ini disebut sebagai saluran organisasional. Mereka bukan politikus dan bukan komunikator profesional, namun mereka cukup baik dalam politik dan komunikasi sehingga dapat disebut sebagai aktivis politik dan semiprofesional dalam komunikasi politik. Berbicara untuk kepentingan yang terorganisasi merupakan peran yang sama dengan para politikus partisan, yakni mewakili tuntutan anggota organisasi dan tawar-menawar dalam politik transaksional untuk mewujudkan kepentingan organisasi. Mereka berperan pada tingkat nasional maupun subnasional-lokal, baik pada masalah yang multikompleks atau masalah yang tunggal – pada bidang tertentu. Kelompok ini terkadang lebih didominasi oleh peran yang dimainkan oleh pemimpin organisasi, seperti di Indonesia pada masa lalu ada Haris ashar, ketua Kontras, atau Asfinawati, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Kedua*, jaringan interpersonal mencakup komunikator politik yakni Pemuka Pendapat (*opinion leader*). Masyarakat memiliki kecenderungan untuk meminta pendapat dari orang yang dianggapnya memiliki keahlian politik, jika mereka ingin membuat keputusan politik mereka. Orang yang diminta pendapat ini disebut sebagai pemuka pendapat. Mereka sangat mempengaruhi keputusan orang lain. Selain memberi petunjuk, para pemuka pendapat ini menjadi penerus informasi dari media massa kepada masyarakat yang tidak aktif dan tidak cukup memiliki pemahaman tentang politik. Para pemuka pendapat ini bisa karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian politik seperti mahasiswa, dosen, ahli dan pengamat politik, atau para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kharisma dan kewibawaann di tengah

masyarakat. Terkadang para mantan atau pensiunan politisi dan pejabat pemerintahan mampu memainkan perannya sebagai pemuka pendapat ini.

Dan Nimmo (2000) menyebutkan bahwa semua orang adalah komunikator politik, siapapun yang dalam *setting* politik adalah komunikator politik. Hal ini terbentang mulai dari level terbawah (rakyat) sampai level atas (elit).

Selanjutnya komunikator infrastruktur yang mempunyai fungsi politik (*input*) yaitu memberikan respon dari umpan balik atas kebijakan publik (*public policy*) yang dikeluarkan (*output*) oleh suprastruktur. Respon yang diberikan infrastruktur adalah berupa tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) di konversi (diolah dan diracik) menjadi bahan pertimbangan atau alternatif untuk membuat kebijakan. Dalam proses sistem politik tersebut diungkap oleh G.A. Almond dan S. Coleman dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

- a. Parpol (*political party*).
- b. Kelompok kepentingan (*interest group*)
- c. Kelompok penekan (*pressure group*)
- d. Tokoh politik (*political figure*)
- e. Alat-alat komunikasi politik (*political communication tools*)

Kelima kelompok komunikator infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan menggerakkan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar berpihak kepada mereka. Karena itu elit-elit suprastruktur sangat berkepentingan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi dengan komunikator infrastruktur terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelompok komunikator infrastruktur tersebut selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit kekuasaan seperti pada pemilihan umum dan pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Oleh karena itu kita dapat merumuskan apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh komunikator politik, diantaranya adalah (Tabroni, 2014):

- a. Kemampuan berkomunikasi yang mumpuni. Mereka harus memiliki kemampuan menyampaikan argumen, gagasan, dan pemikiran kepada publik. Dengan menurunkan sebuah argumen yang abstrak menjadi pesan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
- b. Memiliki kesempatan dan kapasitas sebagai pemimpin. Seorang

komunikator harus memiliki karisma sehingga lebih mudah mempengaruhi publik yang menerima pesan politik.

- c. Memiliki keilmuan yang cukup di bidangnya. Seorang komunikator harus memahami secara baik konteks dan pesan apa yang ingin disampaikan.

Hubungan antara pembentuk opini publik dan masyarakat dapat dilihat dalam bentuk (Ardial, 2010):

- a. Pemimpin opini sangat berpengaruh dalam memengaruhi proses kebijakan politik di Indonesia. Seperti para tokoh agama dan suku yang mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat atau Parpol tertentu. Seperti pemilu dengan sistem noken di Papua.
- b. Pemimpin opini publik menjadi penggerak penolak kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
- c. Pemimpin opini publik mampu membantu pemerintah dalam pembangunan. Seperti menciptakan pemikiran yang sama sehingga tercipta kestabilan politik.

4. Rangkuman

- a. Komunikator politik diantaranya adalah politisi, profesional yang dipakai oleh politisi, dan aktivis politik.
- b. Kategori komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi ini diklasifikasikan berdasarkan tingkatan nasional dan subnasional, masalah multikompleks dan masalah tunggal.
- c. Mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk mentransformasikan pesan agar mudah dipahami oleh publik

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Setiap mahasiswa dipersilahkan untuk mengidentifikasi siapa saja komunikator politik, pesan politiknya apa, masalah yang menjadi objek komunikasinya apa, tingkatan politiknya nasional atau subnasional serta tujuan yang diharapkan itu apa.
- ii. Latihan ini dipresentasikan di kelas dan menjadi bahan diskusi dalam kelas.

b. Lembar Kerja Praktik

6. Evaluasi Pembelajaran

- a. Hasil identifikasi mahasiswa atas komunikator politik di Indonesia.
- b. Tanggapan dan diskusi dalam kelas terkait materi dan tugas latihan.

7. Umpan Balik

B. Penutup

1. Rangkuman

Komunikasi politik dipandang secara beragam oleh para ahli, sebagian mendefinisikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari politik itu sendiri karena dalam politik terjadi proses transaksional kepentingan dan tujuan yang ingin diraih. Komunikasi politik juga dimaknai sebagai bentuk kegiatan, proses, dan prosedur yang melekat pada seluruh kegiatan sistem politik mulai dari pembuatan kebijakan, perebutan dan mempertahankan kekuasaan, dan mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu dalam negara demokrasi kegiatan komunikasi politik merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dengan adanya implementasi kebebasan pers, dan kebebasan berbicara oleh seluruh aktor politik maupun masyarakat umum. Sehingga pada akhirnya kita dapat mengidentifikasi apa saja bentuk dan kegiatan komunikasi politik yang akan diperdalam pada modul-modul selanjutnya sebagai bagian dari pendalaman materi komunikasi politik.

Peran komunikator merupakan peran sentral dalam proses komunikasi politik. Komunikator menentukan kualitas dari proses komunikasi politik, sampai pada pengaruh seperti apa yang dapat ditimbulkan dari pesan yang disampaikannya. Semua orang dapat dikategorikan sebagai komunikator politik khusus pada negara demokrasi, sebab dalam demokrasi setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan kepentingan dan tujuan politiknya masing-masing. Kemampuan menentukan dan mengidentifikasi komunikator politik dapat membantu mahasiswa untuk menjelaskan tujuan politik dan kepentingan politik yang ingin diraih atau diperjuangkan. Kemampuan ini sangat penting

bagi mahasiswa politik untuk menentukan langkah dan strategi atau pesan politik yang dapat disampaikan sebagai respon dalam interaksi politik.

4. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Agitasi	Hasutan
Persuasi	Ajakan
Verbal	Kata-kata
Non verbal	Simbol, atau tanda
Oposisi	Lawan
Editorial	Sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan.
Kolumnis	Jurnalis yang menulis untuk publikasi dalam suatu seri, dan membuat suatu artikel yang sering kali memberikan komentar atau pendapat.

Daftar Pustaka

- Althoff, M. R. (2008).** *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Althoff, R. d. (1997). *Pengantar Sosial Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Arifin, A. (2006). *Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi, R. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Makassar : Kretakupa.
- Budyatna, M. (2015). *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Effendy, O. U. (1994). *Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Efriza, Y. R. (2015). *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Hardjana, A. M. (2003). *Komunikasi intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, A. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Kampanye Politik*. Bandung : Humaniora.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Satu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nimmo, D. (1993). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remadja Posdakarya.
- Rudy, T. M. (2003). *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Sendjaja, S. D. (1994). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Shulhan, G. G. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhandi, S. d. (1993). *Pengantar Studi Komunikasi Politik*. Bandung: Orba Shakti.
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. II*. Jakarta: PT Indeks.
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik, Teori, Konsep, Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wiryanto. (2001). *Teori komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.

MODUL 6

METODE REPRESENTASI (SISTEM PEMILIHAN DAN SISTEM KEPARTAIAN)

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Pada Modul 6 ini mahasiswa akan mempelajari metode representasi meliputi sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Sistem pemilu dan sistem partai merupakan salah satu kajian penting dalam studi perbandingan politik yang dapat menjelaskan fenomena politik serta kekhasan budaya politik dalam suatu masyarakat. Dalam modul ini mahasiswa akan dibantu untuk memahami secara mendasar jenis dan cara kerja sistem serta perbedaan sejumlah sistem pemilu dan kepartaian yang berlaku di dunia.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 6 ini adalah:

- a. CP1 : Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- b. CP2: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- c. CP3: Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena politik
- d. CP 4 : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan masalah sosial, sistem pemilu dan sistem kepartaian sebagai salah satu kajian dalam perbandingan politik
- e. CP 5 : Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia
- f. CP 6 : Mahasiswa mampu menyusun analisa perbandingan politik

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 6 ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami jenis dan cara kerja sistem pemilu serta kepartaian
- b. Mahasiswa mampu melakukan kajian perbandingan terhadap sistem pemilu dan sistem kepartaian di dunia

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 6

Kegunaan atau manfaat dari Modul 6 ini adalah mempelajari metode representasi meliputi sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Sistem pemilu dan sistem partai merupakan salah satu kajian penting dalam studi perbandingan politik yang dapat menjelaskan fenomena politik serta kekhasan budaya politik dalam suatu masyarakat.

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dalam Modul 6 ini adalah metode representasi politik meliputi sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian di dunia.

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Sistem Pemilihan Umum

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah: Mahasiswa mampu memahami jenis dan cara kerja sistem pemilihan umum di dunia. Dengan pemahaman ini maka mahasiswa kemudian dapat memahami cara kerja dan menganalisa isu politik terkait dengan sistem pemilihan umum di Indonesia.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Pilihan atas sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi demokrasi di mana pun. Dalam hampir semua kasus pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan, dan sistem politik, begitu sudah dipilih, sering kali tetap sangat konstan seiring berbagai kepentingan politik mengukuhkan diri di seputar dan merespons insentif-insentif yang ditawarkan sistem tersebut. Meski begitu, walaupun desain yang sengaja dibuat sudah semakin lazim dijumpai belakangan ini, secara

tradisional jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan disengaja. Sering kali pilihan pada dasarnya adalah suatu kebetulan, hasil dari kombinasi tak lazim berbagai situasi, sebuah tren yang mencuat sesaat, atau keganjilan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan efek negara-negara tetangga berpengaruh sering kali sangat kuat.

Setiap demokrasi baru harus memilih (atau mewarisi) sebuah sistem pemilu untuk memilih badan legislatifnya. Sementara itu, krisis politik di setiap negara demokrasi mapan bisa membawa pada momentum bagi perubahan sistem pemilu, bahkan tanpa krisis politik pun para penganjur pembaruan politik mungkin saja berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik. Keputusan-keputusan untuk mengubah, atau mempertahankan, sebuah sistem pemilu sering kali dipengaruhi oleh satu dari dua keadaan:

- a. para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem-sistem pemilu yang berlainan tidak sepenuhnya dimengerti;
- b. atau, sebaliknya, aktor-aktor politik menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem pemilu untuk mempromosikan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi keunggulan partisan mereka sendiri.

Pilihan-pilihan yang diambil boleh jadi membawa konsekuensi yang tidak diduga ketika pilihan-pilihan tersebut diterapkan, di samping berbagai efek yang sudah diperkirakan. Pilihan-pilihan tersebut mungkin bukan selalu yang terbaik bagi kesehatan politik jangka panjang negara yang bersangkutan, dan kadang-kadang bisa mendatangkan konsekuensi merusak bagi prospek demokratisnya.

Sejumlah konsekuensi lain dari sistem pemilu dapat melampaui efek yang sudah disebutkan di atas. Beberapa sistem mendorong bahkan memaksakan, pembentukan partai-partai politik; sedangkan sistem-sistem lainnya hanya mengakui kandidat-kandidat perorangan. Jenis partai yang berkembang, khususnya jumlah dan ukuran relatif partai-partai politik dalam badan legislatif, sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. Begitu pula kohesi internal dan disiplin partai: sebagian sistem mungkin mendorong faksionalisme, di mana sayap-sayap berlainan sebuah partai terus-menerus saling bertikai, sementara sebagian sistem yang lain mungkin mendorong partai berbicara dengan suara tunggal dan mencegah perbedaan pendapat.

Sistem pemilu juga bisa mempengaruhi cara kampanye partai dan cara elite politik berperilaku, dengan demikian berperan dalam menentukan iklim politik lebih luas; sistem pemilu bisa mendorong, atau menghambat, pembentukan persekutuan antara berbagai partai; di samping bisa memberi insentif bagi partai-partai maupun kelompok-kelompok untuk membuat basis lebih luas dan mengakomodai, atau mendasarkan diri pada daya tarik Tinjauan Umum sempit etnisitas atau ikatan kekerabatan.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakilwakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen. Elemen pemilu tersebut adalah:

- a. Electoral Law yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu. *Electoral law* ini ada dua macam yaitu *Plural Majority* dan *Proportional Representation*.
- b. Electoral Process yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan. Electoral process ini meliputi D'Hont, St. League, *Electoral Threshold*, dan *Parliamentary Threshold*

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate. Syarat minimal dari pemilu adalah free dan fair.

Setelah beberapa syarat pemilu terpenuhi, maka diharapkan pemilu dapat terlaksana secara demokratis sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate. Untuk mengukur derajat kualitas pemilu diperlukan beberapa indikator sebagai tolok ukurnya. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*),

keterwakilan (representativeness), keadilan (fairness), persamaan hak tiap pemilih (equality), lokalitas, reliabel, numerikal.

Sistem pemilu memiliki dimensi yang sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain adalah:

- i. Penyuaaraan (balloting). Penyuaaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya).
- ii. Besaran distrik (district magnitude). Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperebutkan kursi.
- iii. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikian). Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikian, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.
- iv. Formula pemilihan (electoral formula). Formula pemilihan adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
- v. Ambang batas (threshold). Threshold yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil pemilu.
- vi. Jumlah kursi legislatif. Berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum

diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya.

Keenam unsur tersebut di atas yang membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur tersebut. Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya rekayasa sistem pemilu dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

Pemilihan sistem pemilu di suatu negara memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Diperlukan beberapa kriteria untuk memilih sebuah sistem pemilu untuk diterapkan di sebuah negara. Kriteria untuk memilih sistem pemilu tersebut adalah:

- d. Elemen demokrasi
 - i. Menciptakan parlemen yang representatif Membuat pemilu yang mudah diakses dan bermakna
 - ii. Memberi peluang untuk konsiliasi
 - iii. Memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien
 - iv. Menciptakan pemerintah dan yang representative dan akuntabel
 - v. Mendorong 'cross-cutting' partai politik
 - vi. Memberi peluang oposisi
 - vii. Biaya dan kapasitas administratif
- e. Keseimbangan
 - i. Pengaruh pemilih dengan perkokoh parpol
 - ii. Kesederhanaan sistem dengan peluang berinovasi
 - iii. Solusi jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang
 - iv. Bangun sistem pemilu berdasar sistem yang pernah ada tanpa terpenjara dimensi historis sistem tersebut
 - v. Sistem pemilu bukan solusi untuk semua permasalahan politik
- f. Dampak Terhadap Sistem Politik
 - i. Tingkat proporsionalitas yaitu hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilih
 - ii. Format kabinet yang akan terbentuk Bentuk sistem kepartaian yaitu jumlah parpol

- iii. Akuntabilitas pemerintahan yaitu konsensus/konfrontasi dalam legislatif dan pemerintahan
- iv. Struktur internal parpol
- v. Tingkat partisipasi warga masyarakat
- vi. Merubah tampilan atau wajah demokrasi

Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 4 (empat) keluarga besar, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem di luar ketiga sistem utama. Secara rinci keluarga sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

a. Sistem Distrik

Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian block vote dan party block vote. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas first past the post, alternative vote, two round system, block vote

b. Sistem Proporsional

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah district magnitude. Variasi dari sistem ini adalah proportional representation dan single transferable vote. Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara garis besar teknik penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan divisor.²⁰ Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (the largest remainder) terdapat beberapa varian di antaranya varian Hare dan Droop. Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. Teknik divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi (the highest average) muncul berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik divisor adalah D'Hondt, Saint Lague.

c. Sistem Campuran

Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem parallel dan mixed member proportional.

b. Sistem Pemilu di luar ketiga sistem utama

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah single non-transferable vote, limited vote, dan borda count. Setiap sistem pemilu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing yang berimplikasi pada pembangunan politik. Setidaknya ada tiga dampak digunakannya sistem pemilu, yaitu:

- i. tingkat proporsionalitas perwakilan. Aspek ini sangat sensitif pada masyarakat yang heterogen. Bagaimana tingkat keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat dapat direpresentasikan dalam parlemen merupakan sebuah permasalahan dalam aspek ini. Disproporsionalitas sangat mungkin terjadi pada sistem distrik. Sistem distrik kurang memperhatikan adanya partai kecil dan golongan minoritas.
- ii. sistem kepartaian. Duverger menyebutkan bahwa sistem distrik akan membentuk sistem dua partai, sedangkan sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai. Hal tersebut terjadi karena bekerjanya efek mekanis dan psikologis dari sistem pemilu.
- iii. kabinet yang dibentuk. Sistem distrik cenderung menghasilkan kabinet yang dikuasai satu partai. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antar partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional. Sementara itu, sistem proporsional mengarah pada terbentuknya kabinet koalisi. Kondisi ini mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi (Cipto, 2000)

Ketercukupan mayoritas kursi sehingga terbentuk mayoritas pemerintahan tidak menjamin stabilitas dan kelanggengan koalisi apabila

tidak memperhitungkan jarak ideologi dari koalisi yang dibangun. Menurut Lijphart, ada 6 (enam) model koalisi, yaitu:

- i. minimal winning: merupakan koalisi yang didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak perlu.
- ii. minimum size: koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.
- iii. bargaining proposition: koalisi dengan jumlah partai yang berkoalisi paling sedikit.
- iv. minimal range: koalisi berdasarkan kedekatan pada kecenderungan ideologis.
- v. minimal connected winning: koalisi yang terjadi antara partai-partai yang memiliki persambungan orientasi kebijakan.
- vi. policy-viable: koalisi yang terjadi antara partai-partai yang secara spesifik memang memiliki kepedulian yang sama berkaitan dengan kebijakan.

Sistem Presidensiil

Menurut Moh. Mahfud MD22, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.

Sejarah sistem pemerintahan presidensial berawal dari lahirnya Negara Amerika Serikat, sebuah negara bekas Koloni Inggris di Benua Amerika untuk memiliki sebuah pemerintahan sendiri yang berdaulat terlepas dari Kerajaan Inggris. Ditahun 1775-1783 terjadi peperangan antara Inggris dengan negara baru Amerika Serikat yang ingin melepaskan diri dari Inggris yang kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat.

Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa:

*” L a t a r b e l a k a n g n e g a r a A m e r i k a
presidensial adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja
George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki
dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka
mereka lebih suka mengikuti jejak Montesqieu dengan mengadakan
pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang*

satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem check and b a l a n c e s . ”

Bentuk penolakan bangsa Amerika terhadap Inggris tercermin dari pembentukan pemerintahan yang berbeda dengan sistem parlementer di Inggris. Salah satu bentuk perbedaannya dengan sistem parlementer itu adalah dengan memberikan kewenangan yang besar terhadap kedudukan presiden.

Jika melihat sejarah perkembangan sistem parlementer, lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki raja, sedangkan perkembangan sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola hubungan presiden dengan lembaga legislatif. 24 Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengadopsinya, selalu diatur di dalam konstitusi di masing-masing negara.

Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Dengan pola hubungan yang terpisah, lebih lanjut Saldi Isra mengatakan bahwa ada keuntungan dari sistem presidensial yakni:

- a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung (direct mandate) pemilih sementara itu, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (appointed indirectly);
- b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (speed and decisiveness);
- d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.

Dalam sistem presidensiil, praktis tidak tersedia ruang gerak bagi partai untuk menawarkan atau menjanjikan visi dan program pemerintahan seperti yang dilakukan partai dalam sistem parlementer. Sistem presidensiil memisahkan dengan jelas wilayah eksekutif dan wilayah legislatif, akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara di parlemen. Karena belum tentu partai politik pemenang pemilu legislatif akan memimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan presidensiil, kedudukan presiden sangat dominan, selaku individu sebagai penanggungjawab atas keberhasilan atau tidaknya pemerintahan, maka langsung atau tidak langsung mempersempit ruang gerak partai politik untuk memunculkan isu-isu politik yang terkait langsung dengan masalah pemerintahan.

Dalam sistem presidensiil, iklim kepartaian memiliki nuansa yang berbeda dengan sistem parlementer. Peran utama partai politik bukan sebagai pengusung ideologi sebagaimana halnya dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensiil, peran partai lebih sebagai fasilitator. Dalam konstitusi Amerika Serikat, sama sekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang fungsi dan tempat partai politik dalam sistem politiknya.

Dalam sistem presidensiil, walaupun presiden diusung oleh partai politik, dalam mengemban misi dan tanggungjawabnya presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih dirinya, terhadap partai yang mengusungnya, presiden bertanggungjawab secara perseorangan/individu. Selaku kepala negara, presiden secara etika kenegaraan, sudah seharusnya melepaskan keterikatannya terhadap partai yang mengusungnya sejak ia terpilih menjadi presiden. Jika dicermati, dalam beberapa kasus, peluang presiden dalam sistem presidensiil untuk menjadi penguasa yang otoriter terbuka lebar. Artinya dengan menggunakan kekuasaan yang absolut, pemerintahan yang dipimpinnya sering mendatangkan ancaman demokrasi, jika dibandingkan dengan kekuasaan presiden dalam sistem parlementer.

Hal tersebut dapat terjadi karena fungsi dan wewenang presiden dalam sistem parlementer terbatas. Dalam sistem presidensiil, pelaksanaan sistem pengawasan bersifat checks and balances antar lembaga negara artinya diantara lembaga-lembaga negara saling mengawasi agar diantara lembaga negara tidak melebihi batas kewenangannya. Di Amerika Serikat sebagai negara yang mencetuskan sistem presidensiil, sistem pembagian kekuasaan di antara lembaga

negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memiliki sistem checks and balances dalam kekuasaannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (Trias Politica) dipraktekkan walaupun tidak sempurna dari ajaran dari Montesquieu.

Setidak-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Dan kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaran, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan (2) salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai

Setiap unsur sistem pemilihan umum terdapat sejumlah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Misalnya, Besaran Daerah Pemilihan terdiri atas dua ukuran, yaitu satu kursi per Dapil (single-member constituency), dan banyak kursi per Dapil (multi-members constituency). Banyak kursi per Dapil dapat dibedakan menjadi tiga ukuran, yaitu Dapil Kecil 2 sampai dengan 5 kursi (Small Constituency), Dapil Sedang 6 sampai 9 kursi (Medium Constituency), dan Dapil Besar 10 atau lebih (Large Constituency). Termasuk yang terakhir ini adalah Dapil Tunggal secara Nasional (single-nation constituency), seperti yang diterapkan Negeri Belanda

dan Timor Leste. Dengan kata lain, terdapat 5 pilihan untuk Besar Daerah Pemilihan dan yang masing-masing memiliki konsekuensi terhadap sistem kepartaian ataupun sistem perwakilan politik.

Proses pembuatan undang-undang Pemilu oleh DPR dan Pemerintah selama ini cenderung tidak memperlakukan sistem pemilihan umum secara komprehensif. Proses penyelenggaraan Pemilu tidak disusun berdasarkan parameter Pemilu yang jelas. Satu-satunya tahap yang diatur dengan prinsip yang jelas adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS . Prinsip yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya enam asas Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi juga dua asas tambahan, yaitu transparan dan akuntabel. UU Pemilu mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta larangan dan sanksinya. Akan tetapi karena dirumuskan tidak berdasarkan parameter Pemilu demokratik yang jelas, maka tidak hanya ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye banyak mengandung kekosongan hukum tetapi juga mekanisme penegakan ketentuan tersebut. Lain halnya bila ketentuan kampanye dan dana kampanye tersebut berdasarkan parameter yang jelas, seperti ‘persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka,’ akan dapat disusun ketentuan, larangan, sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang tepat.

Pemilu Di Tahun 2014

Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang keempat pada masa reformasi. Seperti dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2014 pun juga ditandai dengan beberapa perbaikan dalam hal landasan hukumnya. Pada satu sisi, hal tersebut dapat dimaklumi dalam artian sebagai perbaikan dari legalitas penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menandakan bahwa pemilu di Indonesia masih mencari bentuknya dengan berbagai macam metamorfosis dalam hal institusionalisasinya.

Pemilu tahun 2014 setidaknya dilandasi oleh 3 (tiga) undang-undang. Pertama, UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terakhir, UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dua undang-undang pertama merupakan penggantian dari undang-undang sebelumnya. Sedangkan pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden masih menggunakan peraturan yang sama dengan pilpres tahun 2009.

2. Undang-Undang No.15 Tahun 2011

Pengaturan tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu diatur di dalam UU No.15 Tahun 2011. Terdapat beberapa perbaikan di dalam pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilu. Beberapa perbaikan tersebut adalah:

- a. Penguatan lembaga pengawas pemilu Lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) dianggap sebagai sebuah lembaga yang krusial dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu yang lebih efektif dan efisien merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pemilu itu sendiri. Legitimasi sebuah proses pemilu secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pengawasan terhadap pemilu tersebut. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawas pemilu merupakan hal yang wajar untuk mendapatkan kualitas pemilu yang lebih baik lagi. Kondisi tersebutlah yang mendasari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu melalui pengaturan di dalam UU No.15 Tahun 2011. Secara kelembagaan, penguatan bawaslu setidaknya ditandai dengan adanya dua hal yang sangat penting. Pertama, pelembagaan secara permanen Bawaslu provinsi. Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan sebelumnya di mana Bawaslu provinsi masih sebagai lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*). Kebijakan ini didasari oleh pentingnya kelembagaan pengawas di tingkat provinsi dalam rangka penguatan fungsi pengawasan dalam proses pemilu. Kedua, penguatan kelembagaan supporting Bawaslu yaitu peningkatan eseloning sekretariat Bawaslu. Hal ini ditandai dengan pelembagaan Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagai penopang ataupun pendukung fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Peningkatan eseloning tersebut tentu saja diiringi dengan peningkatan struktur kelembagaan beserta kewenangannya. Di samping itu, penguatan fungsi pengawasan Bawaslu juga ditandai dengan adanya penguatan secara kesisteman pada lembaga pengawas tersebut. Salah satu penguatan sistem pengawasan tersebut adalah di mana Bawaslu mempunyai kewenangan dalam hal penanganan sengketa pemilu.

Bahkan keputusan Bawaslu atas penanganan sengketa tersebut bersifat final dan mengikat, kecuali terkait dengan penetapan peserta pemilu dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Keputusan Bawaslu atas penanganan sengketa harus ditindaklanjuti oleh KPU. Sedangkan untuk penanganan sengketa terkait penetapan peserta pemilu dan penetapan DCT merupakan wilayah sengketa tata usaha negara karena setidaknya memenuhi syarat bersifat final, individual, dan konkrit. Oleh karena itu, sengketa tata usaha negara tersebut dapat diajukan ke PTTUN sampai dengan ke MA.

- b. Pelembagaan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Salah satu terobosan penting dalam kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia adalah dengan adanya pelembagaan penanganan kode etik penyelenggara pemilu. Lembaga ini disebut-sebut sebagai kelembagaan pertama di dunia yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menjadi sejarah yang sangat penting dalam pemilu di Indonesia. Lembaga inilah yang menjaga agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari kepentingan politik apapun merupakan sebuah prasyarat utama untuk mencapai pemilu yang demokratis. DKPP bertindak sebagai lembaga penjaga netralitas serta independensi lembaga penyelenggara pemilu

3. Undang-Undang No.8 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 didasarkan pada landasan hukum UU No.8 Tahun 2012. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Mungkin hal tersebut merupakan alasan yang klasik mengingat hampir pada setiap pemilu terjadi perubahan undang-undang. Namun demikian, apabila dicermati secara lebih jauh, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014.

Beberapa hal penting terkait pengaturan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 adalah:

- a. Masa persiapan pemilu Salah satu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 adalah terkait dengan masa persiapan pemilu itu sendiri. Di dalam UU No.8 Tahun 2012, masa persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif menjadi lebih lama, yaitu 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu legislatif sebelumnya di mana masa persiapannya relatif lebih pendek. Panjangnya masa persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif tersebut diharapkan dapat membantu secara maksimal persiapan pemilu legislatif. Penyelenggaraan pemilu legislatif dapat dipersiapkan secara matang. Peraturan teknis, baik itu peraturan KPU, Bawaslu, maupun DKPP, dapat disusun secara lebih baik lagi. Selain itu, pelaksanaan seluruh tahapan pemilu pun juga dapat dipersiapkan dengan secara lebih baik lagi. Dengan demikian, pemilu legislatif dapat berjalan dengan lancar.
- b. Sistem pemilu Parlemen di Indonesia terdiri atas 2 (dua) kamar, yaitu DPR dan DPD.³² Kedua kamar tersebut dalam pengisian anggotanya menggunakan sistem yang berbeda. Untuk DPR, menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem proporsional ini dipilih dengan didasarkan pada fakta sosiologis bangsa Indonesia. Indonesia merupakan bangsa dengan multi kultur, yang terdiri dari banyak suku bangsa maupun agama. Parlemen dengan prinsip utama representasi atau keterwakilan harus dijamin. Oleh karena itu, sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang diyakini dapat menjamin prinsip keterwakilan tersebut. Sementara itu, daftar terbuka merupakan sebuah legal policy yang ditempuh pembuat undang-undang, Pemerintah dan DPR, dalam rangka menjamin prinsip kedekatan antara pemilih dengan wakilnya. Dengan demikian, pemilih lebih mengenal calon yang akan dijadikan sebagai wakilnya di parlemen. Sedangkan pemilihan untuk anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Prinsip utama dari pemilihan untuk anggota DPD ini adalah penjaminan atas keterwakilan daerah. Maka dari itu, distrik dalam pemilihan anggota DPD adalah

berdasarkan provinsi, di mana setiap provinsi memiliki 4 (empat) orang wakil di DPD. Anggota DPD inilah yang diharapkan dapat menyuarkan berbagai permasalahan kedaerahannya

c. Parliamentary Threshold/Ambang Batas Parlemen

Parliamentary Threshold (PT) merupakan sebuah kebijakan yang diambil dalam rangka untuk membatasi partai politik di parlemen. Biasanya kebijakan PT diambil untuk suatu kepentingan tertentu dalam rangka membangun sistem kepartaian. Setiap negara menerapkan PT secara berbeda-beda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komposisi sosial masyarakat di negara tersebut. Negara yang secara sosiologis termasuk dalam multi kultur sangat tidak mungkin menerapkan PT yang tinggi. Kondisi tersebut untuk menghindari terjadinya disproporsionalitas. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak suku bangsa yang berada di dalamnya. Dalam penerapan PT tentu saja fakta sosiologis tersebut harus dipertimbangkan. Pada pemilu tahun 2009, PT yang digunakan adalah 2,5%. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 terjadi kenaikan PT menjadi 3,5%. Alasan utama dalam kenaikan PT tersebut adalah untuk mencapai tujuan dari pemilu, seperti termaktub di dalam penjelasan umum undang-undang, yaitu multi partai sederhana. Walaupun sampai saat ini belum jelas terkait dengan konsep multi 35 partai sederhana yang hendak dicapai dalam sistem kepartaian di Indonesia.

d. Alokasi kursi di daerah pemilihan (district magnitude)

District magnitude menjadi sangat penting karena hal tersebut terkait dengan peta pertarungan sebenarnya antar partai politik. Bahkan penentuan daerah pemilihan (dapil) menjadi hal yang bersifat politis dibanding administratif. Konsep garrymandering merupakan gambaran kepentingan politis dalam hal penyusunan dapil yang sebenarnya lebih bersifat administratif. Terkait dengan alokasi kursi di parlemen pada UU No.8 Tahun 2012 secara prinsip tidak terjadi perubahan dengan undang-undang sebelumnya. Alokasi kursi untuk DPR masih berkisar pada 3 – 10 kursi di setiap daerah pemilihan, sedangkan untuk DPRD berkisar 3 – 12 kursi di setiap daerah pemilihan. Hal ini lebih bersifat

partai politik tidak mau perdebatan panjang dalam penyusunan dapil sehingga lebih memilih untuk menggunakan dapil yang lama

e. Metode konversi suara ke kursi

Salah satu yang menjadi perdebatan mendasar dalam penyusunan undang-undang pemilu adalah terkait dengan metode konversi suara ke kursi. Pemilihan metode sangat terkait dengan kepentingan tujuan pemilu itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap metode sangat berpengaruh terhadap proporsionalitas serta konsep sistem kepartaian yang akan dituju. Metode konversi suara ke kursi yang digunakan dalam pemilu legislatif tahun 2014 adalah menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan sisa suara habis di dapil. Metode ini lebih menguntungkan partai-partai dengan suara yang kecil. Di satu sisi penggunaan metode ini akan lebih menjamin prinsip proporsionalitas namun di sisi lain metode tersebut tidak mendukung tujuan pemilu itu sendiri, yaitu pencapaian multi partai sederhana.

f. Hasil pemilu anggota DPR tahun 2014

Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 dilakukan dengan persiapan yang lebih matang dibanding dengan pemilu sebelumnya. Tenggang waktu persiapan yang lebih panjang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut ditandai dengan lebih baiknya persiapan terkait dengan aturan teknis penyelenggaraan pemilu serta lebih baiknya pemutakhiran data pemilih. Walaupun demikian, pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 bukan berarti tidak mengalami kendala. Beberapa kendala muncul dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Persoalan pelanggaran-pelanggaran pemilu juga muncul di dalam proses tersebut. Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, telah muncul persoalan tersebut. PBB dan PKPI awalnya dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Memang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu pada UU No.8 Tahun 2012 ditingkatkan. Partai politik harus mempunyai perwakilan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Klausul tersebut tentu saja sangat berpihak pada partai-partai besar. Partai yang kuat di tingkat lokal akan terlibas

oleh beratnya persyaratan tersebut. Namun demikian, pembuat undang-undang berdalih ingin memperkuat kelembagaan partai politik sebagai peserta pemilu. Di sisi lain, terdapat persyaratan terkait dengan tidak diharuskannya partai yang telah memiliki kursi di DPR untuk diverifikasi. Pengaturan ini kemudian dibatalkan MK. MK memutuskan bahwa seluruh partai harus diverifikasi tanpa kecuali. Kegagalan PBB dan PKPI yang tersurat dalam SK KPU terkait penetapan peserta pemilu akhirnya bermuara pada sengketa tata usaha negara. Kedua partai tersebut mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTTUN. Hasilnya adalah PTTUN mengabulkan gugatan tersebut yang akhirnya memaksa KPU untuk mengikutkan kedua partai tersebut menjadi peserta pemilu. Dengan demikian pemilu legislatif tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik dan 2 partai lokal di Aceh.

Dalam sistem presidensiil, banyak pengamat mengatakan bahwa poin utama yang menjadi dasar efektifitas sistem tersebut adalah pribadi presiden sendiri. Kemampuan, kapabilitas, serta pengalaman presiden merupakan basis utama dalam bekerjanya sistem presidensiil. Hal tersebut dikemukakan oleh Ricard Neustadt yang disampaikan kembali oleh Feri Amsari bahwa:

“ Ricard Neustadt mengatakan presiden adalah semata-mata kekuasaan soal skill, mengelola temperamen, dan kemudian menguasai kantornya. Dia sebagai orang yang dianggap leader yang mampu mengelola kantor kepresidenannya. Bahasanya yang lebih terkenal adalah kekuasaan presiden adalah the power to persuade, kekuasaan membujuk orang, merayu orang, kekuasaan diplomasi”

Pendapat tersebut menandakan bahwa posisi presiden haruslah didukung dengan penguasaan dia terkait dengan kemampuan manajerial, pengelolaan emosi, kepemimpinan dan sebagainya. Bekal tersebut akan memudahkan efektifitas berjalannya sistem presidensiil. Sementara itu, perkembangan politik pasca pemilu presiden tahun 2014 memang sangat mengejutkan. Bahkan beberapa pengamat mengatakan sampai dengan pasca pemilu presiden peta politik Indonesia masih terbelah antara pro-Jokowi dan pro-Prabowo.

Kondisi demikian menjadikan politik Indonesia menjadi tidak kondusif. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian ditarik sampai dengan ranah pro dan kontra yang justru berimbas pada ketidakmenentuan politik. Salah satu contoh yang paling kentara adalah bagaimana proses pemilihan pimpinan DPR. Dalam proses tersebut jelas sekali terbelahnya peta pertarungan dalam memperebutkan pimpinan DPR. KMP dengan dukungan yang lebih banyak memenangkan peta pertarungan tersebut. Sementara itu, KIH tidak dapat berbuat banyak dan bahkan tidak mendapat posisi pimpinan di DPR. Justru yang lebih diuntungkan dengan kondisi tersebut adalah Demokrat sebagai partai penyeimbang. Posisi Demokrat justru sangat menguntungkan dengan kursi yang menentukan kemenangan, baik untuk kubu KIH maupun KMP. Keuntungan tersebut sangat dimanfaatkan Demokrat untuk sebuah bargaining position yang kuat dan Demokrat mampu memainkan posisi tersebut dengan baik. Akibatnya adalah justru Demokrat yang berada di luar dua koalisi besar tersebut malah mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR.

Sedangkan hubungan antara Presiden dengan DPR dapat dikatakan masih menyisakan persoalan yang belum tuntas. Banyak hal yang kemudian menjadikan hubungan tersebut menjadi agak renggang. Salah satu yang menyebabkan ketidaksinkronan tersebut adalah karena sistem ketatanegaraan kita yang memang bukan presidensiil murni. Pemisahan kewenangan tidak terjadi secara tegas. Persoalan pemisahan kewenangan yang tidak jelas tersebut terlihat sekali dalam proses pencalonan Kapolri yang kemudian menimbulkan polemik. Pada satu sisi, posisi Kapolri merupakan bagian dari kewenangan eksekutif. Namun di sisi lain, proses pencalonannya haruslah melalui mekanisme politik di DPR. Kondisi demikian tentu saja semakin membuat kerumitan di dalam sistem presidensiil yang mengharuskan pemisahan kewenangan secara tegas.

4. Rangkuman

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Mahasiswa diminta melakukan analisis perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dengan sejumlah negara di dunia
- ii. Mahasiswa melakukan kajian terkait sistem pemilihan pemimpin lokal dan keterkaitannya dengan sistem pemilihan nasional

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem dan cara kerja sistem pemilihan umum serta analisa perbandingan sistem pemilihan umum di beberapa negara hingga tingkat lokal (masyarakat adat)

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2: Sistem Kepartaian

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah: Mahasiswa mampu memahami konsep tentang analisis biaya dan manfaat, proses analisis biaya dan manfaat, konsep dasar analisis biaya dan manfaat, menilai biaya dan manfaat, analisis resiko dan ketidakpastian, dan kritik dan keterbatasan analisis biaya dan manfaat.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sudah banyak ilmuwan politik yang mengulas tentang partai politik. Perkembangan teori tentang partai politik pun sudah beragam. Hal ini lebih dikarenakan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan ada beberapa kalangan, dewasa ini, yang mempertanyakan kembali posisi partai politik dalam khasanah dunia politik. Sebagian ilmuwan lain mempercayai bahwa dalam kehidupan demokrasi, keberadaan partai politik

merupakan pondasi utama yang penting. Ada banyak definisi mengenai partai politik. Carl J. Friedrich, memaparkan yang dimaksud partai politik, adalah:

Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. 4

Pengertian yang hampir sama diberikan oleh R.H. Soltau, yaitu:

Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 5

Sementara itu, untuk kasus Indonesia, pada tahun 2008 berdasar aturan legal (Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi-definisi di atas bisa dipahami bahwa partai politik dibentuk untuk menjalankan sejumlah fungsi. Menurut Nassmacher⁶ fungsi partai politik adalah:

- a. Parties mediate or arbitrate between a pluralistic society and its political institutions of government.
- b. Parties organize political campaigns in order to mobilize voters to participate in an election.
- c. Parties recruit political personnel by selecting and nominating candidates who stand for public office in an election.
- d. Parties aggregate a plurality of interests into a reasonable number of political alternatives or policy options, and thus channel conflicts between government and opposition.

- e. Parties enable people to generate a plurality of opinions in public debate, elaborate projects or proposals for society, and transform policy options into political decisions.

Sementara itu fungsi partai politik berdasarkan UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik adalah bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan o rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mendukung semua peran dan fungsi partai politik tersebut, tentunya partai politik harus terlembagakan dengan baik. Randall dan Svasand (2002) dalam “Party Institutionalization in New Democracies” mendefinisikan secara spesifik pelebagaan partai politik. Menurutnya, pelebagaan partai politik adalah “the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture.”

Proses pelebagaan tersebut mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, yang saling bertemu dalam persilangan sehingga menghasilkan aspek kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi. Salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai indikator pelebagaan partai politik adalah terkait proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen tersebut dapat dilihat apakah partai politik masih bersifat oligarkhis atau demokratis. Proses rekrutmen ini setidaknya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sedangkan tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Partai politik hidup dalam sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat hubungan di antara partai, baik itu yang bersifat kompetisi maupun kerja sama. Hal inilah yang disebut dengan sistem kepartaian. Istilah sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya Duverger, 'Political Party', untuk menggambarkan bentuk dan corak dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara

. Setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan dalam memahami sistem kepartaian di sebuah negara.¹⁰ Pertama, berdasarkan jumlah partai. Kedua, berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai. Ketiga, berdasarkan formasi pemerintahan. Terakhir, berdasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai. Salah satu pendekatan yang paling banyak dipakai oleh ilmuwan dalam melihat sistem kepartaian adalah pendekatan yang didasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi. Pendekatan ini dikonseptualisasikan oleh Sartori. ¹¹ Sartori menyatakan bahwa kriteria partai berdasarkan jumlah tetap penting tetapi harus diingat sejauhmana partai itu mempengaruhi efek dalam kompetisi partai. Boleh jadi partai kecil akan menjadi relevan jika memiliki potensi koalisi dan potensi blackmail.

Untuk mengukur jarak ideologi partai politik beberapa perlu dipertimbangkan¹² adalah: pertama, perbedaan dalam orientasi dasar. Kedua, perbedaan dalam tujuan konkrit yang dikejar. Ketiga, perbedaan dalam cara mengejar tujuan yang ditentukan. Keempat, perbedaan dalam menilai kepribadian politik. Terakhir, perbedaan dalam komposisi partai atau fraksi, terutama basis kelas dan sejauhmana mereka dapat mengumpulkan berbagai kekuatan. Semakin berbeda semakin jauh jarak ideologi antar partai politik.

Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: sistem partai tunggal (one party), partai hegemonik (hegemonic party), partai predominan (predominant party), dua partai (two party), pluralisme terbatas (limited pluralism), pluralisme ekstrim (extreme pluralism), dan atomik (atomized). Ketujuh sistem kepartaian tersebut dapat dirangkum dalam dua kategori besar: pertama, sistem nonkompetitif meliputi partai tunggal dan partai hegemonik. Sistem kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai negara (partystate system). Pada kategori ini, keberadaan partai politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai politik dengan negara. Dengan kata lain sesungguhnya tidak ada sistem kepartaian dalam kondisi ini karena struktur sistem politiknya berpusat pada negara. Kehadiran partai politik identik dengan kepentingan negara.

Kedua, sistem kompetitif yang meliputi partai dominan, dua partai, pluralisme terbatas/moderat, pluralisme ekstrim/terpolarisasi, dan atomik. Pada sistem kepartaian ini negara melindungi hak-hak partai politik untuk menjalankan fungsinya. Sistem kepartaian tersebut bergerak pada satu garis linier, dari atomik ke partai tunggal, dengan faktor pendorong modernisasi, khususnya aspek mobilisasi sosial, yang berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat beserta ide-idenya.

Secara umum terdapat 3 (tiga) pendekatan yang menjelaskan terbentuknya sistem kepartaian. Pertama, pendekatan institusional yang didasarkan asumsi bahwa sistem kepartaian dikonstruksi oleh desain sistem pemilu. Duverger (1946) memperkenalkan pendekatan ini di mana pada sistem pluralitas/mayoritas akan membentuk sistem dua partai (Duverger's Law), sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai (Duverger Hypothesis).¹³ Terciptanya relasi tersebut dikarenakan bekerjanya efek mekanis dan efek psikologis dari sistem pemilu.¹⁴ Pertama, efek mekanis dari sistem pemilu bekerja terhadap partai akibat dari aplikasi langsung aturan pemilu dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Dalam pembagian kursi, beberapa partai terutama partai yang besar akan mendapatkan proporsi kursi yang lebih besar dibandingkan perolehan suaranya (over representation) dan representasi yang terbatas (under representation) bagi partai kecil.

Kedua, efek psikologis dari sistem pemilu datang dari reaksi pemilih dan partai terhadap konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan aturan pemilu. Pada sistem distrik, elit berusaha menahan diri membentuk partai karena mereka tahu sulit bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi. Di sisi lain, banyak partai yang ikut pemilu dalam sistem proporsional karena peluang mendapatkan kursi sangat besar. Dalam rumusan Duverger, efek psikologis dari sistem pemilu juga berpengaruh terhadap strategi pemilih. Pada sistem distrik, pemilih cenderung akan memilih kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Sementara itu, pada sistem proporsional pemilih tetap akan memilih partai meskipun dikalkulasikan partai itu hanya mendapat sedikit suara bahkan tidak mampu menempatkan wakilnya di parlemen.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem proporsional mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Situasi itu akan mempengaruhi bagaimana konsensus atau konfrontasi antara badan legislatif dengan eksekutif. Sedangkan pada sistem pluralitas/mayoritas

mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis (Lipset dan Rokkan, 1967) yang menyatakan bahwa dinamika pembilahan sosial (social cleavage) dan ketegangan atau konflik politik yang mengikuti sebagai sebab pembentukan sistem kepartaian dan partai politik.¹⁵ Sedangkan pendekatan ketiga adalah pendekatan tabula rasa¹⁶ dimana jika pendekatan sosiologis berbicara tentang substansi pertentangan, pendekatan tabula rasa berbicara tentang prosesnya.

Dengan uraian diatas maka secara logika sistem kepartaian bukan kondisi yang statis, akan tetapi dapat berubah. Perubahan sistem kepartaian dapat dilihat dari beberapa indikator (Lane dan Ersson dalam *Politics and Society in Western Europe* 1994), yaitu

- a. Total volatilitas: perubahan agregat suara antar pemilu
- b. Polarisasi: jarak ideologi antar partai
- c. Jumlah efektif partai dan indeks fraksionalisasi: sebuah ukuran yang agak berbeda (berhubungan sangat tinggi) atas jumlah bobot partai dengan kursi mereka di parlemen
- d. Disproporsionalitas elektoral: perbedaan antara pembagian kursi dengan perolehan suara partai
- e. Jumlah dimensi-dimensi isu: sebuah indikator struktur pembilahan dalam sebuah sistem.

Pada banyak kasus, menurut Paul Pennings dan Jan-Erik Lane, perubahan sistem kepartaian hanya melibatkan salah satu atau semua dari tiga faktor berikut, yaitu: jumlah partai, jarak ideologi partai, dan besaran partai. Faktor-faktor tersebut memperjelas struktur kompetisi, misalnya kompetisi dalam memperebutkan pemilih, dan struktur kerjasama, misalnya formasi pemerintahan. Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan.

Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensiil maupun sistem parlementer. Sedangkan sistem multi partai hanya cocok pada sistem parlementer. Sistem multi partai dengan sistem presidensiil dianggap kombinasi yang tidak sesuai. Sistem multi partai dalam pemerintahan presidensiil berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi (Mainwaring, 1993).

Mainwaring menyebutkan tiga alasan utamanya, yaitu pertama, presidensiil multi partai cenderung menghasilkan imobilitas dan jalan buntu (deadlock) eksekutif-legislatif yang kemudian membuat destabilitas demokrasi. Imobilitas dan deadlock ini disebabkan oleh dua hal yaitu:

- i. Sistem presidensiil dapat menghasilkan pemerintahan minoritas (minority government) dan kekuasaan eksekutif lemah, di mana kondisi ini menyebabkan imobilitas. Presidensiil tidak menjamin bahwa pemenang pemilu eksekutif juga memperoleh kursi mayoritas di parlemen. Jika presiden berasal dari partai minoritas di parlemen maka presiden akan kesulitan mensukseskan agenda-agenda yang membutuhkan dukungan parlemen.
- ii. Sistem presidensiil kurang mampu menyelesaikan persoalan ketika persoalan itu muncul. Pada presidensiil, masa pemilu dan jabatan presiden sudah ditetapkan serta adanya pemisahan kekuasaan menjadikannya tidak memiliki jalan keluar yang terlembaga untuk menghindari jalan buntu. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak dapat melaksanakan pemilu yang dipercepat. Presiden kemudian seperti menjadi bebek lumpuh (lame duck). Sementara itu parlemen juga tidak dapat melengserkan Presiden kecuali dengan pemakzulan dengan syarat yang berat. Dalam banyak kasus Presiden kemudian berusaha mencari jalan keluar ekstra konstitusional. Beberapa langkah yang ditempuh di antaranya adalah amandemen konstitusi untuk memperluas kekuasaannya, mengeluarkan dekrit, atau memobilisasi massa untuk menekan parlemen.

Kedua, multi partai menghasilkan polarisasi ideologi dari para bipartai. Ketiga, dalam presidensiil multi partai kesulitan membangun koalisi inter partai. Presidensiil multi partai rawan bagi stabilitas demokrasi terkait dengan absennya insentif untuk membentuk koalisi, sementara itu pada sistem parlementer di sepanjang waktu mengembangkan insentif untuk memproduksi koalisi mayoritas. Dengan kata lain, logika politik rezim parlementer adalah kooperasi dan konsensus, sedangkan logika politik rezim presidensiil adalah konflik tersembunyi.

Terdapat tiga penjelasan mengapa sistem presidensiil tidak memberikan insentif bagi terbentuknya koalisi. Pertama, akibat langsung dari prinsi pemisahan kekuasaan: survavilitas jabatan presiden tidak tergantung pada berbagai jenis dukungan legislatif; seorang presiden tidak membutuhkan kerjasama dengan partai lain kecuali dengan partainya sendiri, dan lebih dari itu

partai tidak mendukung pemerintahan meskipun partai-partai itu bergabung dalam pemerintahan. Kedua, watak dari pemilu presiden juga memberikan insentif untuk menghindari kooperasi. Kooperasi mensyaratkan kompromi dan kemungkinan modifikasi posisi untuk mengakomodasi partner, sebuah situasi yang presiden kemungkinan menolak. Presiden berkompetisi dalam distrik yang bersifat nasional, berbeda dengan legislatif yang lebih bersifat parokial. Terakhir, politik presidensiil adalah zero-sum, winnertake all yang itu mempersulit untuk kerjasama atau membentuk koalisi.

Dalam sistem presidensiil, jabatan presiden adalah penghargaan tertinggi dalam proses politik. Karena presiden adalah tunggal maka menjadi tidak mungkin untuk membentuk koalisi. Namun demikian bukan berarti dalam sistem presidensiil tidak terbentuk koalisi. Koalisi dalam presidensiil tetap ada, tetapi koalisi yang terbentuk sangat rentan dan tidak mampu menciptakan disiplin partai untuk meminta dukungan legislatif kepada pemerintah. Orientasi pada kekuasaan, karakteristik pembagian kekuasaan dalam sistem parlementer memberikan insentif pada legislator untuk melakukan kerjasama, hasil akhirnya adalah disiplin partai yang tinggi. Sebaliknya, karakter pemisahan kekuasaan pada sistem presidensiil menghasilkan rendahnya disiplin partai. Koalisi partai yang tercipta dalam sistem presidensiil multi partai tetap saja tidak menghasilkan stabilitas pemerintahan karena sifatnya yang tidak mengikat, sementara itu koalisi pada parlementer multi partai menghasilkan pemerintahan yang stabil karena koalisi itu mengikat partai-partai.

4. Rangkuman

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

c. Latihan

Mahasiswa menentukan sebuah proyek atau kebijakan publik tertentu dan melakukan analisis biayanya. Proyek yang dipilih adalah proyek yang sedang dilaksanakan, sementara kebijakan publik adalah kebijakan yang baru disahkan oleh pemerintah.

d. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan analisis biaya proyek atau kebijakan publik.

7. Umpan Balik

C. Penutup

1. Rangkuman

Pemilihan alternatif kebijakan merupakan bagian dari program pembuatan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi dalam sistem pemerintahan maupun sistem politik memiliki kompleksitas yang berbeda, karena masyarakat sebagai objek dan subjek dari kebijakan publik memiliki struktur dan nilai yang kompleks. Oleh karena itu penggunaan berbagai model alternatif kebijakan publik merupakan salah satu bagian konsep yang harus dikuasai oleh mahasiswa politik. Baik secara teoritis maupun praktek. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk alternatif kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah maupun infrastruktur politik lainnya di Indonesia. Terutama dalam penerapannya dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

2. Daftar Istilah

Rasionalitas	Konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak.
Inkrementalisme	Metode untuk mencapai perubahan besar-besaran dalam kebijakan publik dengan menerapkan perubahan kecil secara perlahan dari waktu ke waktu.
Komprehensif	Luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).
Behavioral	Pendekatan dalam ilmu sosial yang menjadikan perilaku manusia, struktur, maupun institusi sebagai objek analisis.
Empiris	Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
Ad-hoc	Sementara dibentuk atau dimaksudkan untuk satu tujuan saja

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul (Editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
- Antlov, Hans Eds, *Election in Indonesia, The New Order and Beyond*, London and New York, Routledge Curzon, 2004.
- Anderson, James E., *Public Policy making: An Introduction*, Houghton Mifflin, Boston, 1990.
- AR, Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Asfar, Muhammad dkk, *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, Surabaya, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Chilcote, Ronald H., *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Dahl, Robert, *Polyarchy, Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven, 1971.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1999.
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, PT Arise Consultancies, Jakarta, 2003.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, *Transisi Men*
- Rauf, Maswadi, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tanggal 1 November 1997. Rauf, Maswadi,

Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000. Reynold, Andrew, et.al., Sistem Pemilu, International IDEA Handbook, Swedia, 2005.

MODUL 7

PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK KEPENTINGAN

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Kelompok Kepentingan menduduki peran dan posisi penting dalam setiap sistem politik. Hal ini dilatarbelakangi kelompok kepentingan menjadi sarana dalam menyampaikan dan memperkuat penyampaian kepentingan anggota masyarakat. Dalam bab ini akan dijelaskan jenis-jenis kelompok kepentingan, fungsi dan peran serta dinamika kelompok kepentingan yang tergambarkan dalam fenomena politik di Indonesia. Selanjutnya juga akan dijelaskan terkait dengan partai politik yang berbeda dengan kelompok kepentingan karena tujuannya yang mengarah pada penguasaan suatu jabatan publik. Partai politik dalam bab ini akan dibedakan berdasarkan basis sosial yang mendukungnya dan tujuan yang ditetapkan.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 7 ini adalah:

1. CP2: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2. CP3: Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena politik.
3. CP 4 : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan masalah sosial, fenomena politik dan fokus kajian perbandingan politik.
4. CP 5 : Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk parati politik dan kelompok kepentingan.
5. CP 6 : Mahasiswa mampu menyusun kebijakan publik sesuai dengan masalah yang dihadapi.

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah

mempelajari Modul 7 ini adalah: Mahasiswa mampu memahami jenis, tipologi, fungsi dan peran dari partai politik dan kelompok kepentingan

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 7

Kegunaan atau manfaat dari Modul 7 ini adalah membantu mahasiswa memahami jenis, tipologi, fungsi dan peran dari partai politik dan kelompok kepentingan

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 7 ini adalah jenis, tipologi, fungsi, peran dan sejumlah fenomena serta isu politik terkait dengan partai dan kelompok kepentingan.

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Partai Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami konsep tentang model implementais kebijakan.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep implementasi kebijakan.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lingkungan kebijakan.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Partai politik memiliki sejarah panjang dalam hal promosi ide-ide politik dari level masyarakat ke level negara. Namun, sebelum dilakukan pembicaraan lebih lanjut, perlu kiranya diberikan definisi mengenai partai politik yang digunakan dalam tulisan ini.

Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya menjelaskan

*"Thoughts on the cause of the prese n t d i s c o n t e
B u r k e m e n y a t a k a n b o d y o f t h e w u n i t e d ; f o r a r t y*

promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed" [partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan halhal yang mereka setuju].

Definisi Burke ini tampak masih "abstrak" oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional. Ini tampak misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang *The Iron Law of Oligarchy* (Hukum Besi Oligarki). Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya. Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter tahun 1976 dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Menurutnya, partai politik adalah

" ... i s a g r o u p w h o s e a i m i s t o c o n t r o l t h e p o w e r i n t h e c o m p e t i t i v e s t r u g g l e f o r p o w e r P a r t y a n d p o l i t i c i a n s a r e s i m p l y t h e r e s p o n s e t o t h e f a c t t h a t t h e e l e c t o r a l m a s s i s i n c a p a b l e o f a c t i o n o t h e r t h a n i n a s t a m p e d e , a n d t h e y c o n s t i t u t e a n a t t e m p t t o r e g u l a t e p o l i t i c a l c o m p e t i t i o n e x a c t l y s i m i l a r t o t h e c o r r e s p o n d i n g p r a c t i c e o f a t r a d e a s s o c i a t i o n .
[... a d a l a h k e l o m p o k y a n g a n g g o d a l a m h a l p e r j u a n g a n m e d a n a p a i p a r a p o l i t i s i n y a m e r u p a k a n c o n t o h s e d e r h a n a b a g i t a n g g a p a n a t a s k e t i d a k m a m p u a n m a s s a p e m i l i h u n t u k b e r t i n d a k s e l a i n d a r i k e t i d a k r a p i a n o r g a n i s a s i n y a , d a n m e r e k a s e c a r a n y a t a b e r u s a h a m e n g a t u r k o m p e t i s i p o l i t i k l a y a k n y a p r a k t e k y a n g s a m a y a n g d i l a k u k a n o l e h a s o s i a s i p e r d a g a n g a n].

Definisi Schumpeter ini cukup sinis, dengan menyatakan bahwa partai politik bisa berperan oleh sebab para pemilih (warganegara) sendiri tidak terorganisasi secara baik untuk memenuhi kepentingannya di dalam

negara. Schumpeter juga menganggap partai politik adalah sama seperti pedagang, di mana komoditas yang diperjualbelikan adalah isu politik yang dibayar dengan pemberian suara oleh para pemilih.

Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson pun memberikan definisi mereka tentang partai politik. Menurut Lapalombara dan Anderson, partai politik adalah:

“ ... a political group, in possession of an official label and of a formal organization that links centre and locality, that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non-free), candidates for

p u b

setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas).

Definisi Lapalombara dan Anderson ini membatasi partai politik sebagai organisasi resmi, diakui pemerintah, dan ikut pemilihan umum. Partai politik adalah penghubung antara pusat kekuasaan dengan lokalitas (warganegara yang tersebar di aneka wilayah, agama, ideologi, dan sejenisnya). Partai politik berfungsi untuk menempatkan orang-orang (kandidat) bagi sebuah jabatan publik. Dari definisi yang cukup bervariasi ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum. Definisi ini tentu saja terlampau sederhana akan tetapi akan dipakai di dalam tulisan ini.

i) Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di setiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawaan: Partai politik menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Aneka penulis telah mengkaji fungsi partai politik. Salah satunya adalah David McKay. Dalam kajiannya atas

partai-partai politik di Amerika Serikat, ia pun berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi:

- a. Agregasi kepentingan – fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
- b. Memperdamakan kelompok dalam masyarakat – fungsi ini adalah posisi partai politik untuk membantu memperdamakan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.
- c. Staffing government – fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.
- d. Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah – fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
- e. Mempromosikan stabilitas politik – fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, misalnya dengan mengelola isu-isu yang dibawakan kelompok ekstrim nonpartai ke dalam parlemen untuk dicarikan titik temunya.

Penulis lain, misalnya Janos Simon membagi fungsi partai politik menjadi 6, yaitu : (1) Fungsi sosialisasi politik; (2) fungsi mobilisasi politik; (3) fungsi representasi politik; (4) fungsi partisipasi politik; (5) fungsi legitimasi sistem politik, dan (6) fungsi aktivitas dalam sistem politik.

- a) Fungsi sosialisasi politik mulai signifikan ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudian mencari “figur” yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu lembaga yang menyediakan nilai tersebut adalah partai politik. Sebab itu, partai politik berfungsi sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu. Peran ini semakin besar di negara-negara dengan sistem kepartaian multipartai.
- b) Fungsi mobilisasi adalah fungsi partai politik untuk

membawa warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini adalah : Mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi; Mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut, dan sebagai hasilnya kelompok-kelompok tersebut mengalihkan dukungannya kepada partai politik, dan; Membangun struktur kelompok yang akan menjadi basis pendukung partai yang bersangkutan

- c) Fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warganegara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warganegara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik
- d) Fungsi legitimasi mengacu pada kebijakan partai politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik. Seperti diketahui, partai politik memiliki massa pemilih. Jika partai memilih untuk mendukung sesuatu, maka kemungkinan besar pemilihnya akan melakukan hal yang sama.
- e) Fungsi representasi adalah fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota partai yang masuk ke dalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warganegara yang memilih partai tersebut.
- f) Fungsi aktivitas dalam sistem politik didasarkan pada premis, partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut. Jika partai tersebut mengantungi suara dalam pemilu, maka anggota-anggotanya tersebut akan masuk ke dalam parlemen. Anggota partai yang bersangkutan tersebut kemudian beraktivitas (secara politik) untuk menjalankan program-program partai. Aktivitas pemerintahan (khususnya parlemen) menjadi berjalan akibat adanya partai politik tersebut.

Dalam bukunya, Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa terdapat pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa (Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, 1991). Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa

1. Fungsi di Negara demokrasi

- a. Partai politik di negara demokrasi memiliki fungsi menonjol yaitu komunikasi politik. Pendapat (aspirasi) dari individu dan kelompok akan digabungkan melalui proses *interest aggregation*. Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi merupakan salah satu fungsi komunikasi partai politik. Tahap selanjutnya adalah perumusan usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Disisi lain Partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam sebuah bursa ide (*clearing house of ideas*). Sehingga partai politik menjadi pengeras suara bagi masyarakat dan alat pendengar bagi pemerintah. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitnya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas (Neumann, 1963). Akan tetapi seringkali fungsi ini berlangsung berat sebelah dan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat.

b. Fungsi sosialisasi politik dilakukan oleh partai melalui media massa, ceramah, penerangan kursus kader, penataran dan sejumlah kegiatan lainnya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Fungsi sosialisasi juga dilakukan dengan pendidikan politik bagi anggota partai, bahkan di negara yang baru merdeka partai politik digunakan sebagai sarana dalam internalisasi nilai nasionalisme.

2. Fungsi di Negara otoriter

Menurut Sigmund Neumann setidaknya ada dua fungsi partai politik di negara otoriter atau totaliter yaitu,

- i) Partai berperan dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat secara monopolistik. Partai komunis misalnya akan menjalankan peran utama dalam mengarahkan masyarakat agar bersama-sama berusaha mewujudkan masyarakat komunis. Agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan maka keberadaan partai politik yang berbeda ideologi, maupun ideologi lain yang ada di tengah masyarakat akan ditekan melalui perantara partai tunggal
- ii) Memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Perbedaan pendapat dan ideologi di tengah masyarakat tidak akan dipelihara melainkan akan dihilangkan dengan cara mengarahkan masyarakat dalam sebuah ideologi komunis dan fungsi ini dijalankan oleh partai komunis

3. Fungsi di Negara berkembang

Menurut Mirriam Budiardjo hanya ada satu fungsi partai politik yang berjalan efektif di negara berkembang, yakni partai politik berfungsi sebagai sarana integrasi nasional. Partai politik

di negara berkembang pada titik tertentu mampu mempersatukan masyarakat yang berbeda sehingga dapat diajak bekerjasama untuk kepentingan tertentu. Lebih jauh Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi lain sebagaimana oleh partai politik di negara berkembang disebabkan lebarnya jarak antara pemerintah dan diperintah. Kemudian Budiardjo merinci fungsi-fungsi yang belum berhasil dijalankan oleh partai politik negara berkembang yaitu

- i) Menjadi alat mengorganisir kekuasaan politik
- ii) Mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah
- iii) Menghubungkan masyarakat umum dengan proses politik
- iv) Merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- v) Mengatur konflik kepentingan

Kenneth Wolack, membenarkan bahwa memang telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di negara berkembang yang ditandai dengan

- i) Partai terlalu lemah, personalistik, korup dan kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- ii) Masyarakat frustrasi dengan partai politik, sebab partai korup dan menyimpang dari kebutuhan masyarakat
- iii) Masyarakat ragu menjadi anggota partai
- iv) Dukungan terhadap partai melemah. Sedangkan dukungan untuk calon independen menguat dan gerakan anti partai menguat.

Selanjutnya menurut Aurel Croissant, kekecewaan masyarakat juga terjadi terhadap wakil partai di parlemen di negara berkembang, misalnya di Filipina, Indonesia, Thailand, Kamboja dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh Parlemen yang lemah dalam mewakili, kurang tanggap dan bersifat eksklusif. Ada jarak yang lebar antara keinginan pemilih dan wakil partai di parlemen serta wakil partai di parlemen tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

vi) Tipologi Partai Politik

Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak, dan ini cukup membingungkan. Namun, aneka klasifikasi tipe partai politik tersebut diakibatkan sejumlah sudut pandang. Misalnya, ada yang mengkaitkan dengan kesejarahan, hubungan sosial, berakhirnya perang ideologi, dan sebagainya. Richard S. Katz. Katz membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu:

- a. Partai Elit – Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen
- b. Partai Massa – Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tasingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan
- c. Partai Catch-All – Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral Professional atau Partai Rational-Efficient.
- d. Partai Kartel - Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan-pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi

Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

- e. Partai Integratif - Partai jenis berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih, dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial.

4. Rangkuman

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi partai. (Richard S. Katz, 1980) Jika pada awalnya partai politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi perwakilan, kini peran dan fungsi partai politik ikut menentukan kualitas praktik demokrasi perwakilan, dalam hal ini demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, tetapi juga menuntut partai politik memberi kontribusi positif dan konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas, artinya, sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik dan begitu juga sebaliknya. (Munafrizal Manan, 2012)

Adanya Partai politik bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. (Ramlan Subakti, 2010) Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. (Miriam Budiarjo, 2010)

Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Peran dan fungsi Partai Politik di Indonesia Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain (Miriam Budiardjo, 2000):

Pertama, Sebagai Sarana Komunikasi Politik, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. (Bima Arya Sugiarto, 2008)

Kedua, sebagai Sarana Sosialisasi Politik, fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Ketiga, sebagai Sarana Rekrutmen Politik, fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

Keempat, partisipasi Politik, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem

politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

Kelima, sebagai Sarana pengatur Konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Keberadaan Partai politik di Indonesia memanglah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, selain fungsi-fungsi di atas menurut Hariyanto apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

Mahasiswa memilih satu contoh partai politik dan menjelaskan karakteristik partai politik tersebut berdasarkan tipologinya.

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menjelaskan karakteristik partai politik di Indonesia

7. Umpan Balik

C. Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2: Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- d. Mahasiswa mampu memahami konsep tentang model implementais kebijakan.
- e. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep implementasi kebijakan.
- f. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lingkungan kebijakan.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupun output yang tepat. Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekwensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (interest group).

Secara sederhana, kelompok merupakan suatu kumpulan individu-individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan dan dirah demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, negara. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerja keras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individua tau masyarakat, maupun lebih besar yaitu negara dan beberapa pihak international. Untuk itu semua, sangat diperlukan kekuatan dan motivasi maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga di peroleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan kelompok atau pihakpihak tertentu menjadi tujuan dari sebuah kepentingan.

Organisasi yang terbentuk dari dan mengupayakan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Non Government Organisation (NGO), Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi sosial lainnya. Hal lain di latarbelakangi oleh lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu masyarakat, negara, maupun negara lain, baik yang telah berkembang maupun yang terbelakang dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan bernegara. Secara umum kelompok kepentingan hampir sama dengan sebuah partai politik yang sama merupakan sebuah katalisator penghubung utama antara pemerintah dan yang di perintah.

Kelompok kepentingan lebih kepada sekelompok individu yang mengadakan suatu persekutuan yang didorong oleh sebuah kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok tertentu. Kepentingan dapat berupa kepentingan umum, masyarakat luas dan sekelompok kepentingan tertentu. Contoh dari persekutuan merupakan kelompok kepentingan yaitu seperti sebuah organisasi massa. Sebuah kelompok tidaklah mudah diklasifikasikan, apalagi bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dengan mempengaruhi Lembaga-lembaga politik agar dapat mempermudah maupun mempermudah langkah mereka dalam menetapkan keputusan yang menguntungkan. Hal tersebut tidak dapat dihindari pada sebuah kelompok yang akan merasa dirugikan dari keputusan tersebut. Kelompok kepentingan tidak sedang berusaha mendapatkan wakil-wakilnya di dewan permusyawaratan rakyat, melainkan mereka mempengaruhi satu atau beberapa partai politik yang didalamnya berwenang mendukung setiap aktivitas dan langkah strategis mereka kedepannya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah konflik baru yang akan timbul ketika ada suatu kelompok yang merasa di anak tirikan sehingga perlu sebuah kajian yang menadalam akan hal tersebut.

Sebagai sebuah perkumpulan, individu mengadakan sebuah persekutuan yang didorong oleh kepentingan tertentu, yang dimana berupa kepentingan secara umum dan kepentingan secara kelompok tertentu. Menurut (Heywood 2013) kelompok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam:

- a. kelompok komunal, yang lebih menenankan pada kelompok kepentingan konvensional dimana anggotanya secara sadar dan peduli untuk menjadi bagian dari structural kelompok.
- b. kelompok institusional, mengarah pada bagian dari sebuah mesin pemerintahan sehingga dari mesin tersebut terdapat kelompok-kelompok kepentingan dimana mereka tidak memiliki otonomi secara mutlak.
- c. kelompok asosiasional, lebih mengacu pada masyarakat yang dibentuk menjadi suatu elemen demi mencapai satu tujuan mereka, sehingga lebih mengarah pada ekspresi dan esensi dari sebuah aksi yang sifatnya instrumental.

Lebih lanjut dijelaskan pembagian ketiga kelompok tersebut yaitu Kelompok komunal selalu berkaitan dengan struktur sosial, yang mana perasaan atau sentiment bersama berdasar ikatan kedaerahan, loyalitas, asal usul keturunan, kekerabatan, dan kepercayaan terhadap suatu keyakinan. Nilai komunal adalah nilai bersama yang dengan mudah menggugah kesadaran orang untuk merasa, berpikir dan bertindak secara bersama-sama berdasarkan dorongan hati yang berjumpa dengan dorongan hati orang lain. Bersikap saling pengertian, mendahulukan orang lain yang lemah dan tak berdaya, menghormati keharmonisan dan keselarasan, ramah, juga acap dijadikan semacam trade-mark yang menegaskan betapa nilai-nilai komunal itu selalu menjadi semangat yang menghidupi masyarakat. Selanjutnya, kelompok institusional lebih kepada kelompok yang terstruktur yang memiliki visi, misi dan tugas serta fungsi kepentingan yang sama

Dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumberdaya material, sumberdaya manusia, orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personil, dan lain-lain menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di definisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests* (Benditt 1975:34).

Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Karena itu, jika dibandingkan dengan fungsi partai politik maka agak berbeda dan lebih sempit. Sepertimana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, *any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices* (1984:64). Berdasarkan definisi tersebut, partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai pemain nonpemerintah, mereka dapat berupa: Kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain.

Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumberdaya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.

Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, kelompok kepentingan privat; dan kedua, kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan

anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan profesional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidangbidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: **Pertama**, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.

Kedua, kelompok nonassosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor,

kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

Keempat, kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidangbidang tertentu yang menjadi fokusnya. Contohnya adalah: Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Kamar Dagang dan Industri (KDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain.

Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional dan assosiasional. Sementara pada derajad yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta nonassosiasional.

c. Model dan Pola Politik Kelompok

Beberapa individu dan lapisan masyarakat mempunyai kepentingan yang harus meraih dan dipertahankan untuk kelangsungan hidupnya, baik dalam kelompok masyarakat ataupun suatu bagian struktur keluarga. Dalam rangka mempertahankan dan meraih kepentingan tentu memerlukan sebuah kerja keras dan melalui usaha serta perjuangan yang saling bersentuhan dengan kelompok masyarakat dan individu. Untuk semua itu memerlukan suatu dukungan yang kuat dari segala pihak agar dapat memperoleh respon yang baik dari kalangan masyarakat atau pihak tertentu. Ragam kekuatan memiliki daya dukung kekuatan yang di

dalamnya terdapat dua atau lebih orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan Bersama. Ragam kekuatan ini disebut juga dengan organisasi. Organisasi berdiri mengatasnamakan dirinya selaku organisasi yang mengorientasi pada kepentingan, seperti Lembaga swadaya masyarakat maupun NGO, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini di latar belakang lahirnya suatu kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang di dominasi individu dan masyarakat. Sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam perwujudannya peran dan pengaruh dari politik kelompok berasal sepenuhnya dari factor-faktor yang spesifik pada masing-masing system politik. Menurut Heywood, A. (2013) ada tiga model politik kelompok kepentingan yang paling berpengaruh, yaitu: **(1) Pluralisme; (2) Korporatisme; (3) Kanan Baru.**

1. Model Pluralis, model ini memberikan gambaran paling positif tentang politik kelompok. Mereka menekankan kemampuan dari kelompok-kelompok untuk membela individu dari pengaruh pemerintah dan mempromosikan kepekaan demokratis. Tema inti dari pluralisme adalah bahwa kekuasaan politik terbagi-bagi dan tersebar secara luas.
2. Model Korporatis, model ini berbeda dari pluralisme dimana mereka berusaha untuk menelusuri implikasi-implikasi dari hubungan-hubungan yang lebih erat yang telah berkembang di masyarakat-masyarakat industri antara kelompok-kelompok dan negara. Korporatisme adalah sebuah teori sosial yang menekankan posisi istimewa yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi rumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3. Model Kanan Baru, model ini menunjukkan antipati terhadap kelompok-kelompok kepentingan berasal, secara ideologis, dari individualis yang terletak di jantung dari ekonomi neoliberal. Kelompok sosial dan badan-badan kolektif dari segala jenisnya karena itu dipandang dengan penuh kecurigaan (Heywood 2013)

d. Pertumbuhan dan Perkembangan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sesungguhnya telah lama muncul dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk gerakan maupun

organisasi kepentingan. Dalam politik di negaranegara maju seperti di Inggris ditandai dengan munculnya organisasi seperti Masyarakat Abolisi yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an, yang kemudian diikuti organisasi-organisasi di bidang lain. Di Amerika Serikat gerakan itu ditandai dengan munculnya berbagai asosiasi dalam masyarakat yang bermaksud membela kepentingan-kepentingan kelompok, berhadapan dengan pihak Inggris maupun pertumbuhan pemerintahan Amerika pada masa-masa awal (Cigler and Loomis 2011:8). Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat tumbuh subur dan berakar kuat, salah satunya karena didukung oleh munculnya asosiasi-asosiasi masyarakat tersebut. Kondisi ini sepertimana dikemukakan oleh pemikir Perancis Abad 19, Alexis de Tocqueville, ketika mengunjungi negara tersebut dengan menyatakan bahwa, asosiasi-asosiasi telah menjadi bagian inheren dalam budaya politik Amerika Serikat dan menjadi sumbu bagi tegaknya kehidupan demokratis, yang tidak ditemukan pada masyarakat manapun ketika itu (Tocqueville 1994:167).

Dalam banyak hal kelahiran kelompok kepentingan hampir mirip dengan partai-partai politik. Hanya saja partai politik lebih diorientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului partai-partai politik. Mereka bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Sebagian di antaranya malah menjadi cikal bakal partai politik. Beberapa kelompok kepentingan yang awal di Indonesia muncul pada era kolonial seperti: Sarikat Dagang Islam (SDI), Al-Irsyad, Muhammadiyah, Serikat-Serikat Buruh, pekerja kereta api, Taman Siswa, Organisasi Koperasi, Nahdlatul Ulama dan lain-lain, menjadi pelopor awal dalam munculnya politik kelompok. Organisasi- organisasi tersebut sebagian bertransformasi menjadi besar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada abad ke 20, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di era tahun 1950-an dan 1960-an di negara-negara Barat kelompok kepentingan tumbuh menjamur seiring dengan perluasan peran pemerintah ke segala bidang kehidupan. Perluasan birokrasi dan fungsi-fungsi pemerintahan, baik lokal maupun nasional, dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan telah melahirkan tanggapan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang merasa perlu terlibat dalam isu-isu tertentu. Hal tersebut

juga seiring dengan semakin meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta meningkatnya keterampilan-keterampilan organisasional. Gejala ini menunjukkan bahwa, semakin banyaknya area di mana pemerintah menjadi terlibat, maka semakin banyak pula kepentingan-kepentingan khusus yang berkembang untuk mempengaruhi kebijakan (Loomis 2011:181-182).

Selain itu, kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh mencuatnya isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hal tersebut mulai dari masalah kekerasan anak, perdagangan bebas, kesetaraan perempuan, lingkungan, perdagangan manusia, hak asasi manusia, hutang luar negeri, masalah energi, sumberdaya air, komunitas adat, iklim dan cuaca, hak konsumen, perlindungan binatang, pendidikan kaum marginal, ekonomi mikro, transgender, dan sebagainya. Gerakan ini, untuk sebagian, merupakan bagian dari gerakan sosial baru yang terus memperoleh tempat dalam masyarakat moderen. Sementara pada sektor-sektor tertentu, lahirnya kelompok kepentingan berwujud perjuangan kelompok-kelompok asosiasi profesi, perdagangan, subsektor kehidupan konsumen, kelompok-kelompok dalam birokrasi, kaukus dalam parlemen, aliansi para politisi dalam legislatif maupun eksekutif dan juga yudikatif yang memperjuangkan kepentingan kelompok melalui usulan-usulan, petisi-petisi, dan loby-loby tertentu yang disampaikan.

Belakangan setelah reformasi tahun 1998 di Indonesia, gelombang kelahiran kelompok-kelompok kepentingan baru merebak secara nasional. Suasana politik yang demokratis yang ditandai dengan ledakan partisipasi mengakibatkan sebagian anggota masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di luar partai-partai politik, dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan (Horowitz 2014). Selama kurang lebih 17 tahun terakhir ini diperkirakan tidak kurang 2500 an kelompok kepentingan lahir di seluruh tanah air, yang merangkumi berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, keagamaan adat, etnik, pers, dan lain-lain, dari tingkat lokal sampai nasional.

Jaminan kebebasan yang luas serta adanya kompetisi kuat diantara kelompokkelompok serupa menambah semakin serunya persaingan

kepentingan. Kedudukan kelompok-kelompok ini turut mempengaruhi konfigurasi politik serta ikut mendinamisasikan proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun demikian, hanya sebagian saja di antara kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang mampu mewarnai atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat nasional. Sementara sebagian kecil kelompok kepentingan yang lain dibentuk lebih merupakan tanggapan terhadap isu-isu sesaat yang muncul, ataupun ada karena kepentingan partai politik. Kelompok-kelompok ini bahkan untuk sebagiannya justru malah muncul sebagai kelompok penekan.

e. Kelompok Kepentingan dan Gerakan Sosial Baru

Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” (alienasi) dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat (Self Help), terutama masyarakat lokal. Tujuannya antara lain meningkatkan kualitas hidup (quality of life). Salah satunya caranya ialah dengan mendirikan berbagai kelompok yang peduli pada masalah-masalah baru seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia, dan gerakan antinuklir”. Selain itu gerakan sosial baru ini lebih menekankan kebebasan pada gerakan mereka itu sendiri seperti tidak memiliki struktur organisasi (adanya rantai komanda), tidak terbirokratisasi, mempunyai kepentingan atau issue perjuangan yang sama. (Budiardjo 2010).

Gerakan sosial dibentuk oleh satu perilaku kolektif yang dimana sebagian besar sosial dibangkitkan pada gerakan-gerakan sosial yang baru. Di abad ke 19 gerakan-gerakan telah marak muncul baik dari gerakan perempuan, gerakan lingkungan maupun gerakan perdamaian. Gerakan-gerakan ini muncul oleh sebuah faktualisasi yang terjadi pada gejolak dunia belakangan ini, misalnya pada gerakan perempuan muncul akibat banyaknya perempuan yang merasa ditindas, hal lain dipicu sebagai gerbang perempuan mengaspirasikan kesetaraan gender, kesetaraan upah, legalisasi aborsi dan beberapa masalah lainnya tentang keperempuanan. Gerakan lingkungan tentunya hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap pencemaran lingkungan, penebangan hutan, serta kampanye penghijauan diberbagai pelosok negeri dalam mengajak masyarakat berpartisipasi

dalam pengahijauan lingkungan. Selanjutnya, gerakan perdamaian yang ditenggarai oleh beberapa peperangan yang juga terjadi di penjuru dunia seperti yang terjadi pada Israel dan palestina kemudian kekerasan yang terjadi pada kaum etnis Rohingya di Thailand yang memicu munculnya gerakan-gerakan perdamaian untuk mendamaikan seluruh lapisan kelompok masyarakat yang berbangsa dan bernegara sehingga tercipta kehidupan yang harmonis diantara umat beragama maupun bernegara.

Gerakan sosial mencerminkan sebuah usaha oleh individu untuk mencapai sebuah keamanan yang bersifat individu dan menyeluruh, selain itu identitas melalui komitmen yang kuat serta kepatuhan mereka terhadap suatu pemimpin agar mengharapakan suatu keamanan dan kenyamanan. Kemunculan gerakan-gerakan sosial baru dipandang sebagai bukti bahwa kekuasaan di masyarakat semakin padu dan semakin besar, sehingga muncul sebuah kekuatan baru dalam elemen suatu bangsa. Gerakan tersebut tidak hanya menawarkan pusat-pusat kekuasaan baru tetapi mereka berupaya menyebarkan dan menghegemoni kekuasaan agar tersebar secara lebih efektif dan efisien dan mengembangkan ragam organisasi yang lebih afektif dan terdesentralisasi.

Pengaruh gerakan-gerakan sosial dinilai terpengaruh pada kelompok kepentingan maupun partai politik. Tujuan mereka di pengaruhi oleh langkah-langkah strategis kebudayaan, perubahan gerakan tersebut dianulir dapat mengeser nilai-nilai sikap dan kebudayaan. Gerakan sosial di lihat dalam sudut pandang lain sebagai produk dari power lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi, kepemimpinan yang diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi baru dalam proses-proses gerakan, sebagai individu yang berupaya mendesain dan terdesain begitu paripurna agar menciptakan sebuah ketinggian sumberdaya manusia. Faktor eksternal meliputi, tingkat respresi sebuah masyarakat yang dimana mampu ikut andil dan berperan dalam kelangsungan sebuah proses gerakan sosial, yang diharapkan mampu menumbuhkan sikap simpati terhadap atas perkembangan gerakan sosial baru. Dalam hal ini tahapan diperlukan pada suatu gerakan dan bagaimana proses dari sebuah tingkat gerakan sosial dapat dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan. Pendekat ini lebih konsen pada pemahamanpemahaman yang baik untuk perkembangan gerakan sosial, sehingga mampu melahirkan sumberdaya manusia untuk gerakan sosial.

(Charles Tilly 2017)

Sementara (Charles Tilly 2017), mengkaji beberapa tahapan diperlukan pada suatu gerakan dan bagaimana proses dari sebuah tingkat gerakan sosial dapat dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan. Pendekat ini lebih kosen pada pemahaman-pemahaman yang baik untuk perkembangan gerakan sosial, sehingga mampu melahirkan sumberdaya manusia untuk gerakan sosial. (Culture and Singh 2011) berorientasi pada gerakan sosial yang sifatnya kontemporer, yang dimana sifatnya dilandasi sebagai asumsi dasar dalam kritik terhadap gerakan sosial baru. Partisipasi gerakan sosial tidak lai menjadi sebuah konsekuensi melainkan keputusan rasional yang dimana perlu dilakukan pertimbangan untung dan rugi dalam melibatkan gerakan sosial sebagai kelompok yang menjadikan wadahnya sebagai mobilisasi dalam sumberdaya. istilah mobilisasi mengacu pada proses dalam sebuah pembetulan kerumunan, asosiasi, kelompok dan organisasi yang kolektif demi mencapai tujuan bersama. (Locher et al. 2018)

Beberapa teoritisi lebih mengkaji pada sisi rasional dimana menjelaskan perilaku kolektif dan memahami individu sangat terlibat dalam proses gerakan sosial. Tidak hanya itu sebuah bentuk biaya, keamanan, gaji, juga menjadi perhitungan yang matang dalam membentuk sebuah gerakan sosial, sebab dalam membangun sebuah gerakan sosial tidak hanya diperlukan sebuah taktik yang matang, konsep yang baik melainkan juga berupa biaya yang memadai agar terhidar dari keguncangan pembiayaan dalam sebuah perjalanan kehidupan gerakan-gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru (New Social Movements) melibatkan dimensi-dimensi rasionalitas yang melibatkan banyak pandangan baik tindakan kolektif maupun kerangka teoritik yang baik sehingga memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam suatu gerakan sosial. (Sukmana 2013).

Gerakan sosial yang tentang mengubah “hati dan pikiran” serta kebijakan. Yang penting, ini tidak harus dilihat sebagai dua upaya yang berbeda atau bersaing. Dalam kasus gerakan mungkin pada mengubah pengaturan struktural. gerakan sosial dapat menargetkan preferensi masyarakat hak-hak sipil kulit hitam, aktivis berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap masyarakat berharap bahwa ini akan menekan elit politik untuk mengambil tindakan, sementara

secara bersamaan menargetkan lembaga-lembaga ekonomi dan politik. Dalam kasus kesetaraan gender, kaum feminis cepat menyadari bahwa menargetkan kebijakan tidak akan selalu melemahkan keyakinan budaya dan normatif sangat berakar tentang peran gender dan jenis kelamin. Oleh karena itu aktivis ditargetkan lembaga-lembaga politik serta pertanyaan publik mendorong norma gender dan ketidaksetaraan struktural gender. Ini berarti bahwa target gerakan dan tujuan berkisar dari jangka pendek proksimat dan jangka panjang jauh dan. (Pettinicchio 2016) Dengan demikian, peran gerakan sosial dalam proses pembuatan kebijakan politik menimbulkan pertanyaan tentang jangka pendek dan proses perubahan sosial jangka panjang.

Analisis gerakan rakyat miskin dan kebijakan kesejahteraan Amerika pada tahun 1960 menyarankan bahwa lembaga secara inheren stabil selama jangka waktu yang lama tetapi untuk titik-titik tertentu di mana perubahan datang dalam semburan. Hal ini di sini di mana gerakan dapat bermakna mempengaruhi perubahan. Sebagai suatu gerakan perbuahan sosial atau suatu gerakan pemabaharuan, umur gerakan tersebut tidak bernafas panjang. Sebagai fokus utama tumbuh dengan menyertakan cara-cara di mana gerakan politik memengaruhi selama periode berlarut-larut waktu.

Di tingkat lokal gerakan sosial yang terus berusaha untuk mengharapkan pembentukan provinsi dianggap realistis. Asumsi ini didasarkan pada UU Otonomi Daerah. 22, 1999 (pra direvisi), memberikan kesempatan dan ruang baru ke daerah untuk mengurangi eksploitasi dan marginalisasi. Reaksi kondisi ini mendorong perubahan yang dilakukan oleh kelompok atau kelompok kekuatan tertentu. Reaksi ini dimobilisasi oleh kelompok atau oleh sekelompok kekuatan tertentu. Mengingat gerakan perubahan-berorientasi, gerakan berarti sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas, tidak ada gerakan selain koleksi keinginan untuk mengubah hal-hal yang dianggap lebih baik dan lebih bermakna. Dalam kerangka kehidupan sosial, gerakan adalah berbagai upaya untuk mengubah urutan tidak adil menuju tatanan baru yang menjamin terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. (Purnomo, E. P., & Anand, P. B., & Choi 2014).

Kelompok kepentingan dan gerakan berusaha memngintervensi suatu kebijakan pemerintah tanpa berkehendak lain dapat memperoleh

jabatan politik. Sedangkan partai politik secara terang-terangan memang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai jabatan-jabatan publik melalui pemilu. Walaupun kelompok kepentingan mendapatkan porsi dalam kekuasaan tidak menunjukkan bahwa kelompok kepentingan itu berorientasi kekuasaan. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang strategi civil society sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dari gambar 1 di atas menjelaskan bahwa, strategi masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dalam mempengaruhi kebijakan dengan sejumlah instrumen yaitu: *advising*, *advocasi*, *lobbying* dan *activism*. Masing-masing instrumen ini memiliki karakter gerakan yang berbeda-beda. Namun, dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan pilihan-pilihan yang dikehendaki. Masing-masing instrumen dan pilihan-pilihan gerakan tersebut menjadi penentu warna hubungan masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dengan pemerintah.

Selanjutnya menurut Heywood (2013), secara garis besar ada beberapa faktor utama yang menentukan pengaruh kelompok, yaitu seperti: (1) Kebudayaan Politik; (2) Struktur Kelembagaan; (3) Watak dari system partai; (4) Watak dan gaya dari kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang mempengaruhi suatu kelompok kepentingan dalam memberikan pengaruhnya, terutama dalam watak dan sumber dayanya, yaitu seperti: simpati publik terhadap kelompok tersebut dan tujuan-tujuannya, ukuran keanggotaannya dan basis aktivisnya, kekuatan finansial dan kemampuan organisasionalnya, kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah, hubungan- hubungan personal atau institusional yang mungkin dimilikinya dengan partai-partai politik atau badan-badan pemerintahan. Metoda-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dipengaruhi oleh saluran-saluran akses yang digunakan untuk memberikan pengaruh. Saluran-saluran akses tersebut adalah seperti: (1) Birokrasi; (2) Majelis; (3) Pengadilan-Pengadilan; (4) Partai-Partai Politik; (5) Media Massa; (6) Organisasi-Organisasi Internasional (Heywood, 2013).

4. Rangkuman

Kelompok kepentingan dan gerakan adalah sebuah kelompok organisasi berpengaruh sebagai sebuah asosiasi yang terorganisir dan

sistematis yang mana kelompok ini senantiasa memiliki tujuan untuk mempengaruhi dari setiap kebijakankebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan dari sebuah state atau government. Saat ini peran dari sebuah kelompok kepentingan dan sebuah gerakan semakin meningkat dan memiliki pengaruh yang cukup luas dalam implementasinya dalam sebuah negara. Dalam sebuah jalannya system demokrasi, kelompok kepentingan dan gerakan merupakan sebuah katalisator penghubung antara yang memerintah dan yang di perintah (masyarakat).

Secara garis besar dan komprehensif, kelompok kepentingan dan gerakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam seperti kelompok komunal, kelompok institusional, kelompok asosiasional, dan secara garis besar ada tiga model politik kelompok kepentingan yang paling berpengaruh, yaitu seperti Pluralisme, Korporatisme, Kanan Baru, dimana faktor utama yang menentukan pengaruhnya, yaitu seperti Kebudayaan Politik, Struktur Kelembagaan, Watak dari system partai, Watak dan gaya dari kebijakan publik, dengan menjalankan dua fungsi politik yang utama: (1) Agregasi kepentingan, yakni dibentuk pada suatu program kebijakan yang didasarkan atas rangkaian kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda, (2) Artikulasi kepentingan, yakni di anulir sebagai ekspresi dan mempublikasikan berbagai ragam kebijakan yang mampu untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan-gerakan sosial juga sangat memanfaatkan bentuk-bentuk metode yang sama dalam mengartikulasikan suatu kepentingan, seperti, melakukan lobby dan negosiasi terhadap politisi dalam membuat dan menyebarkan pamflet, membuat riset, mengoordinasikan aksi-aksi pemogokan, dan mengorganisasikan petisi, sambil mengorganisasikan aksi-aksi kekerasan tertentu, dan lainnya.

Resourch Mobilization Theory (RMT), focus pada agenda-agenda sosial yang memunculkan pada berhasilnya suatu gerakan, Resourch Mobilization Theory (RMT) lebih memberikan perhatiannya pada faktor politik dan faktor ekonomi. Teori ini juga dibangun atas sebuah asumsi bahwa adanya suatu keterangisanan individu dan masyarakat sehingga lebih cenderung pada ketidaksesuaian antara kapasitas sebuah gerakan disbanding suatu individu. Sehingga muncul ketidak puasan terhadap sebuah gerakan sosial yang berdampak pada kurang simpati masyarakat pada gerakan-gerakan sosial baru. Gerakan-gerakan ini muncul oleh

sebuah faktualiasi yang terjadi pada gejolak dunia belakangan ini, misalnya pada gerakan perempuan muncul akibat banyaknya perempuan yang merasa ditindas, hal lain dipicu sebagai gerbang perempuan mengaspirasikan kesetaraan gender, kesetaraan upah, legalisasi aborsi dan beberapa masalah lainnya tentang keperempuanan. Gerakan lingkungan tentunya hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap pencemaran lingkungan, penebangan hutan, serta kampanye penghijauan diberbagai pelosok negeri dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan.

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

Mahasiswa memilih satu contoh kebijakan publik, jelaskan masalah penyebab lahirnya kebijakan publik, lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta capaian dari implementasi kebijakan tersebut.

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menjelaskan proses implementasi sebuah kebijakan publik.

7. Umpan Balik

D. Penutup

1. Rangkuman

Analisis implementasi kebijakan merupakan proses analisis yang berfokus pada objek material sosial. Bahwa ada masalah sosial, kebijakan publik dirumuskan, ada lingkungan yang mempengaruhi proses perumusannya, hingga penerapannya. Analisis implementasi kebijakan ini digabungkan dengan analisis biaya dan manfaat. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan pengukuran atas sebuah kebijakan publik yang telah diterapkan. Penguasaan atas materi modul ke 6 ini adalah salah satu konsep terpenting yang harus dikuasai oleh mahasiswa Ilmu Politik, sehingga mampu menganalisis kebijakan publik yang merupakan produk dari proses politik.

2. Daftar Istilah

Agenda setting	Upaya menciptakan <i>public awareness</i> (kesadaran masyarakat) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting
Lembaga legislatif	Lembaga pembuat UU
Keputusan yudisial	Keputusan lembaga peradilan
Distorsi	Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul (Editor), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
- Antlov, Hans Eds, Election in Indonesia, The New Order and Beyond, London and New York, Routledge Curzon, 2004.
- Anderson, James E., Public Policy making: An Introduction, Houghton Mifflin, Boston, 1990.
- AR, Mustopadidjaja, Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Asfar, Muhammad dkk, Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, Surabaya, 2002.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Chilcote, Ronald H., Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Dahl, Robert, Perihal Demokrasi, terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Dahl, Robert, Polyarchy, Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven, 1971.
- Diamond, Larry, Developing Democracy: Toward Consolidation, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1999.
- Evans, Kevin Raymond, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Consultancies, Jakarta, 2003.
- Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.

- Gabriel. 2018. 'Research Note : A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process Author (s): Gabriel A . Almond Source : The American Political Science Review , Vol . 52 , No . 1 (Mar . , 1958) , Pp . 270-282 Published by : American Political Science As'. 52(1): 270–82.
- Gaffar, Afan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Heywood, A. (2013). Politik: Edisi ke-4; terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Politik.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, Transisi Men
- Rauf, Maswadi, Demokrasi dan Demokratisasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tanggal 1 November 1997. Rauf, Maswadi, Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000. Reynold, Andrew, et.al., Sistem Pemilu, International IDEA Handbook, Swedia, 2005.
- Tilly, Charles. 2017. 'Contentious Repertoires in Great Britain , 1758-1834 Author (s): Charles Tilly Published by : Cambridge University Press Stable URL : [Http://Www.Jstor.Org/Stable/1171282](http://www.jstor.org/stable/1171282) Contentious Repertoires'. 17(2): 253– 80.

MODUL 8 ELIT POLITIK

A. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membantu mahasiswa untuk memahami terminologi elite politik. Teori elite klasik akan menjelaskan tentang distribusi kekuasaan dan pengaruh elit dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan stratifikasi politik yaitu lapisan sistem elite dan sirkulasi elite. Dalam modul ini juga akan dikaji terkait analisa posisi, analisa reputasi dan analisa keputusan dala elite politik.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 8 ini adalah:

- a. CP1 : Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
2. CP2: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3. CP3: Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan publik.
4. CP 4 : Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan masalah sosial, kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik di Indonesia.
5. CP 5 : Mahasiswa mampu menganalisis definisi elit dan stratifikasi sosial elite

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 8 ini adalah: Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan publik.

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 8

Kegunaan atau manfaat dari Modul 8 ini adalah membantu mahasiswa memahami teori-teori kebijakan publik sebagai sebuah sistem yang secara alamiah terjadi dalam sebuah Negara dan masyarakat.

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dalam Modul 8 ini adalah monitoring dan teknik evaluasi kebijakan, pendekatan pemantauan, dan teknik pemantauan.

B) Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1 : Elit Politik

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami konsep tentang monitoring kebijakan.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan Pemantauan dalam analisis kebijakan, Pendekatan pemantauan, dan Teknik pemantauan.

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Elit digambarkan secara sederhana seperti sekelompok individu yang mempunyai peran dan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Peran dan pengaruh yang lebih besar dapat mereka lakukan karena keunggulan-keunggulan yang mereka miliki, tidak dimiliki kelompok individu lainnya, dan hal itu menjadi pembeda. Keunggulan tersebut dapat membuat mereka mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu. Pada gilirannya, yang bersangkutan akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan masyarakat.

Pada kenyatannya, mereka yang mempunyai peran dan pengaruh besar berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat lainnya yang tidak memiliki peran dan pengaruh. Meskipun berjumlah lebih sedikit, mereka yang memiliki keunggulan dapat memerintah atau memaksa individu-individu lainnya untuk tunduk pada perintahnya.

Individu-individu lainnya tersebut dikenal dengan sebutan massa. Karena tidak memiliki keunggulan, meskipun jumlahnya lebih besar massa harus

mematuhi dan tunduk pada perintah pihak yang memiliki keunggulan. Para ilmuwan sosial menyatakan bahwa kondisi seperti merupakan hal yang wajar dan alamiah. Sebab, dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, mereka mampu membangun kekuatan yang dapat dipergunakannya untuk memaksa pihak lain untuk tunduk dan patuh pada kehendaknya. Semakin besar keunggulan yang dimilikinya akan menjadikan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang semakin besar pula. Kekuasaan yang besar akan membuat sekelompok individu tadi memiliki kemampuan dalam memainkan peran dan pengaruhnya pada cabang kehidupan dimana yang bersangkutan memiliki keunggulan.

3.1 Pengertian Elit

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite.

Golongan elit terbentuk karena adanya perbedaan, yang alamiah terjadi dalam masyarakat. Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya adalah titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok unggulan. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elit yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan, yang tidak memiliki keunggulan.

Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah prosuk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya

yang baru oleh generasi berikutnya (Nasruddin Anshoriy, 2008) .

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik (Varma, 1987). Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Dalam sirkulasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, 2000).

Elite adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya.

Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, dimana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan

dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elite politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

Menurut Keller, elite pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritasminoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (*non elite*).

Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Varma, 1987).

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau

pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elite yang tiak memerintah (non governign elite) . Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai adri yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah (Rauf M. , Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis, 2000).

Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu : (1). Lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite), dan elit yang tidak memerintah (non-governing). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite. Konsep pergantian elite juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian: (1). di antara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri. (2). di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (1). individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada. (2). individuindividu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemduain didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu

yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.

Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite. Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat.

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri, apa lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite.

Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki atau bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Charles F. Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni : sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.

3.2 Stratifikasi politik

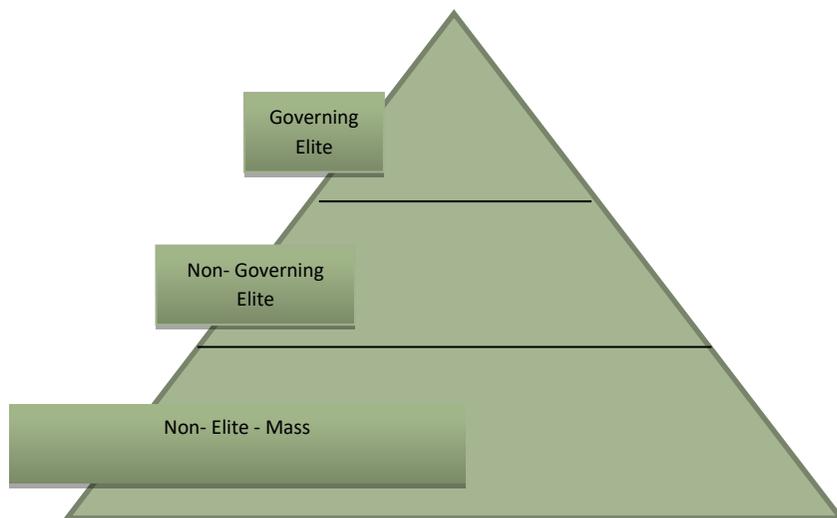
Pada umumnya individu atau sekelompok individu yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu akan tampil sebagai pemimpin di masyarakatnya. Mereka akan mengarahkan individu-individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya. Hal ini memiliki konsekuensi kelompok yang memimpin dan dipimpin akan muncul di masyarakat, atau dalam istilah lain kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah.

Hal yang perlu dicatat adalah sekelompok individu yang memainkan peran sebagai pemimpin tersebut secara alamiah berjumlah jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan individu-individu yang dipimpin. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa mereka yang dapat dimasukkan ke dalam golongan yang memimpin atau yang memerintah dikarenakan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya.

Pareto dan Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional ataupun yang modern, pasti dapat ditemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu tadi adalah lapisan elit yang memerintah atau “*governing elite*” dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah atau “*non-governing elite*” Mereka yang termasuk dalam kelompok

elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politik. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politik, tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan (Bottomore, 1981).

Pendapat tersebut, apabila dipaparkan dalam bentuk grafik menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi lapis (Hagopian, 1978). Piramida tersebut melukiskan masyarakat yang terbagi menjadi dua lapis, yakni anggota masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan lapis lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat pada umumnya yang tidak termasuk dalam kelompok elit (*non-elite*). Sementara itu, mereka yang termasuk dalam kelompok elit masih dipilah lagi menjadi dua, yakni mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah (*governing elite*) yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mereka yang termasuk dalam kelompok elit, tetapi tidak sedang memerintah (*Non-Governing Elite*). Grafik berikut ini dapat lebih memperjelas hal tersebut,

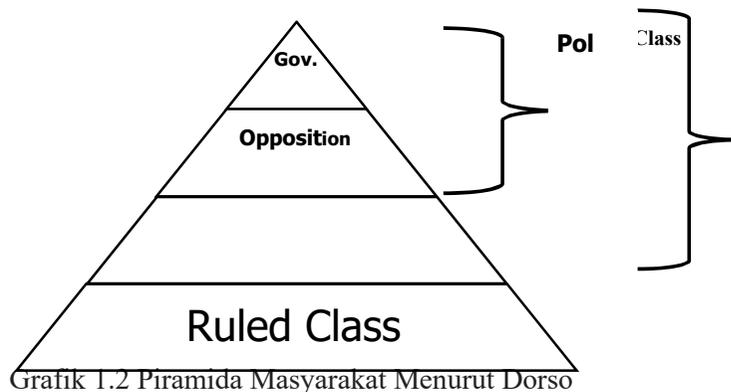


Gambar Piramida Masyarakat Menurut Pareto dan Mosca

Guido Dorso seorang *political theorist* dari Italia berusaha melengkapi teori dari Pareto dan Mosca dengan menjelaskan bahwa ada dikotomi dalam masyarakat, yang dibedakan dengan adanya peran dalam masyarakat dimana ada kelas yang memerintah dan diperintah. Kelas yang sedang memerintah atau yang disebut dengan "*the rulling class*" dinyatakan sebagai kelompok yang

mempunyai kekuasaan. *The ruling class* kemudian dipilah menjadi beberapa *sub-classes* dimana yang salah satunya merupakan “*the political class*” yang merupakan instrumen teknis dari kelas yang memerintah tadi. Menurut Dorso, *the political class* dapat dipilah lebih lanjut menjadi *the government political class* atau yang disebut dengan *the ins*, dan *the opposition political class* yang sering disebut dengan *the outs* (Hagopian, 1978).

Pendapat Dorso diatas sebagaimana dengan Pareto ataupun Mosca dapat digambarkan dalam bentuk gambar yang menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi beberapa lapis. Piramida yang termasuk Piramida yang melukiskan masyarakat tersebut dapat dipilah menjadi lapisan yang termasuk kelompok yang memerintah atau “*ruling class*” dan kelompok yang diperintah atau “*the ruled*””. Kelompok yang disebut belakangan, jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan kelompok yang disebut pertama. Di dalam Lapis masyarakat yang memerintah atau “*the ruling class*” terdapat kelompok yang tergolong dalam “*the political class*” yang berada pada puncak piramida. Dalam piramida yang menggambarkan kelompok yang tidak diperintah, tidak ada sebutan bagi mereka yang termasuk dalam “*the ruling class*” tetapi tidak tergolong dalam kelompok “*the political class*”. Dorso hanya memilah kelompok yang berada pada puncak piramida ini menjadi yang tergabung dalam “*the government political class*” dan mereka yang tidak termasuk di dalamnya sebagai “*the opposition political class*”. Grafik berikut ini dapat lebih memperjelas hal tersebut.



Grafik 1.2 Piramida Masyarakat Menurut Dorso

Secara garis besar, pendapat yang dikemukakan Pareto, Mosca, ataupun Dorso adalah pemilahan masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki keunggulan dan mereka yang tidak. Pada gilirannya, mereka yang terlekat

keunggulan akan mampu menggenggam kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk memerintah mereka yang tidak memiliki keunggulan apa pun. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang diperintah mempunyai jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah mereka yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Hal tersebut paralel dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robert Michels yang menyatakan bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa suatu kelas “dominan” atau kelas politik. Selanjutnya, Michels mengatakan bahwa pemerintah tidak lain adalah organisasi dan sekelompok minoritas yang dominan. Kelompok minoritas ini yang memberlakukan “tatanan legal” yang merupakan hasil dominasi dan eksploitasi terhadap massa. Kelompok minoritas tidak pernah benar-benar mewakili golongan mayoritas (Michels, 1986).

Kondisi masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Michels tersebut pernah digugat oleh mereka yang tergabung dalam kelompok liberal. Kelompok liberal menyatakan bahwa sejatinya, kekuasaan yang ada di masyarakat harus dibagi secara merata di antara para anggotanya, dan mereka yang tergabung dalam kelompok ini sangat yakin bahwa hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Merespons kritik yang dikemukakan kelompok yang tergabung dalam kaum demokrat liberal tadi, mereka yang termasuk dalam kelompok yang menganut paham “elitis” menyatakan sanggahannya. Mereka menyatakan bahwa bukan saja karena kenyataannya, kekuasaan itu dimonopoli oleh sekelompok kecil orang tetapi memang secara praktis, tidak mungkin dan tidak seharusnya terjadi yang sebaliknya (Putnam, 1978).

Berdasarkan pada uraian tersebut, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa dalam kehidupan politik terdapat beberapa lapisan, atau dengan istilah yang lebih populer terdapat stratifikasi politik. Dalam stratifikasi politik, individu-individu yang berada pada lapisan atas—karena keunggulan yang dimilikinya—mempunyai kemampuan lebih besar untuk menggenggam dan menjalankan kekuasaan. Di sisi lain, individu-individu yang berada pada stratifikasi/ lapis bawah memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk menjalankan hal yang sama. Oleh karena itu, semakin ke atas posisi seseorang atau kelompok dalam stratifikasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang semakin besar. Demikian pula sebaliknya, semakin ke bawah posisi seseorang atau sekelompok orang berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang semakin kecil atau bahkan, tidak memiliki sama sekali.

Putnam memberikan penjelasan relatif detail berkaitan dengan stratifikasi politik. Dengan rinci, ia melukiskan pendapatnya tentang stratifikasi politik dalam

suatu bentuk piramida yang di dalamnya terdapat enam lapisan. Ia menyatakan pada lapisan yang pertama—di puncak piramida—terdapat individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional. Mereka disebut sebagai kelompok pembuat keputusan atau “*proximate decision makers*”. Pada umumnya, lapisan ini terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan resmi utama.

Pada lapisan yang kedua, terdapat kaum berpengaruh (*influentials*) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit kuat. Kepentingan dan pendapat mereka yang termasuk dalam kelompok ini diperhitungkan oleh para pembuat keputusan. Para pembuat keputusan tetap memperhitungkan sanksi ataupun ancaman yang dilontarkan oleh kelompok ini. Pada umumnya, lapisan ini terdiri dari para tokoh, seperti birokrat tingkat tinggi, tuan tanah besar, industrialis, bankir, pemimpin kelompok kepentingan, dan konsultan baik yang resmi ataupun tidak resmi.

Lapisan ketiga terdiri dari para warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Mereka mungkin berperan sebagai anggota partai ataupun birokrat tingkat menengah. Pada umumnya, aktivitas politik yang dilakukannya telah dijalannya secara intens dalam kurun waktu yang relatif lama. Individu-individu yang termasuk dalam kelompok yang disebut “lapisan aktivis” ini mempunyai jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah individu pada kaum berpengaruh yang berada di lapisan kedua.

Pada lapisan yang keempat, terdapat individu-individu yang menganggap dan memandang bahwa kehidupan politik seperti halnya sebuah tontonan pertunjukan yang sangat menarik. Individu-individu yang termasuk dalam kelompok ini memiliki minat yang relatif besar pada berlangsungnya aktivitas politik yang terjadi di sekelilingnya, walaupun tidak melakukan aktivitas politik yang menonjol. Hal yang membedakan mereka dengan anggota-anggota masyarakat lainnya adalah minatnya yang sedemikian besar terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan

Lapisan yang kelima dalam stratifikasi politik adalah lapisan warga negara biasa yang sering disebut dengan “massa”. Mereka bisa memengaruhi kehidupan politik nasional hanya pada saat diselenggarakan pemilihan umum. Di luar kegiatan pemilihan umum, hampir dapat dikatakan pengaruhnya tidak ada. Individu-individu yang tergabung dalam lapisan ini biasa disebut dengan kaum pemilih atau voters. Kaum pemilih ini memiliki satu sumber politik

kolektif yang melekat pada dirinya yang dapat dikategorikan penting, yakni jumlah mereka yang relatif besar. Akan tetapi, walaupun jumlah mereka besar, secara individual mereka tidak memiliki pengaruh politik sama sekali.

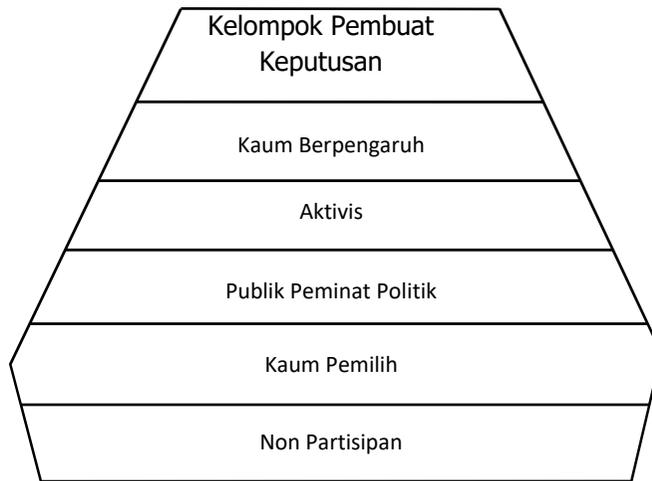
Lapisan keenam sekaligus terakhir merupakan lapisan paling bawah dari stratifikasi politik terdiri dari individu-individu yang menjadi objek politik saja. Mereka sama sekali tidak melakukan peran apa pun dalam kehidupan politik. Oleh karenanya, mereka sering disebut sebagai kelompok non-partisipan yang secara politis tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Berbagai kemungkinan bisa menjadi faktor penyebab mengapa mereka hanya menjadi objek politik semata (MacAndrews, 1991).

Ada tiga kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tersebut. Salah satu kemungkinan adalah mereka memang dengan sengaja menghindarkan diri dan tidak bersedia terlibat dalam kehidupan politik, walaupun mereka mempunyai wawasan politik yang relatif memadai. Kemungkinan lainnya, mereka tidak melakukan peran apa pun dalam kehidupan politik karena ketidaktahuannya. Hal ini dikarenakan wawasan politiknya yang relatif tidak memadai untuk dapat terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, dimungkinkan pula bahwa mereka hanya menjadi objek politik karena diasingkan sama sekali dari segala aktivitas politik oleh penguasa yang ada.

Uraian mengenai stratifikasi politik yang dikemukakan oleh Putnam tersebut juga paralel dengan pendapat yang diungkapkan oleh Pareto, Mosca, ataupun Dorso. Individu-individu yang oleh Putnam dikelompokkan dalam lapisan paling atas atau yang mendekati puncak stratifikasi disebut sebagai kelompok elit, sementara individu-individu yang berada di lapisan paling bawah atau yang mendekati dasar stratifikasi disebut sebagai massa.

Demikian pendapat yang diungkapkan oleh Putnam tentang stratifikasi politik. Dalam menentukan pembentukan stratifikasi politik, Putnam mendasarkan pada pertimbangan aktivitas atau partisipasi yang dilakukan setiap individu dalam kehidupan politik. Frekuensi dan intensitas aktivitas politik yang dilakukan setiap individu tidak sama satu dengan yang lainnya atau dengan ungkapan lain tingkat partisipasi politik setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Pada gilirannya, perbedaan tersebut akan membentuk suatu lapisan yang oleh Putnam digambarkan dalam wujud piramida. Bentuk stratifikasi politik yang ada pada suatu masyarakat belum tentu mempunyai wujud yang sama dengan stratifikasi politik yang ada pada masyarakat yang lain. Hal yang menjadi faktor penyebab adalah tingkat partisipasi yang berbeda antara

masyarakat yang satu dengan lain. Begitu pula dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, bentuk stratifikasi politik yang ada pada masyarakat yang sama juga belum tentu serupa. Hal ini sangat mungkin karena adanya perubahan partisipasi politik anggota masyarakat yang bersangkutan, baik yang berhubungan dengan frekuensi ataupun intensitas partisipasi



Grafik Piramida Politik Menurut Putnam

Uraian di atas telah mengulas pandangan Pareto, Dorso, dan Putnam mengenai stratifikasi politik. Kiranya, perlu pula membahas hal yang sama menurut pandangan mereka yang termasuk dalam kelompok neo-Marxis. Menurut pandangan aliran neo-Marxis, masyarakat dapat dipilah menjadi tiga strata: kelompok borjuis, kelompok borjuis kecil (petty) atau kelas menengah, dan kelas pekerja.

Mereka yang berpandangan neo-Marxis menyatakan bahwa individu-individu yang termasuk dalam kelompok “the big bourgeoisie” adalah “the capitalist ruling class” yang memiliki bagian terbesar dari, misalnya, usaha pertambangan alam, usaha pertanian yang luas, pabrik-pabrik besar, perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka yang termasuk dalam kelompok ini juga memiliki dan menguasai usaha-usaha yang sifatnya “non-profit”, seperti halnya usaha di bidang pendidikan ataupun yayasan.

Strata berikutnya dihuni oleh mereka yang termasuk dalam kelompok “the petty bourgeoisie” atau kelas menengah. Menurut pandangan neo-Marxis, kelompok ini terdiri dari empat sub-kelompok yang masing-masing mempunyai peran dalam proses produksi. Sub- sub kelompok yang tergabung dalam kelompok “the petty bourgeoisie” ini adalah:

- (a) para profesional, seperti dokter, guru, ahli hukum;
- (b) orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori kelompok borjuis;
- (c) orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang disebut dengan “kelas menengah lama”, seperti para pemilik toko, pengrajin, petani-petani kecil, walaupun di masyarakatnya sedang berlangsung proses industrialisasi dan munculnya kelas pekerja, mereka ini (kelas menengah lama) tetap dapat bertahan;
- (d) orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai “white collar” atau yang sering pula dikenal dengan sebutan “service class”

Istilah “white collar” acapkali disandingkan dengan “blue collar”. Mereka yang termasuk dalam kelompok “white collar” merujuk pada orang-orang “kantoran”. Secara kontras, mereka yang termasuk dalam kelompok “blue collar” merujuk pada orang-orang atau pekerja di luar kantor atau pekerja lapangan. Sementara, kalangan lain menyatakan “white collar” sebagai pekerja “halus” dan “blue collar” sebagai pekerja kasar. Mereka yang termasuk dalam kelompok “blue collar” tentu saja tidak masuk dalam kelompok “the petty bourgeoisie” atau kelas menengah, tetapi masuk dalam kelompok di bawahnya.

Neo-Marxis menyatakan bahwa selain dua kelompok masyarakat sebagaimana diungkapkan tadi, masih terdapat satu kelompok lagi yang justru berada pada lapisan paling bawah, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok pekerja atau buruh. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini menjual tenaganya ke pasar, tenaga kerja yang didikte kepentingan kelompok borjuis yang ada pada lapisan masyarakat paling atas dan sekaligus sebagai pemilik “modal”. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kelas pekerja berada dalam kondisi dieksploitasi oleh pemilik modal. Akibat dari kondisi seperti itu, walaupun di masyarakat tersebut terjadi kenaikan standar hidup, kelompok pekerja tetap saja dalam keadaan miskin sementara pemilik modal menjadi bertambah semakin kaya.

Grafik berikut ini dapat memperjelas pemilahan strata sebagaimana diungkapkan oleh mereka yang mempunyai pandangan neo-Marxis.¹³ Kelompok “the big bourgeoisie” dengan jumlah anggota yang paling sedikit berada pada lapisan paling atas atau puncak dari sebuah piramida. Lalu, pada lapisan di bawahnya terdapat kelompok “the petty bourgeoisie” atau kelas menengah. Kemudian, disusul pada lapisan paling dasar dari piramida terdapat kelompok pekerja atau “the working class” yang jumlah anggotanya paling banyak.

Apabila diperhatikan sekilas dan tidak dengan saksama, tampaknya, stratifikasi sebagaimana yang diungkapkan oleh mereka yang berpandangan neo-Marxis tidak mempunyai kaitan dengan kekuasaan yang melekat pada sosok individu ataupun sekelompok individu. Akan tetapi, apabila diperhatikan secara mendalam dengan lebih saksama, ternyata ada kaitan antara stratifikasi tersebut dengan kekuasaan. Stratifikasi sebagaimana diuraikan tadi mempunyai dampak di bidang kehidupan politik. Secara sederhana dan ringkas, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam keadaan tidak mempunyai modal dan dieksploitasi, individu-individu yang tergabung dalam kelompok pekerja sangat tergantung hidupnya pada mereka yang memiliki modal. Dalam hal ini, modal dapat dipandang sebagai pangkal adanya kekuasaan pada kelompok yang memilikinya. Modal tersebut digunakan mereka untuk memberikan perintah kepada individu-individu lain, terutama yang tergabung dalam kelompok pekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disimak pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Miliband, salah seorang yang berpandangan neo-Marxis, yang menyatakan bahwa:

- a. Para pengusaha merupakan bagian penting dari apa yang disebut sebagai “the state elite”.
- b. Para pengusaha dan “the state elite” digambarkan mendominasi kelompok atas dan tengah-atas
- c. Ideologi dari “the state”, khususnya birokrasi, sangat “konservatif” dan pro-kapitalis.
- d. Kebijakan pemerintah, tanpa kecuali, adalah memberikan dukungan pada sistem kapitalis.

Demikian pandangan dari mereka yang tergabung dalam kelompok neo-Marxis tentang stratifikasi yang terjadi di masyarakat. Pada gilirannya, stratifikasi tersebut juga mempunyai dampak di bidang kehidupan politik. Paralel dengan stratifikasi yang diuraikan sebelumnya, baik yang diungkapkan

Pareto ataupun yang lainnya, kelompok yang berada pada lapisan atas atau puncak piramida mempunyai jumlah yang relatif sedikit, namun mereka mampu memengaruhi kehidupan individu-individu lainnya yang berada pada lapisan bawah dari susunan piramida tersebut.

4. Rangkuman

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

Mahasiswa melakukan evaluasi dasar atas sebuah program yang merupakan bagian dari kebijakan publik di Indonesia, dengan menggunakan salah satu dari 6 bentuk pendekatan yang telah dijelaskan dalam modul 7 diatas.

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan bentuk evaluasi yang dilakukan menggunakan salah satu pendekatan evaluasi dasar program kebijakan publik.

7. Umpan Balik

C) Kegiatan Pembelajaran 2

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 2 : Sirkulasi Elit

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

KA pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

- a. Mahasiswa mampu memahami konsep tentang monitoring kebijakan.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan Pemantauan dalam analisis kebijakan, Pendekatan pemantauan, dan Teknik pemantauan.

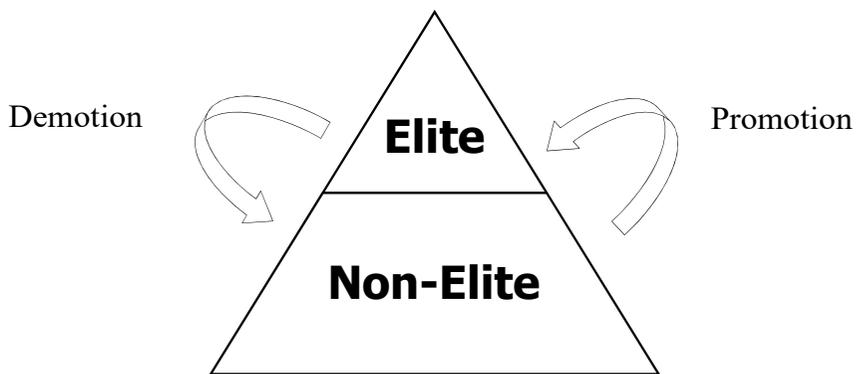
3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Posisi pada masyarakat yang terbagi menjadi dua lapisan, yakni kelompok elit dan kelompok non-elit atau massa dapat mengalami perubahan. Sekelompok individu yang berkedudukan sebagai elit tidak memiliki jaminan selamanya akan menduduki posisi tersebut. Posisi yang mereka sandang tidak bersifat langgeng karena akan diganti atau digeser oleh kelompok lainnya. Hal tersebut tidak dapat terelakkan, sebab perubahan atau pergeseran elit pasti akan berlangsung di masyarakat mana pun juga. Bahkan, ada sinyalemen yang menyatakan bahwa tidak akan ada satu kekuatan yang mampu menghalangi terjadinya perubahan atau pergeseran posisi elit tersebut. Lambat ataupun cepat mereka yang tergabung dalam kelompok elit yang sedang mengendalikan kekuasaan pasti akan tergeser oleh kelompok lainnya. Kepastian akan hal tersebut paling tidak didasarkan bahwa secara alamiah elit yang sedang berkuasa tidak akan mungkin selamanya mampu memerintah; kemampuan yang ada pada dirinya sebagai elit dibatasi oleh usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pareto menyatakan bahwa dalam tubuh elit terdapat kecenderungan untuk mengalami apa yang disebut sebagai “decay” atau pembusukan. Adanya kondisi seperti ini menyebabkan mereka yang termasuk dalam kelompok non-elit atau massa mempunyai kecenderungan untuk membuat dirinya secara potensial dapat memasuki lingkungan elit.¹⁵ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pareto lebih lanjut mengungkapkan pernyataan populer, yakni “sejarah merupakan kuburan bagi kaum aristokrat”. Sebagaimana diketahui bahwa mereka yang tergolong kaum aristokrat adalah mereka yang berperan sebagai elit di masyarakat yang bersangkutan. Maka, dalam suatu masyarakat dapat berlangsung suatu proses yang lebih dikenal

dengan istilah “sirkulasi elit” atau “perputaran elit”. Dalam rumusan lain, ternyata, sirkulasi elit melibatkan suatu proses “*promotion*” kelompok non-elit atau massa ke dalam lapisan elit, dan proses “*demotion*” kelompok elit ke dalam lapisan elit.

Grafik sederhana berikut dapat memperjelas mekanisme yang berlangsung sehubungan dengan adanya sirkulasi elit sebagaimana yang diuraikan oleh Pareto di atas (Hagopian, 1978)



Grafik 1.5 Piramida sirkulasi elit Pareto

Nyatanya, sirkulasi elit tidak hanya merupakan proses pergantian atau pertukaran antara elit dengan non-elit atau massa, tetapi juga mencakup proses pergantian atau pertukaran posisi di antara sesama elit sendiri. Lapisan elit, sebagaimana dilukiskan Pareto, terdiri dari mereka yang tergabung dalam kelompok yang menduduki jabatan politis dan mereka yang tidak menduduki jabatan politis sebagai kelompok oposisi. Pergantian atau pertukaran posisi di antara dua kelompok tersebut sangat dimungkinkan, dan proses itu dapat disebut pula sebagai sirkulasi elit.

Sebenarnya, sirkulasi elit yang berlangsung antara elit dan massa ataupun di antara sesama elit mengandung esensi bahwa proses tersebut merupakan upaya penggantian elit dengan kelompok baru yang mempunyai kualitas lebih baik. Proses sirkulasi elit seperti ini memang merupakan hal yang ideal, dimana elit yang lama akan diganti kelompok baru dengan kualitas yang lebih baik. Mereka diharapkan lebih mampu merespon kepentingan masyarakat yang lebih beragam dan selalu berubah. Akan tetapi, proses sirkulasi elit dalam kenyataannya tidak selalu memunculkan kelompok baru yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk berperan sebagai elit. Kelompok baru yang muncul sebagai elit bisa jadi tidak mempunyai kemampuan sebaik yang dimiliki oleh elit lama yang digantikannya.

Dalam pernyataan yang lebih sederhana, sirkulasi elit adalah suatu mobilisasi atau perputaran elit dari satu kelompok kelas ke kelompok kelas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pareto menyatakan bahwa di setiap masyarakat mana pun, elit secara berkesinambungan melakukan upaya perubahan di dalam kelas-kelas atau posisi-posisi, dimana yang bersangkutan berada. Begitu pula pada setiap masyarakat, selalu ada pertukaran antara kelompok elit dan kelompok non-elit atau massa. Elit tidak hanya melakukan perubahan di dalam dirinya atau kelompoknya, tetapi mereka juga melakukan hal sama pada kelompok-kelompok kelas lainnya. Dalam perubahan tersebut, sekelompok kecil individu yang berasal dari golongan non-elit dapat masuk ke dalam jaringan elit, dan sebaliknya individu-individu yang berasal dari golongan elit dapat pula tererosok masuk ke dalam kelompok massa (Jangam, 1982).

Apabila mekanisme berlangsungnya sirkulasi elit di suatu masyarakat dapat berputar dengan baik dan teratur, maka kestabilan dalam masyarakat tersebut sangat mungkin menjadi lebih terjamin. Sebaliknya, apabila sirkulasi elit berlangsung secara tersendat dan tidak teratur akan membuka peluang munculnya kondisi potensial untuk mewujudkan ketidakstabilan di masyarakat. Tekad antara kelompok elit ataupun kelompok non-elit untuk mewujudkan berlangsungnya perputaran elit yang ideal dan teratur penting guna mewujudkan sirkulasi elit yang baik dan teratur.

Realitas menunjukkan bahwa individu-individu yang tergabung dalam kelompok massa tidak jarang melakukan berbagai upaya agar dapat masuk ke dalam jaringan elit. Bahkan, jika memungkinkan mereka berkeinginan untuk langsung masuk ke dalam jaringan elit yang sedang mengendalikan kekuasaan. Kelompok massa yang berupaya masuk ke dalam jaringan elit tidak secara tegas

disebut sebagai “*counter elite*”, yakni individu-individu yang berada di lapisan atas dari massa. “*Counter elite*” adalah mereka yang berada di lapisan atas dari massa, karena yang bersangkutan merupakan kelompok yang potensial menghadapi dan menggantikan posisi elit yang tengah berkuasa. Namun, tidak tertutup kemungkinan mereka yang tidak berada di lapisan atas dari kelompok massa bisa berupaya menembus masuk ke dalam jaringan elit. Maksudnya, mereka yang berasal bukan dari kelompok “*counter elite*” bisa pula berupaya menembus ke jaringan elit.

Pada umumnya, masyarakat yang sirkulasi elitnya berlangsung dengan baik dan teratur, individu-individu yang termasuk dalam “*counter elite*” tidak secara terbuka atau terang-terangan menyatakan bahwa dirinya mempunyai ambisi untuk memasuki jaringan elit. Biasanya, ambisi mereka diselubungi berbagai ragam slogan, seperti halnya persamaan hak, demokrasi, kebebasan bagi semua warga, dan slogan lain yang senada. Biasanya, slogan-slogan tersebut menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan mana dari massa. Sepintas, upaya yang mereka tempuh tampak lebih mengarah pada upaya memperjuangkan kepentingan massa, bukan untuk mengejar ambisi pribadi masuk ke dalam jaringan elit. Akan tetapi, kalau dicermati lebih saksama, muncul keraguan apakah upaya yang dilakukan tersebut benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan massa ataukah untuk mewujudkan ambisi pribadi meraih posisi elit. Dari keraguan tersebut, maka mereka mencoba menembus masuk jaringan elit atas nama kepentingan massa. Jadi dalam realitanya, ambisi mereka untuk masuk ke dalam jaringan elit sering diselubungi slogan demi kepentingan massa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mereka yang termasuk dalam “*counter elite*” perlu diakui ada yang mempergunakan massa sebagai salah satu kekuatan yang mendukungnya untuk memasuki lingkungan elit. Ketika mereka yang tergabung dalam “*counter elite*” dengan dukungan massa berhasil menyingkirkan dan kemudian menggantikan posisi elit lama, maka proses ini sering disebut sebagai “*wholesale circulation of the elite*”, atau yang sering pula disebut sebagai “*revolusi*” (Hagopian, 1978).

Marie Kolabinska berpendapat mengenai beberapa tipe dari sirkulasi elit ini. Pertama, sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung dalam “*the governing elite*”. Kedua, sirkulasi elit yang berlangsung antara mereka yang tergabung dalam “*the governing elite*” dengan massa. Tipe kedua mungkin mengambil bentuk: (a) individu-individu yang berasal dari strata bawah (massa) yang berhasil masuk ke dalam jaringan elit, dan (b) individu-individu dari strata

bawah (massa) yang membentuk kelompok elit baru dan melakukan perjuangan melawan elit yang ada guna memperoleh kekuasaan.

Sehubungan dengan perputaran elit, Guido Dorso memberikan catatan yang menarik untuk disimak. Lebih spesifik, Dorso membahasnya dengan sebutan sebagai suatu bentuk “*exchange*” antara segmen yang berbeda daripada sirkulasi pada umumnya. Menurut Dorso di masyarakat berlangsung tiga mekanisme “*exchange*” yang utama, yakni:

- a. “*Exchange*” antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi yang berasal dari dalam “*political class*”. Contoh yang paling jelas mengenai “*exchange*” tipe ini adalah diberlakukannya sistem dua partai di Inggris ataupun Amerika Serikat. Satu partai menjalankan peran sebagai pihak pemerintah, sementara partai yang lainnya bertindak sebagai pihak oposisi.
- b. “*Exchange*” antara pihak yang tergabung dalam kelompok “*political class*” dengan “sisa” dari kelompok “*ruling class*”. Adanya “*exchange*” tipe ini berarti memberi kesempatan bagi anggota baru untuk masuk ke dalam kelompok “*political class*”, dan hal tersebut berarti pula mencegah terjadinya upaya korporasi tertutup pada kelompok itu.
- c. “*Exchange*” antara pihak yang tergabung dalam kelompok “*the ruled class*” dengan kelompok “*the ruling class*”. “*Exchange*” tipe ini sama dengan “sirkulasi” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pareto. Tipe ini dapat dinyatakan mempunyai kaitan yang relatif erat dengan apa yang oleh para ilmuwan sosial sering disebut sebagai “mobilisasi sosial yang sifatnya vertikal”.

Lebih lanjut, Dorso mengemukakan pendapatnya bahwa apabila selama berlangsungnya proses mekanisme “*exchange*” seperti di uraikan tadi mengalami gangguan atau hambatan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti apa yang diistilahkan Pareto sebagai “revolusi”. Bahkan, Dorso menyatakan bahwa “*political revolution*” akan benar-benar terjadi apabila individu-individu yang tergabung dalam kelompok “*governing political class*” berubah menjadi suatu “*cam*” yang selalu berupaya menumpuk kekuasaan pada diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, mereka yang tergabung dalam kelompok “*opposition*”

political class” akan memperoleh dukungan dari massa dan “sisa” dari “*the ruling class*”. Apabila “*political revolution*” berlangsung, maka sistem politik yang ada di masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan. Walaupun demikian, struktur sosial masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah masih tetap utuh seperti semula.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya sirkulasi elit, Pareto memandang dari sisi lain. Ia mengungkapkan bahwa faktor biologis dan sosio-psikologis dari anggota-anggota elit mempunyai peran yang cukup berarti (Keller, 1984). Penyelidikan terhadap jatuh banggunya elit ternyata mengacu pada suatu kesimpulan, yakni faktor keturunan merupakan salah satu penyebabnya. Banyak keluarga aristokrat yang terlambat mempunyai keturunan atau bahkan tidak mempunyai sama sekali. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan terlambat melakukan perkawinan atau bahkan tidak jarang ada di antara mereka yang tidak kawin sepanjang hidupnya. Selain terlambat mempunyai keturunan, jumlah anak biasanya juga relatif tidak banyak. Penyelidikan juga menyebutkan bahwa tidak jarang di antara keluarga aristokrat tersebut menderita berbagai jenis penyakit yang diduga berasal dari terjadinya tali perkawinan di antara sesama anggota keluarga (*inses*). Sudah tentu hal tersebut pada gilirannya akan mendorong musnahnya kelompok elit tersebut.

Selain faktor biologis, faktor lain yang berpengaruh terhadap jatuh banggunya elit juga ditentukan oleh keadaan sosio-psikologis yang melingkupi elit yang bersangkutan. Sama halnya dengan elit yang gagal mereproduksi diri sendiri, ketidakmampuan elit untuk memindahkan keunggulan intelektual merupakan hal yang memengaruhi sirkulasi elit. Maka, elit juga mungkin tetap bertahan pada posisinya, karena kemampuannya untuk menyebarkan nilai-nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan kepada para keturunannya. Hal tersebut didasarkan pada suatu anggapan bahwa keunggulan intelektual merupakan suatu bakat yang sedikit sekali diperoleh dari keturunan. Oleh karena itu, elit harus mampu menemukan cara agar dapat memindahkan keunggulan intelektual kepada para calon penerusnya.

Sehubungan dengan sirkulasi elit, Pareto menggambarkan bahwa elit lama umpama sekawan serigala yang serakah, egois, cerdik dan sekaligus licik untuk bertipu muslihat. Sementara itu, elit baru dilukiskan sebagaimana halnya dengan sekawan singa yang gagah, tangguh, dan mempunyai cita-cita mulia.

Akan tetapi, begitu tercapai keinginannya untuk menduduki tampuk kekuasaan, singa itu akan menjelma menjadi serigala. Pareto menyatakan bahwa nasib semua serigala adalah dijatuhkan oleh singa, tetapi nasib semua singa adalah menjadi serigala.

Sirkulasi elit akan menghasilkan elit baru yang menggeser posisi elit lama, dan hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan elit lama untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketidakmampuan elit yang sedang berkuasa untuk mempertahankan posisinya dapat disebabkan beberapa hal, antara lain,

- a. ketidakmampuan serta keengganan para elit untuk mereproduksi diri sendiri, dengan catatan hal ini berlangsung apabila pewarisan posisi elit merupakan pola yang berlaku;
- b. ketidakmampuan elit untuk memindahkan kemampuan intelektual kepada para calon penggantinya ataupun ketidakmampuannya untuk memilih calon-calon pengganti yang tepat;
- c. munculnya penyakit-penyakit sosial pada diri elit, seperti adanya keinginan untuk bertingkah laku konservatif, dan juga munculnya jarak sosial yang semakin melebar dengan massa

Semua itu adalah problema-problema yang dihadapi elit dalam kaitannya dengan berlangsungnya proses sirkulasi. Kemampuan elit mengatasi problema-problema tersebut berarti membuka kemungkinan munculnya elit baru yang merupakan penerus dari elit lama. Sementara itu, apabila elit mengalami kegagalan dalam mengatasi problema-problema tersebut berarti memberi kesempatan bagi munculnya elit baru yang berasal dari kelompok lain yang bukan merupakan generasi penerus dari elit lama.

Hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan sirkulasi elit adalah elit dalam kondisi apa pun (sukses atau gagal dalam menjalankan peranannya) harus menyadari bahwa mereka pada suatu saat pasti akan digantikan oleh kelompok lain. Pada waktunya, semua elit yang berhasil maupun yang gagal harus bersedia untuk menyerahkan kekuasaan yang selama ini digenggamnya dan mengundurkan diri dari pentas politik. Mereka memang masih mungkin terus-menerus mendapat tempat untuk dikenang sebagai orang yang pernah menduduki posisi dan memainkan peran tertentu pada masa silam. Namun, mereka harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin terus-menerus

menduduki posisi dan memainkan peran dalam menentukan kebijakan yang berlaku bagi orang banyak.

2.1 Elite di Negara Sedang Berkembang

Watak atau sifat yang melekat pada diri elit di suatu masyarakat belum tentu sama dengan yang ada di masyarakat lainnya. Hal tersebut paling tidak ditentukan oleh tipe dari masyarakat di mana elit berada dan juga sifat kebudayaannya. Pada masyarakat yang sudah mencapai taraf industrialisasi tentunya mempunyai elit yang wataknya berlainan dengan elit yang ada di masyarakat yang masih kental dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Demikian pula elit masyarakat yang mengutamakan norma-norma agama sebagai sendi kehidupan mempunyai watak yang berbeda dengan elit yang berada di masyarakat lainnya yang mengutamakan norma-norma kehidupan sekuler.

Negara yang sedang berkembang adalah negara yang masyarakatnya mulai meninggalkan nilai-nilai tradisi lama dan sedang berupaya menjadikan dirinya sebagai masyarakat modern. Di negara berkembang tentunya mempunyai elit dengan watak serta sifat tertentu pula. Elit di negara berkembang mempunyai watak dan sifat yang berbeda dengan elit yang ada di negara yang masyarakatnya masih ketat berpegang pada nilai-nilai tradisi lama ataupun elit yang ada di negara yang masyarakatnya dilingkupi oleh nilai-nilai modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka elit di negara yang sedang berkembang harus diberi peran yang pokok dalam proses modernisasi.²⁵ Sebab, di kebanyakan negara berkembang sedang melaksanakan modernisasi di hampir semua sektor kehidupan untuk mengejar ketertinggalannya. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tersebut berada pada “posisi antara”, yakni proses meninggalkan nilai-nilai lama menuju nilai-nilai baru. Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi mulai ditinggalkan dan berangsur-angsur diganti dengan hal-hal baru yang dinilainya sesuai dengan kebutuhannya. Perbedaan antara situasi lama dan situasi baru di negara berkembang ternyata cukup mencolok. Dalam keadaan seperti ini, elit dituntut lebih memainkan peran untuk menata dan mengarahkan masyarakat agar kehidupannya tidak terombang-ambing antara nilai-nilai lama dan baru. Masyarakat mudah terombang-ambing, karena nilai-nilai baru yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan belum sepenuhnya kokoh, sementara nilai-nilai lama sudah terlanjur mulai ditinggalkan

Pada kenyataannya, elit lama di negara yang sedang berkembang tidak cocok dan tidak mempunyai kemampuan untuk menata dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka modernisasi. Perihal elit lama, kenyataan juga menunjukkan bahwa mereka tidak jarang telah ternoda, karena pernah menjalin hubungan dengan penguasa kolonial. (Harap diingat bahwa kebanyakan negara berkembang belum begitu lama lepas dari belenggu penjajahan). Keadaan seperti inilah yang semakin mempersulit keberadaan elit di negara yang belum lama merdeka untuk menjalankan modernisasi.

Di negara sedang berkembang, elit yang mengendalikan roda pemerintahan dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang kompleks dan relatif sulit untuk dicarikan solusinya. Elit di negara sedang berkembang harus terdiri dari individu-individu yang memperoleh pendidikan memadai dan mempunyai pengalaman serta wawasan untuk menghadapi permasalahan yang muncul di zaman yang semakin modern.

Berkaitan dengan hal tersebut, Schoorl menyatakan bahwa terdapat sejumlah permasalahan pokok yang harus dihadapi elit di negara yang sedang berkembang, yaitu:

- a. Pengembangan sistem politik baru yang cocok untuk melaksanakan modernisasi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.
- b. Pengintegrasian golongan-golongan “plural” menjadi suatu kesatuan nasional, untuk membentuk suatu identitas nasional. Identifikasi dan loyalitas dengan satuan politik baru, yakni negara baru harus didahulukan daripada identifikasi dan loyalitas dengan satuan-satuan sosial lama yang tradisional dan lebih kecil, seperti kelompok kekerabatan, desa, regional, kelompok dengan persamaan bahasa, kelompok agama, kelompok sosial dan sebagainya. Harus terbentuk suatu kesatuan nasional dengan kebudayaan nasional.
- c. Perlunya mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek. Untuk

mewujudkannya, elit perlu mengikutsertakan penduduk, atau setidaknya-tidaknya bagian-bagian penting dari penduduk, dalam proses produksi modern.

Menghadapi setumpuk permasalahan yang sangat kompleks, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana negara berkembang memilih secara tepat individu-individu untuk dijadikan elit. Ada harapan agar mereka yang terpilih sebagai elit mampu memimpin masyarakat yang bersangkutan dalam proses modernisasi. Akan tetapi, sekali lagi dalam kenyataannya, relatif sulit untuk menemukan elit yang tepat bagi negara yang sedang menjalankan proses modernisasi. Sementara itu, realitas menunjukkan bahwa di negara ini terdapat berbagai macam tipe elit yang mempunyai pengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini antara lain disebabkan kebanyakan negara sedang berkembang mempunyai tingkat pluralitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tipe elit yang terdapat di setiap negara berkembang belum tentu sama satu dengan lainnya. Pada gilirannya, hal tersebut akan memungkinkan terjadinya perbedaan jalannya proses modernisasi di masing-masing negara tersebut

Upaya yang dilakukan untuk memetakan tipologi elit yang sedang berkuasa di negara berkembang telah dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan, seperti Clark Kerr. Tipologi yang dikemukakan didasarkan pada penentuan orientasi sentral dari elit mengenai permasalahan-permasalahan utama yang dihadapinya. Orientasi ini selain tampak pada permasalahan utama, juga tampak pada kebijakan yang dikeluarkannya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan. Tipologi tersebut membagi elit di negara sedang berkembang menjadi lima tipe menurut latar belakang sosial dan orientasi politiknya, yakni:

- i. Elit kelas menengah yang berasal atau muncul dari kelompok-kelompok pedagang dan tukang. Pada umumnya, mereka terdiri dari golongan minoritas dalam bidang keagamaan ataupun kesukuan. Kelompok ini merupakan elit baru yang ternyata dalam perkembangannya dapat hidup berdampingan dengan elit lama. Kesempatan berkembang yang diperoleh kelompok ini lebih sering digunakan untuk mengembangkan, atau memperbaiki kedudukannya sendiri. Elit yang tergolong tipe kelas menengah tidak mempunyai ideologi yang tegas. Sikap mereka pragmatis dengan mengutamakan individualisme ekonomi dan egalitarianisme politik. Elit tipe ini mementingkan mobilitas sosial yang harus segera dilaksanakan dengan cara mengejar kepentingan

diri sendiri secara sehat.

- ii. Elit dinastik atau pemimpin dinastik berasal dari lingkungan aristokrat yang berlandaskan pada masyarakat agraris atau pedagang. Selain itu, pihak yang juga dipandang sebagai elit menurut tipe ini adalah mereka yang berasal dari kasta militer seperti di Jepang) atau elit yang terdiri atas kepala-kepala suku. Elit menurut tipe ini selalu berupaya untuk tetap mempertahankan orde yang sudah ada dengan sangat berorientasi kepada tradisi. Tradisi ini digunakan para elit untuk membenarkan kewibawaan dan kekuasaan yang dibangunnya. Elit menurut tipe ini dibedakan menjadi dua, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok yang “realis” dan mereka yang tergolong dalam kelompok “tradisionalis”. Kelompok yang realis menyadari bahwa sebagian dari modernisasi itu sebagian tidak mungkin dihindari, khususnya yang berkaitan dengan industrialisasi. Biasanya, kelompok tradisionalis tetap menghendaki orde yang berlangsung untuk tetap bertahan dengan landasan tradisi. Struktur masyarakat dimana tipe elit dinastik ini ada, biasanya menunjukkan struktur yang sangat hierarkis. Hubungan antara mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dengan bawahannya merupakan hubungan yang bercorak paternalistik di bidang politik maupun ekonomi. Peran yang dilakukannya dalam proses modernisasi relatif terbatas. Sebagaimana halnya dengan elit pejabat kolonial, kepentingan pribadi dari para elit dinastik juga menghambat pelaksanaan modernisasi. Sebab, elit memiliki ketakutan terhadap posisinya yang terancam hilang apabila modernisasi berjalan dengan lancar. Tampaknya, mereka lebih mementingkan keluarga besar atau dinastinya ketimbang ikut aktif mendorong bergulirnya modernisasi.
- iii. Pejabat kolonial yang merupakan pejabat-pejabat yang berasal dari pemerintahan kolonial. Pada umumnya, mereka tidak terlalu berperan dalam melaksanakan modernisasi. Elit tipe ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah. Sebenarnya, mereka merupakan pemimpin asing dengan kebijakan yang berorientasi pada asing pula. Pejabat kolonial dapat menggelindingkan roda modernisasi, seperti industrialisasi. Hal itu

dapat dicapai melalui perangkat administrasi yang efektif atau pengenalan pendidikan modern. Akan tetapi, upaya ini kurang dapat memberi dukungan secara langsung bagi terselenggaranya modernisasi dengan cepat. Pada umumnya, kepemimpinan elit tipe ini lebih banyak mengandalkan pada kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan kompromi. Mereka menekan kebebasan penduduk pribumi dan berupaya mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi dan keamanannya sepenuhnya tergantung pada penguasa kolonial. Realitas memang menunjukkan bahwa pada dewasa ini, elit asing hampir tidak ada sama sekali. Akan tetapi, di negara berkembang lebih banyak muncul elit lokal yang mempunyai jiwa administrator kolonial. Elit lokal ini lebih sering meniru tingkah laku elit kolonial yang berkuasa sebelumnya. Mereka mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan golongannya sendiri sebagaimana halnya elit kolonial yang lebih mementingkan kepentingan “*home country*”-nya. Ringkasnya, walaupun secara retorik mereka menyatakan lebih mengutamakan kepentingan umum, tetapi pada realitasnya, orientasi terhadap kepentingan umum masih sangat lemah. Kaum intelektual revolusioner merupakan kelompok baru yang terdiri dari para intelektual yang merupakan hasil sistem pendidikan yang ada. Mereka yang tergabung dalam elit ini mempunyai pandangan bahwa kebudayaan dan struktur masyarakat yang ada selama ini sudah dianggap tidak cocok lagi bagi suatu masyarakat modern. Dengan pandangan seperti itu, mereka menempatkan diri sebagai pemimpin dalam menata dan mengarahkan modernisasi yang menurutnya tidak dapat dielakkan pelaksanaannya. Ideologi mereka lebih menekankan pada gagasan seperti “panggilan historis” daripada peran mereka, termasuk dedikasi yang tinggi terhadap tugas. Elit tipe ini juga mempunyai kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan politik yang ada pada genggamannya. Gejolak-gejolak sosial yang muncul tidak akan dipecahkan melalui penyesuaian program dan administrasi pemerintahan, tetapi lebih sering diselesaikan melalui pembinaan ideologi. Apabila pembinaan ideologi yang dilakukan tidak sesuai

dengan aspirasi masyarakat, maka elit tipe ini mempunyai kecenderungan untuk memerintah dengan tangan besi.

- iv. Pemimpin nasional yang mempunyai latar belakang yang relatif beragam. Pada umumnya, mereka berasal dari berbagai gerakan sosio-politik yang berusaha melawan penjajah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kebanyakan di antara mereka merupakan pemimpin yang kharismatik dengan pengaruh pribadi yang relatif menonjol. Bagi mereka, nasionalisme yang ada di negara berkembang masih lebih merupakan sentimen daripada sebagai sistem pemikiran yang telah dijabarkan. Di negara yang sedang berkembang, elit tipe ini berperan di tengah-tengah masyarakat. Semangat nasionalisme merupakan motivasi yang kuat untuk melaksanakan modernisasi.

Di samping tipologi sebagaimana telah diuraikan tersebut, Clark Kerr menambahkan tipe keenam, yaitu apa yang disebutnya sebagai “kekuatan mengambang”. Elit yang tergabung dalam tipe ini adalah para intelektual dan jenderal. Para intelektual, termasuk di dalamnya mahasiswa sangat tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya, mereka terpecah-pecah, tetapi apabila mereka mampu menyatukan diri dalam kelompok yang kuat, maka secara bersama-sama mereka akan mampu mengubah dan menggerakkan masyarakat secepat gagasan-gagasan yang dilontarkannya. Para intelektual tersebut dapat dianggap sebagai sumber yang relatif membahayakan, tetapi sebaliknya, mereka adalah alat bagi terlaksananya modernisasi. Ke mana mereka akan bergerak tergantung dari perlakuan penguasa terhadap mereka, apakah mereka dicurigai dan ditendang penguasa ataukah justru diajak berperan serta dalam pelaksanaan modernisasi.

2.2 Elite Kelas Menengah

Sehubungan dengan kelas menengah, menarik untuk mencermati pendapat Aristoteles yang menjelaskan bahwa di setiap negara terdiri dari tiga lapisan masyarakat, yakni: (a) lapisan masyarakat yang kaya sekali, (b) lapisan masyarakat yang sangat miskin, dan (c) lapisan masyarakat yang berada di antara dua lapisan tersebut. Ia menyatakan lebih lanjut bahwa untuk membangun suatu negara yang relatif kuat diperlukan adanya kelas menengah yang kuat pula. Hal ini disebabkan kelas menengah merupakan lapisan masyarakat yang

posisinya paling aman. Mereka tidak mudah iri atau tidak akan berbuat jahat terhadap lapisan masyarakat yang kaya dan tidak ada alasan yang menyebabkan kaum miskin merasa iri dan berbuat jahat terhadapnya. Oleh karena itu, Aristoteles menyatakan masyarakat politik yang terbaik berasal dari lapisan menengah.

Konsep kelas menengah lahir dan dikenal di Eropa Barat pada masa menjelang dan sesudah berlangsungnya revolusi industri. Pada permulaan berlangsungnya revolusi industri, mereka yang tergabung dalam kelas menengah berperan sebagai penggerak utama dalam kehidupan perekonomian. Pada mulanya, ketika ekonomi feodal mengalami kebangkrutan, kelas menengah ini terdiri dari mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang berperan sebagai perantara antara penghasil barang mentah dengan pihak pengelola bahan mentah tadi. Dalam posisi seperti ini, mereka yang memainkan peran sebagai perantara mempunyai posisi yang sangat menguntungkan dan pada gilirannya, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi kelompok yang dikenal sebagai kelas menengah.

Kelas menengah dengan posisi yang relatif menguntungkan akan menjalankan peran sebagai penghubung antara mereka yang tergabung dalam kelas atas (kelompok borjuis) dengan mereka yang termasuk dalam kelas pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Nicos Poulantzas menulis bahwa kelas menengah tidak termasuk dalam pola produksi kapitalis. Mereka baru berada dalam masa transisi dari pola produksi feodal menuju pola produksi kapitalis dan mereka agak anti terhadap kapitalis serta lebih berilusi reformis, yaitu menghendaki adanya partisipasi, mobilitas vertikal, dan khawatir terjadinya proletarisasi.

Status kelas menengah memang lebih sering dikaitkan dengan struktur ekonomi. Akan tetapi, kelas tersebut juga mempunyai kemampuan untuk berperan lebih dari sekadar pada ruang lingkup ekonomi saja. Mereka mempunyai kemampuan untuk menempatkan diri dan bertindak sebagai pelopor pembaharuan pada hampir semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kelas menengah dinyatakan sebagai motor penggerak bagi berlangsungnya perubahan dan pembaharuan (terutama di masyarakat Barat). Sebagai motor penggerak perubahan, mereka biasanya terorganisir secara rapi dan permanen. Mereka yang tergabung dalam kelas menengah diharapkan mampu menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya suasana menuju pertumbuhan sosial dan politik yang dicita-citakan masyarakat yang

bersangkutan. Di samping itu, mereka juga dibebani harapan untuk melakukan peran sebagai stabilisator dalam kehidupan sosial dan politik sehingga tercipta suasana yang mapan dan kondusif bagi kelancaran pelaksanaan modernisasi.

Dalam konteks pertumbuhan masyarakat yang semakin berkembang ke arah kehidupan yang lebih modern, kelas menengah semakin menunjukkan dirinya sebagai kelompok yang berperan sebagai “dinamisator” di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena posisinya yang berada di antara elit dan massa. Posisi itu membuat kelas menengah lebih mudah berhubungan baik dengan elit yang berada di atasnya ataupun dengan massa yang berada di bawahnya. Dengan jarak sosial yang relatif dekat, kelas menengah dengan mudah dapat melakukan komunikasi dengan mereka yang tergabung dalam kelompok elit ataupun massa.

Kelas atas menganggap kelas menengah relatif penting untuk diperhatikan. Karena peran besar yang dapat dimainkan kelas menengah dalam perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik, tidak jarang kelas menengah dimanfaatkan oleh kelas atas untuk menjembatani hubungannya dengan kelas bawah; dalam hal ini kelas menengah sering dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi terhadap massa yang tergabung dalam kelas bawah.

Mereka yang tergabung dalam kelas menengah pada suatu saat pasti mempunyai keinginan untuk dapat memasuki lapisan kelas yang ada di atasnya. Tidak dapat dipungkiri, kelas menengah menyimpan ambisi bahwa suatu ketika dirinya akan mampu menembus masuk ke dalam lingkaran elit. Hasrat yang melekat pada kelas menengah tersebut merupakan hal yang wajar, karena dalam pentas kehidupan politik upaya untuk mengumpulkan dan memperbesar kekuasaan merupakan suatu keniscayaan. Sehubungan dengan keinginan yang ada pada kelas menengah tersebut, maka tidak jarang kelas atas mengkhawatirkan keberadaan kelas menengah jika posisinya menjadi semakin kokoh. Semakin kokoh posisi kelas menengah dapat menjadikan kekhawatiran kelas atas bertambah. Bagi kelas atas, keberadaan kelas menengah tetap dibutuhkan karena mereka dapat dijadikan penghubung dengan kelas bawah, tetapi keberadaannya harus tetap terjaga sedemikian rupa sehingga tidak merusak “status quo” yang ada.

Akan tetapi, apabila posisi kelas menengah belum begitu kuat dan masih banyak tergantung pada kelas atas untuk memenuhi kepentingannya, maka kecenderungan kelas menengah untuk menggeser posisi kelas atas sangat kecil atau bahkan, tidak ada sama sekali. Realitas menunjukkan bahwa dalam kondisi

kelas menengah yang masih lemah dan belum mandiri, mereka akan cenderung untuk mempertahankan “status quo”. Tidak jarang pula mereka melakukan tindakan penetrasi terhadap massa sebagai kelas bawah.

Sementara itu, peran kelas menengah bagi mereka yang tergabung dalam kelompok massa tidak lebih sebagai ujung tombak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya kepada kelas atas. Walaupun demikian, tidak jarang pula kelas menengah membutuhkan kelas bawah. Kelas menengah membutuhkan massa yang jumlahnya banyak untuk mendukung kepentingannya dalam rangka bargaining dengan kelas atas. Biasanya, kelas menengah mengalami kegagalan dalam proses tawar-menawar tersebut apabila tidak disertai dengan adanya massa sebagai kekuatan yang mendukungnya. Jadi, terdapat hubungan timbal balik yang sifatnya saling menguntungkan di antara kelas-kelas tersebut. Kelas menengah berperan sebagai ujung tombak menyalurkan kepentingan massa, dan massa dapat pula memberikan dukungan yang dibutuhkan kelas menengah dalam rangka bargaining dengan kelas atas.

Di negara berkembang, keberadaan dan peran kelas menengah sering dipertanyakan dan menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan. Pertanyaan yang cukup relevan adalah dapatkah konsep kelas menengah yang kemunculannya didasarkan pada kondisi di Eropa Barat diterapkan di negara sedang berkembang? Tidak sedikit pakar ilmu sosial meragukan ketepatan penerapan konsep kelas menengah tersebut di negara berkembang yang notabene kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan di pertengahan abad ke-20.

Sebagaimana diulas pada uraian di depan, kelas menengah di Eropa Barat muncul berbarengan dengan adanya revolusi industri yang pada waktu itu kapitalisme sedang tumbuh dan berkembang. Sementara itu, bangsa-bangsa di negara berkembang yang belum begitu lama mengecap kemerdekaan dari belenggu penjajah berupaya mentransfer makna kebangkitan kelas menengah yang berlangsung di Eropa Barat ke dalam masyarakat mereka. Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk memahami peranan dan prospek kelas menengah yang ada di negara berkembang harus terlebih dahulu memahami ciri dan karakteristik kapitalisme yang ada dan berkembang di kawasan yang bersangkutan beserta formasi sosial yang ada di dalamnya.

Sementara itu pada kenyataannya, walaupun ada kapitalisme di negara sedang berkembang, maka ia lebih tepat disebut dengan istilah kapitalisme “pinggiran”. Kapitalisme pinggiran menunjukkan ciri dan perwatakan yang

mirip dengan kapitalisme yang ada dan berkembang di Eropa Barat. Namun, menunjukkan kelainan struktural (dimana ia sangat tergantung pada kapitalisme yang ada di "pusat") yang pada gilirannya akan membawa pengaruh bagi keberadaan dan perkembangan kelas menengah di negara sedang berkembang.

Negara berkembang yang belum lama menyatakan kemerdekaannya, pada umumnya, sedang berlangsung proses modernisasi dalam rangka mengejar ketertinggalannya dari negara maju. Sepanjang berlangsungnya proses modernisasi, tampak peran kelas menengah yang cukup menonjol dalam mengarahkan dan mengawal perubahan masyarakat dari yang tadinya terlekat sifat feodalistik ke masyarakat yang lebih modern. Tidak jarang kelas menengah menjalankan peran sebagai motor penggerak yang mencetuskan ide-ide pembangunan. Akan tetapi, sebagaimana umumnya terjadi di negara sedang berkembang, kelas menengah kurang mempunyai kekuatan ekonomi yang dapat dijadikan pijakan dan dukungan terhadap peranannya di bidang politik. Di satu sisi, mereka secara ekonomi terus diperkuat tetapi pada akhirnya, kelompok ini harus berhadapan dengan kenyataan intervensi negara pada struktur perekonomian.³³ Intervensi negara tersebut tampak melalui berbagai regulasi dan birokratisasi di sektor perekonomian yang menghambat penguatan ekonomi kelas menengah.

Apabila hal tersebut adalah kendala bagi kelas menengah untuk mengembangkan diri agar mampu berperan secara signifikan di pentas politik. Kelas menengah di negara berkembang relatif sulit untuk dapat kokoh mandiri secara ekonomi apabila harus menghadapi derasnya intervensi negara. Sementara itu, tanpa kemandirian di bidang ekonomi, kelas menengah seakan tidak mempunyai kekuatan sebagai modal yang memadai untuk memainkan peran di pentas politik. Kelas menengah sudah sulit mewujudkan keinginannya untuk memasuki lapisan atas dengan menjadikan dirinya sebagai elit baru, apalagi menyalurkan kepentingan massa. Kelas menengah yang tidak mandiri di bidang ekonomi akan menjadikannya tergantung pada kelas atas di hampir semua bidang kehidupan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka tidak begitu mengherankan apabila ada pertanyaan yang isinya meragukan peran kelas menengah di negara berkembang. Kalaupun ia ada di negara tersebut, ia lebih cenderung berperan sebagai pendukung kelas atas atau elit dalam rangka mempertahankan kondisi "status quo" daripada menjalankan peran sebagai penyalur kepentingan massa, karena ia lebih ingin memasuki lingkaran elit guna menggenggam kekuasaan.

4. Rangkuman

5. Latihan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

Mahasiswa melakukan evaluasi dasar atas sebuah program yang merupakan bagian dari kebijakan publik di Indonesia, dengan menggunakan model CIPP.

b. Lembar Kerja Praktek

6. Evaluasi Pembelajaran

7. Umpan Balik

D. Penutup

1. Rangkuman

Monitoring kebijakan merupakan salah satu upaya agar kebijakan publik yang diterapkan dapat terorganisir, sistematis, dan dapat dievaluasi untuk dikembangkan atau dihentikan jika dianggap gagal menyelesaikan masalah sosial. Oleh karena itu kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari kerja aktor politik sebagai pengambil keputusan. Proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aparat pada sistem pemerintahan itu sendiri, partai politik, lembaga *civil society*, maupun masyarakat itu sendiri.

2. Daftar Istilah

Investasi	Pemberian modal bagi sebuah kegiatan produksi tertentu.
Rasio pengeluaran	Perbandingan antara total pengeluaran terhadap total pendapatan
Metodologis	Ilmu tentang metode; uraian tentang metode/cara
Relevan	Sesuai
Reliabel	Mempunyai atau mendatangkan hasil yang sama pada setiap percobaan yang berhasil
Valid	Menurut cara yang semestinya; berlaku; sah
<i>Fisible</i>	Terlaksana ; terwujud

Premis	Apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan; asumsi; kalimat atau proposisi
Designative	Faktual
Advokatif	Sebagai bentuk upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi
Retrospektif	Pengembangan
Prospektif	Ada prospeknya; dapat (mungkin) terjadi; ada harapan (baik)
Holistik	Menyeluruh
Insentif	Hadiah
Konservatif	Tertutup

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul (ed.). Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.
- Andrain, Charles F. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Anderson, Benedict R. O. G. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt (ed.), Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Budiardjo, Miriam (ed.). Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.
- _____. Partisipasi Politik Dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Bottomore, Tom B. Elite and Society. New York: Penguin Books Ltd. 1982.
- Dahl, Robert A. Modern Political Analysis. New Delhi: Prentice-Hall of India, 1978 (edisi ketiga).
- Dahrendorf, Ralf. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. Jakarta: CV Rajawali, 1986 (Judul asli buku ini: "Class and Class Conflict in Industrial Society").
- Giddens, Anthony. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Jakarta: UI Press, 1986. (Judul asli "Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber").

- Gandhi, Madan G. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1981.
- Hagopian, Mark N. *Regimes, Movements and Ideologies*. New York: Longman Inc., 1978.
- Jangam, R.T. *Political Sociology*, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982.
- Kartodirdjo, Sartono. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali, 1984 (Judul asli: "Beyond the Ruling Class: The Role of the Strategic Elite in Modern Societies").
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, jilid 1 dan 2. Jakarta: PT Gramedia, 1986 (Judul asli: "Sociological Theory, Classical, Founders and Contemporary Perspective").
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (eds.). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978.
- Mas'ood, Mohtar dan Nasikun. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU – Sosial UGM, 1987.
- Macridis, Roy C. dan Bernard E. Brown (eds.). *Comparative Politics: Note and Readings*. Homewood Illinois: The Dorsey Press Inc., 1961.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press, 1956.

MODUL 9

DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN KEKUASAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan definisi umum yang menempatkan kekuasaan dijalankan oleh orang banyak/mayoritas rakyat. Komunisme sebagai sebuah teori berbeda dalam berbagai implementasinya di dunia turut menyebutkan dirinya sebagai demokrasi rakyat. Oleh karena itu pada modul ini mahasiswa akan mempelajari apa saja perbedaan mendasar dari konsep demokrasi yang saat ini diterapkan oleh mayoritas sistem politik, dengan komunisme. Baik itu landasan argumentasi, tujuan, serta proses pendistribusian kekuasaannya, serta peran dan fungsi berbagai institusi politiknya.

1. Deskripsi Singkat

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 9 ini adalah:

- a. Mampu menguasai teori politik sebagai dasar analisis fenomena politik baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara maupun tugas sebagai mahasiswa politik.
- b. Terbentuknya kesadaran sosial akan persoalan politik bangsa berdasarkan pemahaman akan teori politik
- c. Mampu menemukan solusi atas fenomena politik berdasarkan konsep dan teori yang dipelajari;
- d. Menganalisis fenomena politik berdasarkan pembelajaran student *center learning* melalui praktek penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

3. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 9 ini adalah:

Mahasiswa/i diharapkan mampu Mampu menguraikan berbagai macam konsep

demokrasi dan para ilmuwan politik pencetus demokrasi.

4. Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5. Kegunaan Modul 9

Membantu mahasiswa memahami teori dan konsep demokrasi sebagai sebuah ideologi dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh lebih dari 140 negara di dunia.

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

B. Kegiatan Pembelajaran 1

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1: Demokrasi dan Institusi dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi

a. Definisi Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena (Azra, 2005). Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the*

people, by the people for the people) (Fuady, 2010). Kalimat *of, by* dan *for the people* adalah konsep yang dikatakan Abraham Lincoln untuk menjelaskan demokrasi di Amerika Serikat secara singkat, yang kemudian diterima secara umum sebagai sebuah pendefinisian sederhana tentang demokrasi.

- i. *Government of the people*. Mengandung makna pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegitimate government*) di mata rakyat.
- ii. *Government by the people*. Mengandung arti bahwa pemerintahan yang dijalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan diri sendiri, dan pemerintahan tersebut dibawah pengawasan rakyat.
- iii. *Government for the people*. Mengandung arti bahwa pemerintahan yang dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

David Beetham dan Kevin Boyle menyebut demokrasi merupakan bagian dari khasanah pengambilan keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikannya (Boyle, 2000). Defenisi Beetham dan Boyle memperlihatkan dua hal substansi tentang demokrasi; bahwa demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama, serta demokrasi merupakan indikator tentang sejauhmana prinsip kendali rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Namun jika ingin menemukan defenisi pasti tentang demokrasi tentu membingungkan, karena antara pendapat ahli atau bentuk implementasinya yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sebab demokrasi diinterpretasikan sebagai sebuah ideologi, sistem pemerintahan, atau pada kondisi yang lain demokrasi dijelaskan secara normatif namun pada kondisi lain dijelaskan sebagai prosedur kelembagaan. Namun dapat dibedakan keseluruhan defenisi tentang demokrasi dalam dua kategori demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.

- i. Demokrasi langsung. Kedaulatan rakyatnya di suatu negara diwujudkan secara langsung. Rakyat berkedaulatan secara langsung tanpa diwakili oleh orang-orang tertentu dalam hal apapun. Pemerintahan sangat transparan, hanya bisa diterapkan di negara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sedikit 30. 000-40. 000 jiwa, pemerintah adalah pelaksana tugas rakyat yang dipilih diantara masyarakat yang unggul, dan pembuatan maupun perubahan konstitusi didasarkan pada keputusan mayoritas (Suara Mayoritas). Diterapkan di Athena pada abad ke 4-5 M. meskipun begitu prosedural demokrasi langsung masih diterapkan pada masa kini seperti; *Referendum* artinya merujuk beberapa masalah penting, kebijakan atau keputusan kepada rakyat, seperti amendemen konstitusi. Pemberian pendapat oleh orang-orang bisa bersifat wajib atau sukarela. *Inisiatif* menyiratkan bahwa masyarakat atau bagian tertentu dari warga negara dapat mengambil inisiatif untuk pengesahan pilihan hukum tertentu yang diinginkan. Orang dapat mengirim proposal ke badan legislatif yang mungkin akan memberlakukan hukum pilihannya tersebut. *Pembatalan* yaitu prosedur yang dilakukan oleh orang-orang dari daerah pemilihan, secara mayoritas dapat meminta legislatif menarik kembali perwakilannya sehingga membatalkan status perwakilan tersebut sebagai legislator. Banyak negara bagian Amerika Serikat yang rakyatnya melakukan pembatalan semacam ini. *Plebisit* menunjukkan bahwa orang-orang menjadi konsultan secara langsung mengenai masalah-masalah kepentingan politik. Plebisit pernah terjadi pada 1935, rakyat Saar diminta untuk mengungkapkan pendapatnya apakah ingin tetap di Jerman atau tidak. Orang-orang Junagarh (Saurashtra, Gujarat) diminta untuk memberikan pendapat apakah ingin tetap di India atau di Pakistan (Putri, 2020).
- ii. Demokrasi tidak langsung (*Representation Democracy*). Kedaulatan rakyat tetap, tetapi diserahkan kepada orang-orang terpilih dalam pemilu. Para orang terpilih ini menjadi wakil rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan, mewujudkan kepentingan rakyat. Diterapkan karena kondisi negara bangsa yang jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar. Orang terpilih memiliki hak memilih pembantunya dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Prosedurnya melalui pemilihan

umum, adanya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menjalankan wewenang rakyat (baca konsep Trias Politika pada konteks distribusi kekuasaan dan Negara di Modul 1 dan Modul 3). Memperkuat argumentasi tentang demokrasi tidak langsung yang mayoritas diterapkan oleh berbagai negara saat ini, Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi merupakan persiapan dalam membuat suatu keputusan politik. Kekuasaan seseorang untuk membuat keputusan ditentukan oleh *voting* suara rakyat. Bahwa yang dapat dilakukan oleh rakyat hanyalah memilih para elit representatif sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.

Dari perbedaan dua bentuk demokrasi tersebut kita dapat mengidentifikasi ciri pokok demokrasi yaitu; empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan, hukum di atas kekuasaan, penekanan pada acara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan persamaan HAM (Fogelman, 1994). Hendry B. Mayo (1965) menyatakan 6 kriteria antara lain; menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan secara minimum, adanya keragaman, dan tercapainya keadilan.

Menurut Juan dan Alfred, demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan. Pada gilirannya, demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah (Stepan, 2001). Keduanya mengemukakan dua bagian kriteria utama tentang demokrasi, yaitu (Stepan, 2001);

- i. Mengapa demokrasi modern harus bersifat inklusif secara luas, menyangkut siapa yang dapat memberikan suara, dan jenis-jenis partai politik apa yang dapat bersaing untuk memberikan suara?. Pada prinsipnya, setiap individu dalam masyarakat harus bebas untuk mengungkapkan apapun kepentingan dan nilai-nilai yang mereka miliki, dan pada jalur politik untuk mencapai secara damai, berusaha untuk mencari dukungan dari sesama warga negara dalam pemilihan. Disingkirkannya artikulasi kepentingan atau tuntutan ideologis, budaya, etnis, regional, bahasa, dan keagamaan, bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan.
- ii. Para penguasa harus memerintah secara demokratis. Jika

kalangan eksekutif terpilih, menyalahi konstitusi, melanggar hak individu kaum minoritas, menabrak fungsi-fungsi yang sah dari badan legislatif sehingga dapat diartikan tidak mampu memerintah dalam batas-batas suatu negara hukum, hal itu dapat disebut rezim bukan demokrasi.

Demokrasi tidak langsung pada konteks negara bangsa melalui prosedural pemilihan umum untuk mengisi jabatan eksekutif dan legislatif, menurut Huntington mereka akan berperan sebagai para pembuat keputusan. Mereka dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, berkala dan dalam sistem yang membuat mereka bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara (Huntington, 2001).

Larry Diamond mengembangkan defenisi demokrasi, dengan mengkategorikan defenisi Huntington merupakan defenisi demokrasi pemilihan (*electoral democracy*). Sementara bagi Larry Diamond, demokrasi dalam implementasinya harus menganut paham liberal, yang didalamnya mengakui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis dalam tatanan yang didalamnya terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna (Diamond, 2003). Namun rumusan demokrasi dari keduanya dianggap relevan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam pemilihan pemimpin, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung, rakyat bebas memilih pemimpin yang diinginkannya. Sedangkan dalam pemilihan tidak langsung, anggota legislatif memiliki kewenangan politik untuk bebas memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi politik yang diwakili.

Maswadi Rauf merangkum keseluruhan defenisi tersebut dengan menekankan defenisi para ahli tersebut pada dua konsep yang sama yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Kedua konsep ini adalah konsep dasar dalam membangun demokrasi atau demokratisasi. Kebebasan dan persamaan memiliki persyaratan yang penekanannya terletak pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, persamaan semua manusia, keragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul (termasuk berorganisasi). Sementara konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen dan pengadilan bebas (Naafisah, 2013).

Senada dengan itu David Beetham dan Kevin Doyle mengemukakan alasan pentingnya demokrasi harus dijunjung tinggi, yaitu; untuk memperlakukan semua orang sama dan sederajat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, untuk kepentingan pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial tanpa melalui pergolakan atau kekacauan (Boyle, 2000).

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai apapun, bagi Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria dibawah ini (Dahl, 1985):

- i. Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih.
- ii. Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum.
- iii. Secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat.
- iv. Secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya.
- v. Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat.
- vi. Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif.
- vii. Rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.

Jika ke 7 kriteria tersebut diterapkan maka demokrasi memiliki keunggulan, sebagai berikut (Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, 2001):

- i. Demokrasi menolong untuk mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik.
- ii. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis.
- iii. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
- iv. Demokrasi membantu rakyat dalam melindungi kepentingan dasarnya.
- v. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu

- untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
- vi. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan tanggung jawab moral.
 - vii. Demokrasi membantu perkembangan umat manusia secara lebih, dibandingkan alternatif lainnya yang memungkinkan.
 - viii. Hanya pada pemerintahan demokratis dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
 - ix. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berpegang satu sama lain.
 - x. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Untuk mewujudkan berbagai kriteria tersebut memang dikatakan bahwa setiap individu memiliki hak menentukan pilihan politiknya. Namun untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, terjadi pembatasan terhadap kondisi ini. bahwa hanya orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa yang akan menentukan pilihan-pilihan politik dalam demokrasi. Ini bukan bentuk diskriminasi, namun sebagai upaya untuk menjaga keunggulan demokrasi itu sendiri. Sebab masalah politik adalah membicarakan isu-isu mendasar dalam masyarakat yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa, seseorang juga dituntut untuk memiliki kemampuan dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks, dan untuk menyelesaikan persoalan sosial membutuhkan waktu yang dilalui dengan proses analisis serta pemahaman yang utuh. Ketiga alasan ini dimiliki oleh orang dewasa, namun orang dewasa yang memiliki tingkat pengetahuan yang memadai yang dianggap paling ideal dalam memilih atau dipilih. Sehingga tidak heran jika keberhasilan demokrasi juga didukung oleh pendidikan, pendidikan yang buruk dan menghasilkan manusia dengan kualitas yang buruk pula, maka demokrasi belum tentu berhasil.

b. Institusi Politik Dan Perannya Dalam Demokrasi

Diantara berbagai tujuan, prinsip, dan prosedur demokrasi yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi beberapa institusi yang dibutuhkan demokrasi. Institusi-institusi itu antara lain; konstitusi, partai politik, trias politika, *civil society*, media massa dan penyelenggara pemilu independen. **Konstitusi atau UUD**, dibutuhkan untuk menetapkan landasan hukum, yang menjadi sumber dari segala regulasi teknis di bawahnya.

Konstitusi mengatur hal-hal mendasar secara umum, yang terutama dalam demokrasi adalah pemenuhan HAM dan tujuan hidup bernegara seperti keadilan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Secara otomatis regulasi diskriminatif tidak diperbolehkan ada apalagi jika didasarkan pada identitas, namun regulasi diskriminatif diperlukan bagi pelanggar regulasi itu sendiri. Seperti sanksi hukuman badan atau materi (denda). Pelanggar hukum dalam negara demokrasi artinya mereka yang melanggar kepentingan umum demi kepentingan pribadi.

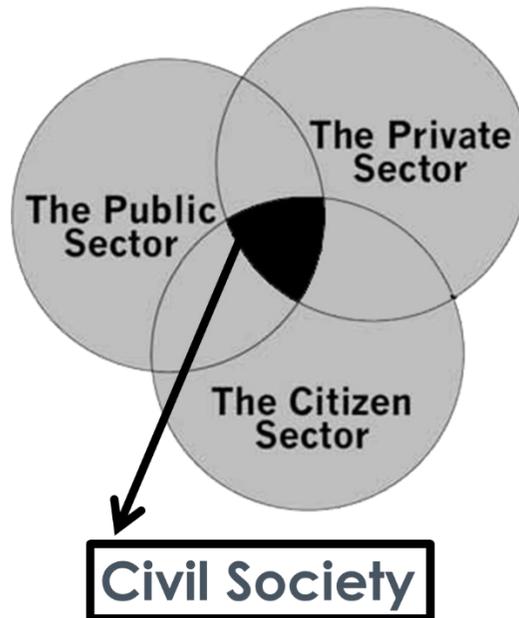
Lemabaga Negara yang Menerapkan sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan (secara umum dikenal sebagai Trias Politika). Karena didalam konstitusi mewajibkan adanya keadilan, maka secara otomatis dampaknya adalah tidak adanya dominasi dari individu, kelompok atau lembaga. Maknanya semua orang diperlakukan sama di hadapan politik dan hukum, sehingga sentralisasi kekuasaan merupakan hal yang ditolak dalam negara demokrasi. Oleh karena itu kekuasaan harus terbagi dan menjalankan fungsi *check and balances*. Terutama lembaga negara yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk mewujudkan kepentingan umum. Oleh karena itu lembaga penyelenggara negara wajib melakukan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan (secara horizontal) dan pembagian kekuasaan (secara vertikal). Pembahasan mengenai ini sudah dijelaskan dalam sistem politik, Modul 1.

Partai politik. Karena makna demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, maka kehadiran partai politik dalam negara demokrasi adalah sebuah kewajiban. Tidak ada negara demokrasi yang tidak memiliki partai politik. Partai politik memiliki beberapa tugas yaitu; 1) Mewakili Kelompok Kepentingan, partai politik adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik baik berupa kebutuhan, kepentingan, maupun masalah sosial yang harus diselesaikan oleh lembaga negara. 2) Pilihan Penyederhanaan, partai politik bertugas membuat pilihan-pilihan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menentukan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan. 3) Membuat Kebijakan, partai politik bertugas menyusun kebijakan dan alternatif kebijakan yang akan ditawarkan kepada masyarakat dalam proses pemilu. Sehingga ketika partai politik memenangkan pemilu karena meraih suara mayoritas, maka partai politik harus melaksanakan kebijakan yang telah disusunya. Kebijakan yang disusunya merupakan rangkuman dari keseluruhan kebutuhan, kepentingan dan masalah sosial yang ada di tengah masyarakat, atau

merupakan kumpulan aspirasi masyarakat. 4) Memilih Calon, partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu sebagai orang yang mampu melaksanakan kebijakan yang telah disusunya. Kandidat yang diajukan merupakan kader partai politik yang terbaik. Ukuran terbaik merupakan hasil dari proses kaderisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan dalam tubuh partai politik. Kandidat-kandidat ini adalah perwakilan masyarakat yang dipilih oleh partai politik. 5) Mobilisasi Pemilih, tugas partai politik ini adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada masa pemilu dan setelah pemilu. Pada masa pemilu, masyarakat dewasa yang menjadi pemilih diarahkan untuk memilih partai politik, melalui proses sosialisasi dan kampanye politik. Alasan memilih partai politik didasarkan pada kebijakan dan kemampuan kandidat dalam mewujudkan kebijakan yang telah disusun. Pasca pemilu, partai politik harus memobilisasi pemilih untuk melakukan pengawasan implementasi kebijakan yang diterapkan oleh kader partai politik yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif. 6) Fasilitasi Pemerintah, tugas ini adalah tugas partai politik dalam melakukan koordinasi, koneksi, komunikasi, penyampaian aspirasi, dan mewujudkan aspirasi politik antara masyarakat dan pemerintah yang telah diisi oleh kader-kader partai politik yang diajukan pada saat pemilu. Dan tugas yang ke 7) Memantau Pihak yang Bertentangan dalam Kekuasaan, karena mekanisme pemilu akan menghasilkan partai politik yang mengisi jabatan eksekutif dan legislatif dan partai politik yang hanya mengisi salah satunya. Oleh karena itu akan ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, yang akan melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah atau sebaliknya. Selain itu karena tidak adanya sentralisasi kekuasaan, menyebabkan negara demokrasi terdiri dari beragam kepentingan, baik itu melalui *civil society*, media massa, maupun masyarakat itu sendiri, sehingga partai politik dan keseluruhan institusi lainnya melaksanakan fungsi kontrol satu sama lain sehingga tidak adanya dominasi dari satu kelompok atau institusi tertentu. Berdasarkan berbagai tugas partai politik itu maka fungsi partai politik adalah, Sebagai Sarana Komunikasi Politik (media aspirasi rakyat/publik), Sebagai Sosialisator Politik (sosialisasi kebijakan politik), Sebagai Rekrutmen Politik (warga negara menjadi kader partai, yang akan dididik untuk layak melaksanakan kebijakan politik), dan Sebagai Pengatur Konflik (pengawas, pengontrol, dan mewujudkan keseimbangan kekuasaan politik).

Civil Society, Terjemahan istilah *civil society* ke dalam bahasa Indonesia masih sangat beragam seperti: masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat

berbudaya, masyarakat kewargaan, dan sebagainya. Tetapi, pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah. Keberadaan aktor non-negara dalam rentang sejarah negara-negara tidak semua mengandung konotasi positif. Banyak catatan sejarah yang memberikan *stereotype negative* terhadapnya, misalnya, sebagai kelompok anarkis atau oposisi. Keterlibatan gerakan kritis masyarakat sipil sangat beragam yang mengakibatkan mereka harus *vis a vis* negara yang cukup beresiko. Masyarakat sipil di dalam negara militeristik seringkali terlibat pada berbagai upaya advokasi menyuarkan keadilan, pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan, anti korupsi, anti perang, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Mereka dapat berada dalam kelompok partai, kelompok agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan karakter keterbukaan dan juga pekerjaan beresiko bagi aktor-aktor di dalamnya. Optimisme yang dibangun adalah bahwa kontribusi sektor civil society adalah dalam rangkai untuk memastikan dan mengawal proses transformasi sosial (Fakih, 2010). *Civil Society* didefinisikan sebagai kelompok-kelompok asosiasi yang berfungsi mengerem kekuasaan negara, menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada negara, dan merupakan kelembagaan sosial yang saling berinteraksi internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat kerja-kerja negara. Demokrasi bermakna mensyaratkan beberapa hal antara lain: kesetaraan, kapasitas negara dan kelompok masyarakat sipil/individu dalam tata kelola alokasi sumber daya kehidupan. Dengan demikian, entitas masyarakat sipil, pasar, dan negara dapat hidup berdampingan secara damai—dengan menempatkan posisi secara proporsional dan saling ada penghargaan untuk memastikan demokrasi itu sendiri tidak menegasikan keberadaan entitas lain.



Gambar 9. Posisi *Civil Society*

Civil Society dilihat sebagai fenomena *intermediary* atau Perantara/penengah, bukan dilihat sebagai institusi melainkan Sebagai Ruang Diantara Negara dan Privat. Maka tugas *Civil Society* untuk menciptakan ruang diantara negara dan masyarakat, serta digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika dilihat dari perannya dalam demokrasi, maka ciri *civil society* antara lain; Mengontrol/Mengawasi Kekuasaan Pemerintah, Menstimulasi Partisipasi Politik Warga Negara. Tempat Pendidikan Politik – Demokrasi, Mendorong Terwujudnya Demokrasi, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Hingga Tingkat Lokal, Menjadi Mediator – Terutama Dalam Konflik, Rekrutmen Dan Pendidikan Politik Bagi Calon Pemimpin Politik, Diseminasi Informasi Dan Memberdayakan Warga Negara. Bedanya dengan partai politik adalah *civil society* tidak mengajukan anggotanya sebagai kandidat dalam pemilu.

Media massa. Dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan adanya kontrol dari masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan rakyat, salah satu dampaknya adalah perlunya ketersediaan informasi yang memadai bagi masyarakat. Habermas menyebutnya sebagai kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistorsi. Komunikasi yang tak terdistorsi akan memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi setara, pun menuntut hak yang setara. Oleh karena itu peran media massa dalam negara demokrasi adalah informatif tentang

keseluruhan proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik, sebagai sarana penyampaian aspirasi publik, sebagai sarana pembentukan opini publik, sebagai sarana transparansi publik yang memungkinkan terjadinya akuntabilitas, dan pengawasan terhadap dan oleh penyelenggara negara secara timbal balik. Meskipun media massa didominasi oleh kepemilikan swasta, atau pengusaha yang bersifat komersial namun tuntutan keberadaannya tidak serta merta dijual sekedar untuk mengejar *profit* bagi pemilik. Penguasaan media massa dan pemanfaatan media yang salah, atau tidak untuk kepentingan umum, akan menyebabkan sistem politik berjalan dalam kemandiriannya terhadap masyarakat. Pada akhirnya tujuan demokrasi yang harus mewujudkan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Kondisi ini akan semakin diperparah jika partai politik menjadi alat pemerintah atau politisi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan *civil society* dimatikan, maka hilanglah prinsip demokrasi itu. Oleh karena itu Sistem media yang demokratis pada dasarnya harus mewujudkan 3 karakteristik; *Pertama*, terdapat independensi dari media yang ada. Sifat *independence* atau kemerdekaan ini berarti tidak ada campur tangan baik dari pemerintah, maupun monopoli swasta, termasuk di sini kepentingan pasar. *Kedua*, media yang ada harus mempunyai *accountability*, pertanggungjawaban secara profesional baik terhadap masyarakat secara umum, maupun kepada pengguna atau khalayaknya. *Ketiga*, sistem media harus menjamin adanya keberagaman, diversity, baik keberagaman politik (political diversity), maupun keberagaman sosial (*social diversity*) (Cuilenberg, 1998).

Penyelenggara pemilu independen. Institusi terakhir adalah penyelenggara pemilu, merupakan institusi yang menjalankan salah satu fungsi demokrasi prosedural, yaitu pemilu. Oleh karena itu keberadaannya hanya ada pada negara yang menerapkan demokrasi tidak langsung/*representative democracy*. Sebab pemilu bertujuan melahirkan pemimpin eksekutif dan anggota legislatif, dengan pesertanya adalah kandidat-kandidat terbaik dari partai politik. Para penyelenggara pemilu hakikatnya adalah lembaga yang hanya tunduk pada UUD atau konstitusi dengan diawasi oleh lembaga yudikatif. Anggota dalam tubuh lembaga ini haruslah orang-orang independen yang bukan pegawai pemerintahan namun mereka adalah orang terpilih dari proses seleksi yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga pengawasan atas lembaga ini dilakukan oleh semua institusi yang ada dalam sistem politik, pertanggungjawabannya kepada publik namun secara formal kepada lembaga

legislatif dan eksekutif. Seperti yang dijelaskan Samuel Huntington, bahwa tugas lembaga ini adalah melaksanakan pemilu yang jujur, adil, bertanggungjawab, dan berkala.

Institusi-institusi demokrasi ini mendapatkan ruang dan tempatnya dalam sistem pemerintahan demokrasi. Ada beberapa jenis sistem demokrasi yang diterapkan dalam sejarah perkembangannya, dibagi dalam beberapa kategori, seperti dijelaskan dibawah ini. **Berdasarkan sudut pandang ideologi**, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- i. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
- ii. Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- i. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).
- ii. Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat

menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

- iii. Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- i. Demokrasi formal Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.
- ii. Demokrasi material Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.
- iii. Demokrasi gabungan Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

Secara umum prinsip sistem pemerintahan yang demokratis yang universal diterapkan pada berbagai sistem pemerintah demokrasi diatas dan mampu melingkupi seluruh institusi demokrasi diatas, menurut Inu Kencana Syaffie, antara lain (Syaffie, 2006):

- i. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.
- ii. Pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.
- iii. Manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.
- iv. Kebebasan individu Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin UU dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.
- v. Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
- vi. Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat

dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

- vii. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
- viii. Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.
- ix. Pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.
- x. Beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik.

c. Dilema Demokrasi

Dilema demokrasi bisa dikategorikan sebagai kekurangan dari demokrasi, namun jikat tidak diterapkan maka tujuan demokrasi itu tidak akan terwujud. Menurut Leslie Lipson, dilema demokrasi antara lain (Naafisah, 2013):

- i. Perwujudan nilai demokrasi adalah mengenai status pluralitas sosial masyarakat dan hubungannya dengan demokrasi. Dalam sistem demokrasi diyakini bahwa keragaman masyarakat adalah keniscayaan. Oleh karena itu pemerintah harus berperan

melindungi hal tersebut. Faktor keragaman masyarakat yang menjadi determinan tersebut adalah ras, agama, bahasa, etnis, suku, dan golongan. Berbagai kondisi keberagaman ini akan mempengaruhi implementasi demokrasi menjadi lebih baik, artinya tidak terpusatnya distribusi kekuasaan. Namun menjadi buruk jika dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk meraih suara mayoritas baik dalam pemilu maupun dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu jika keragaman diisi oleh perilaku politik yang mengabaikan kepentingan umum, maka akan menimbulkan ketidakstabilan akibat konflik sosial yang disebabkan oleh persaingan upaya mewujudkan kebutuhan, dan kepentingan politik.

- ii. Sistem perwakilan yang merupakan bentuk implementasi dari penyerahan sebagian kedaulatan rakyat kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan kepentingan umum. Pertanyaannya benarkah para wakil rakyat tersebut merupakan cerminan dari masyarakat yang diwakilinya?. Sementara sebagai makhluk politik, para wakil rakyat adalah individu yang juga memiliki kepentingan pribadi.
- iii. Batas antara kebebasan individu dan kesamaan atau keadilan selalu tidak jelas dalam demokrasi. Padahal kedua prinsip ini adalah sebuah kewajiban dalam implementasi demokrasi. Benturan antara kebebasan individu sementara di sisi lain harus diwujudkan keadilan dan perlakuan yang sama.

Leslie Lipson juga mengajukan 3 keberatan dalam demokrasi sebagai bentuk kritiknya terhadap demokrasi, yaitu (Naafisah, 2013):

- i. Adanya potensi tirani mayoritas terhadap kelompok minoritas. Tirani ini terkait dengan tindakan brutal dari kelompok kecil masyarakat pada kelompok mayoritas dan penyangkalan terhadap hak-hak kaum minoritas. Kemungkinan ini dapat terjadi sebab tipe pemerintah memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat disalahgunakan baik oleh minoritas maupun mayoritas.
- ii. Kenyataan bahwa demokrasi cenderung menempatkan orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan. Didasarkan pada konsep bahwa hanya sebagian kecil manusia yang mampu memimpin, rakyat jelata harus dipimpin, serta seni pemerintahan memerlukan seorang ahli dan mengerti secara teknis mengenai pemerintahan. Sebab ketika pemilu yang didasarkan pada raihan suara mayoritas, tidak berarti yang terpilih adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

- iii. Demokrasi hanya berisi ilusi dan kebohongan. Karena kepura-puraannya dalam membantu minoritas.

Keberatan ini maksudnya adalah ahl yang akan selalu bias ketika demokrasi diterapkan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal-hal ini, Lipson pun mengajukan solusinya.

Pada keberatan pertama dapat diatasi dengan mengembangkan mekanisme pemerintahan yang kompleks sehingga kelompok minoritas dapat melindungi kepentingannya dengan berbagai cara. Selain itu, juga dapat diatasi dengan mengembangkan sistem oposisi yang kritis dan konstruktif. Terhadap keberatan kedua, Lipson tidak menolak jika orang-orang yang terpilih saja yang pantas berkuasa, namun dapat dibatasi dengan menetapkan syarat-syarat bagi kandidat yang mengajukan diri dalam pemilu. Namun di sisi lain jika partai politik mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan benar maka keberatan kedua ini tidak akan terwujud. Sementara pada keberatannya yang ketiga, Lipson mengajukan resolusi bahwa jika proses demokrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilainya, maka mampu memaksa penguasa oligarkis untuk selalu memperhatikan aspirasi rakyat, terutama dalam sistem demokrasi multipartai.

Dari berbagai contoh implementasi demokrasi di berbagai negara, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan demokrasi menjadi tidak efektif, antara lain:

- i. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, Asia dan Amerika Latin)
- ii. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, Bolivia, Albania pada 1990-an)
- iii. Problem *social capital* dalam hubungan antar etnik dan golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).
- iv. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, Asia dan Amerika Latin)
- v. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, Bolivia, Albania pada 1990-an)

- vi. Problem *social capital* dalam hubungan antaretnik dan golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).
- vii. Distribusi kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang asimetrik. (Masalah umum demokrasi elektoral di Afrika, Asia dan Amerika Latin)
- viii. Situasi krisis ekonomi yang memfasilitasi dikeluarkan kebijakan darurat semacam dekrit (e. g. Argentina, Peru, Bolivia, Albania pada 1990-an)
- ix. Problem *social capital* dalam hubungan antaretnik dan golongan yang memfasilitasi praktik diskriminasi terhadap minoritas (e. g. Kroasia, Bosnia, Rusia).

d. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep tentang negara kesejahteraan hakikatnya adalah bentuk kritikan terhadap liberalisme klasik yang dikemukakan oleh kaum sosialis-komunis. Ide individualisme yang dibawa liberalisme dalam prakteknya telah memicu lahirnya ketimpangan sosial yang semakin tinggi. Kelompok kaya dan kuat semakin makmur dan berkuasa, sementara kelompok miskin dan lemah menjadi terabaikan dan tak berdaya. Ditambah ide neoliberalisme ketimpangan ini semakin parah dalam prakteknya terutama pada negara-negara kelas menengah ke bawah, negara bahkan tidak diperbolehkan untuk memberi subsidi dan bantuan bagi kelompok sosial kelas menengah ke bawah, karena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalam pasar. Oleh karena itu bentuk koreksi atas kondisi ini yang dilakukan oleh demokrasi sehingga tidak menjadi sosialis-komunis adalah menerapkan apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini sering disebut sebagai bentuk antitesis terhadap konsep *laissez faire*.

Menurut Goodin negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum (Simarmata, 2008). Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *'uti l i(kegunaan)* untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (Judith Bessant, 2006). Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).

Sementara pada tahun 1850-an di Prusia, konsep negara kesejahteraan dirintis oleh Otto Von Bismarck (Bahagijo, 2006). Di masa lalu, di Eropa dan Amerika, gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sempat berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Namun ternyata benturan kedua gagasan besar tersebut telah menghasilkan negara-negara makmur, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dimana rakyatnya hidup dengan sejahtera. Rakyat di negara-negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan sebagainya.

Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu (Bahagijo, 2006): 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; dan 4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar, serta diberikan berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Menurut Barr, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara kesejahteraan. Menurutnya, ada dua hal yang terkait langsung dengan upaya

pembangunan ekonomi: *Pertama*, perwujudan negara kesejahteraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari upaya pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera, bukan sebaliknya. *Kedua*, tujuan perwujudan negara kesejahteraan bukan hanya karena alasan kesamaan, tetapi juga demi efisiensi dalam proses ekonomi. Idealnya, alasan kesamaan atau pemerataan tidak bertentangan dengan tujuan efisiensi dalam ekonomi. Peran negara kesejahteraan menurut Barr antara lain (Simarmata, 2008):

- i. Sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara, seperti gaji atau upah, tabungan, donasi dan subsidi dari pemerintah.
- ii. Cara mewujudkan kesejahteraan sosial, dilakukan dengan cara memberi pelayanan gratis layanan sosial (kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya)

Menurut Goodin alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: untuk mempromosikan efisiensi ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan, untuk mempromosikan kesamaan sosial, untuk mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial, untuk mempromosikan stabilitas sosial, dan untuk mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (Goodin, 1999).

Secara umum, paling tidak terdapat 3 model utama Negara Kesejahteraan yaitu (Simarmata, 2008):

- i. Model Liberal atau Residual, dengan ciri-cirinya antara lain, 1) Dukungan sosial yang terbatas, atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; 2) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi dalam arus besar ketenagakerjaan; dan 3) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu untuk menciptakan akses atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. Contoh negara penganut model ini adalah: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
- ii. Model Konservatif (Korporatis, Continental Europe) dengan ciri-ciri meliputi: 1) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara; 2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; 3) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait

dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja dan sektor swasta; dan 4) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara "sakit" baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model proteksi sosial. Contoh negara penganut model ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.

- iii. Model Sosial-Demokratis (Redistributif-Institusional) dengan ciri-ciri meliputi: 1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; 2) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya, warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan; dan 3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan itu. Contoh negara penganut model ini adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia dan Norwegia.

Sementara prinsip umum dari Negara kesejahteraan adalah (Simarmata, 2008):

- i. Prinsip Hak-Hak Sosial Dalam Negara Demokrasi. Pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara adalah inheren sebagai tanggungjawab Negara demokratik. Tatanan demokrasi dalam konteks ini tidak dapat direduksi hanya pada penataan aturan-aturan main prosedural politik untuk memilih pejabat publik. Pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara sejalan dengan tujuan substansial demokratik untuk memberikan pemenuhan standar kehidupan sosial masyarakat yang baik, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak sipil dan politiknya secara utuh.
- ii. Prinsip Hak Kesejahteraan. Secara filosofis keberadaan wacana Negara kesejahteraan ditopang oleh ide filosofis tentang keadilan sosial terutama berhubungan dengan keadilan distributif. Kebijakan Negara kesejahteraan tidak serta merta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari tiap-tiap individu, namun demikian kebijakan publik yang dilakukan oleh Negara kesejahteraan memiliki tujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara adil bagi seluruh warga Negara.
- iii. Prinsip Kesetaraan. Kesempatan Bagi Warga Negara. Landasan filosofis dari relevansi Negara kesejahteraan juga ditopang oleh basis keadilan sosial redistributif atas prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga Negara.

- iv. Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Pasar bebas tidak dapat dibiarkan berjalan sendirian untuk mengatur kompleksitas kehidupan publik. Negara kesejahteraan secara filosofis justru tidak menghalangi prinsip efisiensi ekonomi. Negara kesejahteraan justru bermaksud menggerakkan roda perekonomian secara positif untuk mendorong agar setiap sumber daya manusia dimanfaatkan secara produktif untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, dengan memenuhi kebutuhan dasar dari tiap-tiap orang. Selanjutnya prinsip Negara kesejahteraan juga berniat untuk mendorong partisipasi penuh pada pasar tenaga kerja maupun aktivitas investasi dan menabung.

4. Rangkuman

- a. Demokrasi dalam berbagai defenisinya mampu diidentifikasi sebagai ideologi, dan sistem pemerintahan. Sebagai ideologi, demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan yang bertanggungjawab, penghargaan tertinggi pada HAM, tidak ada hegemoni/Diskriminasi. Pertanggungjawaban dan kepentingan Mayoritas. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam memberikan ketentuan mengenai masalah kehidupannya, kebijakan/keputusan pemerintah berdasarkan keinginan rakyat, rakyat penilai kinerja pemerintah, dan kebebasan pemimpin organisasi-pemerintahan menjabarkan alternatif kebijakan.
- b. Demokrasi saat ini menerapkan beberapa ketentuan seperti Sistem perwakilan – Pembagian kekuasaan, Pemilu, *Civil Society* yang bebas dan otonom, Partai Politik, Media yang bebas, Masyarakat yang bebas, Partisipasi politik tinggi, dan Sistem Ekonomi *welfare state* dan berkeadilan.
- c. Namun meskipun begitu demokrasi bukan tanpa cela atau kekurangan, serta adanya ancaman yang mampu menyebabkan demokrasi menjadi gagal seperti yang telah dikemukakan diatas. Baik itu dalam konteks implementasi nilai, proses, dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan sejarah.

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek

a. Latihan

- i. Setiap mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan praktek implementasi demokrasi di berbagai negara. Masing-masing memilih 1 negara dan menjelaskan implementasi demokrasi di negara tersebut.
- ii. Penjelasan implementasi demokrasi di berbagai negara dilakukan secara deskriptif.
- iii. Indikator penjelasan implementasi demokrasi di berbagai negara didasarkan pada nilai, prinsip, dan proses demokrasi yang telah dijelaskan pada modul ini.

b. Lembar Kerja Praktik

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan nama para tokoh PAK dengan pokok-pokok pikirannya.

No	Nama Tokoh	Pokok Pikirannya

6. Evaluasi Pembelajaran

7. Umpan Balik

C. Penutup

1. Rangkuman

Mempelajari modul ini akan mendorong mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan demokrasi sebagai sebuah ideologi, dan sistem politik. Tentang bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat dalam konteks hidup bernegara yang

mencakup keseluruhan sistem sosial, yang didasarkan pada asas kesetaraan, kemandirian, keadilan sosial, serta kekuasaan rakyat itu sendiri. Sebagai sebuah ideologi, implementasi demokrasi kerap kali disebut sebagai demokratisasi, sebab makna ideologi mengandung landasan, proses dan tujuan. Tujuan akhir demokrasi adalah pencapaian asas-asas tersebut secara utuh, namun ideologi dianggap telah cukup jika telah dilaksanakan sebagai prinsip utama dalam proses politik itu sendiri, dan berdampak pada keseluruhan sistem sosial termasuk ekonomi. Sehingga demokrasi mengadaptasi pemikiran sosialisme yaitu negara kesejahteraan dalam implementasinya di bidang ekonomi. Dengan memberikan kewenangan lebih bagi negara untuk menyelesaikan dan mengurangi dampak buruk dari ekonomi pasar yang bertentangan dengan asas umum ideologi demokrasi itu sendiri. Disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai sebuah ideologi, demokrasi adalah ideologi yang fleksibel.

2. Daftar Istilah

Istilah	Arti
Trias politika	Mekanisme pemisahan kekuasaan negara pada 3 institusi berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiganya melaksanakan fungsi saling mengawasi, mengontrol, dan menjaga keseimbangan agar terhindar dari sentralisasi kekuasaan.
Sentralisasi	Pemusatan
Empiris	Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
Inklusif	Mencakup seluruh
Rezim	Tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa
Demokratisasi	Proses menerapkan prinsip-prinsip dan praktek demokrasi
Distorsi	Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan

Profit	Keuntungan
Laissez faire	

3. Daftar Pustaka

- Azra, A. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahagijo, D. T. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- Boyle, D. B. (2000). *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cuilenberg, J. v. (1998). Media Policy Paradigm Shifts, in Search of a New Communication Policy Paradigm . In G. Picard, *Evolving Media Market, Effect of Economic and Policy Changes* (p. 67). Turku, Finland: Economic Research Foundation for Mass Communication.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: YOI.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fakih, M. (2010). *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fogelman, W. E. (1994). *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita aditama.
- Goodin, R. E. (1999). *The Real Worlds of Werfare Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hutington, S. (2001). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Judith Bessant, R. W. (2006). *Talking Policy: How Social Policy in Made*. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Mayo, H. B. (1965). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Naafisah, M. M. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Putri, A. S. (2020, Januari 28). *Perbedaan Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung*. Retrieved from [www.kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/160000969/perbedaan-demokrasi-langsung-dan-tidak-langsung?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/160000969/perbedaan-demokrasi-langsung-dan-tidak-langsung?page=all)
- Simarmata, H. T. (2008). *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.

- Stepan, J. J. (2001). *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Santos, T. D. (1970, May). The Structure of Dependence. *Eighty-second Annual Meeting of the American Economic*, 60, p. 231.
- So, S. d. (1991). *Perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Soebianto, T. d. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Todaro, M. P. (1983). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Turner, A. G. (1987). *Social Theory Today*. Stanford: Stanford University Pers.

DAFTAR LAMPIRAN BMP

Lampiran I: Struktur Penulisan Artikel Book Chapter

JUDUL MAKALAH ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah (*judul sub bab*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi:

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian

penutup yang memuat *Alternative* penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Rumusan Masalah (*judul sub bab*)

Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian masalah tersebut.

C. Pertanyaan Kritis (*judul sub bab*)

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada kesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,"

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB III PEMBAHASAN

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda"

"Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilih berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan (*judul sub bab*)

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kritis pada bab I.

B. Rekomendasi (*judul sub bab*)

Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah atau memperbaharui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit: nama penerbit.*

Contoh:

A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote: (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010: 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.³

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

³ L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.
(Contoh Footnote)

Lampiran II: Struktur Penulisan Paper atau Artikel

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold)

A. Latar Belakang Masalah (*kapital di awal kata, dan bold*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi:

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat *Alternative* penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Tinjauan Teoritis (*kapital di awal kata, dan bold*)

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,"

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang masalah.

C. ANALISIS (*kapital di awal kata, dan bold*)

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda"

"Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilih berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

D. KESIMPULAN (*kapital di awal kata, dan bold*)

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit: nama penerbit.*

Contoh:

A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote: (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style):

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010: 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan

hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.⁴

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

⁴ L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.
(Contoh Footnote)

Biografi Penulis



Indah Novitasari yang memiliki nama kecil “Ovit” lahir di Jakarta, 05 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh antara lain adalah Strata-1 Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia, Strata 2 *Asymmetric Warfare* di Universitas Pertahanan, serta sedang dalam tahap penyelesaian Strata 2 Ilmu Politik dengan konsentrasi ekonomi politik dan psikologi politik di Universitas Nasional. Sebelum memutuskan mengabdikan sebagai tenaga pendidik, penulis meniti karier sebagai asisten pribadi anggota Legistatif di Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014-2019, yang kemudian menghantarkan penulis untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut. Setelah menyelesaikan studi jenjang magister, penulis juga dilibatkan dalam sejumlah penelitian bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak tahun 2015 hingga 2017, begitu juga dengan penelitian Indeks Pembangunan Hukum Indonesia (IPHN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM pada tahun 2017. Sejumlah publikasi ilmiah penulis antara lain, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia (2015), Babak Baru Rejim Keamanan Siber di Asia tenggara menyongsong ASEAN Connectivity 2025 (2015), Analisis Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape dalam Pemilukada Sebagai Implikasi Konflik tanah di Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 (2019), Pendidikan Politik bagi Generasi Milenial di SMA Global Prestasi, Kalimantan, Bekasi Barat (2019), Gerakan Filantropi Sebagai Upaya Pembentukan opini Publik : Studi Kemunculan Platform Donasi Digital www.kitabisa.com (2020), Implikasi Pendirian Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) terhadap peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (2018), Fenomena Botoh pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri (2020). Saat ini penulis merupakan dosen di program studi Ilmu Politik, Fisipol, Universitas Kristen Indonesia. Bidang kajian yang menjadi keahlian penulis antara lain: konflik dan konsensus politik, ekonomi politik, politik keamanan, politik luar negeri,

psikologi politik serta interpretasi dan pengolahan *big data* politik. Hingga tahun 2021, penulis telah menghasilkan modul teori kebijakan publik, perbandingan politik, sosiologi politik, konflik dan konsensus serta perempuan dan politik.